



Pemerintah Daerah
Kabupaten Halmahera Selatan

**PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2025**

Tentang

**RENCANA
PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH
DAERAH**

**KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
TAHUN 2025-2029**





**BUPATI HALMAHERA SELATAN
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN
HALMAHERA SELATAN
TAHUN 2025-2029**

Menimbang : Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
dan
BUPATI HALMAHERA SELATAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2025- 2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan.
4. Perangkat Daerah adalah unit kerja atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Daerah, Dinas Daerah, unit pelaksana teknis, serta Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, yang selanjutnya disebut Bappelitbangda, adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun, ditingkat Daerah.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun di tingkat Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025—2029.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2025—2029, yang selanjutnya disebut dengan RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Halmahera Selatan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan pembangunan dari masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan untuk periode tahun 2025—2029 yang merupakan penjabaran dari RPJMD sesuai tugas pokok dan fungsi masing- masing Perangkat Daerah.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinir oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta memperoleh alokasi anggaran.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2021-2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan

Ditetapkan di Labuha
pada tanggal : 7 Oktober 2025



Diundangkan di Labuha
pada tanggal 7 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN



SAFIUN RAJULAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 3
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD RUSLAN, SH
NIP. 19780124200501 1009



**BUPATI HALMAHERA SELATAN
PROVINSI MALUKU UTARA**

PENJELASAN ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA
SELATAN TAHUN 2025—2029**

I. UMUM

Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting yang mendukung keberhasilan sistem perencanaan pembangunan nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Undang-Undang tersebut mengamanatkan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah meliputi RPJPD untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sejalan dengan ketentuan tersebut, RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2021—2026 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2021—2026, tidak lagi relevan berdasarkan pengaturan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025—2029. Berdasarkan konstruksi pengaturan peraturan perundang-undangan dimaksud, pada awal periode kepemimpinan Bupati Halmahera Selatan Terpilih berdasarkan pemilihan umum Kepala Daerah serentak tahun 2024, dibutuhkan pengaturan ulang RPJMD. RPJMD dimaksud merupakan dasar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Daerah periode 2025—2029. Dalam RPJMD dijabarkan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih. RPJMD sendiri digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renstra-PD, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan RKPD. Karena itu, disusunlah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2025—2029.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2025
NOMOR

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
TAHUN 2025-2029**

DAFTAR ISI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2025-2029.....	i
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR GRAFIK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 LATAR BELAKANG	I-1
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN	I-4
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN	I-7
1.3.1 Hubungan RPJMD kabupaten halmahera selatan dengan rpjm nasional.....	I-8
1.3.2 hubungan RPJMD kabupaten halmahera selatan dengan rpjmd provinsi maluku utara	I-9
1.3.3 Hubungan RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan dengan RPJPD Kabupaten Halmahera Selatan.....	I-10
1.3.4 Hubungan RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Halmahera Selatan	I-11
1.3.5 Hubungan RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan Dengan Rencana Strategis OPD Kabupaten Halmahera Selatan.....	I-12
1.3.6 Hubungan RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan Dengan RKPD Kabupaten Halmahera Selatan.....	I-12
1.3.7 Hubungan RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan Dengan Renja OPD Kabupaten Halmahera Selatan.....	I-13
1.3.8 Hubungan RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan Dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2025-2029	I-13
1.3.9 Hubungan RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan Dengan Dokumen-dokumen Lainnya	I-14

1.4	SISTEMATIKA PENULISAN	I-14
1.5	MAKSUD DAN TUJUAN.....	I-15
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH.....		II-1
2.1	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI	II-1
2.1.1	Posisi dan peran strategis daerah	II-1
2.1.2	Kendala Potensi Sumber Daya Alam	I-5
2.2	DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP	II-19
2.2.1	Daya Dukung Air	II-19
2.2.2	Daya Dukung Pangan	II-20
2.2.3	Daya Dukung Pertanian	II-22
2.2.4	Daya Dukung Lahan Terbangun	II-22
2.2.5	Daya Dukung Fungsi Lindung	II-23
2.2.6	Jasa Penyediaan Air	II-25
2.2.7	Jasa Penyediaan Pangan	II-28
2.2.8	Jasa Pengaturan Air	II-30
2.2.9	Kawasan Pertambangan	II-33
2.2.10	Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim	II-33
2.3	BERKETAHANAN ENERGI, AIR DAN KEMANDIRIAN PANGAN.....	II-35
2.3.1	Tingkat Ketahanan Dan Potensi Keanekaragaman Hayati	II-35
2.3.2	Lingkungan Hidup Berkualitas	II-38
2.4	DEMOGRAFI	II-45
2.4.1	Laju Pertumbuhan Penduduk, Persebaran dan Kepadatan Penduduk	II-45
2.4.2	Proyeksi Penduduk	II-50
2.4.3	Proyeksi Bonus Demografi	II-53
2.5	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	II-55
2.5.1	Kesejahteraan Ekonomi	II-55
2.5.2	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita	II-58
2.5.3	Kesehatan untuk semua	II-64
2.5.4	Pendidikan Berkualitas yang merata	II-73
2.5.5	Perlindungan Sosial yang Adaptif	II-77
2.5.6	Beragama maslahat dan berkebudayaan maju	II-78

2.5.7	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, Dan Masyarakat Inklusif	II-80
2.6	ASPEK DAYA SAING DAERAH	II-82
2.6.1	Daya Saing Sumber Daya Manusia	II-82
2.6.2	Transformasi Digital	II-87
2.6.3	Perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	II-87
2.6.4	Stabilitas Ekonomi Makro	II-89
2.7	ASPEK PELAYANAN UMUM.....	I-93
2.7.1	Regulasi Dan Tata Kelola Yang Berintegrasi Dan Adaptif.....	II-93
2.7.2	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Yang Tangguh, Dan Demokrasi Substansial	II-96
2.7.3	Ketangguhan Diplomasi Dan Pertahanan Budaya Gentar Kawasan	II-105
2.8	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH.....	II-149
2.8.1	Gambaran Ringkas Kondisi Keuangan Daerah Tahun 2019-2023	II-149
2.8.2	Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2019-2023.....	II-153
2.8.3	Realisasi Belanja Daerah Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023.....	II-157
2.8.4	Realisasi Surplus/Defisit APBD Tahun 2019-2023	II-160
2.8.5	Realisasi Pembiayaan Daerah dan Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Tahun Berkenaan (SILPA) Tahun 2019-2023.....	II-162
2.8.6	Neraca Daerah Tahun 2020-2024	II-165
2.8.7	Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2025-2029	II-167
2.9	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	II-169
2.9.1	Permasalahan Pembangunan Daerah.....	II-170
2.9.2	Isu Strategis Daerah	II-180
BAB III	VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	III-1
3.1	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	III-1
3.1.1	Visi Jangka Menengah Kabupaten Halmahera Selatan	III-1
3.1.2	Misi Jangka Menengah Kabupaten Halmahera Selatan.....	III-3
3.1.3	Relasi Antar Misi Pembangunan.....	III-5
3.1.4	Tujuan dan Sasaran	III-8
3.2	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	III-17
3.2.1	Strategi, Arah Kebijakan Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran	

	RPJMD Tahun 2025-2029	III-18
3.2.2	Pentahapan Pembangunan dan Arah Kebijakan Kewilayahan	III-41
3.2.3	Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan	III-52
3.2.4	Kerangka Penyelarasan Misi Pembangunan Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2025-2029	III-89
3.3	KONSEP DAN STRATEGI AGROMARITIM.....	III-93
3.4	PERWILAYAHAN KOMUNITAS.....	I-101
3.5	ROADMAP HILIRISASI AGROMARITIM TAHUN 2025-2030 ...	III-115
3.6	STRATEGI PEMBIAYAAN ALTERNATIF	III-116

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA

	PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.....	VI-1
4.1	PROGRAM PERANGKAT DAERAH.....	VI-1
4.2	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH ...	VI-68
4.2.1.	Indikator Kinerja Utama (IKU).....	VI-68
4.2.2.	Indikator Kinerja Daerah (IKD).....	VI-70
4.2.3.	Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	VI-89

BAB V PENUTUP.....

5.1	Kaidah Pelaksanaan	V-1
5.2	Pedoman Transisi.....	V-2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan dan Desa di Kab.Halsel.....	I-2
Tabel 2.2 Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku.....	II-4
Tabel 2.3 Hasil Produksi Ikan Cakalang.....	II-6
Tabel 2.4 Hasil Produksi Ikan Tongkol.....	II-6
Tabel 2.5 Hasil Produksi Ikan Tuna.....	II-7
Tabel 2.6 Hasil Produksi Perikanan Tangkap Lainnya	II-8
Tabel 2.7 Data Tanaman Pangan Halmahera Selatan Tahun 2021 – 2022.....	II-12
Tabel 2.8 Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Jenis Tanaman.....	II-16
Tabel 2.9 Produksi Perkebunan Kab. Halmahera Selatan	II-17
Tabel 2.10 Jenis Destinasi Wisata Kab.Halmahera Selatan	II-17
Tabel 2.11 Daya Dukung Air	II-20
Tabel 2.12 Daya Dukung Pangan.....	II-21
Tabel 2.13 Perhitungan Daya Dukung Lahan Pertanian	II-22
Tabel 2.14 Tutupan Lahan Kab. Halsel	II-23
Tabel 2.15 Tingkat Kualitas Daya Dukung Fungsi Lindung	II-24
Tabel 2.16 Analis Daya Dukung Fungsi Lindung Kab. Halsel.....	II-24
Tabel 2.17 Jasa Ekosistem Penyediaan Air.....	II-26
Tabel 2.18 Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan	II-29
Tabel 2.19 Jasa Ekosistem Pengaturan Air	II-32
Tabel 2.20 Potensi Pertambangan Kab.Halmahera Selatan	II-33
Tabel 2.21 Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim.....	II-34
Tabel 2.22 Akses Rumah Tangga Terhadap Konsumsi Air Minum	II-38
Tabel 2.23 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).....	II-39
Tabel 2.24 Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman.....	II-41
Tabel 2.25 Proposi Rumah Tangga dengan layanan pengumpulan sampah	II-42
Tabel 2.26 Nilai Indeks Resiko Provinsi Maluku Utara	II-44
Tabel 2.27 Indeks Ketahanan Daerah	II-44
Tabel 2.28 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan.....	II-45
Tabel 2.29 Perkembangan Jumlah Penduduk Kab. Halsel	II-47
Tabel 2.30 Jumlah Penduduk Kab.Halsel 4 zona.....	II-48
Tabel 2.31 Proyeksi Jumlah Penduduk Kab. Halsel	II-51
Tabel 2.32 Proyeksi Penduduk berdasarkan jenis kelamin	II-51

Tabel 2.33 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur	II-51
Tabel 2.34 Proyeksi Penduduk di Kab. Halsel.....	II-52
Tabel 2.35 Parameter Hasil Proyeksi Penduduk Kab.Halsel	II-54
Tabel 2.36 Perkembangan Kemiskinan di Kab.Halsel.....	II-57
Tabel 2.37 Nilai PDRB Per Kapita Kab. Halsel	II-58
Tabel 2.38 PDRB Sektor perikanan, pertanian dan kehutanan	II-59
Tabel 2.39 Tingkat Pengangguran Terbuka	II-60
Tabel 2.40 Gini Rasio	II-61
Tabel 2.41 Persentase penduduk menurut jenis jaminan kesehatan	II-64
Tabel 2.42 Rata-Rata Lama Sekolah Kab. Halsel.....	II-73
Tabel 2.43 Harapan Lama Sekolah Kab. Halsel	II-75
Tabel 2.44 Rata Rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional	II-76
Tabel 2.45 Gambaran Indeks Literasi Masyarakat Kab. Halsel.....	II-77
Tabel 2.46 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	II-77
Tabel 2.47 Indeks Kerukunan Umat Beragama.....	I-78
Tabel 2.48 Perbandingan Indeks Kebudayaan Nasional.....	II-79
Tabel 2.49 Indeks Pembangunan Keluarga.....	II-81
Tabel 2.50 Indeks Ketimpangan Gender.....	II-82
Tabel 2.51 Komposisi Penduduk (%)	II-83
Tabel 2.52 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	II-84
Tabel 2.53 Indeks Inovasi Daerah Kab. Halsel.....	II-86
Tabel 2.54 Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	II-87
Tabel 2.55 Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak.....	II-88
Tabel 2.56 Rekapitulasi Indeks Desa Membangun	II-88
Tabel 2.57 Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB	II-90
Tabel 2.58 IHK dan Tingkat Inflasi	II-91
Tabel 2.59 Indeks Pelayanan Publik	II-93
Tabel 2.60 Indeks Reformasi Birokrasi	II-96
Tabel 2.61 Persentase Penegakan Perda	II-96
5Tabel 2.62 Sasaran Strategis Perlindungan HAM Kelompok Perempuan.....	II-97
Tabel 2.63 Sasaran Strategis Perlindungan HAM Kelompok Anak	II-99
Tabel 2.64 Sasaran Strategis Perlindungan HAM Kelompok Disabilitas.....	II-100
Tabel 2.65 Sasaran Strategis Perlindungan HAM Kelompok Masyarakat adat ..	II-101

Tabel 2.66	Capaian Aksi HAM Kab.Halsel	II-102
Tabel 2.67	Indeks Demokrasi Indonesia	II-103
Tabel 2.68	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	II-105
Tabel 2.69	Capaian Kinerja Setiap Urusan Pemerintah Daerah 4 Tahun	II-106
Tabel 2.70	Realisasi Struktur APBD Kab.Halsel.....	II-150
Tabel 2.71	Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah.....	I-153
Tabel 2.72	Pertumbuhan dan Kontribusi Realisasi Pendapatan Daerah	II-156
Tabel 2.73	Perkembangan Realisasi Belanja Daerah.....	II-158
Tabel 2.74	Pertumbuhan dan Kontribusi Belanja Daerah.....	II-159
Tabel 2.75	Surplus/Defisit APBD Kabupaten Halmahera Selatan	II-161
Tabel 2.76	Perkembangan Pembiayaan Daerah.....	II-163
Tabel 2.77	Neraca Daerah Tahun 2020 – 2024	II-166
Tabel 2.78	Proyeksi APBD Kab.Halsel	II-168
Tabel 2.79	Teknik Menyimpan Isu Strategis Daerah	II-184
Tabel 3.1	Visi RPJPD Kabupaten Halmahera Selatan, RPJMN dan RPJMD Provinsi Maluku Utara	III-1
Tabel 3.2	Perwujudan Visi Jangka Menengah Pembangunan Kab. Halmahera Selatan Tahun 2025-2029	III-2
Tabel 3.3	Indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	III-11
Tabel 3.4	Arah Kebijakan Pembangunan Sesuai Misi Kab.Halsel	III-28
Tabel 3.5	Arah Kebijakan Pembangunan Kab.Halsel	III-30
Tabel 3.6	Penahapan Pembangunan Kab.Halmahera Selatan	III-42
Tabel 3.7	Program Prioritas yang mendukung Misi RPJMD	III-59
Tabel 3.8	Kerangka Penyelarasan Misi Pembangunan Jangka Menengah	III-90
Tabel 3.9	Perwilayahan Komoditas Agromaritim.....	III-112
Tabel 4.1	Program Perangkat Daerah	IV-2
Tabel 4.2	Indikator Kinerja Utama	IV-69
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Daerah	IV-72
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Kunci	IV-90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Halmahera Selatan.....	II-2
Gambar 2.2 Sepuluh Komoditas Pertanian yang Paling Banyak Diusahakan di Kabupaten Hamahera Selatan Tahun 2023	II-10
Gambar 2.3 Persentase Luasan Jasa Penyediaan Air	II-26
Gambar 2.4 Persentase Luasan Jasa Penyediaan Pangan	II-29
Gambar 2.5 Persentase Luasan Jasa Pengaturan Air	II-31
Gambar 2.6 Gambaran Indeks Ketahanan Pangan	II-36
Gambar 2.7 Prevalensi ketidakcukupan Konsumsi Pangan Tahun 2020-2025 .	II-37
Gambar 2.8 Sebaran Jumlah Penduduk Berdasarkan Zona	II-49
Gambar 2.9 Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kab Halsel	II-74
Gambar 3.1 Hubungan Antar Misi Panca Transformasi Senyum	III-6
Gambar 3.2 Relasi antar Misi pembangunan 2025-2029.....	III-8
Gambar 3. 3 Arah Pembangunan Kab. Halsel Menurut RPJPN	III-28

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Perkembangan Jumlah Penduduk Halsei Tahun 2019 -2024	II-48
Grafik 2.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	II-56
Grafik 2.3 Perkembangan IPM	II-63
Grafik 2.4 Perbandingan IPM Kabupaten/Kota.....	II-63
Grafik 2.5 Usia Harapan Hidup	II-65
Grafik 2.6 Hasil Capaian Pembangunan Daerah	II-79
Grafik 2.7 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	II-85
Grafik 2.8 Persentase Desa Mandiri	II-89
Grafik 2.9 Indeks Integritas Nasional	II-94

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah merupakan fungsi yang sangat penting dan strategis, karena dengan perencanaan kita bisa melihat daerah akan dibawa kemana, dengan tetap mempertimbangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dilakukan dengan tetap mendasarkan pada data dan informasi yang akurat, valid dan akuntabel. Selanjutnya ketercapaian sasaran dan ketersediaan data menjadi ukuran utama yang sangat penting. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan pembangunan baik nasional maupun daerah diperlukan untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran. Pemerintah Daerah sebagai bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam menyusun perencanaan pembangunan, berkewajiban mempedomani dan mengacu perencanaan pembangunan nasional dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan daerah dengan Pembangunan nasional.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi landasan hukum dalam perencanaan pembangunan Nasional dan pembangunan Daerah. Terkait dengan pembangunan daerah, undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa untuk setiap periode jabatan kepala daerah, harus disusun perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang berlaku sejak pelantikan kepala daerah hingga akhir periode jabatan selama 5 tahun. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) karena RPJMD merupakan penjabaran RPJPD, kemudian RPJMD menjadi pedoman bagi daerah untuk menyusun RKPD dan menjadi pedoman Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Penyusunan RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2025-2029 dilakukan dengan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Maluku Utara, kondisi lingkungan strategis di daerah, potensi daerah, isu strategis baik internasional, nasional maupun lokal, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya. Dalam melakukan penyusunan RPJMD, digunakan empat pendekatan utama. **Pertama**, pendekatan politik.

Pendekatan ini memandang bahwa pemilihan kepala daerah pada dasarnya merupakan bagian terpenting di dalam proses penyusunan rencana program. Hal ini terjadi karena rakyat memilih menentukan pilihannya berdasarkan yang ditawarkan para calon Kepala Daerah. Dalam hal ini, rencana pembangunan adalah penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye ke dalam RPJMD. **Kedua**, pendekatan teknokratik. Pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut. **Ketiga**, pendekatan partisipatif. Pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. **Keempat** pendekatan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up). Pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemeritahan. Hasil proses tersebut kemudian diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan.

Dalam hal pendekatan politik, RPJMD merupakan turunan dari visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dimana Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin merupakan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Halmahera Selatan pada pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024 serta resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta Pada hari Kamis, 20 Februari 2025. Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri nomor : 100.2.1.3-221 tahun 2025 dan nomor : 100.2.1.3-1719 tahun 2025 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Kabupaten dan Kota hasil pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 masa jabatan 2025-2030. Sehingga dalam Proses penyusunan RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2025-2029 dilakukan dan disinergikan dengan menggunakan 3 (tiga) pendekatan utama lainnya, dan dilakukan secara bertahap. Proses penyusunannya dilakukan dari bawah, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) yang ada. Tujuannya adalah agar RPJMD ini merupakan refleksi dari perencanaan yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat di daerah. Melalui RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) akan dimungkinkan lebih terarah pengkajian terhadap indikator-indikator perkembangan di daerah, diantaranya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Gini, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran, dan Tingkat Kemiskinan.

RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2025-2029 merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah periode pertama dari RPJPD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2025-2045. RPJMD yang telah disusun selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD).

Selanjutnya, sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (12) menyatakan bahwa “Pemerintahan Daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia”. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, disusun suatu perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, pengawasan serta evaluasi. Oleh karena itu, dalam implementasinya pelaksanaan otonomi daerah harus terencana dan sinergis dengan perencanaan pemerintahan yang lebih tinggi dengan tidak menghilangkan nilai kekhasan setiap daerah. Berdasarkan ketentuan pasal 261 ayat (4), visi dan misi kepala daerah terpilih harus diterjemakan kedalam dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.

Dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang dimaksud pada penjelasan sebelumnya merupakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu dokumen perencanaan untuk periode waktu lima tahun yang akan datang. Selain janji-janji politik atau visi, misi Kepala Daerah terpilih yang harus diterjemahkan kepada RPJMD, hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya, isu-isu strategis serta potensi-potensi unggulan Kabupaten Halmahera Selatan juga harus diakomodir pada RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan.

Keseluruhan hal tersebut di analisis berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam peraturan tersebut diamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan dan Penetapan RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotism (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
 11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6223);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228);
 16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 19);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 459);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran;
26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2045;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012-2032 (Lembaran daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2014 Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Labuha Tahun 2020-2040;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2025 – 2045;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

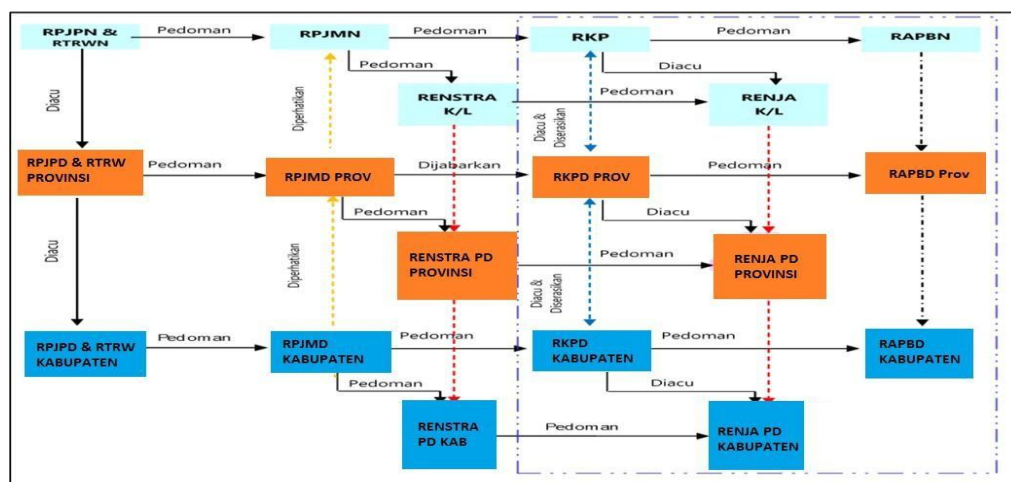
Dalam sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD merupakan satu kesatuan hubungan yang utuh dari manajemen pembangunan khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan.

Sebagai subsistem, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah merupakan bagian integral dari Perencanaan Pembangunan Nasional dan Perencanaan Pembangunan Provinsi, maka penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2025- 2029 memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029.

Agar dokumen RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2025- 2029 selaras dengan kebijakan pembangunan nasional, perlu dilakukan telaahan terhadap pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN yang berhubungan atau mempengaruhi pembangunan daerah. Lebih jelasnya hubungan antar dokumen dapat dilihat pada Gambar 1.1 sebagai berikut

:

Gambar 1. 1
Hubungan RPJM Daerah Kabupaten Halmahera Selatan dengan



Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2025-2029 dijabarkan dalam RKPD dan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD). Selanjutnya dari RKPD dan RKA PD inilah selanjutnya disusun dokumen RAPBD.

Selain itu dilakukan telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk diintegrasikan dengan rencana pembangunan daerah guna melihat arahan pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang berikut asumsi-asumsinya. Guna mendukung perwujudan pembangunan yang berkelanjutan, maka dilakukan telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2025-2029. Proses penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan juga memperhatikan keterpaduan pembangunan antar wilayah.

Untuk itu dilakukan telaahan terhadap dokumen perencanaan daerah lainnya yang berdampingan dengan Kabupaten Halmahera Selatan dan dianggap strategis dalam mendukung pembangunan, antara lain dokumen perencanaan Kota Tidore Kepulauan berkaitan dengan status Kota baru Sofifi yang wilayahnya berbatasan langsung dengan Kabupaten Halmahera Selatan, dan Kabupaten Halmahera Tengah terkait perencanaan Kawasan Industri Weda yang wilayahnya berbatasan langsung dengan Kabupaten Halmahera Selatan. Secara lebih terperinci hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya dilingkup pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai berikut:

1.3.1 Hubungan RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan dengan RPJM Nasional

RPJM Nasional Tahun 2025-2029 menyebutkan bahwa visi Indonesia Tahun 2025-2029 adalah **“BERSAMA INDONESIA MAJU MENUJU INDONESIA EMAS 2045”**. Visi tersebut akan diwujudkan melalui 8 (delapan) misi yang dikenal dengan ASTA CITA yang didukung oleh 17 program prioritas, 8 program hasil terbaik cepat (*quick wins*) dan 320 program kerja. ASTA CITA sebagai misi dituangkan sebagai prioritas nasional dalam RPJMN 2024-2029 yaitu : 1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM); 2) Memantapkan system pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru; 3) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif

serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi; 4) Memperkuat Pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran Perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas; 5) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; 6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan; 7) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan; dan 8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai Masyarakat yang adil dan makmur;

Agar RPJM Nasional mampu dioperasionalkan secara optimal dan tercipta harmonisasi irama pembangunan, maka RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2025-2029 wajib mengacu pada ASTA CITA' tersebut. Pada konteks inilah pendekatan atas-bawah (top down) diimplementasikan dalam penyusunan RPJM Daerah.

1.3.2 Hubungan RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan dengan RPJMD Provinsi Maluku Utara

Visi pembangunan Provinsi Maluku Utara yang ingin diwujudkan pada periode 2025-2029 adalah: **"MENJAGA KEBERAGAMAN DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN BERSAMA MALUKU UTARA BANGKIT, MAJU, SEJAHTERA BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN"**. Visi itu kemudian dijabarkan dalam Lima Misi, yaitu: 1) Mewujudkan transformasi social melalui peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, unggul dan berdaya saing; 2) Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan dengan meningkatkan produktifitas dan nilai tambah melalui pengembangan dan hilirisasi sector unggulan dan ekonomi kreatif; 3) Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang inklusif dan adaptif berorientasi pada kebutuhan masyarakat; 4) Mewujudkan prinsip demokrasi, stabilitas keamanan dan stabilitas ekonomi 5) Mewujudkan ketahanan social budaya dan ekologi berbasis kearifan local dalam tatanan masyarakat yang aman, nyaman dalam harmoni social untuk pembangunan yang berkelanjutan dan 6). Mewujudkan pengembangan wilayah berbasis kepulauan melalui penguatan infrastruktur dan sarana prasarana yang berkualitas dan berkeadilan.

Sama halnya dengan RPJM Nasional, substansi RPJMD Provinsi Maluku Utara tahun 2025-2029 juga wajib menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan RPJMD Kabupaten

Halmahera Selatan tahun 2025-2029 sehingga tercipta sinkronisasi pembangunan dalam wilayah Provinsi Maluku Utara.

1.3.3 Hubungan RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan dengan RPJPD Kabupaten Halmahera Selatan

RPJPD Kabupaten Halmahera Selatan periode 20 tahun sebelumnya telah berakhir, dan saat ini RPJPD Kabupaten Halmahera Selatan memasuki babak baru dengan penyusunan RPJPD periode 2025 – 2045. Sebagai RPJPD baru maka penyusunan RPJMD periode 2025 – 2029 menjadi tahapan pertama kebijakan Pembangunan yang harus dipedomasi pada RPJPD Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2025 – 2045. Berbagai kebijakan Pembangunan tahap pertama (2025-2029) dari RPJPD harus menjadi pedoman bagi penyusunan RPJMD periode 2025 – 2029. Untuk itu maka berbagai program Pembangunan tahap sebelumnya yang belum terselesaikan harus menjadi acuan bagi penyusunan RPJMD 2025 – 2029 dengan penekanan pada arah kebijakan RPJPD 2025 – 2045 Arah kebijakan Pembangunan Lima Tahun I (pertama) pada RPJPD Kabupaten Halmahera Selatan adalah: perkuatan fondasi transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan daerah untuk mewujudkan **Kabupaten Halmahera Selatan Sebagai Agromaritim Yang Maju Dan Berkelanjutan Dalam Bingkai Saruma**. Kebijakan ini diarahkan pada: 1). Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial; 2). Hilirisasi SDA; penguatan riset inovasi dan produktifitas tenaga kerja; 3). Perwujudan kelembagaan pemerintah daerah tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil; 4). Penguatan supremasi hukum dan stabilitas keamanan sebagai landasan Transformasi Halmahera Selatan; 5). Penguatan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar Transformasi Halmahera Selatan; 6). Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan; 7). Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; 8). Optimalisasi pembiayaan pembangunan daerah;

Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan tersebut di atas mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Posisi RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan 2025-2029 selanjutnya menjadi dokumen yang menjabarkan perencanaan jangka panjang secara lebih terfokus.

1.3.4 Hubungan RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Halmahera Selatan

Penyusunan RPJMD perlu memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan pola penataan ruang yang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012-2032, sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Halmahera Selatan. Adapun kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Halmahera Selatan sebagai berikut:

1. Pengembangan sistem kota-kota;
2. Pengembangan sistem pusat permukiman perkotaan dan perdesaan;
3. Peningkatan aksesibilitas regional maupun sub regional dengan pengembangan sistem transportasi yang terpadu;
4. Pengembangan sistem jaringan prasarana;
5. Pemantapan dan pengendalian kawasan lindung;
6. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
7. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya secara optimal sesuai dengan daya dukung lingkungan;
8. Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya;
9. Pengendalian kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
10. Pengembangan kawasan strategis;
11. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara;

Lebih lanjut, pengembangan wilayah Halmahera Selatan sebagai pusat-pusat kegiatan dan kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan, dan lain-lain sebagai berikut:

1. Pengembangan wilayah berdasarkan struktur ruang meliputi : Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yaitu kawasan perkotaan Labuha di Pulau Bacan. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu kawasan perkotaan Guruapin, Maffa, Saketa dan Babang, Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yaitu kawasan perkotaan Laiwui, Loleo Jaya, Kukupang dan Waikyon, serta Pusat Pelayanan Lokal (PPL) di 21 kecamatan.
2. Pengembangan wilayah berdasarkan pola ruang terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan Lindung di Kabupaten Halmahera Selatan terdiri

atas Kawasan suaka alam, Kawasan hutan lindung dan Kawasan resapan air.

3. Kawasan Budidaya terdiri atas Kawasan hutan produksi tetap, Kawasan hutan produksi terbatas, Kawasan pertanian lahan basah, Kawasan pertanian lahan kering, Kawasan perkebunan, Kawasan peternakan, Kawasan perikanan (minapolitan, perikanan tangkap, budidaya perikanan), Kawasan pertambangan, Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi, Kawasan pertambangan panas bumi, Kawasan industri, Kawasan pariwisata, Kawasan Permukiman, Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta Kawasan peruntukan lainnya.
4. Pengembangan kawasan strategis meliputi kawasan strategis berdasarkan kepentingan ekonomi, sosial budaya, pendayagunaan SDA dan teknologi tinggi, serta daya dukung lingkungan.

1.3.5 Hubungan RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan Dengan Rencana Strategis OPD Kabupaten Halmahera Selatan

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra OPD. Renstra OPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap OPD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Halmahera Selatan.

Dalam konteks ini, sangat penting bagi OPD untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Bupati terpilih dan RPJMD. Penyajian Renstra OPD dilakukan secara sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas OPD serta dilengkapi dengan indikator kinerja atau tolok ukur pencapaiannya.

1.3.6 Hubungan RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan Dengan RKPD Kabupaten Halmahera Selatan

RKPD merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2025-2029 yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah; b) prioritas pembangunan daerah; dan c) rencana kerja dan kerangka pendanaan, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS.

1.3.7 Hubungan RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan Dengan Renja OPD Kabupaten Halmahera Selatan

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2025-2029 dijabarkan ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan daerah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja OPD. RKPD menjadi acuan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten. Selanjutnya OPD dengan berpedoman pada Renstra OPD dan RKPD menyusun rencana kerja tahunan berupa Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai dasar penyusunan RKA OPD.

1.3.8 Hubungan RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan Dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2025-2029

Guna mensinergikan pembangunan Halmahera Selatan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan/atau Sustainable Development Goals (SDGs), maka dalam penyusunan dan penetapan RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2025-2029 juga memperhatikan hasil dan rekomendasi KLHS RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2025-2029 yakni terdapat empat pilar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang harus diintegrasikan kedalam dokumen RPJMD sebagai berikut:

1. Pilar Sosial meliputi:
 - a. Penanggulangan kemiskinan;
 - b. Penanggulangan kesenjangan wilayah;
 - c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - d. Peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat;
 - e. Kedaulatan pangan untuk pemenuhan gizi masyarakat;
 - f. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
2. Pilar Ekonomi meliputi:
 - a. Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha;
3. Pilar Lingkungan meliputi:
 - a. Keberlanjutan pembangunan dengan daya dukung lingkungan dan SDA;
4. Pilar Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan meliputi:
 - a. Peningkatan keamanan dan ketertiban lingkungan;
 - b. Tata kelola pemerintah untuk peningkatan pelayanan masyarakat.;

1.3.9 Hubungan RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan Dengan Dokumen - dokumen Lainnya

Guna mensinergikan pembangunan kewilayahan dan sektoral, maka dalam penyusunan dan penetapan RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2025-2029 juga memperhatikan keberadaan dokumen-dokumen lain diluar komponen perencanaan. Pada bagian lain, dokumen berupa perencanaan sektoral dan bersifat mikro juga perlu mengacu pada RPJMD. Adapun contoh dari dokumen-dokumen lain yang dimaksud misalnya RISPAM (Rencana Induk Sistem Pengembangan Air Minum), SSK (strategi Pengembangan Sanitasi Kabupaten), Grand Desain Kependudukan, RIPDA (Rencana Induk Pariwisata Daerah) dan lain-lain.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2025-2029 pada intinya adalah skema atas penjabaran visi dan misi Bupati Halmahera Selatan terpilih yang terjabarkan dalam beberapa tujuan pembangunan. Untuk mencapai tujuan pembangunan dimaksud, ditetapkanlah sasaran pembangunan beserta besaran target yang harus dicapai. Selanjutnya untuk mencapai target sasaran tersebut, dirumuskan strategi, arah kebijakan dan program prioritas. Rumusan tersebut menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan beserta masyarakat dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun yang akan datang.

Adapun sistematika penulisan sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

BAB I menjelaskan tentang: Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, Sistematika Penulisan serta Maksud dan Tujuan penyusunan dokumen RPJMD

Bab II GAMBARAN UMUM DAERAH

BAB II memiliki 3 sub bab yaitu *pertama* sub bab gambaran umum kondisi daerah yang memuat aspek geografi dan demografi, aspek

kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum *kedua* Sub bab gambaran keuangan daerah yang memuat penjelasan tentang realisasi APBD tahun anggaran 2020-2024 dan proyeksi keuangan daerah tahun anggaran 2025-2029. *Ketiga* Sub bab permasalahan dan isu strategis yang memuat permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.

Bab III VISI MISI DAN PROGRAM PRIORITAS

BAB III memiliki 2 sub bab yaitu *pertama* Sub bab Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, *Kedua* Sub bab strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah.

Bab IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BAB IV memiliki 2 Sub bab yaitu *pertama* Sub bab program perangkat daerah yang memuat daftar program perangkat daerah tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dan indicator program perangkat daerah Tahun 2025-2029. *Kedua* Sub bab kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang memuat target keberhasilan pencapaian tujuann dan sasaran RPJMD tahun 2025-2029 melalui indicator kinerja utama (IKU) dan target penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui indicator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB V PENUTUP

BAB IX Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian dan pelaksanaan pembangunan daerah,

1.5 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Memberikan arah atau petunjuk dalam penyelenggaraan pembangunan jangka menengah di Kabupaten Halmahera Selatan, khususnya periode tahun 2025-2029;
2. Menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) OPD dilingkup pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya RKPD tersebut menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
4. Sebagai alat ukur untuk penilaian keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
5. Sebagai parameter untuk mengukur kinerja Kepala OPD dalam melaksanakan amanat pembangunan berdasarkan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki masing-masing dalam rangka mewujudkan visi, misi dan program kerja Pemerintah Daerah;
6. Sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan;
7. Sebagai instrumen untuk menjalankan fungsi pengawasan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan, khususnya dalam pengendalian penyelenggaraan pembangunan daerah agar sesuai tujuan, sasaran dan prioritas program pembangunan yang ditetapkan dan aspirasi masyarakat.

Sedangkan Tujuan Penyusunan RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2025-2029 adalah:

1. Menjabarkan visi dan misi dalam berbagai agenda pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud, sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan;
2. Menjamin terwujudnya konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Halmahera Selatan;

3. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di dalam satu pola sikap dan pola tindak;
4. Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial dan ekonomi dalam pembangunan di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan;
5. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dengan Kabupaten/Kota sekitar, Kabupaten Halmahera Selatan dengan propinsi Maluku Utara dan Pemerintah Pusat;
6. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

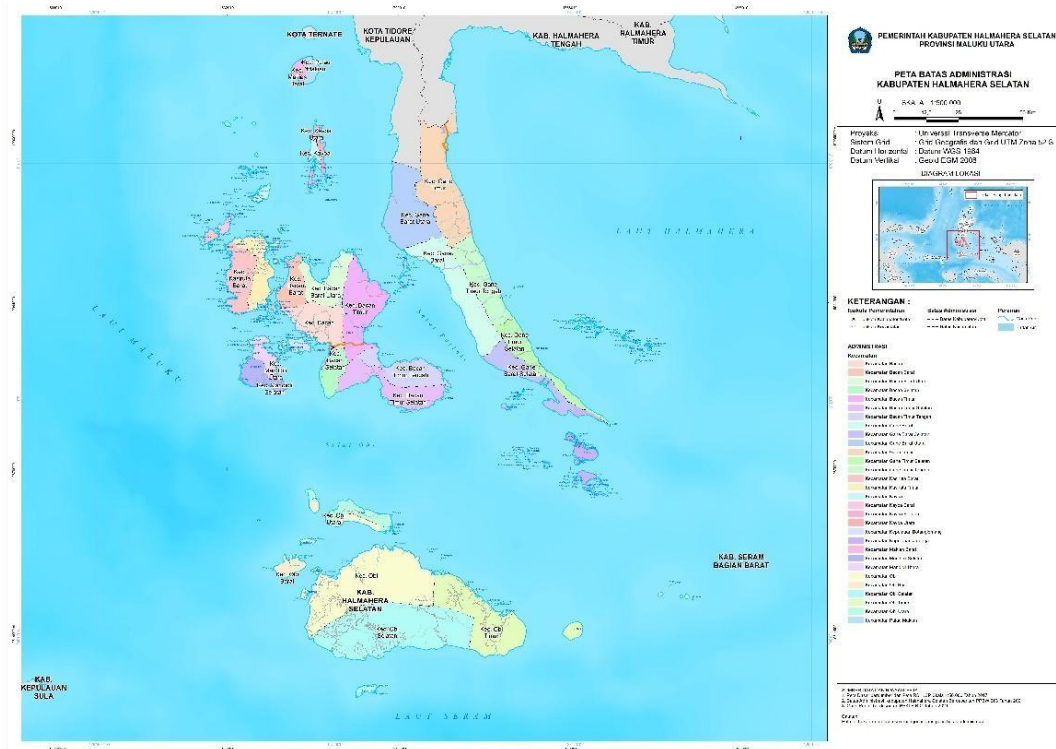
2.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

1. Letak Geografis Kabupaten Halmahera Selatan

Kabupaten Halmahera Selatan sebagai daerah otonom yang baru dimekarkan dari Kabupaten Maluku Utara (sekarang Halmahera Barat) Provinsi Maluku Utara sesuai dengan **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003**, terletak antara 126°45' Bujur Timur (BT) dan 129°30' Bujur Timur (BT) dan 0°30' Lintang Utara (LU) dan 2°00' Lintang Utara (LU). Luas wilayah Kabupaten Halmahera Selatan adalah **40,263,72 KM²**, yang terdiri dari **daratan seluas 8,779,32 KM² (22%)** dan **luas lautan sebesar 31,484,40 KM² (78%)**. Kabupaten Halmahera Selatan terdiri atas 404 pulau, meliputi enam pulau besar di antaranya Pulau Obi, Pulau Bacan, Pulau Makian, Pulau Kayoa, Pulau Kasiruta, dan Pulau Mandioli. Pulau Obi dan Pulau Bacan merupakan pulau terbesar dengan luas masing-masing 3,111 KM² dan 2,053 KM². Kabupaten Halmahera Selatan terletak di Kawasan Timur Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Kabupaten Halmahera selatan terdiri atas 9 (sembilan) Kecamatan. Namun, telah mengalami perubahan berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2007 Kecamatan dalam wilayah administrasi Kabupaten Halmahera Selatan menjadi 30 Kecamatan, 249 desa definitif serta 6 Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT). Di antara Kecamatan-Kecamatan tersebut, Kecamatan Obi Selatan merupakan kecamatan yang terluas yaitu 1.083,48 Km² atau 12,34 persen dari total luas wilayah Kabupaten Halmahera Selatan. Sedangkan Kecamatan Kayoa Selatan merupakan Kecamatan yang terkecil yaitu 26,06 Km² atau 0,30 persen. Kabupaten Halmahera Selatan berada pada ketinggian yang bervariasi dengan ketinggian 0-2.070,78 meter di atas permukaan laut. Gambaran wilayah secara utuh dapat dilihat pada Peta Administrasi Kabupaten Halmahera Selatan pada Gambar 2.1 dibawah ini.

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Halmahera Selatan



Sumber: RTRW Kabupaten Halmahera Selatan, Tahun 2012

Secara geografis Kabupaten Halmahera Selatan memiliki batas wilayah adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara dibatasi oleh Kota Tidore Kepulauan, Kota Ternate, dan Kabupaten Halmahera Tengah;
- Sebelah selatan dibatasi oleh Laut Seram;
- Sebelah timur dibatasi oleh Laut Halmahera; dan
- Sebelah barat dibatasi Laut Maluku.

Adapun luas wilayah administrasi Kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan dapat dilihat pada Tabel 2.1 dibawah ini.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan Menurut Kecamatan

NO	KECAMATAN	LUAS (KM ²)	IBU KOTA KECAMATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Obi Selatan	1.083,48	Wayaloar
2	Obi	1.073,15	Laiwui
3	Obi Barat	94,53	Jikohai
4	Obi Timur	636,23	Sum

NO	KECAMATAN	LUAS (KM ²)	IBU KOTA KECAMATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Obi Utara	160,69	Madapolo
6	Bacan	304,69	Labuha
7	Mandioli Selatan	138,81	Jiko
8	Mandioli Utara	96,79	Indong
9	Bacan Selatan	169,21	Mandaong
10	Batang Lomang	55,81	Bajo
11	Bacan Timur	463,50	Babang
12	Bacan Timur Selatan	321,13	Wayaua
13	Bacan Timur Tengah	276,28	Bibinoi
14	Bacan Barat	180,78	Indari
15	Kasiruta Barat	272,98	Palamea
16	Kasiruta Timur	247,93	Loleojaya
17	Bacan Barat Utara	264,94	Yaba
18	Kayoa	87,62	Guruapin
19	Kayoa Barat	27,07	Busua
20	Kayoa Selatan	26,06	Laluin
21	Kayoa Utara	39,22	Laromabati
22	Pulau Makian	55,50	Kota
23	Makian Barat	35,54	Mateketen
24	Gane Barat	493,67	Saketa
25	Gane Barat Selatan	252,55	Gane Dalam
26	Gane Barat Utara	501,69	Dolik
27	Kepulauan Joronga	148,93	Kukupang
28	Gane Timur	656,72	Maffa
29	Gane Timur Tengah	309,67	Bisui
30	Gane Timur Selatan	304,15	Gane Luar

Sumber: Halmahera Selatan dalam Angka Tahun 2025.

2. Peran Strategis Daerah

Kabupaten Halmahera Selatan memiliki peran penting dan strategis dalam perekonomian Provinsi Maluku Utara. Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Halmahera terhadap Pemerintah Provinsi Maluku Utara menunjukkan perkembangan yang berarti pada Tahun 2021 sebesar 20,68 persen meningkat menjadi 24,12 persen pada Tahun 2024. Secara rata-rata dalam kurun waktu 4 (empat) tahun Kabupaten Halmahera menjadi penyumbang distribusi PDRB-ADHB sebesar 21,49 persen, dan kedua tertinggi setelah Kabupaten Halmahera Tengah dalam wilayah Provinsi Maluku Utara, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

NO	KABUPATEN/KOTA	2021	2022	2023	2024*	RATA-RATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Halmahera Barat	4,44	3,58	3,14	3,23	3,60
2	Halmahera Tengah	18,30	29,91	33,46	28,24	27,48
3	Kepulauan Sula	4,92	4,06	3,59	3,79	4,09
4	Halmahera Selatan	20,68	20,23	20,92	24,12	21,49
5	Halmahera Utara	11,37	9,11	7,95	9,03	9,37
6	Halmahera Timur	7,44	5,92	6,18	5,86	6,35
7	Pulau Morotai	3,11	2,47	2,19	2,21	2,50
8	Pulau Taliabu	3,25	2,66	2,29	2,27	2,62
9	Kota Ternate	20,76	17,40	16,14	17,05	17,84
10	Kota Tidore Kepulauan	5,73	4,66	4,14	4,20	4,68

Sumber: Provinsi Maluku Utara Dalam Angka 2025.

Kabupaten Halmahera Selatan memiliki wilayah terluas dari 10 (Sepuluh) Kabupaten/Kota yaitu 1/3 (Sepertiga) dari luas wilayah Provinsi Maluku Utara. Dengan luas wilayah dan jumlah penduduk terbanyak, Kabupaten Halmahera Selatan memiliki posisi penting dan strategis untuk mendukung peranan Provinsi Maluku Utara dalam konstelasi nasional dengan memperhatikan daya dukung, daya tampung, dan inklusifitas bagi seluruh masyarakat agar dapat mendukung dalam pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Berikut ini penjelasan mengenai peranan Kabupaten Halmahera Selatan di Provinsi Maluku Utara yang berdasarkan hasil “Analisis Isu Terkini Provinsi Maluku Utara” yang telah dipublikasi BPS pada November 2024”, Kabupaten Halmahera Selatan merupakan salah satu daerah yang memiliki karakteristik unik dalam konteks ekonomi dan sosial di Maluku Utara. Berdasarkan analisis terkini, berikut beberapa poin penting mengenai Halmahera Selatan:

1. Halmahera Selatan mencatat pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan, pada tahun 2024, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Selatan mencapai 23,95%, menjadikannya sebagai salah satu yang tertinggi di provinsi ini;
2. PDRB ADHB Halmahera Selatan pada tahun 2024 tercatat sebesar 21.047,794 miliar rupiah. Hal ini menunjukkan pertumbuhan yang maju jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yang mencerminkan perkembangan sektor ekonomi yang dinamis;
3. Meskipun pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tantangan kemiskinan masih ada. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Halmahera Selatan pada tahun 2024

berada di angka 5,63%, yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan beberapa kabupaten lainnya di Maluku Utara;

4. Pertambangan dan industri pengolahan nikel menjadi sektor dominan di daerah ini. Namun, meskipun sektor ini memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, dampak positifnya terhadap masyarakat lokal masih perlu diperbaiki untuk mengurangi angka kemiskinan yang ada;

Secara infrastruktur Kabupaten Halmahera Selatan memiliki posisi strategis dan berkontribusi antara lain sebagai berikut :

1. simpul transportasi laut dan udara yang menghubungkan wilayah Halmahera dengan Wilayah Maluku;
2. Pelabuhan Babang, Pelabuhan Labuha dan Bandara Oesman Sadik menjadi pusat distribusi logistik regional dan mobilitas masyarakat antar pulau;
3. Potensi pengembangan jaringan transportasi laut perintis dan tol laut yang mendukung integrasi ekonomi kawasan timur Indonesia

Secara lingkungan dan ekologi kabupaten Halmahera Selatan berkontribusi sebagai penyangga ekosistem laut dan pesisir yang kaya akan keanekaragaman hayati (Mangrove, Terumbu Karang dan Padang Lamun) serta Halmahera Selatan memiliki kawasan konservasi laut yang penting bagi kelestarian sumber daya perikanan.

2.1.2 Kendala Potensi Sumber Daya Alam

Infrastruktur dan aksesibilitas masih menjadi tantangan yang perlu diatasi, terutama untuk memastikan distribusi pendapatan dan manfaat ekonomi tercapai secara merata di seluruh wilayah.

1. Potensi Perikanan

Kabupaten Halmahera Selatan memiliki luas lautan sebesar 31,484,40 km² atau 78 persen dari total luas wilayah sebesar 40,263,72 km². Oleh karena itu, Kabupaten Halmahera Selatan merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki potensi sumber daya alam yang memadai khususnya di sektor perikanan.

Jumlah hasil produksi ikan Cakalang dari Kabupaten Halmahera Selatan sebesar 11,990 ton atau dengan proporsi 10.302 persen dari total produksi ikan Cakalang Provinsi Maluku Utara pada tahun 2019-2023 sebesar 116,385 ton. Meskipun demikian, produksi perikanan dari Kabupaten Halmahera Selatan menurun drastis dari 10,193 ton pada Tahun 2019 menjadi 2.762 ton pada Tahun 2023, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.3 .

Tabel 2.3
Hasil Produksi Ikan Cakalang Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2023

NO	WILAYAH	HASIL PRODUKSI IKAN CAKALANG (TON)					JUMLAH	PROPORSI (%)
		2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Halmahera Barat	3.486	2.151	1.245	3.796	2.22	7.194	6,18
2	Halmahera Tengah	8.900	1.848	3.409	3.624	1.959	8.883	7,63
3	Kepulauan Sula	6.732	6.112	3.797	4.235	3.102	14.147	12,16
4	Halmahera Selatan	10.193	2.808	6.495	2,684	2.762	11.990	10,30
5	Halmahera Utara	7.787	4.083	3.326	3.600	3.254	14.263	12,25
6	Halmahera Timur	511	2.837	1.147	1.329	592	4.577	3,93
7	Pulau Morotai	5.323	724	1.217	1.280	1.212	3.222	2,76
8	Pulau Taliabu	3.102	3.848	-	-	-	3.848	3,30
9	Kota Ternate	32.018	24.088	3.003	3.780	4.366	30.875	26,53
10	Kota Tidore Kepulauan	20.264	6.917	4.851	5.614	2.882	17.385	14,94
	Maluku Utara	98.316	55.415	28.490	29.943	21.146	116,385	100

Sumber: Kementerian KKP, Tahun 2024.

Hasil produksi ikan Tongkol dari Kabupaten Halmahera Selatan sebesar 11,990 ton atau dengan proporsi 18,876 persen dari total produksi ikan Tongkol Provinsi Maluku Utara sebesar 112,761 ton pada periode yang sama. Hasil produksi ikan Tongkol dari Kabupaten Halmahera Selatan juga menurun drastis selama kurun waktu 2019-2022 yaitu dari 11,235 ton pada tahun 2019 menjadi hanya sebesar 1.296 ton pada tahun 2023. Gambaran hasil produksinya dapat dilihat pada Tabel 2.4

Tabel 2.4
Hasil Produksi Ikan Tongkol Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2023

NO	WILAYAH	HASIL PRODUKSI IKAN TONGKOL (TON)					JUMLAH	PROPORSI (%)
		2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Halmahera Barat	1.013	1.749	4.373	1.872	-	9.007	7,988
2	Halmahera Tengah	418	2.763	4.506	4.790	6.532	12.484	11,071
3	Kepulauan Sula	-	1.206	997	1.083	1.781	3.288	2,916

NO	WILAYAH	HASIL PRODUKSI IKAN TONGKOL (TON)					JUMLAH	PROPORSI (%)
		2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Halmahera Selatan	11.235	2.578	4.875	1.301	1.296	21.285	18,876
5	Halmahera Utara	1.136	2.998	1.940	2.835	1.783	8.911	7,902
6	Halmahera Timur	1.634	1.805	1.104	1.388	1.882	5.933	5,261
7	Pulau Morotai	-	104	-	-	-	104	0,092
8	Pulau Taliabu	1.126	4.859	-	-	-	5.985	5,308
9	Kota Ternate	3.016	999	9.544	17.117	1.322	30.677	27,206
10	Kota Tidore Kepulauan	699	5.222	4.512	4.650	4.373	15.087	13,380
	Maluku Utara	20.278	24.285	31.851	35.036	21.146	112.761	100

Sumber: Kementerian KKP, Tahun 2024.

Selain ikan cakalang dan ikan tongkol, hasil produksi ikan tuna dari Kabupaten Halmahera Selatan pada tahun 2019-2023 sebesar 14,216 ton atau 9.355 persen dari total produksi ikan tuna Provinsi Maluku Utara sebesar 151,970 ton pada periode yang sama. Hasil produksi ikan tuna dari Kabupaten Halmahera Selatan juga menurun drastis selama kurun waktu 2019-2023 yaitu dari 4,245 ton pada tahun 2019 dan meningkat di tahun 2021 menjadi 6,502 dan di tahun 2023 mengalami penurunan produksi menjadi 1.353 ton. Secara jelas dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5
Hasil Produksi Ikan Tuna Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2023

NO	WILAYAH	HASIL PRODUKSI IKAN TUNA (TON)					JUMLAH	PROPORSI (%)
		2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Halmahera Barat	1.986	835	1.046	1.040	985	5.892	3,877
2	Halmahera Tengah	5.838	922	1.518	1.614	1.525	9.894	6,510
3	Kepulauan Sula	6.517	4.967	2.053	2.336	2.08	15.875	10,446
4	Halmahera Selatan	4.245	2.135	6.502	1.333	1.353	14.216	9,355
5	Halmahera Utara	2.754	3.263	2.994	2.293	3.124	11.307	7,440
6	Halmahera Timur	642	271	-	-	-	913	0,601
7	Pulau Morotai	1.965	11.380	23.716	2.190	23.631	39.275	25,844
8	Pulau Taliabu	3.860	420	-	-	-	4.280	2,816
9	Kota Ternate	3.458	3.763	9.763	1.973	5.43	18.962	12,478

NO	WILAYAH	HASIL PRODUKSI IKAN TUNA (TON)					Jumlah	PROPORSI (%)
		2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
10	Kota Tidore Kepulauan	10.326	6.582	7.046	7.395	6.786	31.356	20,633
	Maluku Utara	41.591	34.539	54.638	20,174	44.917	151.970	100

Sumber: Kementerian KKP, Tahun 2024

Di sisi lain, potensi perikanan tangkap lainnya di laut di Kabupaten Halmahera Selatan juga yang besar. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan bahwa jumlah hasil produksi perikanan tangkap lainnya dari Kabupaten Halmahera Selatan selama kurun waktu 2019-2023 mencapai 224,446 ton atau dengan proporsi 20.071 persen dari total hasil produksi Provinsi Maluku Utara 1,118,277 ton. Hasil produksi perikanan tangkap lainnya ini meningkat dari 27,278 ton pada tahun 2019 menjadi 55,429 ton pada tahun 2023. Hasil produksi tersebut telah menempatkan Kabupaten Halmahera Selatan sebagai kabupaten yang memiliki hasil produksi perikanan tangkap lainnya yang terbesar di Provinsi Maluku Utara. Secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.6 dibawah ini:

Tabel 2.6
Hasil Produksi Perikanan Tangkap Lainnya Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2023

NO	WILAYAH	HASIL PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP LAINNYA (TON)					Jumlah	PROPORSI (%)
		2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Halmahera Barat	11.009	20.940	24.545	24.759	23.195	104.448	9,340
2	Halmahera Tengah	8.625	17.473	27.862	29.729	27.982	111.671	9,986
3	Kepulauan Sula	9.313	18.845	19.060	20.358	19.253	86.829	7,765
4	Halmahera Selatan	27.278	46.290	42.368	53.081	55.429	224.446	20,071
5	Halmahera Utara	17.164	21.677	29.845	31.558	36.283	136.527	12,209
6	Halmahera Timur	6.999	19.319	21.376	24.786	21.455	93.935	8,400
7	Pulau Morotai	8.746	8.152	17.910	18.839	18.206	71.853	6,425
8	Pulau Taliabu	6.686	15.867	22.025	23.344	22.529	90.451	8,088
9	Kota Ternate	17.367	18.897	21.968	25.364	22.882	106.478	9,522
10	Kota Tidore Kepulauan	14.816	18.226	19.563	20.011	19.023	91.639	8,195

NO	WILAYAH	HASIL PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP LAINNYA (TON)					JUMLAH	PROPORSI (%)
		2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Maluku Utara	128.002	205.686	246.522	271.829	266.237	1.118.277	100,00

Sumber: Kementerian KKP, Tahun 2024

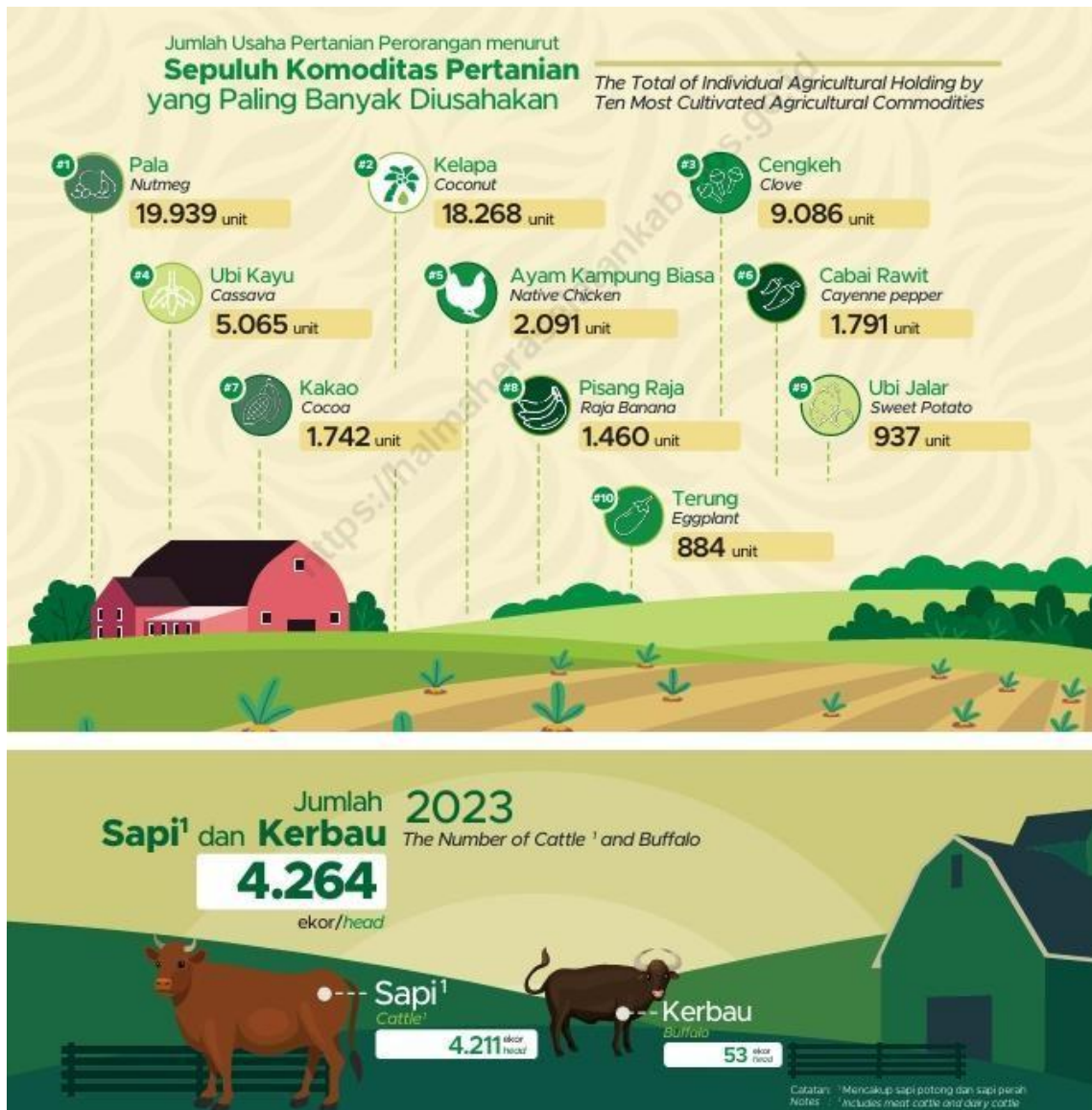
2. Potensi Pertanian

Sektor pertanian memiliki potensi untuk berkontribusi signifikan terhadap ekonomi nasional. Fakta bahwa masih terjadi penyerapan tenaga kerja yang tinggi di sektor pertanian, serta sumbangan devisa yang cukup besar dari sektor agribisnis yang berkembang pesat dan penyediaan bahan baku untuk industri hilir, menunjukkan ketahanan sektor pertanian dalam menghadapi pandemi Covid-19.

BPS telah melaksanakan Sensus Pertanian Tahun 2023 (ST2023) Tahap I (pertama) di Kabupaten Halmahera Selatan. Kegiatan ST2023 tahap pertama ini meliputi tujuh subsektor pertanian, yaitu: (1) subsektor tanaman pangan; (2) subsektor tanaman hortikultura; (3) subsektor tanaman perkebunan; (4) subsektor peternakan; (5) subsektor perikanan, (6) subsektor kehutanan; dan (7) subsektor jasa pertanian. sedangkan kegiatan pertanian yang dicakup meliputi: (1) budi daya tanaman, yaitu: padi, palawija, hortikultura (sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan tanaman obat), perkebunan, kehutanan (antara lain: kayu, getah, rotan, dll). (2) budi daya ternak/unggas; (3) budi daya ikan dan penangkapan ikan; (4) penangkaran tumbuhan dan satwa liar; perburuan dan penangkapan satwa liar, dan pemungutan hasil hutan; dan (6) jasa pertanian.

Hasil Sensus Pertanian Tahun 2023 (ST2023) yang dilaksanakan oleh BPS menunjukkan terdapat 10 komoditas pertanian yang paling banyak diusahakan di Kabupaten Halmahera Selatan. Selama 2023 Komoditas perkebunan tahunan yang banyak ditanam petani adalah kelapa, pala, cengkeh, kakao, dan pisang, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.2.

Gambar 2.2
Sepuluh Komoditas Pertanian yang Paling Banyak Diusahakan
di Kabupaten Hamahera Selatan Tahun 2023



Sumber: BPS, Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023
Tahap 1 Kabupaten Halmahera Selatan, Desember 2023.

3. Potensi Pangan

Pangan selalu menjadi isu strategis dalam pembangunan baik di tingkat global maupun nasional, karena pemenuhan pangan merupakan hak setiap warga negara yang harus dijamin kuantitas dan kualitasnya, aman dan bergizi. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Tanaman pangan adalah komoditi yang banyak diusahakan karena sektor tanaman pangan akan selalu berjalan selama manusia masih memerlukan makanan untuk mempertahankan hidup. Data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera

Selatan menunjukkan bahwa tanaman pangan yang diusahakan oleh petani di Kabupaten Halmahera Selatan adalah Padi Ladang, Padi Sawah, Jagung, Ubi Kayu, ubi Jalar, Kacang Tanah dan Kacang Hijau, dapat dilihat pada Tabel 2.7

Tabel 2.7
Data Tanaman Pangan Halmahera Selatan, Tahun 2020-2024

NO	JENIS TANAMAN	TAHUN 2020				TAHUN 2021				TAHUN 2022				TAHUN 2023				TAHUN 2024			
		LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PROV (KW/Ha)	PROD (Ton)	LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PROV (KW/Ha)	PROD (Ton)	LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PROV (KW/Ha)	PROD (Ton)	LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PROV (KW/Ha)	PROD (Ton)	LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PROV (KW/Ha)	PROD (Ton)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
1	Padi Ladang	3,060.00	2,754.00	2.00	5,508.00	1,486.00	1,337.00	2.00	2,674.00	313.00	282.00	1.90	535.00	5.20	4.70	2.10	10.00	23.00	21.00	2.00	41.00
2	Padi Sawah	2,173.00	1,956.00	2.90	5,672.00	2,672.00	2,405.00	2.90	6,975.00	260.00	234.00	2.70	632.00	325.50	293.00	2.90	850.00	177.50	159.80	3.00	479.00
3	Jagung	882.00	794.00	2.50	1,984.00	1,606.00	1,445.00	2.70	3,903.00	258.30	232.50	2.90	674.00	287.30	258.60	2.90	750.00	144.50	115.60	2.50	289.00
4	Uni Kayu	156.00	140.00	4.00	561.00	171.00	153.50	3.70	568.00	121.00	109.00	4.00	436.00	152.70	137.40	4.00	550.00	54.00	48.60	4.00	194.00
5	Ubi Jalar	145.00	131.00	1.60	209.00	144.00	115.00	1.70	196.00	138.00	124.00	1.70	211.00	61.50	55.40	1.50	83.00	3.00	2.70	3.00	8.00
6	Kacang Tanah	230.00	207.00	1.50	311.00	177.00	159.00	1.00	159.00	217.00	195.00	1.10	215.00	51.00	46.00	1.20	55.00	-	-	-	-
7	Kacang Hijau	119.00	107.00	1.20	129.00	137.00	123.00	1.40	172.00	221.00	199.00	1.20	239.00	49.50	44.60	1.30	58.00	-	-	-	-

Sumber: Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Tahun 2024

Dari Tabel diatas produksi padi ladang mengalami kenaikan di tahun 2024, dimana tahun 2023 produksi padi ladang sebesar 10 Ton namun di tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 41 Ton, sementara padi sawah mengalami penurunan produksi dari 850 ton di tahun 2023 menjadi 470 ton di 2024, begitu juga dengan tanaman pangan lainnya mengalami fluktuasi produksi.

4. Potensi Perkebunan

Halmahera Selatan memiliki potensi besar dalam sektor perkebunan yang sebagian besar merupakan perkebunan rakyat yang luas areanya mencapai kurang 42.000 Ha dengan komoditas utama yaitu Kelapa, Kakao, Cengkeh dan pala.

Pala (*Myristica fragrans*) merupakan tanaman yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan berperan penting dalam perekonomian lokal, terutama di daerah-daerah yang memiliki iklim dan kondisi tanah yang mendukung pertumbuhannya. Kondisi tanaman pala di Halmahera Selatan saat ini menunjukkan dinamika yang kompleks, dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan, teknik budidaya, dan tantangan ekonomi yang dihadapi oleh para petani. Di Halmahera Selatan, tanaman pala tidak hanya menjadi sumber pendapatan bagi petani, tetapi juga berkontribusi pada keberagaman agroekosistem yang ada di wilayah tersebut.

Tanaman pala dikenal sebagai tanaman rempah yang memiliki nilai ekonomis. Hasil tanaman pala yang biasa dimanfaatkan adalah buah pala. Buah pala terdiri dari daging buah (77,8%), fuli (4%), tempurung (5,1%), dan biji (13,1%). Biji pala dan fuli adalah bagian buah yang bernilai ekonomi tinggi. Dua bahan baku tersebut biasanya diproses menjadi minyak pala, dan juga dalam industri pengalengan, minuman, dan kosmetik. Di Eropah biji pala dan fuli diproses menjadi minyak atsiri, kemudian minyak atsiri ini diproses lagi secara kimia menjadi produk-produk turunan yang bernilai ekonomi tinggi untuk digunakan sebagai bahan dasar pembuatan parfum, obat-obatan, dan bahan penyedap makanan. Batang pohon pala dapat dijadikan kayu bangunan atau kayu bakar. Sedangkan daging buah biasanya dibuat menjadi asinan pala, manisan pala, marmelade, selai pala, jus pala, sirup pala dan kristal daging buah pala. Daging buah pala banyak digunakan dalam industri minuman dan sari buah pala.

Secara umum, permasalahan tanaman pala di Halmahera Selatan yaitu tanaman tidak diurus dengan baik. Petani hanya melakukan penanaman dan membiarkan tanaman tumbuh sampai siap panen. Kondisi ini menyebabkan banyak permasalahan di perkebunan pala yang teridentifikasi mulai dari aspek budidaya sampai pengolahan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh petani pala di Halmahera Selatan adalah perubahan iklim yang berdampak

pada pola curah hujan dan suhu. Tanaman pala memerlukan curah hujan yang tinggi dan suhu yang stabil untuk tumbuh dengan baik, dan fluktuasi dalam kondisi ini dapat mengganggu proses pertumbuhan dan hasil panen. Penelitian menunjukkan bahwa tanaman pala dapat tumbuh optimal pada ketinggian 0-700 meter di atas permukaan laut dengan curah hujan antara 2000-3500 mm per tahun. Namun, dengan adanya perubahan iklim yang semakin tidak menentu, para petani harus beradaptasi dengan teknik budidaya yang lebih baik untuk menjaga produktivitas tanaman mereka. Dalam konteks budidaya, permasalahan utama yang ada yaitu tidak berjalannya teknik budidaya yang baik dalam pengelolaan tanaman pala. Beberapa permasalahan tersebut yaitu tidak diterapkan pemeliharaan tanaman yang baik, pemupukan yang tidak dilakukan, dan pengendalian hama dan penyakit yang tidak dijalankan. Permasalahan lain yang dihadapi yaitu adanya serangan hama penggerek batang dan penyakit pecah buah muda.

Saat ini petani hanya memanen buah pala yang sudah masak untuk dimanfaatkan biji dan fulinya saja. Sedangkan daging buah masih dibuang dan tidak dimanfaatkan. Industri minyak atsiri dan produk turunan juga sudah tersedia di Bacan dan Makian namun tidak berjalan dengan baik saat ini. Sehingga pendampingan dari hulu ke hilir untuk produksi pala perlu dilakukan secara holistik. Di sisi ekonomi, tanaman pala di Halmahera Selatan memiliki potensi yang besar sebagai komoditas ekspor. Namun, untuk memaksimalkan potensi ini, petani perlu memahami pasar dan meningkatkan kualitas produk mereka agar dapat bersaing di pasar global. Menurut data Bidang UMKM, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Kabupaten Halmahera Selatan (2024), di Kecamatan Pulau Makian terdapat 18 UKM selai kenari, dan di Kecamatan Makian Barat terdapat 20 UKM sirup pala. Namun untuk UKM sirup pala produksinya belum kontinu.

Kondisi tanaman kelapa di Halmahera Selatan saat ini mencerminkan dinamika yang kompleks, dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan, sosial, dan ekonomi. Secara umum, tanaman kelapa di wilayah ini memiliki potensi yang signifikan, namun juga dihadapkan pada tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.

Pertama-tama, penting untuk mencatat bahwa tanaman kelapa di Halmahera Selatan tersebar di berbagai lokasi, termasuk lahan pekarangan dan perkebunan. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa kelapa merupakan salah satu komoditas penting di Indonesia, yang tidak hanya berfungsi sebagai bahan pangan tetapi juga sebagai sumber bahan bakar nabati. Namun, meskipun kelapa memiliki banyak manfaat, informasi mengenai penyebaran dan sistem budidayanya di Halmahera Selatan masih terbatas, yang mengindikasikan perlunya

penelitian lebih lanjut untuk memahami potensi dan tantangan yang ada. Kondisi pesisir di Halmahera Selatan juga berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman kelapa. Wilayah pesisir yang dinamis mengalami perubahan akibat interaksi antara daratan, laut, dan atmosfer, yang dapat mempengaruhi lingkungan pertumbuhan tanaman kelapa. Perubahan cuaca yang ekstrem, seperti badai dan kenaikan muka air laut, dapat berdampak negatif pada produktivitas tanaman kelapa, sehingga pengelolaan yang holistik dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk menjaga keberlangsungan budidaya kelapa di daerah ini. Permasalahan utama dalam budidaya kelapa di Halmahera Selatan yaitu penggunaan bibit non unggul. Petani menggunakan bibit dari pohon kelapa yang sudah ada dan ditanam kembali untuk peremajaan kelapa. Jenis kelapa yang terdapat di Halmahera Selatan didominasi kelapa tipe dalam. Jenis ini membutuhkan waktu yang cukup lama sampai menghasilkan dan tipe tanaman yang sangat tinggi, yang akan mempersulit pemanenan. Selain itu, petani tidak pernah melakukan pemupukan mulai dari penanaman sampai tanaman tersebut dipanen bertahun-tahun. Hal ini menyebabkan produktivitas kelapa yang cukup rendah di Halmahera Selatan. Serangan hama penggerek batang juga menjadi kendala utama di Halmahera Selatan. Hama ini bisa menyebabkan gagal panen atau penurunan panen yang cukup drastis karena serangga sexava memakan daun. Di sisi lain, pengelolaan limbah kelapa juga menjadi perhatian penting. Banyak petani di Halmahera Selatan hanya memanfaatkan daging buah kelapa untuk pembuatan kopra, sementara limbah seperti serabut dan tempurung seringkali terabaikan. Padahal produk turunan dapat dimanfaatkan sebagai produk bernilai ekonomis dan dapat meningkatkan pendapatan petani. Kopra yang diusahakan oleh petani masih terbatas pada kopra asap. Hal ini karena teknologi pengeringan yang sangat memungkinkan dilakukan oleh petani, serta merupakan kebiasaan turun temurun. Hal menarik yang ditemukan di lapangan yaitu proses pengeringan lanjutan yang menggunakan plastic house.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat petani kelapa di Halmahera Selatan juga berperan penting dalam menentukan keberhasilan budidaya kelapa. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, pendapatan, dan akses terhadap informasi berpengaruh terhadap produktivitas pertanian. Hampir semua petani sangat tergantung dengan tengkulak dan sudah berjalan puluhan tahun. Ketergantungan ini menyebabkan harga kopra yang dibeli dengan harga murah karena petani tidak memiliki pilihan untuk menjual ke tempat lain karena sudah terjatuh hutang.

Kondisi tanaman cengkeh (*Syzygium aromaticum*) di Halmahera Selatan saat ini menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi produktivitas dan keberlanjutan budidayanya. Secara umum, cengkeh merupakan salah satu komoditas perkebunan yang

memiliki nilai ekonomi tinggi di Indonesia, termasuk di Halmahera Selatan, yang dikenal sebagai daerah dengan potensi pertanian yang signifikan. Namun, para petani di wilayah ini sering kali menghadapi kendala dalam pengelolaan tanaman, termasuk fluktuasi harga, serangan hama, dan kondisi cuaca yang tidak menentu. Dari segi pemasaran, cengkeh di Halmahera Selatan juga mengalami tantangan. Fluktuasi harga cengkeh di pasar global dan lokal sering kali membuat petani kesulitan dalam merencanakan usaha tani mereka. Penelitian menunjukkan bahwa ketidakpastian harga dapat mempengaruhi keputusan petani dalam mempertahankan atau meningkatkan luas lahan cengkeh yang mereka kelola. Hal ini diperparah dengan kurangnya akses informasi yang akurat mengenai pasar dan teknik budidaya yang efisien, yang sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani.

Tabel 2.8
Luas Areal Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman di
Kabupaten Halmahera Selatan (Ha)

No	Jenis Tanaman	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tanaman Tahunan						
1	Karet					
2	Kelapa			29.731	29.741	29.741
3	Kelapa Sawit				5.556	
4	Kopi				2	2
5	Kakao			3.920	3.920	3.920
6	Teh					
7	Jambu Mete					
8	Pala			12.192	13.097	13.097
8	Cengkeh			4.303	4.123	4.123
Tanaman Semusim						
1	Tebu					
2	Tembakau					
3	Nilam					

Sumber : Halmahera Selatan Dalam Angka Tahun 2025

Dari tabel diatas bahwa produksi kelapa merupakan komoditas perkebunan paling banyak di Kabupaten Halmahera Selatan dengan total areal tanaman di tahun 2024 sebanyak 29.741 Ha, Pala

Tabel 2.9
Produksi Perkebunan Kabupaten Halmahera Selatan

No	Produksi (Ton/Tahun)	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kelapa	23.523	23.523	23.523	20.330	
2	Pala	605	601	608	654	
3	Cengkeh	767	769	763	863	
4	Kakao	1.829	2.195	2.195	2.005	

Sumber : Rencana Induk dan Peta jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Inovasi Kabupaten Halmahera Selatan 2025-2029

5. Potensi Pariwisata

Daya tarik wisata Kabupaten Halmahera Selatan sangat dipengaruhi oleh karakteristik geografis wilayah pesisir sehingga didominasi berupa wisata pulau, pantai, dan wisata tirta berupa alam, situs sejarah dan budaya. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 telah menetapkan 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dalam 50 Destinasi Pariwisata Nasional. Berdasarkan RIPPARNAS tersebut, Kabupaten Halmahera Selatan berada dalam wilayah KSPN Morotai dan sekitarnya.

Potensi daya tarik wisata Kabupaten Halmahera Selatan dilihat dari aspek sejarah, aspek alam, aspek pulau, aspek pantai, aspek air terjun/sungai, danau dan sektor sektor lain yang terkait lainnya yang dapat dikembangkan dilihat pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10
Jenis Destinasi Wisata Kabupaten Halmahera Selatan

NO	JENIS DESTINASI WISATA	LOKASI
(1)	(2)	(3)
1	Sejarah	Keraton Sultan Bacan- Amasing Kota, Bacan; Masjid Sultan Bacan - Amasing Kota, Bacan; Benteng Bernaveld- Labuha, Bacan; Rumah Putih- Kampung Makian, Bacan Selatan; Rumah Kuning- Amasing Kota, Bacan; Ompu Asal- Kasiruta Dalam; Goa Jeret (Kuburan Tua)- Kasiruta
2	Alam	Cagar Alam Gunung Sibela-Bacan (Habitat Monyet Bacan/ <i>Macaca Nigra</i> , Burung Bidadari/Standar <i>Wallacea Wings</i> , Burung Nuri

NO	JENIS DESTINASI WISATA	LOKASI
(1)	(2)	(3)
		Ternate/ <i>Lorius Garulus</i> , Burung Raja/ <i>Cicinnurus Regius</i> , Burung Kasturi Merah/ <i>Eos Bornea</i> , Kakatua Alba/ <i>Cacatua Alba</i> , Perkicil <i>Violet/ Eos Squamata</i> Anggrek Alam, Kupu-Kupu/ <i>Ornithopera Aesakus</i>); Hutan Karet- Bacan; Perkebunan Duku Bacan- Amasing Kali, Bacan; Barangka Dolong- Bacan; Kawasan air Panas Tawa - Bacan Timur Tengah; Kawasan Air Panas Kayoa; Tambang batu Bacan- Kasiruta
3	Pulau	Kepulauan Widi- Gane Timur Tengah (99 pulau Kepulauan Guruaici- Kayoa; Nusa Ra- Indomut, Bacan; Pulau Poroco, Pulau Kusu, Pulau Sali- Bacan Timur; Pulau Sambiki- Obi; Pulau Sali- Bacan Timur (terdapat <i>Sali Bay Resort</i>); Pulau Gata-Gata, Pulau Woka, Pulau Taunu, Pulau Tobalai
4	Pantai	Pantai Omamoy- Bacan Selatan; Dermaga Biru, Sibela Beach Babang- Bacan Timur; Pogo-Pogo Bacan Barat; Pantai Poate, Pantai Sagawe, Pantai Wattambi
5	Air Terjun/ Sungai	Air Terjun Aha Kolano- Kasiruta; Air Terjun Amasing Kali- Bacan; Air Terjun Gandasuli- Bacan Selatan; Air Terjun Kubung- Bacan Selatan; Air Terjun Nyonyifi- Bacan Timur; Air Terjun Bibinoi- Bacan Timur Tengah; Air Terjun Curupana dan Air Terjun Paramasang- BT Selatan; Air Terjun Saketa - Gane Barat
6	Danau	Danau Manggayaong- Wayamiga, Bacan Timur; Talaga Nusa- Wayamiga, Bacan Timur; Danau Karo- Obi
Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024		

6. Potensi Pertambangan

Pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, di bawah permukaan bumi, dan dibawah permukaan air. Berdasarkan data Kementerian ESDM yang dapat diakses melalui: <https://geoportal.esdm.go.id/minerba/>, diketahui bahwa terdapat pula potensi batubara yaitu Batubara Halmahera, kalori rendah di Pulau Bacan; Batubara Pulau Obi, kalori sedang (5100- 6100 kal/gr) yang sedang dilakukan peninjauan oleh Pemerintah. Selain itu, terdapat potensi mineral logam antara lain: nikel di Pulau Obi; tembaga di Pulau Bacan; emas primer di Pulau Obi dan Pulau Bacan; perak di Pulau Bacan; kobalt di Pulau Obi; dan potensi mineral bukan logam yaitu batu gamping di Pulau Mandioli.

7. Potensi Sektor Industri

Sejak 1 Januari 2020, Pemerintah Indonesia telah melarang ekspor nikel mentah untuk meningkatkan nilai tambah komoditas tersebut di dalam negeri. Tujuannya adalah memicu efek pengganda yang lebih besar dari sektor sumber daya alam, khususnya nikel, dan

memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian. Oleh karena itu, pemerintah berusaha membangun ekosistem baru industri nikel dalam negeri dengan tujuan hilirisasi produk akhir nikel yang diproduksi oleh Indonesia. Mengacu pada Peraturan Presiden 109 Tahun 2020 bahwa pulau Obi Kabupaten Halmahera Selatan ditetapkan sebagai lokasi Proyek Strategis Nasional (PSN) di Provinsi Maluku Utara

Kawasan yang ditetapkan ini menjadi salah satu tujuan hilirisasi industri ini telah menghasilkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Halmahera Selatan dan Provinsi Maluku Utara hingga dua digit persentase, jauh di atas rata-rata nasional. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Maluku Utara dan Kabupaten Halmahera Selatan juga meningkat drastis akibat hilirisasi tersebut.

Hasil Publikasi BPS Kabupaten Halmahera Selatan menunjukkan sektor industri pengolahan berdasarkan lapangan usaha mengalami pertumbuhan pada tahun 2023 sebesar 47,13 persen dari tahun 2022 dengan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Halmahera Selatan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar 52,48 persen. Disusul peran lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang berkontribusi sebesar 16,50 persen dan laju pertumbuhan 39,51 persen dari tahun 2022.

2.2 DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP

2.2.1 Daya Dukung Air

Daya dukung air dianalisis berdasarkan perhitungan kebutuhan dan ketersediaan air. Apabila ketersediaan air lebih tinggi dibandingkan kebutuhan maka masih belum terlampaui. Sebaliknya apabila kebutuhan lebih tinggi dibandingkan ketersediaan maka Terlampaui. Daya dukung air dibagi menjadi dua perhitungan yaitu ketersediaan dan kebutuhan air. Daya Dukung Air di Halmahera Selatan didominasi oleh kelas yang masih memenuhi. Secara keseluruhan, luas lahan sebesar 656.510,61 hektar atau 79 % mendukung untuk daya dukung air. Kecamatan Kasiruta Timur memiliki persentase tertinggi dibandingkan kecamatan yang lain yaitu 91, 7 % sedangkan yang terendah adalah Kecamatan Makia barat dengan persentase hanya 34 %, dapat dilihat pada Tabel 2.11

Tabel 2.11
Daya Dukung Air Kabupaten Halmahera Selatan

NO	KECAMATAN	WILAYAH YANG MENDUKUNG	
		LUAS (HA)	PROPORSI
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bacan	21535,9	77,2%
2	Bacan Barat	15842,26	89,5%
3	Bacan Utara	20924,60	87,5%
4	Bacan Selatan	11640,58	71,7%
5	Bacan Timur	8182,58	85,5%
6	Bacan Selatan	23209,84	74,7%
7	Bacan Timur Tengah	19164,61	74,7%
8	Gane Barat	35869,44	83,4%
9	Gane Barat Selatan	13747,07	59,3%
10	Gane Barat Utara	50827,65	88,4%
11	Gane Timur	43084,28	79,6%
12	Gane Timur Selatan	21410,22	69,6%
13	Gane Timur Tengah	24090,80	76,6%
14	Kasiruta Barat	16221,67	74,9%
15	Kasiruta Timur	24746,58	91,7%
16	Kayoa	5710,72	88,8%
17	Kayoa Barat	1990,60	82,6%
18	Kayoa Selatan	1621,16	73,3%
19	Kayoa Utara	3887,61	85,2%
20	Kep.Batanglomang	2687,51	51,4%
21	Kep. Joronga	9555,72	75,7%
22	Makia Barat	1157,38	34,0%
23	Mandioli Selatan	6742,90	47,9%
24	Mandioli Utara	4662,26	57,2%
25	Obi	90620,23	88,7%
26	Obi Barat	5980,52	68,4%
27	Obi Selatan	85937,82	87,0%
28	Obi Timur	47233,86	76,4%
29	Obi Utara	8025,54	61,4%
30	Pulau Makian	598,86	11,3%
Halmahera Selatan		656.510,61	79,6%

Sumber : Kajian D3TLH Tahun 2022

2.2.2 Daya Dukung Pangan

Daya Dukung Pangan di Halmahera Selatan didominasi oleh kelas yang masih memenuhi. Secara keseluruhan, luas lahan sebesar 815.648,20 hektar atau 99 % mendukung untuk daya dukung pangan. Kecamatan Obi Timur memiliki persentase tertinggi

dibandingkan kecamatan yang lain yaitu 99 % sedangkan yang terendah adalah Kecamatan Kayoa Selatan dengan persentase hanya 93,2 %, dapat dilihat pada Tabel 2.12.

Tabel 2.12
Daya Dukung Pangan Kabupaten Halmahera Selatan

NO	KECAMATAN	WILAYAH YANG MENDUKUNG	
		LUAS (HA)	PROPORS I
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bacan	22.007,79	97,1%
2	Bacan Barat	17.218,20	99,5%
3	Bacan Utara	23.788,27	99,5%
4	Bacan Selatan	15.725,36	96,9%
5	Bacan Timur	43.414,74	97,2%
6	Bacan Selatan	30.865,67	99,4%
7	Bacan Timur Tengah	25.458,39	99,2%
8	Gane Barat	42.426,36	98,6%
9	Gane Barat Selatan	23.007,37	99,2%
10	Gane Barat Utara	57.240,44	99,6%
11	Gane Timur	53.265,27	98,5%
12	Gane Timur Selatan	30.533,70	99,2%
13	Gane Timur Tengah	31.049,68	98,8%
14	Kasiruta Barat	21.520,45	99,3%
15	Kasiruta Timur	2.6890,5	99,7%
16	Kayoa	6.264,27	97,4%
17	Kayoa Barat	2.338,45	97,0%
18	Kayoa Selatan	2.062,14	93,2%
19	Kayoa Utara	4.521,22	99,0
20	Kep.Botanglomang	5.100,96	97,6%
21	Kep. Joronga	12.520,29	99,2%
22	Makia Barat	3.253,96	95,6%
23	Mandioli Selatan	13.903,53	98,8%
24	Mandioli Utara	7.971,40	98,6%
25	Obi	10.655,15	99,5%
26	Obi Barat	8.632,85	98,8%
27	Obi Selatan	98.419,07	99,6%
28	Obi Timur	61.711,21	99,9%
29	Obi Utara	12.895,12	98,7%
30	Pulau Makian	4.915,94	92,6%
Halmahera Selatan		815.648,20	99,0%

Sumber : Kajian D3TLH Tahun 2022

2.2.3 Daya Dukung Pertanian

Luas panen Kabupaten Halmahera Selatan mengalami fluktuasi selama 2021-2023. Pada tahun 2021, luas panen 211,97 hektar sedangkan tahun 2022 menurun menjadi 31,11 hektar, kemudian meningkat kembali menjadi 122 hektar pada 2023. Produktivitasnya mengalami tren penurunan dari 3.937 kilogram menjadi 3.324 kilogram pada tahun 2023. Sedangkan kebutuhan layak tiap penduduk mencapai 113.48 kilogram tiap tahunnya. Hasil perhitungan menunjukkan kebutuhan lahan ideal sebesar 7.254,71 hektar pada tahun 2021 , 9.262,27 hektar dan 8.902,17 hektar pada tahun 2023 Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan luas panen di Kabupaten Halmahera Selatan sehingga daya dukungnya sudah terlampaui.

Ketahanan pangan perlu menjadi perhatian dalam pembangunan Kabupaten Halmahera Selatan. Hal ini dikarenakan keterbatasan lahan yang sesuai untuk tanaman semusim seperti padi. Perkembangan penduduk dan ekonomi akan berdampak pada peningkatan kebutuhan pangan sedangkan luas lahan pertanian stagnan, bahkan terus berkurang. Kondisi tersebut dapat mengurangi kemampuan untuk mendukung penyediaan pangan dan dapat bergantung pada daerah lain. Berikut daya dukung lahan pertanian dapat disajikan pada Tabel 2.13 dibawah ini.

Tabel 2.13
Perhitungan Daya Dukung lahan Pertanian

KETERANGAN	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah Penduduk	251690	255798	260758
Luas Panen (Ha)	224.97	31.11	122
Produktivitas	3937	3134	3324
Kebutuhan Layak	113.48	113.48	113.48
Kebutuhan Lahan	7,254.71	9,262.27	8,902.17
Selisih	(7,029.74)	(9,231.16)	(8,780.17)
Daya Dukung	Terlampaui	Terlampaui	Terlampaui

Sumber : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahan Pangan Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024.

2.2.4 Daya Dukung Lahan Terbangun

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 bahwa pemanfaatan lahan budidaya harus mempertimbangkan aspek konserfasi atau Ruang Terbuka Hijau (RTH). Oleh karena itu daya dukung lahan untuk permukiman mempertimbangkan koefisien luas lahan yang terbangun dari luas wilayah yang diperuntukan minimal 30% pengguna untuk RTH. Disisi lain untuk kawasan pedesaan diharapkan mampu memberikan peruntukan fungsi

lindung sebesar 50%. Salah satu indikator dalam penilaian daya dukung lahan terbangun adalah tutupan lahan sebagai mana dapat dilihat pada Tabel 2.14.

Tabel 2. 14
Tutupan Lahan kabupaten Halmahera Selatan

TUTUPAN LAHAN	HEKTAR	LAHAN TERBANGUN
(1)	(2)	(3)
Awan	97.716,24	0
Hutan Lahan Kering Primer	47.217,26	0
Hutan Lahan Kering Sekunder	425.269,94	0
Hutan Mangrove Primer	9.146,08	0
Hutan Mangrove Sekunder	6.202,93	0
Laut	240,10	0
Pemukiman	2.481,36	2.481,36
Pertanian Lahan Kering	15.965,82	15.965,82
Pertanian Lahan Kering Bercampur	128.774,85	128.774,85
Rawa	49,26	0
Savana	17.047,10	0
Semak/Belukar	74.485,83	74.485,83
Semak/Belukar Rawa	1.080,50	
Tanah terbuka	1.681,16	1.681,16
Transmigrasi	3.326,20	3.326,20
Tubuh Air	1.402,41	0
Total	832.087,04	226.715,22

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2025 – 2045

DDLKB Kabupaten Halmahera Selatan secara keseluruhan dengan nilai 2,57 termasuk dalam daya dukung lahan permukiman sedang. Hal tersebut memiliki arti bahwa Kabupaten Halmahera Selatan masih memiliki daya tampung bangunan yang bersyarat/sedang. Pengembangan permukiman perlu mempertimbangkan kawasan lindung sehingga tidak memnimbulkan kerusakan lingkungan.

2.2.5 Daya Dukung Fungsi Lindung

Daya dukung fungsi lindung ditinjau dari luas guna lahan yang memiliki fungsi lindung, koefisien lindung untuk guna lahan dan luasan wilayah, daya dukung fungsi lindung ditinjau dari luas guna lahan yang memiliki fungsi lindung, koefisien lindung untuk guna lahan dan luasan wilayah. Daya Dukung fungsi lindung (DDL), memiliki kisaran nilai antara 0 (minimal) sampai 1 (maksimal). Nilai mendekati angka 1, semakin baik fungsi lindung

yang ada dalam wilayah tersebut, demikian pula sebaliknya, apabila mendekati angka 0, fungsi lindung semakin buruk atau lebih berfungsi sebagai kawasan budidaya. Adapun tingkat kualitas daya dukung fungsi lindung seperti pada Tabel 2.15

Tabel 2. 15
Tingkat Kualitas Daya Dukung Fungsi Lindung

TINGKAT KUALITAS DAYA DUKUNG FUNGSI LINDUNG	RENTANG NILAI DDL
(1)	(2)
Sangat Rusak	0 – 0,20
Rusak	0,20 – 0,40
Sedang	0,40 – 0,60
Baik	0,60 – 0,80
Sangat Baik	0,80 – 1

Sumber: Pedoman Penentuan DDT LH, KLH Tahun 2014

Berdasarkan Tabel 2.15 yang menggambarkan tingkat kualitas daya dukung fungsi lindung memberikan arti bahwa semakin tinggi nilai DDL maka semakin baik kualitas daya dukungnya begitu pula sebaliknya. Atas hal tersebut dapat dilakukan analisis daya dukung fungsi lindung di Kabupaten Halmahera Selatan sebagai mana dapat dilihat pada Tabel 2.16.

Tabel 2.16
Analisis Daya Dukung Fungsi Lindung Kabupaten Halmahera Selatan

TUTUPAN LAHAN	HEKTAR	KOEFISIEN LINDUNG	HASIL PERKALIAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Awan	97.716,24		-
Hutan Lahan Kering Primer	47.217,26	1,00	47.217,26
Hutan Lahan Kering Sekunder	425.269,94	1,00	425.269,94
Hutan Mangrove Primer	9.146,08	1,00	9.146,08
Hutan Mangrove Sekunder	6.202,93	1,00	6.202,93
Laut	240,10	0,98	235,30
Pemukiman	2.481,36	0,18	446,64
Pertanian Lahan Kering	15.965,82	0,54	8.621,54
Pertanian Lahan Kering Bercampur	128.774,85	0,54	69.538,42
Rawa	49,26	0,54	26,60

TUTUPAN LAHAN	HEKTAR	KOEFISIEN LINDUNG	HASIL PERKALIAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Savana	17.047,10	0,46	7.841,67
Semak/Belukar	74.485,83	0,46	34.263,48
Semak/Belukar Rawa	1.080,50	0,46	497,03
Tanah terbuka	1.681,16	0,46	773,33
Transmigrasi	3.326,20	0,18	598,72
Tubuh Air	1.402,41	1,00	1.402,41
Total	832.087,04	0,73	612.081,35

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2025 – 2045

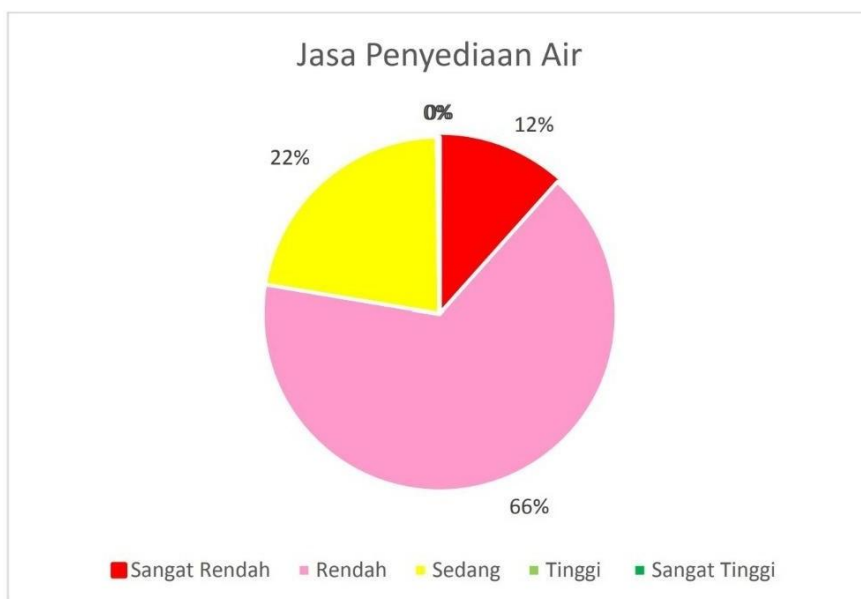
Berdasarkan Tabel 2.16 di atas tingkat kualitas daya dukung fungsi lindung berdasarkan lahan eksisting maka koefisien lindung Kabupaten Halmahera Selatan sebesar 0,73 dalam kategori fungsi lindung sangat baik.

2.2.6 Jasa Penyediaan Air

Daya dukung daya tampung lingkungan hidup berbasis Jasa lingkungan penyediaan air bersih menunjukkan kemampuan ekosistem dalam memberikan manfaat kepada manusia berupa tersedianya air bersih. Penyediaan air bersih tersebut berupa air yang bersumber dari air tanah, air hujan, maupun air permukaan. Ketersediaan air bersih tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai hal baik itu dari jenis tanah, jenis batuan, intensitas hujan, hingga tutupan lahan. Oleh karena itu, Jasa lingkungan penyediaan air bersih ini akan berbeda pada tiap ekoregion.

Kelas rendah mempunyai luasan tertinggi untuk jasa ekosistem penyediaan air 533.392,94 hektar. Kelas sedang menempati peringkat kedua terluas yaitu 178.475,68 hektar sedangkan kelas sangat rendah seluas 93.793,20 hektar. Kemampuan untuk penyediaan air terkait dengan kondisi penggunaan lahan dan jenis ekoregionnya. Kawasan yang berbukit dan bergunung mempunyai kemampuan relatif rendah karena jarak air tanah dengan permukaan relatif dalam. Hal berbeda apabila wilayah dengan dataran rendah atau lembah maka kemampuan penyediaan air lebih baik. Selain itu jenis penggunaan lahan mempengaruhi kemampuan untuk penyerapan air hujan yang menjadi sumber untuk airtanah. Lahan yang masih didominasi vegetasi maka kemampuan penyerapan air akan lebih tinggi dibandingkan lahan yang sudah berubah menjadi pertanian, Perkebunan atau lahan terbangun. Berikut persentase luasan jasa penyediaan air pada Gambar 2.3 dan tabel 2.17

Gambar 2.3
Persentase Luasan Jasa Penyediaan Air



Sumber : Kajian D3TLH Tahun 2022

Tabel 2.17
Jasa Ekosistem Penyediaan Air

NO	KECAMATAN	LUAS INDEKS JASA EKOSISTEM PENYEDIAAN AIR (HA)				
		SANGAT RENDAH	RENDAH	SEDANG	TINGGI	SANGAT TINGGI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bacan	2005,21	21700,74	3586,16	0,00	0,00
2	Bacan Barata	980,19	15642,55	410,53	22,60	0,00
3	Bacan Utara	1776,47	19794,79	0,00	0,00	0,00
4	Bacan Selatan	2117,14	13823,12	1676,52	0,00	0,00
5	Bacan Timur	3024,11	37234,07	0,00	21,25	596,26
6	Bacan Selatan	2788,83	24590,62	3528,87	5,16	0,00
7	Bacan Timur Tengah	1924,93	15,741,65	2852,53	652,39	0,00
8	Gane Barat	1113,09	39,945,09	6914,33	1,45	0,00
9	Gane Barat Selatan	2962,85	18510,68	935,86	0,00	2,06
10	Gane Barat Utara	892,12	50792,56	980,10	73,06	0,04
11	Gane Timur	1841,97	48071,52	5061,17	149,96	0,00
12	Gane Timur Selatan	1324,39	23600,67	3375,84	0,00	0,16
13	Gane Timur Tengah	1162,17	23926,21	4409,02	0,00	0,00
14	Kasiruta Barat	2286,15	18818,53	5078,44	0,30	0,27
15	Kasiruta Timur	5033,34	20343,98	20,15	0,09	0,00
16	Kayoa	1360,16	3887,04	953,43	1,87	0,00

NO	KECAMATAN	LUAS INDEKS JASA EKOSISTEM PENYEDIAAN AIR (HA)				
		SANGAT RENDAH	RENDAH	SEDANG	TINGGI	SANGAT TINGGI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17	Kayoa Barat	312,88	2062,61	0,00	0,00	0,00
18	Kayoa Selatan	981,33	886,94	81,11	0,00	0,00
19	Kayoa Utara	784,78	1095,19	1526,81	0,00	0,00
20	Kep.Batanglomang	95,03	4685,85	283,40	0,00	0,00
21	Kep. Joronga	6003,48	6278,15	0,00	10,20	0,00
22	Makia Barat	0,00	62,93	3189,86	0,00	0,00
23	Mandioli Selatan	3000,73	10771,06	0,00	30,99	0,00
24	Mandioli Utara	809,59	7070,0	80,0	0,00	0,00
25	Obi	22109,48	33546,04	34983,42	1087,63	34,60
26	Obi Barat	4407,97	4050,81	0,00	0,00	0,00
27	Obi Selatan	5358,24	27691,53	64515,75	0,00	0,00
28	Obi Timur	12587,77	32104,33	16518,16	0,00	0,00
29	Obi Utara	4628,78	5961,81	2033,05	0,00	0,00
30	Pulau Makian	0,00	151,49	4988,51	0,00	0,00
	Halmahera Selatan	93.793,20	533.392,94	178.475,68	2056,96	96,20

Sumber : Kajian D3TLH Tahun 2022

Terkait daya dukung air berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup (2024), total potensi air permukaan dari sungai, danau kecil, serta air tanah di kabupaten Halmahera Selatan diperkirakan mencapai 2,5 Miliar³ per tahun. Ketersediaan air bersih masih relatif mencukupi kebutuhan domestik dan pertanian, namun di beberapa pulau kecil seperti Kasiruta, Obi, dan Kayoa ketersediaan mulai mengalami penurunan pada musim kemarau dan peningkatan konversi lahan dan sedimentasi sungai akibat aktivitas pertambangan dan perkebunan menjadi ancaman terhadap kualitas dan kuantitas air permukaan. Adapun data ketersediaan dan pemanfaatan air biasa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel
Ketersediaan dan Pemanfaatan Air

No	Jenias Sumber Air	Volume Potensial (M3/Tahun)	Tingkat Pemanfaatan (M3/Tahun)	Tingkat Pemanfaatan (%)	Kondisi Daya Dukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Air Permukaan (Sungai dan Danau)	1.520.000.000	890.000.000	58,5	Masih mendukung kebutuhan
2	Air tanah dangkal	650.000.000	390.000.000	60,0	Cukup stabil, perlu konservasi

No	Jenias Sumber Air	Volume Potensial (M3/Tahun)	Tingkat Pemanfaatan (M3/Tahun)	Tingkat Pemanfaatan (%)	Kondisi Daya Dukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Air tanah dalam	330.000.000	210.000.000	63,6	Mulai menurun di pulau kecil
	Air hujan (tampungan alami)	80.000.000	45.000.000	56,2	Belum dimanfaatkan optimal

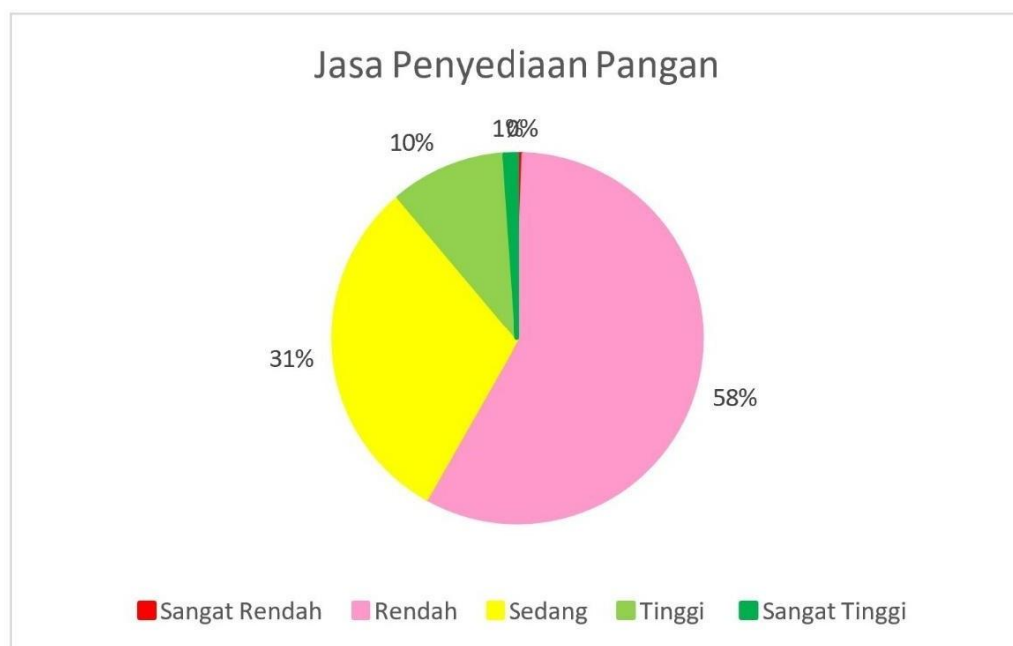
Sumber: KLHS RPJMD 2025–2029, BPS Halsel (2024).

2.2.7 Jasa Penyediaan Pangan

Daya dukung daya tampung lingkungan hidup berbasis Jasa lingkungan penyediaan pangan merupakan kemampuan ekosistem dalam memberikan manfaat kepada manusia berupa tersedianya bahan pangan bagi manusia. Penyediaan bahan pangan yang dimaksud berupa sumber pangan hayati dan hewani. Jasa lingkungan penyediaan bahan pangan akan berbeda pada setiap ekoregion hal tersebut dikarenakan ketersediaanya dapat dipengaruhi oleh karakteristik lahan dan dominasi tutupan vegetasinya. Ketersediaan bahan pangan akan memiliki nilai tinggi pada ekoregion dataran fluvio gunung api karena memiliki karakteristik lahan berupa tanah yang subur dan sesuai untuk tumbuhnya berbagai macam jenis tumbuhan terutama tanaman pangan.

Kelas rendah mempunyai luasan tertinggi untuk jasa ekosistem penyediaan pangan 465.834,84 hektar. Kelas sedang menempati peringkat kedua terluas yaitu 247.417,30 hektar sedangkan kelas tinggi seluas 80.858,57 hektar. Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan memiliki konfigurasi geografis berupa pegunungan maupun perbukitan sehingga tidak sesuai untuk penyediaan pangan. Lahan dengan kontribusi tersebut sesuai untuk pengembangan sektor Perkebunan atau kehutanan yang mana tipe vegetasi dengan tegakan keras. Lokasi yang mempunyai kelas tinggi berada di lembah atau dataran rendah, yang mana sesuai untuk tipe vegetasi tanaman semusim, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.4.

Gambar 2.4
Persentase Luasan Jasa Penyediaan Pangan



Sumber : Kajian D3TLH Tahun 2022

Untuk menilai kontribusi jasa ekosistem terhadap penyediaan pangan akan memberikan gambaran dalam memahami seberapa besar ekosistem alam dalam mendukung keberlanjutan dan ketahanan pangan di Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.18

Tabel 2.18
Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan

NO	KECAMATAN	LUAS INDEKS AGREGAT JASA EKOSISTEM PENYEDIAAN PANGAN (HA)				
		SANGAT RENDAH	RENDAH	SEDANG	TINGGI	SANGAT TINGGI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bacan	334,38	16570,85	8328,97	1565,74	491,18
2	Bacan Barat	25,28	13495,44	2343,62	651,49	361,05
3	Bacan Utara	13,88	17529,02	4312,87	1359,20	32,81
4	Bacan Selatan	282,83	11450,64	2346,98	1824,85	24,94
5	Bacan Timur	178,90	31091,50	8361,61	2219,73	1015,83
6	Bacan Selatan	46,75	19343,17	4776,20	6071,71	0,00
7	Bacan Timur Tengah	60,28	10967,37	6891,23	6328,72	115,70
8	Gane Barat	52,30	33123,00	6063,16	2548,07	228,94
9	Gane Barat Selatan	8,48	16111,90	4294,65	1102,47	938,19
10	Gane Barat Utara	58,02	44970,91	10171,78	1545,58	73,06

NO	KECAMATAN	LUAS INDEKS AGREGAT JASA EKOSISTEM PENYEDIAAN PANGAN (HA)				
		SANGAT RENDAH	RENDAH	SEDANG	TINGGI	SANGAT TINGGI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11	Gane Timur	1,48	36824,43	8451,59	6445,86	1715,94
12	Gane Timur Selatan	22,70	17851,01	9628,28	1827,30	4,95
13	Gane Timur Tengah	9,11	20033,26	7819,64	2934,81	0,00
14	Kasiruta Barat	71,59	15313,97	5422,41	294,36	22,87
15	Kasiruta Timur	29,10	22452,38	2896,62	611,99	340,88
16	Kayoa	141,38	3831,11	770,97	1082,88	358,17
17	Kayoa Barat	0,00	2079,13	288,66	0,00	7,71
18	Kayoa Selatan	128,40	950,26	499,61	226,59	144,51
19	Kayoa Utara	22,58	2232,22	1513,36	589,63	48,99
20	Kepulauan Batanglomang	0,00	1020,36	3167,88	339,54	545,50
21	Kepulauan Joronga	14,64	6801,84	2395,57	2979,58	100,21
22	Makian Barat	0,00	52,16	1703,92	1495,71	0,00
23	Mandioli Selatan	74,91	6345,20	5093,31	1343,36	0,00
24	Mandioli Utara	30,55	4640,48	2646,66	410,70	159,26
25	Obi	2600,66	43343,90	46459,03	7492,65	927,92
26	Obi Barat	113,12	5730,36	2276,02	339,29	0,00
27	Obi Selatan	33,21	19428,19	60341,25	17854,20	7,68
28	Obi Timur	268,82	34278,11	21532,69	3894,26	1236,37
29	Obi Utara	48,58	6895,38	4104,67	1575,02	0,00
30	Pulau Makian	0,00	65,29	2479,09	2464,98	129,63
	Halmahera Selatan	4.671,95	465.834,84	247.417,30	80.858,57	9.032,20

Sumber : Kajian D3TLH Tahun 2022

2.2.8 Jasa Pengaturan Air

Daya dukung daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa lingkungan pengatur air menunjukkan kemampuan ekosistem dalam mengatur siklus hidrologi pada suatu wilayah. Siklus hidrologi tersebut berlangsung secara kontinyu mulai dari terjadinya penguapan air, kondensasi, turunnya hujan hingga mengalirnya air hujan di permukaan tanah dan infiltrasi air ke tanah. Tata aliran air tersebut dapat berjalan baik apabila lahan memiliki tutupan vegetasi, karena vegetasi tersebut memiliki peran untuk menyimpan cadangan air. Semakin rapat vegetasi maka pengaturan tata air akan semakin baik. Selain itu, pengaturan tata air

tersebut juga dapat dipengaruhi oleh kondisi topografi suatu wilayah karena air dapat mengalir pada permukaan sehingga ketika tidak terdapat vegetasi yang mampu menyerap air, air tersebut akan lebih cepat mengalir ke permukaan yang lebih rendah. Pengaturan tata air tersebut dilakukan untuk menjamin ketersediaan air serta mengendalikan air agar tidak terjadi banjir.

Kelas sedang mempunyai luasan tertinggi untuk jasa ekosistem pengaturan air 437.399,57 hektar. Kelas tinggi menempati peringkat kedua terluas yaitu 177.486,79 hektar sedangkan kelas sangat rendah seluas 38.643,39 hektar. Pengaturan air terkait dengan kemampuan untuk penyerapan air hujan dan mengurangi limpasan. Wilayah yang masih berupa hutan memiliki kemampuan yang tinggi untuk meminimalisir limpasan. Akan tetapi wilayah yang sudah beralih fungsi menjadi Perkebunan, lahan terbuka atau permukiman maka kemampuannya pasti berkurang. Hal ini dapat meningkatkan potensi terjadinya bencana seperti banjir dan longsor karena tidak ada kemampuan pengaturan air di lahan tersebut. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 2.5 dibawah ini.

Gambar 2.5
Persentase Luasan Jasa Pengaturan Air

Sumber : Kajian D3TLH Tahun 2022

Adapun Luas lahan menurut indeks jasa ekosistem air yang terbagi dalam beberapa



kelas dari sangat rendah sampai sangat tinggi yang tersebar di seluruh 30 Kecamatan Kabupaten Halmahera Selatan menunjukan kelas yang paling rendah adalah Kecamatan

Makian Barat sebesar 54,16 dan Kecamatan yang memiliki nilai sangat tinggi adalah Kecamatan Obi Selatan dengan nilai 15.699,61 dapat dilihat pada Tabel 2.19

Tabel 2. 19
Jasa Ekosistem Pengaturan Air

\	KECAMATAN	LUAS MENURUT INDEKS JASA EKOSISTEM PENGATURAN AIR (Ha)				
		SANGAT RENDAH	RENDAH	SEDANG	TINGGI	SANGAT TINGGI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bacan	970,68	6042,96	16372,63	3827,31	78,54
2	Bacan Barat	0,00	1032,63	14726,99	236,08	880,18
3	Bacan Utara	0,00	3486,61	17814,93	1739,54	206,70
4	Bacan Selatan	2117,14	4667,02	9146,10	0,00	0,00
5	Bacan Timur	606,28	6059,39	32428,83	4159,77	612,28
6	Bacan Selatan	1168,13	3267,16	23148,04	0,00	2653,80
7	Bacan Timur Tengah	117,95	3280,00	14793,64	1032,84	5557,88
8	Gane Barat	0,00	1167,69	40815,65	30,69	1,45
9	Gane Barat Selatan	448,54	1532,43	17896,91	1956,83	620,97
10	Gane Barat Utara	165,75	1657,94	51628,97	3366,65	0,04
11	Gane Timur	17,75	25787,37	41750,58	8898,45	181,15
12	Gane Timur Selatan	86,68	3001,80	22387,45	3853,37	4,05
13	Gane Timur Tengah	9,11	1746,90	27252,57	1788,24	0,00
14	Kasiruta Barat	0,00	3220,14	15060,33	2791,32	53,41
15	Kasiruta Timur	0,00	4457,17	6088,43	14556,03	1229,34
16	Kayoa	566,43	1804,88	531,08	2671,06	611,06
17	Kayoa Barat	0,00	1639,15	288,66	439,97	7,71
18	Kayoa Selatan	754,74	742,43	0,00	307,70	144,51
19	Kayoa Utara	267,75	2046,20	588,09	1485,76	48,99
20	Kep.Batanglomang	0,00	779,78	3001,09	753,69	529,33
21	Kep. Joronga	1409,06	3164,06	5114,33	1627,85	946,53
22	Makia Barat	0,00	54,16	2288,88	909,75	0,00
23	Mandioli Selatan	370,84	2297,49	6618,78	3376,20	509,47
24	Mandioli Utara	139,28	2084,33	2788,60	2710,20	159,26
25	Obi	16342,88	15529,72	17736,88	44951,07	6029,61
26	Obi Barat	2474,58	2428,38	3216,54	339,27	0,03
27	Obi Selatan	1747,20	12969,73	22551,37	436969,61	15699,61
28	Obi Timur	4062,48	18929,36	11923,59	25058,45	1236,37
29	Obi Utara	3800,12	3654,49	4548,32	620,71	0,00
30	Pulau Makian	0,00	133,68	4710,94	295,37	0,00
Halmahera Selatan		38.643,39	11.097,04	437.399,57	177.486,79	38.188,17

Sumber : Kajian D3TLH Tahun 2022

2.2.9 Kawasan Pertambangan

Terdapat tiga kecamatan yang memiliki potensi pertambangan yaitu Kecamatan Obi Selatan, Kecamatan Obi dan Kecamatan Bacan yang memiliki Potensi Pertambangan dengan jenis Kelompok Logam Mulia, Mineral Industri, Logam besi dan Paduan Besi. Pengembangan, pengawasan, dan pengendalian kawasan pertambangan mineral logam di Kecamatan Bacan Selatan; Kecamatan Gane Barat Selatan; serta Kecamatan Obi tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Berikut komoditi pertambangan di Kabupaten Halmahera Selatan dapat dilihat pada Tabel 2.20

Tabel 2.20
Potensi Pertambangan Kabupaten Halmahera Selatan

NO	KOMODITI	KELOMPOK	DESA	LOKASI	KECAMATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	-	-	Wayaloar	Pulau Obi	Obi Selatan
2	Nikel	Logam Besi dan Paduan Besi	Kawasi	Houl Sagu	Obi Selatan
3	Nikel	Logam Besi dan Paduan Besi	Kawasi	Kawasi	Obi Selatan
4	Besi Laterit	Logam Besi dan Paduan Besi	Kawasi	Malamala (P.Obi)	Obi Selatan
5	Nikel	Logam besi dan Paduan Besi	Baru	Baru	Obi
6	Emas Primer	Logam Mulia	Air Mangga Indah	Ambon-Anggai (P.obi)	Obi
7	Emas Primer	Logam Mulia	Air Mangga Indah	Ambon-Anggai (P.obi)	Obi
8	Emas Primer	Logam Mulia	Kubung	Kaputusan	Bacan
9	Emas Primer	Logam Mulia	Kubung	Kaputusan	Bacan
10	Tembaga	Logam Dasar	Sawadai	Kaputusan	Bacan
11	Batugamping	Mineral Industri	Yoyok	P. Mandioli	Bacan
12	-	-	Amasing Kali	Bacan	Bacan

Sumber : RTRW Kabupaten Halmehera Selatan Tahun 2012 – 2032

2.2.10 Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim

Daya dukung daya tampung lingkungan hidup berbasis Jasa lingkungan pengaturan iklim menunjukkan kemampuan ekosistem dalam mengatur berbagai unsur iklim seperti suhu, hujan dan penguapan, kelembapan dan hujan serta angin. Iklim antara satu wilayah dan wilayah lainnya berbeda. Hal itu disebabkan ada berbagai hal yang mempengaruhi kondisi iklim di suatu daerah, misalnya kondisi topografi, bentuklahan hingga tutupan vegetasi. Wilayah yang berada pada elevasi yang tinggi seperti pegunungan lebih berkontribusi tinggi dalam Jasa lingkungan pengaturan iklim apabila presentase tutupan vegetasi masih tinggi.

Akan tetapi, wilayah yang berada pada dataran rendah pun dapat berkontribusi tinggi dalam Jasa lingkungan pengaturan iklim apabila presentase tutupan vegetasi tinggi.

Kelas tinggi mempunyai luasan tertinggi untuk jasa ekosistem pengaturan iklim 493.647,25 hektar. Kelas sedang menempati peringkat kedua terluas yaitu 258.822,57 hektar sedangkan kelas sangat tinggi seluas 47.799,00 hektar. Vegetasi di Halmahera Selatan yang masih mendominasi membuat kemampuan untuk pengaturan iklim masih baik. Vegetasi mempunyai kemampuan untuk menghasilkan oksigen sehingga menjaga suhu udara dan kualitas udara. Hal yang perlu menjadi perhatian terkait dengan pembukaan hutan untuk kegiatan Perkebunan, tambang atau yang lainnya. Hal tersebut dapat berdampak pada kemampuan untuk menjaga kondisi iklim karena berkurangnya tutupan vegetasi. Adapun luasan indeks ekosistem pengaturan iklim dapat dilihat pada Tabel 2.21.

Tabel 2.21
Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim

NO	KECAMATAN	LUAS INDEKS JASA EKOSISTEM PENGATURAN IKLIM (HA)				
		SANGAT RENDAH	RENDAH	SEDANG	TINGGI	SANGAT TINGGI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bacan	131,62	166,52	8931,60	17799,90	262,48
2	Bacan Barat	0,00	43,03	3419,16	12556,11	857,57
3	Bacan Utara	9,88	29,57	6706,63	16295,11	206,70
4	Bacan Selatan	94,39	116,38	6522,63	9206,82	0,00
5	Bacan Timur	45,16	85,85	11273,70	31850,43	612,41
6	Bacan Selatan	0,00	46,75	10624,05	16917,68	2648,65
7	Bacan Timur Tengah	0,00	100,56	8399,78	10927,34	5535,62
8	Gane Barat	4,80	153,62	7959,81	33897,26	0,00
9	Gane Barat Selatan	0,00	73,61	11345,56	10221,93	814,58
10	Gane Barat Utara	598,41	320,16	7451,85	48448,92	0,00
11	Gane Timur	10,50	638,48	14666,86	37948,31	185,15
12	Gane Timur Selatan	0,00	62,14	10932,14	18148,71	53,04
13	Gane Timur Tengah	0,00	88,39	10119,27	20589,17	0,00
14	Kasiruta Barat	0,00	106,44	8706,51	12259,22	53,04
15	Kasiruta Timur	0,00	35,91	1932,63	23133,19	1229,25
16	Kayoa	0,00	160,89	911,86	3985,57	1126,30
17	Kayoa Barat	0,00	27,30	1900,51	439,97	7,71
18	Kayoa Selatan	0,00	128,40	1148,53	301,34	371,10
19	Kayoa Utara	0,00	27,81	535,61	3277,32	566,03
20	Kep.Botanglomang	0,00	55,24	3675,52	804,19	529,33
21	Kep. Joronga	0,00	47,59	6879,40	2822,44	2542,40
22	Makia Barat	0,00	54,16	2268,28	930,36	0,00
23	Mandioli Selatan	0,00	74,91	9835,81	3177,86	714,20

NO	KECAMATAN	LUAS INDEKS JASA EKOSISTEM PENGATURAN IKLIM (HA)				
		SANGAT RENDAH	RENDAH	SEDANG	TINGGI	SANGAT TINGGI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
24	Mandioli Utara	0,00	37,34	4756,81	2577,45	516,03
25	Obi	51,04	2938,12	27225,73	60148,60	10297,60
26	Obi Barat	0,00	113,12	6289,09	2047,53	18,04
27	Obi Selatan	0,00	120,64	23784,95	56935,73	16823,30
28	Obi Timur	355,91	268,82	26594,38	32714,02	1277,12
29	Obi Utara	0,00	67,38	9517,12	2725,82	313,32
30	Pulau Makian	0,00	65,29	4756,81	559,01	0,00
	Halmahera Selatan	1.301,71	6.244,43	258.822,57	493.647,25	47.799,00

Sumber : Kajian D3TLH Tahun 2022

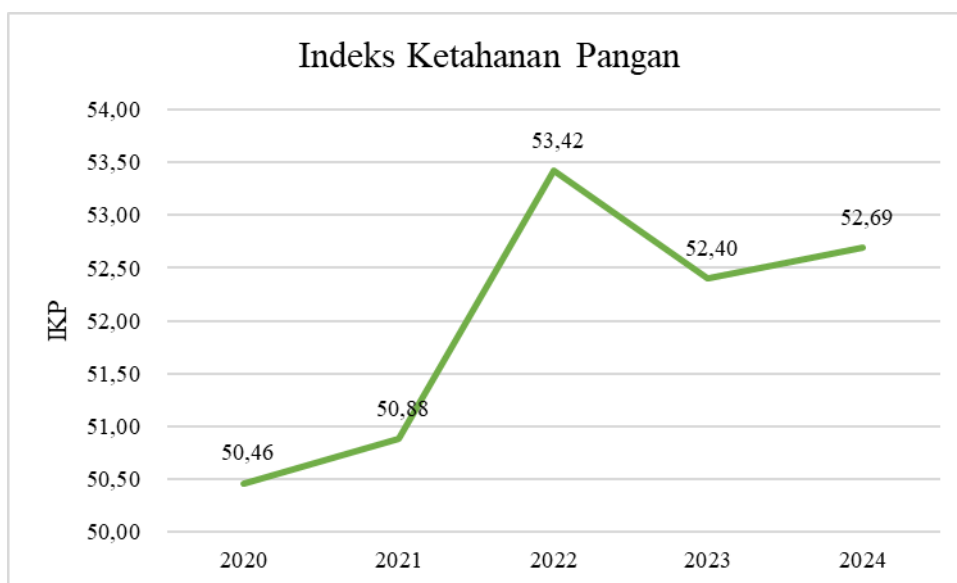
2.3 BERKETAHANAN ENERGI, AIR DAN KEMANDIRIAN PANGAN

2.3.1 Tingkat Ketahanan Dan Potensi Keanekaragaman Hayati

Indeks Ketahanan Pangan adalah ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan disuatu wilayah. Nilai Indeks Ketahanan Pangan dapat menunjukan capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah (Kabupaten/Kota/Provinsi) dan peringkat (Ranking) relatif antara satu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya.

Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Selatan memang menunjukkan kenaikan dari 50,46 (2020) ke 53,42 (2022) sebelum turun ke 52,40 (2023) dan kemudian naik ke 52,69 (2024), tetapi masih menghadapi tiga tantangan utama: ketahanan pangan yang belum stabil (rentan terhadap gangguan distribusi, produksi, bencana, dan fluktuasi harga global), efektivitas kebijakan yang tidak konsisten (program jangka pendek belum diimbangi strategi berkelanjutan), serta kesenjangan antar wilayah dan kelompok sosial (angka rata-rata tidak selalu mencerminkan kerentanan di daerah terpencil atau kelompok rentan). Untuk mempercepat dan menstabilkan pertumbuhan IKP di atas target CAGR 2 %-nya, fokus ke diversifikasi komoditas lokal, infrastruktur mikro (irigasi pertanian, jalan tani), dan digitalisasi rantai pasok menjadi urgensi. Secara rinci dapat dilihat dari grafik dibawah ini:

Gambar 2.6
Gambaran Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Selatan
Tahun 2020 - 2024



Sumber : Badan Pangan Nasional, Tahun 2024

Adapun permasalahan dalam ketahanan pangan di Kabupaten Halmahera Selatan yaitu:

1. Ketahanan Pangan Belum Stabil

Fluktuasi skor dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa sistem pangan masih rentan terhadap gangguan, baik dari faktor internal seperti distribusi dan produksi, maupun eksternal seperti bencana alam dan harga pangan global.

2. Efektivitas Kebijakan yang Tidak Konsisten

Adanya penurunan setelah peningkatan tajam mengindikasikan bahwa kebijakan dan program yang sebelumnya efektif belum berkelanjutan atau belum diimbangi dengan strategi jangka panjang.

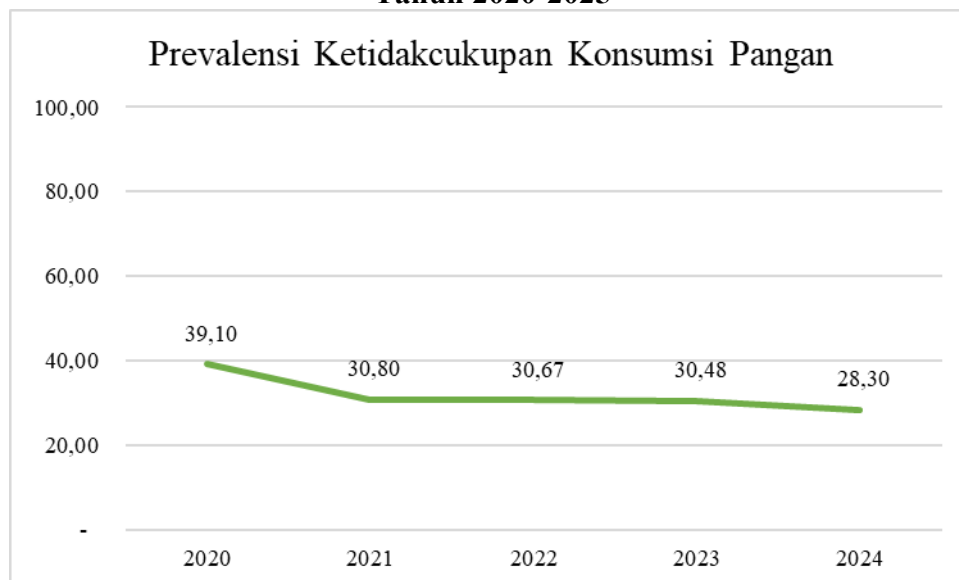
3. Kesenjangan Wilayah dan Kelompok Sosial

Angka rata-rata nasional belum tentu mencerminkan kondisi di seluruh daerah. Ketimpangan antar wilayah atau kelompok masyarakat tertentu bisa menjadi penyebab ketahanan pangan nasional tidak maksimal.

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau *Prevalence of Undernourishment* (PoU) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan

produktif. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan Kabupaten Halmahera Selatan dari tahun 2020 sampai 2024 mengalami penurunan. Dari tahun 2020 sebesar 39,10 skor sampai 2024 sebesar 28,30. Secara rinci dapat dijelaskan pada grafik 2.7 berikut.

Gambar 2.7
Prevalensi ketidakcukupan Konsumsi Pangan
Tahun 2020-2025



Sumber : Badan Pangan Nasional, Tahun 2025

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Kabupaten Halmahera Selatan berhasil ditekan dari 39,10% pada 2020 menjadi 28,30% pada 2024, menunjukkan kemajuan nyata dalam penguatan ketahanan pangan. Meskipun laju penurunan melambat pasca 2021, capaian ini tetap mencerminkan efektivitas kebijakan yang dijalankan di tengah tantangan seperti inflasi pangan, perubahan iklim, dan ketimpangan wilayah. Ke depan, penguatan strategi yang lebih adaptif dan inklusif diperlukan untuk memastikan pemerataan akses pangan yang berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat, walaupun begitu terdapat beberapa permasalahan yaitu :

1. Laju Penurunan yang Tidak Merata

Meskipun terjadi penurunan, laju penurunannya tidak konsisten dan cenderung lambat setelah tahun 2021. Ini mengindikasikan adanya hambatan dalam implementasi program pangan

2. Ketidakcukupan Masih Tinggi

Di tahun 2024, angka 28,30% masih tergolong tinggi. Artinya, hampir 3 dari 10 orang belum memiliki akses pangan yang cukup, dan ini menunjukkan masalah ketahanan pangan yang belum terselesaikan secara menyeluruh.

Di Faktor Eksternal terjadi Perlambatan penurunan disebabkan oleh faktor eksternal seperti inflasi pangan, perubahan iklim, pandemi, dan gangguan rantai pasok yang memengaruhi produksi dan distribusi makanan

Akses Rumah Tangga Terhadap Konsumsi Air Minum, Sejak tahun 2019, konsep yang digunakan mengacu pada metadata SDGs dimana rumah tangga dikatakan memiliki akses air minum layak (access to improved water) yaitu jika sumber air minum utama yang digunakan adalah leding, air terlindungi, dan air hujan. Air terlindungi mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung. Bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berupa air kemasan, maka rumah tangga dikategorikan memiliki akses air minum layak jika sumber air untuk mandi/cuci berasal dari leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan. Adapaun akses rumah tangga terhadap konsumsi air minum Kabupaten Halmahera Selatan bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.22

Akses Rumah Tangga Terhadap Konsumsi Air Minum Tahun 2020 - 2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	HASIL EVALUASI CAPAIAN PEMBANGUNAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Akses Rumah Tangga Terhadap Konsumsi Air Minum	SR	1.511	2.246	19.557	36.862	36.862
		%	42,37	43,29	43,75	43,29	44,01

Sumber Data : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025

2.3.2 Lingkungan Hidup Berkualitas

Indeks lingkungan Hidup Daerah, Sampai saat ini, isu lingkungan yang berkelanjutan semakin marak mewarnai pemberitaan media global, baik di negara maju maupun negara berkembang. Peningkatan kesadaran manusia terhadap pentingnya jasa

lingkungan dan kelestariannya, telah menjadikan lingkungan menjadi isu yang banyak dibicarakan.

Seperti diketahui bersama bahwa pembangunan ekonomi yang menjadi tujuan bagi sebagian besar negara di dunia, justru berbanding terbalik dengan kualitas lingkungan hidup yang ada. Pembangunan ekonomi yang dilakukan lebih sering berdampak negatif terhadap lingkungan hidup dibandingkan menguntungkan lingkungan hidup. Seiring berkembangnya pembangunan di bidang ekonomi, maka kebutuhan akan energi, lahan, dan sumber daya alam juga semakin meningkat, sehingga menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan hidup.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut. IKLH Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2021-2023 disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.23
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Halmahera Selatan
Tahun 2020 – 2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	-	74,63	75,43	81,13	81,09
	a. Indeks Kualitas Air (IKA)		-	46,67	46,67	62,00	61,67
	b. Indeks Kualitas Udara (IKU)		-	93,28	95,26	94,81	95,05
	c. Indeks Kualitas Lahan (IKL)		-	88,13	88,13	88,67	88,62

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat kita lihat pada Indikator “**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**” dengan indeks realisasi pada tahun 2024 mencapai **81,09** dari target yg ditetapkan pada tahun 2024 adalah sebesar **72.00** dan masuk kategori **baik** secara nasional peringkat 34 dari 514 kabupaten Kota dan secara provinsi peringkat 3 dari 10 kabupaten/Kota.

Dapat dilihat bahwa realisasi untuk indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) telah mencapai, bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan. Hasil tersebut didapat dari berbagai aspek indeks kualitas lingkungan hidup, diantaranya:

- Indeks Kualitas Udara (IKU)

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan dalam melakukan pemantauan kualitas udara sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh instansi pembina yaitu Kementerian Lingkungan Hidup. Dalam satu tahun dilakukan 2 (dua) kali kegiatan Pemantauan Kualitas Udara yang dimana sampel dari hasil pemantauan akan di uji oleh pihak laboratorium yang terakreditasi.

- Indeks Kualitas Air (IKA)

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan dalam melakukan Pengujian Kualitas Air sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Ada 14 titik Pengujian Kualitas Air yang dilakukan dan di uji oleh pihak Laboratorium yang terakreditasi.

- Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Dalam wilayah Kabupaten Halmahera Selatan tidak memiliki lahan gambut.

Walaupun IKLH Kabupaten Halmahera Selatan sudah masuk kategori baik bukan berarti tidak ada permasalahan. Adapun permasalahan dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan yaitu :

1. Perlu menyusun peraturan terkait Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup;
2. Perlu meningkatkan anggaran pengendalian pencemaran Lingkungan Hidup;
3. Perlu meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha dan/atau kegiatan serta usaha skala kecil;
4. Perlu meningkatkan jumlah titik pantau;
5. Meningkatkan jumlah IPAL domestik;
6. Memasukan data terkait pelibatan pemangku kepentingan;
7. Meningkatkan upaya publikasi;
8. Meningkatkan upaya inovasi.

Rumah tangga disebut mengakses sanitasi yang aman (safety managed) apabila fasilitas sanitasi digunakan hanya ART sendiri dengan jenis kloset berupa leher angsa, dan tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T). Rumah tangga dengan akses sanitasi aman Kabupaten Halmahera Selatan dapat dilihat pada tabel 2.24.

Tabel Tabel 2.24
Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman Kabupaten Halmahera Selatan

NO	INDIKATOR	SATUAN	HASIL EVALUASI CAPAIAN PEMBANGUNAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman	Unit	1.623	2.437	2.887	2.897	2.897
		%	51,08	52,18	53,88	55,04	56,54

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025

Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah adalah proporsi jumlah sampah yang diproses di fasilitas pengolahan sampah dibandingkan dengan total timbulan sampah, dalam satuan persen per periode tertentu. Untuk Kabupaten Halmahera Selatan belum ada Pengolahan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) karena keterbatasan sumber daya manusia dan peralatan pengolahan sampah. TPA Marabose belum memiliki secara standar belum memenuhi syarat namun tempat lokasi sangat terbatas untuk penampungan dan pengolahan sampah sehingga diperlukan pengembangan penanganan sampah yang berkelanjutan.

Proporsi Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah. Pada Indikator “**Proporsi Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah**”, Kabupaten Halmahera Selatan mendapat capaian Kinerja **52.45%** dari target yang ditetapkan adalah sebesar **70%**, atau kita konversikan ke dalam satuan Ton maka dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2024 yaitu sebesar **7,575 Ton**, dengan capaian realisasi sebesar **3,973 Ton**. Perhitungan didapat berdasarkan pendekatan perhitungan sesuai SNI, bahwa perorang menghasilkan sampah per/hari adalah sebesar 0.4 kg/hari untuk kategori kota kecil. Volume sampah yang di tangani oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmehara Selatan melayani di 3 (tiga) Kecamatan. Adapun proporsi rumah tanggan yang terlayani sampah dapat dilihat pada Tabel 2.25.

Tabel 2.25
Proporsi Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Proporsi Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%					
		Ton	-	-	-	3.645	3.973

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2025

Tidak tercapainya realisasi dari target yang telah ditetapkan disebabkan dari beberapa faktor seperti bertambahnya jumlah penduduk, belum adanya ketegasan dalam penegakan hukum lingkungan, minimnya ketersediaan teknologi pemrosesan sampah dan kurangnya armada pengangkut sampah seperti Dump Truck dan Truck Armroll dan belum optimalnya kelompok Masyarakat yang melakukan pengurangan sampah.

Adapun permasalahan sebagai berikut:

1. Semakin meningkatnya jumlah penduduk dan kepadatan penduduk;
2. Kurangnya kesadaran / partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di sumber sampah;
3. TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) di desa Marabose dengan kondisi saat ini yang overload;
4. Sarana dan prasarana yang tersedia hanya dapat menangani diwilayah tertentu;
5. Minimnya ketersediaan teknologi pemrosesan sampah;
6. Belum optimalnya kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan sampah;
7. Belum optimalnya kelembagaan daerah yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah;
8. Belum adanya ketegasan dalam penegakan hukum Lingkungan.
9. Belum adanya jembatan timbang pada TPA di Desa Marabose, sehingga perhitungan jumlah sampah yang terangkut masih melalui pendekatan yaitu dengan perhitungan jumlah sampah yang di hasilkan dari setiap orang yaitu sebesar 0,40 KG/Hari berdasarkan dengan SNI yang ditetapkan dalam kategori kota kecil.
10. Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim

Indeks risiko bencana, Indonesia memiliki risiko bencana yang tinggi sebagai konsekuensi letak negara ini dari sisi geologis dan geografis. Secara geologis, Indonesia

berada pada pertemuan empat lempeng utama yaitu Eurasia, Indo Australia, Filipina, dan Pasifik yang menjadikan Indonesia rawan bencana gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api. Di sisi lain, kondisi geografis Indonesia yang berada di daerah tropis dan pada pertemuan dua samudera dan dua benua membuat wilayah ini rawan akan bencana banjir, tanah longsor, banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi, dan kekeringan yang juga dapat memicu kebakaran hutan dan lahan.

Melihat kondisi tersebut, perlu dilakukan upaya pengelolaan risiko bencana untuk mengurangi kerugian akibat bencana seminimal mungkin. Upaya pengelolaan risiko bencana ini didasari dengan pemahaman risiko bencana yang ada yang diperoleh melalui suatu kajian risiko bencana. Informasi risiko bencana tersebut kemudian dijadikan salah satu dasar dalam perumusan berbagai upaya penanggulangan bencana.

Penentuan tingkat risiko bencana sudah dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sejak periode awal berdiri, yaitu pada tahun 2008. Pada tahun 2009, BNPB menerbitkan status kebencanaan melalui Indeks Kerawanan Bencana Indonesia yang diperbaharui dengan Indeks Rawan Bencana Indonesia pada tahun 2011. Sejak tahun 2013, BNPB menerbitkan Indeks Risiko Bencana Indonesia. Perubahan terminologi dari “rawan” menjadi “risiko” menunjukkan perubahan substansi dari penilaian dampak bencana (korban jiwa, kerusakan atau kerugian) menjadi penilaian potensi kehilangan atau kerugian (risiko).

Dalam indeks risiko, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana. Penilaian tingkat risiko berdasarkan potensi kerugian di atas memungkinkan adanya perhitungan capaian suatu upaya pengurangan risiko bencana di suatu daerah. Risiko bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen tersebut. Oleh karena itu, program atau kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan kerentanan atau peningkatan kapasitas dapat dilihat kontribusinya secara kuantitatif dalam bentuk penurunan indeks risiko bencana. Penilaian secara berkala terhadap indeks risiko ini dapat menjadi perangkat pemantauan dan evaluasi terhadap capaian program penanggulangan bencana pada periode tertentu.

Hasil publikasi BNPB menunjukkan bahwa dari 514 Kabupaten kabupaten/kota di Indonesia, terdapat 192 kabupaten/kota yang berada pada kelas indeks risiko tinggi dan 322 berada pada kelas indeks risiko sedang. Tiga kabupaten/kota dengan skor paling tinggi adalah Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara (skor 216,99), Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku (skor 216,64), Kota Gunung sitoli, Provinsi Sumatera Utara (skor 215,60). Sementara itu, tiga yang memiliki skor terendah (berada pada kelas sedang) adalah Kepulauan Seribu,

Provinsi DKI Jakarta (skor 51,53), Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah (skor 49,27), dan Mamberamo Tengah, Provinsi Papua (skor 44,80). Berikut nilai indeks resiko di Provinsi Maluku Utara sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.26.

Tabel 2.26
Nilai Indeks Risiko Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

NO	KABUPATEN/KOTA	2020	2021	2022	2023	2024	KELAS RISIKO 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Halmahera Selatan	213.82	216.99	216.99	214.20	193.60	TINGGI
2	Halmahera Timur	173.20	173.20	173.20	173.20	173.20	TINGGI
3	Tidore Kepulauan	159.90	161.20	161.25	161.25	161.25	TINGGI
4	Kepulauan Sula	152.37	157.17	157.17	154.03	154.03	TINGGI
5	Halmahera Utara	162.74	155.67	160.12	160.12	160.12	TINGGI
6	Halmahera Barat	143.18	143.55	143.55	143.55	143.55	SEDANG
7	Pulau Morotai	118.44	120.36	123.02	123.02	123.02	SEDANG
8	Ternate	104.49	101.89	103.22	100.90	91.97	SEDANG
9	Halmahera Tengah	75.20	75.20	75.20	75.20	71.64	SEDANG

Sumber: Inarisk.bnppb.go.id/irbi, Tahun 2024

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi ketahanan suatu daerah terhadap berbagai tantangan dan ancaman yang timbul, termasuk bencana alam, perubahan iklim, kerawanan sosial, ekonomi, dan faktor lainnya. IKD bertujuan untuk membantu pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengidentifikasi area yang mungkin memerlukan perhatian khusus serta sumber daya untuk meningkatkan ketahanan dan kesiapsiagaan daerah. Pada tahun 2024, IKD Kabupaten Halmahera Selatan tercatat sebesar 0,50. Adapun lebih jelas Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan bisa dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.27
Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan

NO	INDIKATOR	SATUAN	HASIL EVALUASI CAPAIAN PEMBANGUNAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Indeks Ketahanan Daerah	Angka			1,05	0,35	0,50

Sumber : BPBD Provinsi Maluku Utara Tahun 2025.

2.4 DEMOGRAFI

2.4.1 Laju Pertumbuhan Penduduk, Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Indikator dari demografis ada *ukuran, distribusi dan struktur penduduk*. Penduduk merupakan sumber daya yang potensial bagi proses pembangunan daerah jika dimanfaatkan secara optimal bagi pelaksanaan pembangunan, namun dapat pula menjadi beban jika tidak tertangani secara serius sehingga berimplikasi pada munculnya berbagai masalah sosial seiring dengan berkembangnya penduduk seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan sosial dan sebagainya. Hal ini dikarenakan dalam proses pembangunan, penduduk berada pada dua sisi sebagai subjek atau pelaku pembangunan, sekaligus menjadi objek atau sasaran pembangunan itu sendiri.

Penduduk merupakan salah satu faktor yang dominan dalam proses pembangunan, karena dengan kemampuannya mereka dapat mengelola sumber daya alam sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup bagi diri dan keluarganya secara berkelanjutan. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi tetapi dapat pula menjadi beban dalam proses pembangunan jika berkualitas rendah. Oleh sebab itu, dalam menangani masalah kependudukan untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional, pemerintah tidak saja mengarahkan pada upaya pengendalian jumlah penduduk, tetapi juga minitik beratkan pada peningkatan kualitas SDM-nya.

Sesuai data BPS Halmahera Selatan bahwa Jumlah Penduduk Halmahera Selatan tahun 2024 sebesar 258.564 jiwa meningkat sebesar 3.180 jiwa dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar 255.384 jiwa. Salah satu dampak dengan bertambahnya jumlah penduduk adalah akan memperluas areal permukiman dan mengurangi areal lahan produktif. Berikut perkembangan jumlah penduduk di tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.28.

Tabel 2.28
Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH		PENDUDUK		
		KM	%	JUMLAH	%	KEPADATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Obi Selatan	1.083,48	12,34	15.815	6,12	14,60
2	Obi	1.073,15	12,22	19.047	7,37	17,75
3	Obi Barat	94,53	1,08	5.83	2,25	61,67
4	Obi Timur	636,23	7,25	4.048	1,57	6,36

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH		PENDUDUK		
		KM	%	JUMLAH	%	KEPADATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	Obi Utara	160,69	1,83	10.27	3,97	63,91
6	Bacan	304,69	23,47	29.227	11,30	95,92
7	Mandioli Selatan	138,81	1,58	7.186	2,78	51,77
8	Mandioli Utara	96,79	1,1	3.726	1,44	38,50
9	Bacan Selatan	169,21	1,93	21.971	8,50	129,84
10	Kep.Botanglomang	55,81	0,64	7.808	3,02	139,90
11	Bacan Timur	463,5	5,28	13.811	5,34	29,80
12	Bacan Timur Selatan	321,13	3,66	8.459	3,27	26,34
13	Bacan Timur Tengah	276,28	3,15	6.579	2,54	23,81
14	Bacan Barat	180,78	2,06	4.602	1,78	25,46
15	Kasiruta Barat	272,98	3,11	6.034	2,33	22,10
16	Kasiruta Timur	247,93	2,82	4.99	1,93	20,13
17	Bacan Barat Utara	264,94	3,02	5.167	2,00	19,50
18	Kayoa	87,62	1	8.614	3,33	98,31
19	Kayoa Barat	27,07	0,31	4.042	1,56	149,32
20	Kayoa Selatan	26,06	0,3	6.559	2,54	251,69
21	Kayoa Utara	39,22	0,45	2.781	1,08	70,91
22	Pulau Makian	55,5	0,63	8.774	3,39	158,09
23	Makian Barat	35,54	0,4	3.549	1,37	99,86
34	Gane Barat	493,67	5,62	9.719	3,76	19,69
35	Gane Barat Selatan	252,55	2,88	7.087	2,74	28,06
36	Gane Barat Utara	501,69	571	7.289	2,82	14,53
27	Kep. Joronga	148,93	1,7	7.146	2,76	47,98
28	Gane Timur	656,72	7,48	9.678	3,74	14,74
29	Gane Timur Tengah	309,67	3,53	4.719	1,83	15,24
30	Gane Timur Selatan	304,15	3,45	4.037	1,56	13,27
Halmahera Selatan		8.779,32	100	258.564	100	29,45

Sumber: BPS Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2025

Penyebaran penduduk di Kabupaten Halmahera Selatan tidak merata. Hal ini jika dicermati tabel di atas terlihat dari persentase jumlah penduduk di masing-masing kecamatan pada tahun 2024, Kecamatan Bacan memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu 29.227 jiwa atau 11,30% sedangkan persentase jumlah penduduk terkecil berada pada kecamatan Kayoa Utara sebanyak 2.781 jiwa atau 1,08%. Hal ini juga dapat dilihat dari rasio jumlah penduduk terhadap luas wilayah yang diukur sebagai tingkat kepadatan penduduk, maka tingkat kepadatan penduduk Halmahera Selatan rata-rata 29,45 jiwa per kilometer persegi.

Sedangkan tingkat kepadatan penduduk perkecamatan tertinggi terdapat di Kecamatan Kayoa Selatan sebanyak 251,69 jiwa per kilometer persegi dan terendah di Kecamatan Obi Timur dengan kepadatan 6,36 jiwa per kilometer persegi, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.29.

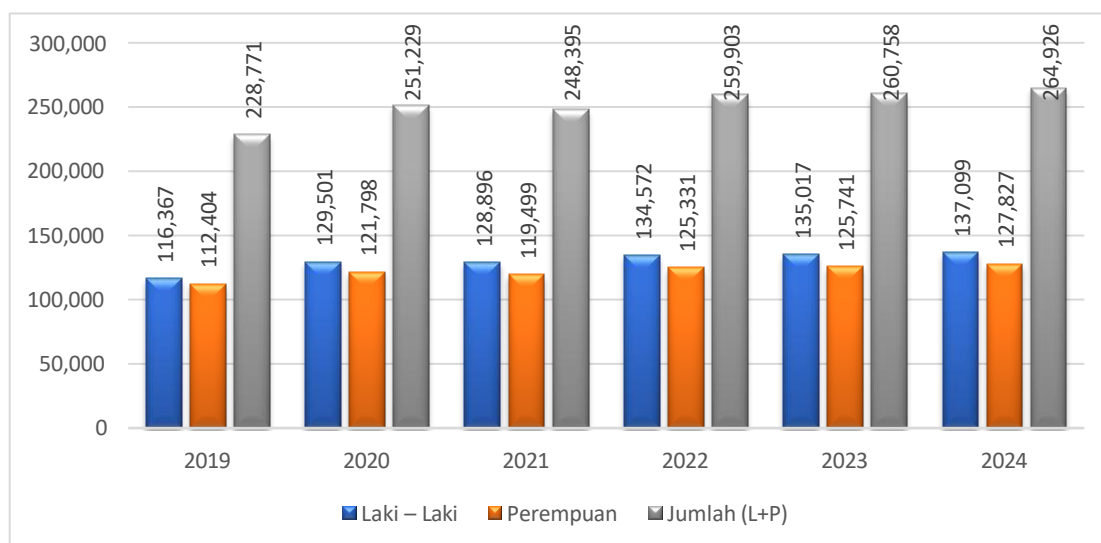
Tabel 2.29
Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Halmahera Selatan
Tahun 2020 - Tahun 2024

JUMLAH PENDUDUK	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Laki – Laki	129.501	128.896	134.572	135.017	137.099
Perempuan	121.798	119.499	125.331	125.741	127.827
Jumlah (L+P)	251.229	248.395	259.903	260.758	264.926
LPP Laki-Laki	11,29	-0,47	4,40	0,33	1,54
LPP Perempuan	8,36	-1,89	4,88	0,33	1,66
LPP (L+P)	9,82	-1,13	4,63	0,33	1,60

Sumber: BPS Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2025

Pada Tabel 2.24 di atas dapat dicermati bahwa terdapat loncatan pada tahun 2024 sebesar 1,60 persen. pertambahan penduduk yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2020, dimana jika dibandingkan dengan tahun 2019 pertumbuhan sebesar 9,82 persen namun pada tahun 2020 terjadi penurunan jumlah penduduk sebesar 1,13% dari Tahun 2021. Hal ini dikarenakan terjadinya bencana non alam atau pandemic karena *virus covid-19* sehingga banyak warga luar daerah yang bekerja terutama bekerja di sektor tambang tidak dapat kembali ke Halmahera Selatan dikarenakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang terjadi di seluruh daerah di Indonesia terutama di Kabupaten Halmahera Selatan. Hal tersebut dapat dilihat secara jelas pada Grafik 2.8 dibawah tentang perkembangan jumlah penduduk dari tahun 2019-2024.

Grafik 2.1
Perkembangan Jumlah Penduduk Halmahera Selatan Tahun 2019 -2024



Sumber: BPS Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2025

Dalam mengendalikan pertambahan penduduk pemerintah menggulirkan Program Keluarga Berencana (KB) dengan tujuan untuk mengendalikan tingkat kelahiran. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dipengaruhi oleh tiga faktor penting, yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Fertilitas merupakan komponen yang paling berpengaruh, oleh sebab itu pemerintah berusaha keras untuk menurunkan tingkat fertilitas ini dari tahun ke tahun. Sementara pertambahan penduduk akibat migrasi ke Kabupaten Halmahera Selatan dalam 5 (lima) tahun terakhir ini cukup tinggi karena terbukanya lapangan pekerjaan pada sektor pertambangan, perkebunan dan perdagangan.

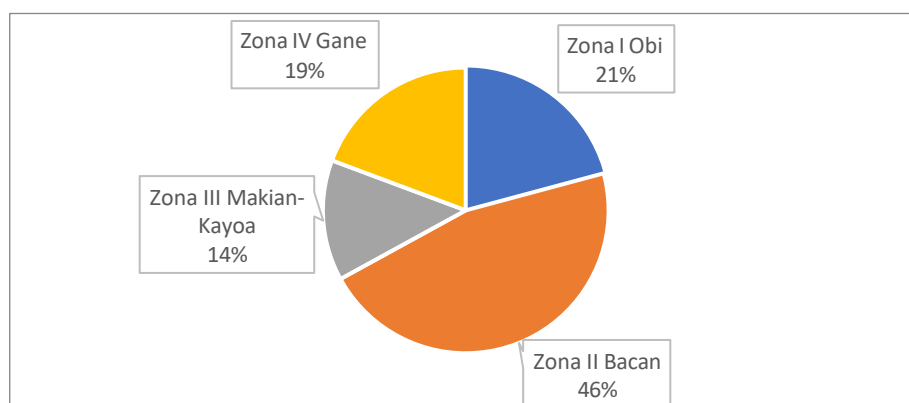
Tabel 2.30
Jumlah Penduduk Kabupaten Halmahera Selatan
berdasarkan Empat Zona Pengembangan Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024

NO	ZONA PENGEMBANGAN	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)							
		2021	%	2022	%	2023	%	2024	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Zona I Obi	50.76	20,44	52.59	20,76	53.18	20,82	55.01	21,28
2	Zona II Bacan	111.5	44,87	115.6	45,64	118	46,2	119.6	46,24
3	Zona III Makian-Kayoa	37.11	14,94	35.7	14,06	34.9	13,67	34.32	13,27
4	Zona IV Gane	49.07	19,75	49.43	19,51	49.32	19,31	49.68	19,21
	Jumlah	248.4	100	253.3	100	255.3	100	236.4	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 2.28 diatas menunjukkan sebaran jumlah penduduk menurut zona pengembangan wilayah Tahun 2024, maka jumlah penduduk paling tinggi berada di zona pengembangan Bacan sebesar 119.560 jiwa (46,24%), menyusul zona pengembangan Obi sebesar 55.010 jiwa (21,28%), zona pengembangan Gane sebesar 49.675 jiwa (19,21%) dan Makian Kayoa 34.319 jiwa (13.27%). Secara Grafik pemetaan zona pengembangan wilayah dapat dilihat pada Gambar 2.8.

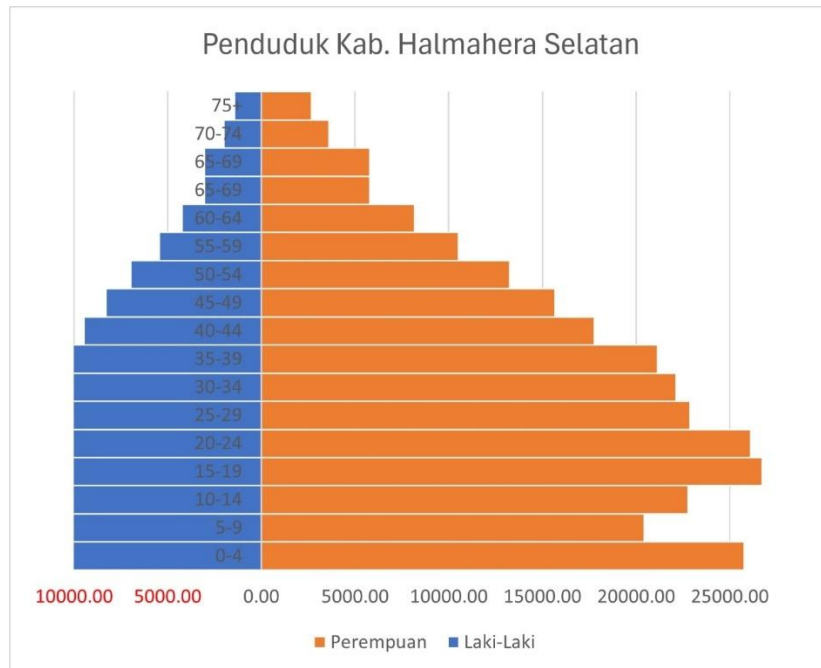
Gambar 2.8
Sebaran Jumlah Penduduk Berdasarkan Zona Pengembangan Wilayah Tahun 2024



Sumber: BPS Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2025

Secara struktur penduduk Kabupaten Halmahera Selatan yang digambrkan melalui piramida penduduk bahwa grafik penduduk Kabupaten Halmahera Selatan termasuk dalam piramida ekspansif (Broad-Based) dimana dasar piramida yang lebar menggambarkan banyak penduduk usia muda, bagian atas runcing dimana menggambarkan sedikit penduduk usia tua serta tingkat kelahiran tinggi ddan tingkat kematian masih cukup tinggi.

Gambar
Piramida Penduduk Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024



Sumber: Halmahera Selatan dalam Angka Tahun 2025

2.4.2 Proyeksi Penduduk

Proyeksi penduduk sebagai bagian analisis sosial kependudukan sangat penting dilakukan oleh tiap-tiap kabupaten untuk memudahkan dalam proses penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi. Menurut Badan Pusat Statistik, proyeksi penduduk adalah perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen komponen laju pertumbuhan penduduk yakni kelahiran, kematian, dan perpindahan (migrasi). Ketiga komponen tersebut akan menentukan jumlah dan struktur umur penduduk di masa depan. Untuk menentukan masing-masing asumsi diperlukan data yang menggambarkan tren di masa lampau hingga saat ini, faktor-faktor yang mempengaruhi tiap-tiap komponen, dan hubungan antara satu komponen dengan yang lain, termasuk target yang diharapkan dicapai pada masa mendatang. Hasil proyeksi penduduk Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2025-2045 dapat dilihat pada Tabel 2.29 berikut:

Tabel 2.31
Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Halmahera Selatan
Tahun 2025 – 2045

PROYEKSI PENDUDUK (ORANG)				
2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
268,010	288,350	306,530	325,290	344,050

Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 2.29 di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil proyeksi penduduk untuk 20 tahun mendatang di Kabupaten Halmahera Selatan terus mengalami peningkatan. Dimana, pada tahun 2023 jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Selatan sebanyak 253.331 jiwa, kemudian setelah dilakukan proyeksi diperoleh jumlah penduduk pada tahun 2045 sebanyak 344.050 jiwa. Rata-rata tingkat pertumbuhan penduduk Kabupaten Halmahera Selatan sebanyak 2,69% per enam tahun. Pada tahun 2016 – 2021. Jumlah penduduk terkecil berada di Kecamatan Kayoa Utara dengan jumlah penduduk sebanyak 2.906, sedangkan jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Bacan yakni 27.683 jiwa.

Memproyeksikan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2045 sangat penting dilakukan untuk dapat melihat komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin yang akan dapat dikonversi menjadi bagaimana peran masing-masing pihak dalam pembangunan. Pada tahun 2023 Komposisi Penduduk Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan jenis kelamin adalah Laki-laki sebanyak 131.386 jiwa (51%) sedangkan jumlah Perempuan sebanyak 121.945 jiwa (49%) dan diperkirakan pada tahun 2045 komposisinya menjadi Laki-laki sebanyak 179.100 jiwa (52%) sedangkan jumlah Perempuan sebanyak 164.950 jiwa (48%), sebagaimana tertera dalam Tabel 2.32.

Tabel 2.32
Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2025 – 2029

PENDUDUK TAHUN 2024		PROYEKSI PENDUDUK (ORANG)				
JENIS KELAMIN	(ORANG)	2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Laki – Laki	137.099	139,160	142.470	145.780	148.050	149,090
Perempuan	127.827	129,850	272.108	272.104	281.283	139,260

Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2025

Selain komposisi jenis kelamin, tidak kalah penting untuk memproyeksikan kelompok umur produktif dan kelompok umur yang tidak produktif dan mengukur tingkat ketergantungan yang dapat menggambarkan beban yang akan diterima penduduk usia produktif dalam menanggung beban penduduk usia muda dan penduduk usia lanjut, sebagaimana tergambar dalam tabel 2.33 sebagai berikut.

Tabel 2.33
Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur
Kabupaten Halmahera Selatan

PENDUDUK TAHUN 2024		PROYEKSI PENDUDUK (ORANG)				
KELOMPOK UMUR	ORANG	2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0-14 Tahun	68,496	69,590	69,610	69,720	69,840	70,040
15-64 Tahun	185.086	186,530	187,930	190,210	195,201	197,020
> 65 Tahun	11,344	12,890	14,710	15,210	16,390	17,290
Angka Ketergantungan	43.88	44.22	44.50	45.30	45.90	46.35

Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 2.31 angka beban ketergantungan di Kabupaten Halmahera Selatan pada periode 2025-2029 mengalami kenaikan angka beban ketergantungan yang landai, dari tahun 2025 dengan nilai sebesar 44,22 menjadi 46.35 di tahun 2029. Angka tersebut dapat diartikan bahwa pada tahun 2025, angka beban ketergantungan adalah sebesar 44,22 berarti bahwa setiap 100 penduduk usia produktif secara ekonomi (15-64 tahun) harus menanggung beban sekitar 40-45 penduduk yang tidak produktif secara ekonomi (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas). Kemudian di tahun 2029, angka ketergantungan menjadi 46.35 yang artinya setiap 100 penduduk usia produktif secara ekonomi harus menanggung beban sekitar 55-56 penduduk yang tidak produktif secara ekonomi.

Kepadatan penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk di suatu wilayah dibagi dengan luasan wilayah tersebut, dihitung dengan satuan Ha. Sedangkan, persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara, apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak. Berdasarkan SNI 03-1733-2004, kepadatan penduduk diklasifikasikan menjadi 4 tingkatan, yakni:

- a. Rendah : <150 jiwa/Ha
- b. Sedang : 151 – 200 jiwa/Ha
- c. Tinggi : 201 – 400 jiwa/Ha
- d. Sangat Tinggi : > 400 jiwa/Ha

Berdasarkan hasil analisis proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2022- 2047 Kabupaten Halmahera Selatan, jumlah penduduk pada tiap kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, sehingga untuk kepadatan penduduk juga mengalami peningkatan setiap tahunnya.

2.4.3 Proyeksi Bonus Demografi

Bonus demografi sebagai bagian dari tahapan transisi demografi merupakan jendela peluang bagi suatu negara untuk memajukan pembangunan ekonomi dan sosialnya. Pada tahapan awal transisi demografi, suatu wilayah akan berada pada kondisi tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi dengan struktur umur yang relatif sama. Berjalannya pembangunan dengan adanya perbaikan kesehatan, sanitasi, akses terhadap pendidikan yang lebih baik, dan dilakukannya penanganan tingkat kelahiran mengakibatkan tingkat kelahiran mulai turun dengan tingkat kematian yang tetap rendah. Hal ini menyebabkan persentase penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibandingkan dengan persentase penduduk usia nonproduktif dan menjadi fase awal dari bonus demografi. Peningkatan jumlah penduduk usia produktif menjadi modal dan sumber daya yang penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial suatu negara. Cruz dan Ahmed memperkirakan setiap perubahan 1 persen pada populasi usia kerja suatu negara dapat meningkatkan pertumbuhan PDB per kapita sebesar 1,5 persen dan 0,8 persen tabungan bagian dari PDB, yang berakibat pada pengurangan jumlah kemiskinan rata-rata sebesar 0,76 persen.

Bonus demografi sebagai bagian dari transisi demografi menurut World Bank dikelompokkan ke dalam tipologi bonus demografi diantaranya pasca bonus demografi, akhir bonus demografi, awal bonus demografi, dan pra bonus demografi. Berdasarkan tipologi bonus demografi yang dibangun oleh world bank, Kabupaten Halmahera Selatan menjadi salah satu daerah yang berada pada tahap awal bonus demografi. Kondisi ini diakibatkan karena persentase pertumbuhan penduduk usia produktif berarah positif pada periode 2020- 2035 dengan TFR Indonesia yang kurang dari empat pada tahun 2015.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa komposisi penduduk di Kabupaten Halmahera Selatan menunjukkan terjadi peningkatan yang cenderung lambat pada penduduk tidak produktif (usia muda dan tua). Proporsi penduduk muda pada periode 2018-2022 berkisar

RPJMD KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 2025-2029

32,49 sampai dengan 22,33 persen dan penduduk usia tua berkisar 4,62 persen sampai dengan 4,03 persen. Kedua nilai tersebut dalam lima tahun terakhir mengalami penurunan.

Persentase penduduk usia muda dan usia tua Kabupaten Halmahera Selatan dalam lima tahun terakhir mengalami penurunan, kemudian penduduk usia produktif dalam lima tahun terakhir mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2018 sebesar 52,88 persen menjadi 69,64 persen pada tahun 2022. Hal tersebut tentu berdampak kepada angka beban ketergantungan yang pada tahun 2018 sebesar 59,02 menjadi 43,60 pada tahun 2022.

Kabupaten Halmahera Selatan telah mengalami bonus demografi, dimana tingkat kelahiran mengalami penurunan sehingga mengakibatkan persentase penduduk usia 0-14 tahun dan rasio ketergantungan menurun. Hal ini dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan dan stakeholder untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan bonus demografi untuk meningkatkan pencapaian tujuan-tujuan Pembangunan daerah. Jumlah penduduk usia produktif yang besar dan berkualitas dapat berperan sebagai sumber tenaga kerja dan pelaku ekonomi yang dapat mempercepat pencapaian tujuan-tujuan pembangunan. Tabel 2.29 berikut ini menyajikan hasil proyeksi penduduk Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2020–2035 berdasarkan enam parameter, yaitu: jenis kelamin; *sex ratio*; komposisi umur; tingkat ketergantungan (*dependency ratio*); tingkat kelahiran/*total fertility rate* (TFR); tingkat kematian/*total mortality rate* (TFR). Selanjutnya, parameter hasil proyeksi penduduk Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020– 2035 dapat dilihat pada Tabel 2.35.

Tabel 2.35
Parameter Hasil Proyeksi Penduduk Kabupaten Halmahera Selatan
Tahun 2020–2035

Parameter	2020	2025	2030	2035
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PENDUDUK				
Laki-Laki (000)	128,63	139,16	149,09	159,13
Perempuan (000)	119,22	129,85	139,26	147,40
Total (000)	247,86	269,01	288,35	306,53
<i>Sex Ratio</i> (%)	107,89	107,17	107,06	107,96
Komposisi Umur (%)				
0–14	27,02	25,88	25,68	26,22
15–64	69,21	69,34	68,33	66,53
65+	3,77	4,78	6,00	7,25
<i>Dependency Ratio</i> (%)	44,49	44,21	46,36	50,30
FERTILITAS				
<i>Total Fertility Rate</i> (TFR)	2,86	2,62	2,46	2,38
MORTALITAS				
<i>Infant Mortality Rate</i> (IMR)	34,65	34,02	29,77	25,90

Sumber: BPS Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2025

Bonus demografi tidak diperoleh otomatis direalisasikan tanpa adanya dukungan kelembagaan. Oleh karena itu, bonus demografi merupakan kesempatan besar bagi Kabupaten Halmahera Selatan dengan didukung kebijakan pembangunan SDM pada sektor kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan.

Hasil proyeksi penduduk sebagaimana disajikan pada Tabel 2.33 sebelumnya menunjukkan bahwa ada masa lebih dari 11 tahun sejak tahun 2024 bagi Kabupaten Halmahera Selatan untuk memanfaatkan bonus demografi sampai tahun 2035 dengan kebijakan yang berlandaskan pada kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM menjadi faktor penentu keberhasilan dari pemanfaatan bonus demografi. Dalam hal tersebut penduduk usia produktif di Kabupaten Halmahera Selatan memiliki kontribusi besar dalam penyediaan sumber tenaga kerja yang dapat memicu pertumbuhan ekonomi dengan dibekali pendidikan yang berkualitas, kesehatan, keterampilan, kompetensi, serta daya saing di era globalisasi.

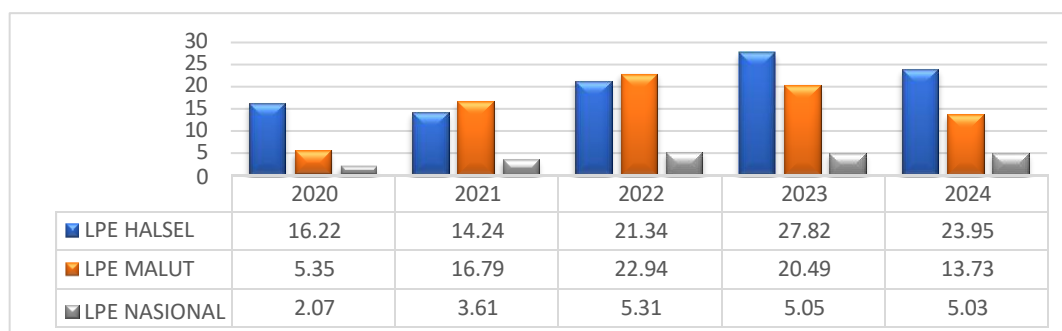
2.5 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Aspek Kesejahteraan Masyarakat mencakup berbagai dimensi yang berperan dalam menciptakan kualitas hidup yang baik bagi seluruh lapisan masyarakat, yang meliputi aspek ekonomi, Aspek Ekonomi, Aspek kesehatan, Aspek Pendidikan, Aspek Sosial dan Budaya, Aspek Keamanan dan Perlindungan, Aspek Perumahan dan Infrastruktur, Aspek Lingkungan Hidup.

2.5.1 Kesejahteraan ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Halmahera Selatan pada tahun 2024 sebesar 23,95 persen yaitu mengalami penurunan jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun sebelumnya di tahun 2023 sebesar 27,82 persen. Selama lima tahun terakhir (2020-2024) perekonomian Kabupaten Halmahera Selatan tumbuh pada kisaran 12 sampai 27 persen. Nilai pertumbuhan ini tergolong tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten kota lainnya di Indonesia, sebagaimana dapat dilihat pada Grafik 2.9.

Grafik 2.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Halmahera Selatan dan
Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024



Sumber: Kabupaten Halmahera Selatan Dalam Angka Tahun 2025.

Laju Pertumbuhan Ekonomi pada umumnya serta cenderung meningkatkan dan mendorong PDRB Per Kapita karena keduanya merupakan indikator penting dalam menilai kinerja ekonomi Kabupaten Halmahera Selatan.

Angka kemiskinan adalah persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu situasi dimana seseorang tidak dapat/mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum yang diperlukan untuk hidup layak dan bermartabat. Selama ini BPS menggunakan pendekatan pengeluaran untuk menghitung kemiskinan di Indonesia. Pendekatan ini menggunakan konsep kemiskinan yang dikaitkan dengan kebutuhan hidup minimal yang layak untuk seseorang atau rumah tangga. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar untuk pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Kemiskinan merupakan masalah nasional yang harus segera ditanggulangi. Penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk mengurangi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Perkembangan kemiskinan di Kabupaten Halmahera Selatan selama lima tahun terakhir disajikan pada Tabel 2.32. Dalam analisis kemiskinan dikenal beberapa indikator penting, diantaranya Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), dan Garis Kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan menjelaskan rata-rata jarak taraf hidup penduduk miskin dengan garis kemiskinan yang dinyatakan sebagai suatu rasio dari kemiskinan. Namun demikian, indeks ini tidak sensitif terhadap distribusi pendapatan di antara penduduk miskin sehingga dibutuhkan indikator lain untuk mengukurnya, yaitu Indeks Keparahan Kemiskinan.

Sedangkan garis kemiskinan menjelaskan batas rata-rata pengeluaran makanan dan non makanan per kapita yang selanjutnya digunakan untuk mengelompokkan penduduk miskin. Penduduk miskin akan memiliki pengeluaran per kapita makanan dan non makanan yang lebih kecil dari garis kemiskinan. Berikut penyajian data perkembangan kemiskinan di Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana dilihat pada Tabel 2.36

Tabel 2.36
Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Halmahera Selatan
Tahun 2020-2024

Indikator Kemiskinan	2020	2021	2022	2023	2024
Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	12,41	12,24	11,89	13,65	13,69
Penduduk Miskin (%)	5,21	5,19	4,99	5,68	5,63
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,41	0,61	0,77	0,88	0,53
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,08	0,12	0,17	0,17	0,08
Garis Kemiskinan	324.767	343.323	362.100	400.768	449.334

Sumber: BPS Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2025

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Halmahera Selatan cenderung fluktuatif selama lima tahun terakhir. Pada 2020, penduduk miskin di Kabupaten Halmahera Selatan sekitar 12,41 ribu jiwa (5,21 persen), kemudian turun menjadi 11,89 ribu jiwa (4,99 persen) pada 2022 dan mengalami kenaikan menjadi 13,69 ribu jiwa (5,63 persen) pada 2024.

Penanganan masalah kemiskinan tidak hanya dengan mengurangi jumlah dan persentase penduduk miskin, namun juga perlu memperhatikan jarak terhadap batas miskin (tingkat kedalaman kemiskinan) dan ketimpangan antar penduduk miskin (tingkat keparahan kemiskinan). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan perubahan yang cenderung meningkat selama periode 2020-2024. Pada 2021, Indeks Kedalamam Kemiskinan di Kabupaten Halmahera Selatan sebesar 0,61, naik menjadi 0,77 pada 2022 dan kembali mengalami kenaikan menjadi 0,88 pada 2023. Namun pada

Tahun 2024 mengalami penurunan yaitu 0,35 persen, hal ini mengindikasikan bahwa selama 2020-2024, rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung menjauhi garis kemiskinan. Selanjutnya, Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Halmahera Selatan pada 2021 sebesar 0,12, mengalami kenaikan menjadi 0,17 di tahun 2022, dan masih bernilai sama sebesar 0,17 di tahun 2023, tetapi pada tahun 2024 mengalami penurunan yaitu 0,08 persen.

2.5.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu mencerminkan kesejahteraan masyarakat yang baik. Salah satu indikator lain yang berkaitan dengan PDRB dan dapat digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat adalah PDRB Per Kapita. PDRB Per Kapita merupakan pendapatan rata-rata per orang yang diperoleh dari pembagian antara PDRB dan jumlah penduduk di suatu wilayah pada tahun tertentu. Indikator ini penting karena menggambarkan perkembangan ekonomi suatu daerah serta menunjukkan kinerja dan hasil pembangunan.

Nilai PDRB Per Kapita Kabupaten Halmahera Selatan selama periode 2020-2024 menunjukkan tren yang cenderung meningkat, dimulai dari Rp36,44 juta pada tahun 2020 dan terus meningkat setiap tahunnya hingga mencapai Rp67,98 juta pada tahun 2023, yang dapat dilihat pada Tabel 2.37.

Tabel 2. 37
Nilai PDRB Per Kapita Kabupaten Halmahera Selatan
Tahun 2020 – 2024

INDIKATOR	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB Per Kapita	Rp Juta	5.723,96	6.538,17	7.936,06	10.144,13	12.573,63

Sumber : Halmahera Selatan Dalam Angka Tahun 2025

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) sektor perikanan, pertanian, dan kehutanan di Kabupaten Halmahera Selatan menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif dan signifikan. Sektor ini merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi di daerah ini, dengan nilai yang menguntungkan. PDRB per kapita di Halmahera Selatan juga mengalami peningkatan, menunjukkan peningkatan kesejahteraan Masyarakat.

Tabel 2.38
PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) sektor perikanan, pertanian, dan kehutanan
di Kabupaten Halmahera Selatan

NO	INDIKATOR	SATUAN	HASIL EVALUASI CAPAIAN PEMBANGUNAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	%	20,10	16,66	14,11	11,96	10,90

Sumber : Badan Pusat Statistik Halmahera Selatan Tahun 2025

PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Sektor ini merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi di Halmahera Selatan, dengan nilai yang menguntungkan. Peningkatan PDRB di sektor ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif di daerah tersebut. PDRB Kabupaten Halmahera Selatan menunjukkan rata-rata pertumbuhan positif. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa ekonomi daerah berjalan sesuai rencana.

Peningkatan PDRB di suatu daerah berhubungan erat dengan pengurangan kemiskinan karena sangat erat keterkaitannya dengan pendapatan rata-rata masyarakat. Namun kondisi Kabupaten Halmahera Selatan saat ini walaupun laju pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Per Kapita yang cenderung meningkat namun kemiskinan di Kabupaten Halmahera Selatan meningkat karena peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat yang tidak merata (Peningkatan pendapatan masyarakat di sektor pertambangan mengalami peningkatan namun golongan pendapatan masyarakat Sektor Perikanan, Pertanian dan perkebunan mengalami penurunan).

PDB Per Kapita Juga berkaitan erat dengan rasio gini, walaupun PDRB perkapita cenderung naik dan rasio gini mengalami penurunan, tetapi penurunan itu hanya sedikit tidak sebanding dengan dengan peningkatan PDRB Perkapita. Ini menunjukkan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masih kurang signifikan di Kabupaten Halmahera Selatan karena PDRB per kapita yang tinggi tidak selalu berarti kesejahteraan merata.

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang

bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.

Pengangguran yaitu:

1. Penduduk yang aktif mencari pekerjaan;
2. Penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru;
3. Penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta;
4. Kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (*supply*) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi. Perbedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan antarkelompok tersebut (Bappenas, 2024). Tabel 2.33 berikut ini menunjukkan bahwa TPT Kabupaten Halmahera Selatan cenderung berfluktuasi dalam periode 2018-2024, namun masih lebih kecil dari TPT Provinsi Maluku Utara. Kabupaten Halmahera Selatan memiliki TPT terendah di Provinsi Maluku Utara dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yaitu tahun 2021, 2023, dan 2024.

Tabel 2. 39
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

NO	WILAYAH	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) KABUPATEN/KOTA (PERSEN)				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Halmahera Barat	3,26	3,26	3,45	3,77	3,53
2	Halmahera Tengah	6,74	4,23	3,06	3,95	3,43
3	Kepulauan Sula	4,90	2,78	2,10	2,67	2,57
4	Halmahera Selatan	4,40	1,94	1,51	2,44	2,00
5	Halmahera Utara	6,49	8,01	6,06	6,53	6,20
6	Halmahera Timur	5,21	6,78	5,20	4,66	4,32
7	Pulau Morotai	4,70	6,27	4,35	4,56	4,21
8	Pulau Taliabu	4,75	6,10	4,17	3,15	2,86
9	Kota Ternate	5,80	5,70	5,77	6,62	6,42
10	Kota Tidore Kepulauan	4,95	2,81	2,85	3,52	3,49
	Maluku Utara	5,15	4,71	3,98	4,31	4,03

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2024

Tingkat Pengangguran sangat erat berkaitan dengan tingkat kemiskinan, semakin tinggi angka pengangguran maka masyarakat miskin semakin tinggi karena tidak mempunyai pendapatan. Dengan kondisi Kabupaten Halmahera Selatan yang tingkat pengangguran terbuka yang menurun namun di satu sisi pemerataan belum sepenuhnya terlaksana sehingga memicu tingkat kemiskinan yang masih tinggi.

Indeks Gini adalah indikator ekonomi yang mengukur ketimpangan pendapatan antar masyarakat di suatu negara. Indeks ini berkisar antara 0 dan 1, dimana 0 mengindikasikan kesetaraan sempurna dan 1 mengindikasikan ketimpangan sempurna. Mengacu pada table berikut ini, diketahui bahwa indeks gini Kabupaten Halmahera Selatan pada tahun 2022 dan 2023 masing-masing sebesar 0,240 dan 0,239 yang menunjukkan ketimpangan pendapatan masyarakat yang menurun dan dapat dilihat pada Tabel 2.40.

Tabel 2.40
Gini Rasio Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara
Tahun 2020-2024

NO	KABUPATEN/KOTA	GINI RASIO				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Halmahera Barat	0,239	0,275	0,246	0,264	
2	Halmahera Tengah	0,328	0,265	0,286	0,300	
3	Kepulauan Sula	0,297	0,244	0,282	0,261	
4	Halmahera Selatan	0,256	0,271	0,240	0,239	
5	Halmahera Utara	0,283	0,274	0,234	0,279	
6	Halmahera Timur	0,296	0,258	0,247	0,297	
7	Pulau Morotai	0,254	0,294	0,266	0,301	
8	Pulau Taliabu	0,248	0,247	0,238	0,284	
9	Kota Ternate	0,272	0,260	0,305	0,294	
10	Kota Tidore Kepulauan	0,258	0,249	0,244	0,290	
Maluku Utara		0,308	0,300	0,279	0,300	0,296
Nasional		0,385	0,381	0,381	0,313	0,379

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2024

Indeks Rasio Gini sangat erat kaitannya dengan kemiskinan semakin tinggi nilai Indeks Gini, semakin tinggi tingkat kemiskinan dalam suatu masyarakat. Melihat data diatas bahwa ketimpangan Pendapatan masyarakat masih sangat tinggi sehingga tingkat kemiskinan di Kabupaten Halmahera Selatan juga tinggi, dan merupakan salah satu tantangan karena dengan indeks rasio gini yang tinggi akan sulit menurunkan tingkat kemiskinan.

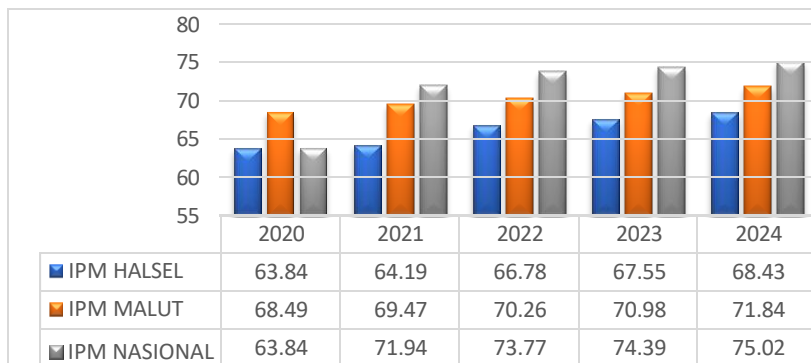
Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator yang menunjukkan pembangunan kualitas hidup manusia. Pengukuran IPM terdiri dari tiga dimensi, yaitu dimensi kesehatan yang diukur dari umur Panjang dan hidup sehat, dimensi pengetahuan yang diukur dari harapan dan rata-rata lama sekolah, serta dimensi standar hidup layak yang dilihat dari pengeluaran perkapita pertahun untuk barang konsumsi atau kebutuhan rumah tangga.

Tiga komponen IPM digambarkan oleh 4 variabel dalam penghitungan, yaitu Usia Harapan Hidup (UHH) untuk dimensi kesehatan, Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata- rata Lama Sekolah (RLS) untuk dimensi pendidikan, serta Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan untuk dimensi standar hidup layak.

Kemampuan daerah untuk berdaya saing tinggi adalah kunci bagi tercapainya kemajuan dan kemakmuran daerah. Daya saing yang tinggi, akan menjadikan Halmahera Selatan siap menghadapi tantangan-tantangan yang ada dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Untuk memperkuat daya saing daerah, maka pembangunan diarahkan untuk mengedepankan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, kinerja pembangunan manusia Kabupaten Halmahera Selatan tercermin pada angka IPM tahun 2024 yang mencapai angka 68,43. Pencapaian angka IPM tersebut lebih Tinggi bila dibandingkan keadaan tahun 2023 sebelumnya yaitu sebesar 67,55. Dengan tercapainya angka tersebut maka Kabupaten Halmahera Selatan menurut Konsep Pembangunan Manusia yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) masih masuk dalam kategori kinerja pembangunan Sedang dengan pencapaian antara 60,00 - 70,00.

Perkembangan IPM Kabupaten Halmahera Selatan dari tahun 2020 sampai dengan 2024 terjadi peningkatan. Dari 64,19 pada tahun 2020 meningkat menjadi 68,43 pada 2024. Apabila dibandingkan dengan IPM Provinsi Maluku Utara, pencapaian IPM Kabupaten Halmahera Selatan sampai 2024 masih dibawah IPM Provinsi dan Nasional. Hal ini dapat dilihat pada Grafik 2.10 dibawah ini.

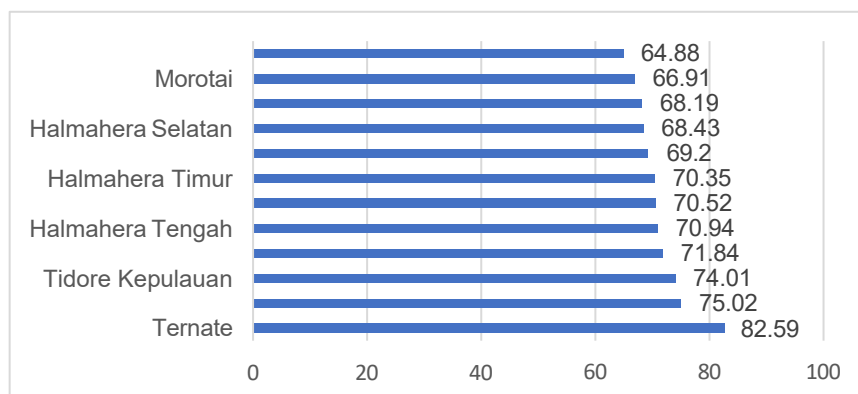
Grafik 2.3
Perkembangan IPM Kabupaten Halmahera Selatan dan Provinsi Maluku Utara
Tahun 2020 – 2024



Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2024

Apabila dirinci menurut kabupaten/kota di wilayah Maluku Utara, pencapaian IPM Kabupaten Halmahera Selatan berada di peringkat ke-7 pada tahun 2024 yakni 68,43, dimana peringkat terendah terjadi pada Kabupeten Pulau Taliabu, dengan pencapaian 64,88 sedangkan pencapaian IPM tertinggi diraih oleh Kota Ternate yaitu sebesar 82,59, dan dapat dilihat pada Tabel 2.11.

Grafik 2.4
Perbandingan IPM Kabupaten/Kota
Dalam Provinsi Maluku Utara Tahun 2024



Sumber : Provinsi Maluku Utara Dalam Angka 2025

Masih rendahnya kualitas SDM pada dimensi kesehatan juga disebabkan karena:

1. Masih adanya *stunting* di Kabupaten Halmahera Selatan; dan

2. Masyarakat yang memiliki BPJS Kesehatan di Kabupaten Halmahera Selatan pada tahun 2024 dengan proporsi baru mencapai 21,66 persen yang lebih rendah bila dibandingkan dengan masyarakat yang memiliki BPJS Kesehatan pada 9 (sembilan) kabupaten/kota lainnya di Provinsi Maluku Utara dengan proporsi mencapai sekitar 30-71 persen. Namun, proporsi masyarakat di Kabupaten Halmahera Selatan yang memiliki Jamkesda mencapai 75,07 persen yang merupakan terbanyak bila dibandingkan 9 (sembilan) kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara. Di sisi lain, masyarakat yang tidak memiliki jaminan kesehatan di Kabupaten Halmahera Selatan hanya 5,53 persen yang merupakan terkecil bila dibandingkan 9 (sembilan) kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2024, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.41 berikut ini.

Tabel 2.41
Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan
Jenis Jaminan Kesehatan yang Dimiliki Tahun 2023 dan 2024

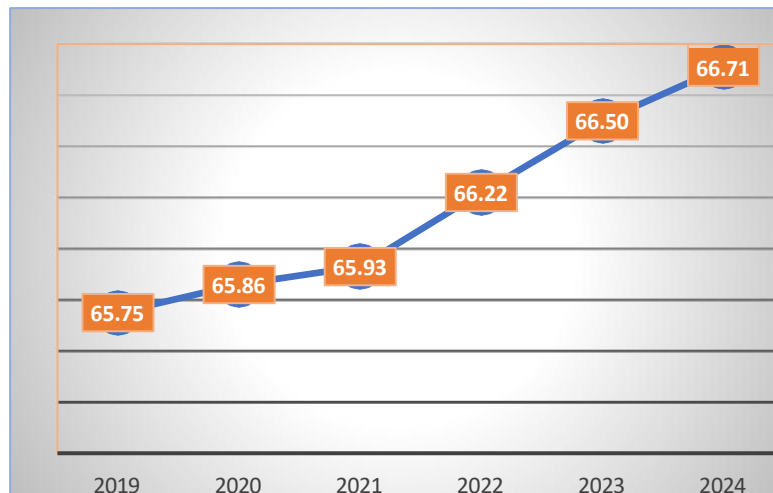
KABUPATEN/KOTA	BPJS KESEHATAN		JAMKESDA		ASURANSI SWASTA		PERUSAHAAN/ KANTOR		TIDAK PUNYA	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Halmahera Barat	60,63	67,37	0,84	NA	0,05	NA	0,71	1,13	37,81	29,87
Halmahera Tengah	71,51	78,25	1,12	2,79	0,05	–	0,91	0,71	26,58	18,25
Kepulauan Sula	36,25	37,16	1,32	NA	0,08	–	0,15	NA	62,33	61,94
Halmahera Selatan	17,68	21,66	83,04	75,07	0,00	–	0,96	0,39	1,12	5,53
Halmahera Utara	46,88	45,83	1,49	NA	0,03	NA	2,29	1,49	50,28	52,22
Halmahera Timur	82,59	79,16	11,25	11,29	0,05	NA	0,04	4,50	11,01	9,26
Pulau Morotai	89,59	89,79	0,03	1,51	0,00	–	0,49	1,59	10,00	7,32
Pulau Taliabu	21,22	22,57	0,27	NA	0,11	–	0,06	NA	78,45	76,65
Kota Ternate	69,33	72,06	4,45	2,18	0,00	NA	4,52	5,18	21,79	21,15
Kota Tidore Kepulauan	64,74	67,96	0,35	NA	0,00	NA	1,18	0,64	33,73	31,21
Provinsi Maluku Utara	52,70	54,92	17,61	15,54	0,03	0,31	1,63	2,00	29,13	28,38

Sumber: BPS Maluku Utara Tahun 2024

2.5.3 Kesehatan untuk semua

Usia Harapan Hidup (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2024, UHH telah meningkat sebesar 0,75 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,15 persen per tahun. Pada tahun 2020, Umur Harapan Hidup saat lahir di Halmahera Selatan adalah 65,86 tahun, dan pada tahun 2024 mencapai 66,71 tahun. Peningkatan indikator ini menunjukkan bahwa setiap tahun derajat kesehatan penduduk Halmahera Selatan meningkat, sebagaimana dapat di sajikan pada grafik 2.5 di bawah ini.

Grafik 2.5
Usia Harapan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan
Tahun 2020 – 2024



Sumber: Kabupaten Halmahera Selatan Dalam Angka 2025

Angka Kematian Ibu di Kabupaten Halmahera Selatan pada tahun 2020 sebesar 140, tahun 2021 sebesar 274, tahun 2022 sebesar 147 dan tahun 2023 sebesar 210 dan tahun 2024 sebesar 281. Tingginya jumlah kematian saat melahirkan pada tahun 2021 disebabkan oleh covid 19 yang mencapai 14 kematian. Adapun menurun di tahun 2022 karena wabah covid sudah ditindak lanjuti sehingga semua ibu hamil sudah divaksinasi kemudian tahun 2023 dan 2024 mengalami kenaikan sudah ada aplikasi kematian yang harus diinput semua kasus kematian terinput di aplikasi.

Cakupan Penemuan dan Pengobatan Tuberkulosis Kabupaten Halmahera Selatan pada tahun 2020 sebesar 50%, tahun 2021 sebesar 47% , tahun 2022 sebesar 70%, tahun 2023 sebesar 78,5% dan tahun 2024 sebesar 90% . Permasalahan dalam cakupan penemuan dan pengobatan TBC antara lain : tingginya turn over (perpindahan) pengelola program TBC, minimnya anggaran pelacakan terduga TBC sehingga penemuan juga rendah, kurang nya tenaga analis kesehatan dan dokter karena tidak semua puskesmas ada analis kesehatan dan dokter serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk berobat TBC.

Prevalensi Stunting, Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* dilaksanakan untuk mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) pada tahun 2030 dengan target antara prevalensi stunting sebesar 14% pada tahun 2024. Target tahun 2025-2030 akan ditetapkan berdasarkan evaluasi atas pencapaian target antara tahun 2024 tersebut. Pencapaian target TPB dilaksanakan melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*, yaitu:

- a. Pilar 1: peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa;
- b. Pilar 2: peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pilar 3: peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa;
- d. Pilar 4: peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
- e. Pilar 5: penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* ini dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa dengan melakukan:

- a. Penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b. Peningkatan kualitas pelaksanaan;
- c. Peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Kabupaten Halmahera Selatan meraih peringkat I (pertama) dengan meraih skor 74 (tujuh puluh empat) penilaian kinerja kabupaten/kota tahun 2022 dalam pelaksanaan 8 aksi konvergensi penurunan *stunting* tahun 2021 di Provinsi Maluku Utara. Hasil penilaian tersebut berdasarkan surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 368.1/KPTS/MU/2022 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Kabupaten Dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi Penurunan *Stunting* di Provinsi Maluku Utara Tahun 2022. Kabupaten Halmahera Tengah meraih peringkat II (kedua) dengan skor 71 (tujuh puluh satu), disusul Kabupaten Halmahera Timur di peringkat III (ketiga) yang meraih skor 62 (enam puluh dua) dan Kabupaten Kepulauan Sula di peringkat IV (keempat) dengan skor 57 (lima puluh tujuh).

BPKP Provinsi Maluku Utara telah melaksanakan evaluasi atas percepatan penurunan *stunting* tahun 2023 pada Kabupaten Halmahera Selatan. Ruang lingkup evaluasi BPKP Provinsi Maluku Utara atas percepatan penurunan *stunting* tahun 2023 yaitu pencapaian kinerja percepatan penurunan *stunting* tahun 2022 sampai dengan Triwulan I (pertama) tahun 2023. Evaluasi tersebut bertujuan untuk:

- a. menilai ketepatan dan konvergensi kebijakan untuk percepatan penurunan *stunting*;

- b. menilai keselarasan kebijakan percepatan penurunan *stunting* antar K/L/D;
- c. menilai implementasi program percepatan penurunan *stunting* melalui pemenuhan intervensi spesifik & intervensi sensitif termasuk pada indikator penyediaan akses air minum & akses sanitasi yang layak, bantuan sosial pangan dan tunai bersyarat, yaitu:
 - 1) Menilai progres capaian dan ketepatan sasaran keluarga berisiko *stunting*;
 - 2) Hambatan dalam pelaksanaan intervensi spesifik dan intervensi sensitif.
- d. menganalisis efektivitas program dalam penurunan prevalensi *stunting*;
- e. mengidentifikasi permasalahan dan hambatan pelaksanaan program;
- f. memberikan rekomendasi/atensi atas permasalahan yang ditemukan.

Berdasarkan hasil evaluasi atas percepatan penurunan *stunting* tahun 2023 pada Kabupaten Halmahera Selatan, disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. terdapat keluaran (*output*) dalam 5 pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* yang belum didukung kebijakan/regulasi dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan. Berdasarkan hasil evaluasi ini, BPKP Provinsi Maluku Utara menyarankan kepada Bupati Halmahera Selatan agar melakukan revisi Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Upaya Penanggulangan Stunting Terintegrasi sebagai dukungan atas indikator output 5 Pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*.
2. seluruh indikator keberhasilan dalam Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Telah Didukung Kebijakan/Regulasi dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.
3. ketepatan dan keselarasan kebijakan dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 dan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 (RAN PASTI). Pada aspek ini diketahui bahwa:
 - a. kebijakan/regulasi Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Terkait Capaian 42 Keluaran (Output) 5 Pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* telah tepat dan selaras.
 - b. peraturan/kebijakan percepatan penurunan *stunting* Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan telah sesuai/telah mendukung indikator keberhasilan dalam Rencana Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* (RAN PASTI).

4. Terdapat keluaran (*output*) dalam 5 Pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting dan Indikator Keberhasilan dalam RAN PASTI yang tidak tersedia data anggarannya. Pada aspek ini diketahui bahwa:
 - a. terdapat 12 keluaran (*output*) dalam 5 Pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* yang tidak tersedia data anggarannya. Berdasarkan hasil evaluasi ini, BPKP Provinsi Maluku Utara menyarankan kepada Wakil Bupati Halmahera Selatan selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) agar menginstruksikan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait penanggung jawab intervensi untuk merinci data anggaran sesuai output 5 Pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*.
 - b. Terdapat 17 indikator keberhasilan dalam RAN PASTI yang tidak tersedia data anggarannya. Berdasarkan hasil evaluasi ini, BPKP Provinsi Maluku Utara menyarankan kepada Wakil Bupati Halmahera Selatan selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) agar menginstruksikan kepala OPD terkait penanggung jawab intervensi untuk merinci data anggaran sesuai indikator keberhasilan RAN PASTI.
5. Terdapat proporsi alokasi anggaran penurunan *stunting* yang belum tepat. Berdasarkan hasil evaluasi ini, BPKP Provinsi Maluku Utara menyarankan kepada Bupati Halmahera Selatan agar mempertimbangkan untuk melakukan penyesuaian proporsi anggaran intervensi spesifik, intervensi sensitif dan intervensi koordinatif sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting*, sehubungan target antara Prevalensi Stunting Tahun 2024 sebesar 14 persen.
6. Pembentukan dan pelaksanaan tugas serta peran Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS). Pada aspek ini diketahui bahwa:
 - a. Terdapat tugas dan peran TPPS Kabupaten Halmahera Selatan yang belum terpenuhi. Berdasarkan hasil evaluasi ini, BPKP Provinsi Maluku Utara menyarankan kepada Wakil Bupati Halmahera Selatan selaku Ketua Pelaksana TPPS Kabupaten Halmahera Selatan agar:
 - 1) Menginstruksikan secara tertulis kepada Koordinator Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif, Koordinator Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga serta Koordinator Bidang Koordinasi

- dan Konvergensi untuk melaksanakan rapat internal bidang sekali dalam sebulan;
- 2) Menginstruksikan Koordinator Bidang Data, Pemantauan, Evaluasi dan *Knowledge Management* untuk menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi, serta menyampaikannya kepada tim pengarah secara berkala.
- b. TPPS tingkat desa belum sepenuhnya melaksanakan tugas dan perannya. Berdasarkan hasil evaluasi ini, BPKP Provinsi Maluku Utara menyarankan kepada Wakil Bupati Halmahera Selatan selaku Ketua Pelaksana TPPS, agar:
- 1) Meningkatkan alokasi anggaran untuk kegiatan peningkatan kapasitas TPPS Tingkat Desa;
 - 2) Melakukan penilaian/evaluasi kinerja penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat desa.
7. Capaian *output* dalam 5 Pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* dan indikator keberhasilan dalam RAN PASTI. Pada aspek ini diketahui bahwa:
- a. Terdapat *output* dalam 5 pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* yang tidak tercapai targetnya dan tidak tersedia data capaiannya. Berdasarkan hasil evaluasi ini, BPKP Provinsi Maluku Utara menyarankan kepada Wakil Bupati Halmahera Selatan selaku Ketua Pelaksana TPPS, agar:
 - 1) Menginstruksikan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana untuk mengajukan usulan tambahan penyuluh KB kepada BKKBN Provinsi Maluku Utara;
 - 2) Menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan untuk melaksanakan pelatihan terkait pengasuhan stimulasi penanganan *stunting* kepada guru PAUD;
 - 3) Menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan untuk melakukan sosialisasi terkait Sanitasi Total Berbasis Masyarakat bagi desa yang belum melaksanakan;
 - 4) Menginstruksikan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman untuk mendata jumlah keluarga yang belum memiliki jamban sehat;
 - 5) Menginstruksikan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk memberikan pemahaman kepada kepala desa tentang alokasi dana desa untuk kesehatan.
 - b. Terdapat indikator keberhasilan dalam RAN PASTI yang tidak tercapai targetnya/tidak tersedia data capaiannya. Berdasarkan hasil evaluasi ini, BPKP Provinsi Maluku Utara menyarankan kepada kepada Wakil Bupati Halmahera Selatan selaku Ketua Pelaksana TPPS Kabupaten Halmahera Selatan, agar:

- 1) Menginstruksikan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana untuk mengoptimalkan sosialisasi program keluarga berencana yang dilakukan oleh penyuluh keluarga berencana;
 - 2) Menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan untuk mengusulkan alokasi anggaran pemberian makanan tambahan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);
 - 3) Menginstruksikan Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa agar mengalokasikan pengadaan makanan tambahan lokal bagi ibu hamil dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
 - 4) Menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan untuk berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku terkait ketersediaan stok tablet tambah darah bagi remaja putri dan ibu hamil sehingga tidak terjadi *stock out*/kekosongan;
 - 5) Mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pembangunan sarana air minum yang layak, rumah layak huni dan jamban sehat bagi keluarga yang belum memiliki.
8. Terdapat kelompok sasaran keluarga risiko stunting yang belum menerima intervensi spesifik dan intervensi sensitif, yaitu:
 - a. Pasangan Usia Subur (PUS) dan Pasangan Usia Subur (PUS) Hamil;
 - b. Remaja Putri dan Calon Pengantin (Catin);
 - c. Baduta dan Balita.
 9. Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan telah menyusun laporan percepatan penurunan *stunting*.
 10. Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan telah melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan percepatan penurunan *stunting*.
 11. Analisis efektivitas percepatan penurunan stunting. Analisis ini difokuskan pada:
 - a. Efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi TPPS Kabupaten Halmahera Selatan terhadap penurunan prevalensi *stunting*.

Secara umum disimpulkan, pelaksanaan tugas dan fungsi TPPS Kabupaten Halmahera Selatan memiliki dampak terhadap penurunan angka prevalensi *stunting*. Hal ini ditunjukkan dari 37 tugas dan fungsi TPPS yang harus dilaksanakan, sebanyak 33 tugas dan fungsi atau 89,19% telah dilaksanakan, sehingga memiliki dampak terhadap penurunan angka prevalensi *stunting* sebesar 1% dari 31,40% di tahun 2022 menjadi 30,40% di Tahun 2023 sesuai hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dilakukan Kementerian Kesehatan.

- b. Efektivitas *trend* anggaran penanganan *stunting* terhadap penurunan prevalensi *stunting*.

Hasil revidi dokumen, terdapat kenaikan anggaran penanganan *stunting* dalam APBD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2022 dibandingkan Tahun 2021 sebesar 23,45 persen, yaitu Rp34.685.989.300,00 pada Tahun 2021 menjadi Rp45.313.297.240,00 pada Tahun 2022, namun pada tahun 2023 mengalami penurunan yaitu 32.966.763.500 dan pada tahun 2024 terjadi peningkatan yaitu 61.532.637.650. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dilakukan Kementerian Kesehatan, terjadi penurunan Angka Prevalensi *Stunting* (APS) Kabupaten Halmahera Selatan sebesar 2,3 persen dari 31,70 persen di Tahun 2021 menjadi 31,40 persen di tahun 2022 dan penurunan sebesar 1% yaitu 30,4 pada Tahun 2023. Dari kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kenaikan anggaran belum secara signifikan berpengaruh terhadap penurunan angka prevalensi *stunting* di Kabupaten Halmahera Selatan.

- c. Efektivitas capaian intervensi terhadap penurunan prevalensi *stunting*.

Berdasarkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* 2021-2024, sasaran yang ingin dicapai dari upaya percepatan penurunan *stunting* terdiri dari tersedianya layanan intervensi spesifik dengan 9 (sembilan) indikator sasaran dan tersedianya layanan intervensi sensitif dengan 11 (sebelas) indikator sasaran dengan perincian sebagai berikut:

Dari 9 (Sembilan) indikator sasaran intervensi spesifik, data capaian yang tersedia sebanyak 7 (tujuh) indikator. Sedangkan dari 11 (sebelas) indikator sasaran intervensi sensitif, data capaian yang tersedia sebanyak 4 (empat) indikator, sehingga pengukuran efektivitas dihitung sesuai indikator yang tersedia data capaiannya. Analisis capaian intervensi spesifik dan intervensi sensitif penurunan *stunting* dilakukan untuk tahun 2022.

Persentase capaian intervensi spesifik dan intervensi sensitif rata-rata sebesar 18,18 persen, Berdasarkan data tersebut di atas, persentase capaian intervensi spesifik dan intervensi sensitif masih rendah, yaitu hanya sebesar 18,18 persen. Namun demikian, masih memiliki dampak terhadap penurunan angka prevalensi *stunting* yang ditunjukkan Angka Prevalensi *Stunting* (APS) Kabupaten Halmahera Selatan turun sebanyak 2,30 persen yaitu dari 33,70 persen pada Tahun 2021 menjadi 31,40

persen pada Tahun 2022 sesuai hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dilakukan Kementerian Kesehatan.

Hal-hal lain yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan dalam upaya percepatan penurunan *stunting* sebagai berikut :

1. Terdapat kekurangan alat kesehatan (antropometri dan mesin USG) dan Dokter yang belum mendapatkan pelatihan penggunaan ultrasonografi (USG). Berdasarkan data yang diberikan Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan, terdapat 341 unit posyandu yang tersebar di 249 Desa. Dari total 341 posyandu, yang telah memiliki alat pengukur tinggi badan (antropometri kit) sebanyak 153 Posyandu dan terdapat 188 posyandu yang belum memiliki peralatan tersebut. Jumlah puskesmas di Kabupaten Halmahera Selatan sebanyak 32 unit, yang sudah memiliki alat pemeriksaan kehamilan atau Ultrasonografi (USG) sebanyak 22 puskesmas dan terdapat 10 puskesmas yang belum memiliki USG. Lebih lanjut, dokter yang sudah terlatih menggunakan USG sebanyak 19 orang, dan yang belum terlatih sebanyak 13 orang. Seharusnya setiap posyandu dan puskesmas memiliki peralatan antropometri kit dan USG, serta setiap dokter harus mendapatkan pelatihan terkait cara penggunaan peralatan USG sebagai upaya untuk menurunkan angka kematian ibu dan mencegah serta menangani *stunting*.

BPKP Provinsi Maluku Utara menyarankan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan, agar:

- a. Mengusulkan pemenuhan peralatan antropometri kit dan USG untuk memenuhi kekurangan kedua peralatan tersebut di 188 posyandu dan 10 puskesmas melalui anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Kesehatan;
 - b. Menyelenggarakan pelatihan penggunaan peralatan USG kepada 13 dokter.
2. Belum terdapat kegiatan budidaya padi kaya gizi (Biofortifikasi) di Kabupaten Halmahera Selatan.

Padi kaya gizi (biofortifikasi) adalah varietas padi yaitu Inpari IR *Nutri Zinc* yang memiliki kandungan unsur Zn (*Zinc*) lebih tinggi (+/- 25%) daripada varietas yang lain. Karena kandungan Zn yang tinggi, Inpari IR *Nutri Zinc* berpotensi mencegah terjadinya *stunting*. Varietas padi ini dilepas pada tahun

2019 dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Pertanian No. 168/HK.540/C/01/2019. Berdasarkan wawancara/ konfirmasi kepada pihak Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Selatan, diketahui bahwa pada Tahun 2022 dan 2023 tidak terdapat kegiatan budidaya padi kaya gizi (biofortifikasi) yang berasal dari APBN dan APBD.

BPKP Provinsi Maluku Utara menyarankan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Selatan agar bersurat kepada Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara untuk melakukan sosialisasi budidaya padi kaya gizi (biofortifikasi) kepada kelompok tani di Kabupaten Halmahera Selatan.

2.5.4 Pendidikan Berkualitas yang merata

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan suatu populasi, khususnya dalam pendidikan formal. RLS menunjukkan jumlah tahun rata-rata yang dihabiskan oleh penduduk dalam menempuh pendidikan formal, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Halmahera Selatan menunjukkan peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024 walaupun kenaikannya tidak terlalu besar. Pada tahun 2020, rata-rata lama sekolah tercatat sebesar 7,93 tahun. Angka ini terus meningkat mencapai 8,42 tahun di tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan dalam akses pendidikan dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan formal. Selama lima tahun terakhir, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Halmahera Selatan meningkat sebesar 0,49 tahun, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.42.

Tabel 2.42
Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara (Tahun)
2020-2024

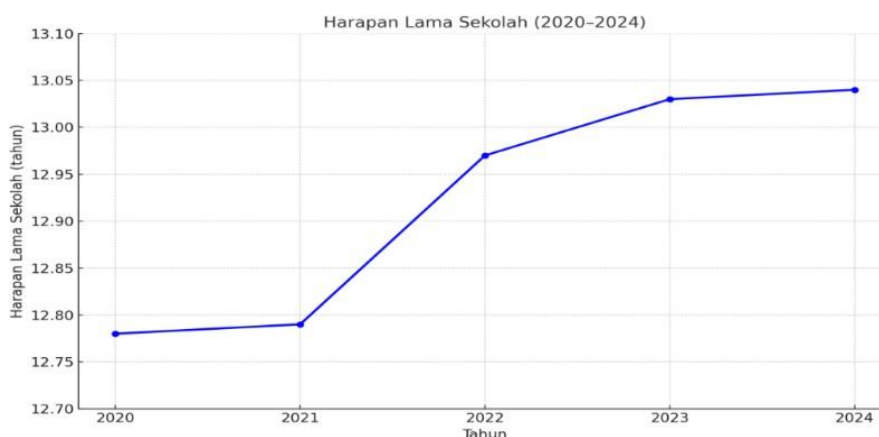
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Maluku Utara	9,04	9,09	9,24	9,26	9,37
Halmahera Barat	8,35	8,37	8,57	8,58	8,59
Halmahera Tengah	9,00	9,01	9,02	9,19	9,20
Kepulauan Sula	8,95	9,00	9,02	9,04	9,17
Halmahera Selatan	7,93	8,10	8,16	8,17	8,42
Halmahera Utara	8,51	8,62	8,63	8,65	8,67
Halmahera Timur	8,26	8,27	8,52	8,66	8,88
Pulau Morotai	7,39	7,40	7,42	7,55	7,73
Pulau Taliabu	7,66	7,67	7,94	7,97	7,99

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kota Ternate	11,71	11,81	12,06	12,07	12,08
Kota Tidore Kepulauan	9,73	9,95	9,96	9,97	10,12

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2024

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur jumlah tahun pendidikan yang diharapkan akan ditempuh oleh anak-anak yang baru lahir, berdasarkan kondisi pendidikan saat ini. HLS memberikan gambaran tentang potensi pendidikan yang dapat dicapai oleh generasi mendatang dalam suatu populasi. Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Halmahera Selatan menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, HLS tercatat sebesar 12,78 tahun, dan mengalami peningkatan secara bertahap setiap tahunnya hingga mencapai 13,04 tahun pada tahun 2024. Peningkatan HLS ini mengindikasikan bahwa anak-anak yang lahir di Kabupaten Halmahera Selatan selama periode 2020 sampai 2024 memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang Diploma atau Sarjana (S1). Secara rinci dapat dilihat pada Gambar 2.9 di bawah ini.

Gambar 2.9
Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Halmahera Selatan
2020-2024



Pada tahun 2024, Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Halmahera Selatan tercatat sebesar 13,04 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Halmahera Selatan memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang

Diploma atau Sarjana (S1). Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Se Provinsi Maluku Utara. Kabupaten Halmahera Selatan menempati peringkat 5 (Lima) tertinggi setelah Kota Ternate sebesar 15,98 Tahun, Kota Tidore Kepulauan sebesar 14,29 Tahun, Kabupaten Halmahera Utara sebesar 13,69 Tahun, Kabupaten Halmahera Tengah sebesar 13,52 Tahun, Kabupaten Halmahera Barat sebesar 13,25 tahun sebesar 13,25 tahun.

Kenaikan HLS dari 2020 ke 2024 hanya 0,26 tahun (dari 12,78 ke 13,04) Faktor akses dan mutu pendidikan di beberapa wilayah belum merata, terutama daerah terpencil. Tingkat putus sekolah masih menjadi kendala yang menghambat peningkatan HLS. Serta Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Adapun HLS Kabupaten Halmahera Selatan dan dibandingkan dengan dengan HLS Kabupaten lainnya di Provinsi Maluku Utara sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.43.

Tabel 2.43
Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara
2020-2024

Provinsi/Kabupaten/Kota	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Maluku Utara	13,67	13,68	13,73	13,74	13,75
Halmahera Barat	13,19	13,20	13,23	13,24	13,25
Halmahera Tengah	12,99	13,11	13,22	13,23	13,52
Kepulauan Sula	12,74	12,77	12,96	12,97	12,98
Halmahera Selatan	12,78	12,79	12,97	13,03	13,04
Halmahera Utara	13,60	13,61	13,67	13,68	13,69
Halmahera Timur	12,75	12,76	12,86	12,87	12,89
Pulau Morotai	12,77	12,93	12,97	12,99	13,02
Pulau Taliabu	12,59	12,65	12,86	12,87	12,88
Kota Ternate	15,74	15,75	15,76	15,78	15,98
Kota Tidore Kepulauan	14,31	14,32	14,36	14,48	14,49

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2024

Literasi Numerasi adalah kemampuan dalam memahami angka, operasi hitung dan bilangan melalui berbagai konteks dalam permasalahan sehari-hari, baik menggunakan bahasa lisan maupun tulisan. Literasi numerasi merupakan kecakapan dan pengetahuan dalam menggunakan berbagai jenis simbol dan angka yang berkaitan dengan matematika dasar untuk membantu dalam menyelesaikan permasalahan dalam konteks sehari-hari, serta menganalisis berbagai data atau informasi yang ditampilkan melalui bentuk tabel, grafik dan bagan sebagai acuan dalam menentukan jawaban dari permasalahan yang diberikan.

Perkembangan Angka Numerasi Literasi di Kabupaten Halmahera Selatan dari tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Nilainya terus meningkat setiap tahun dalam kisaran 9,95 dan 16,85. Namun walaupun mengalami peningkatan masalah yang dihadapi adalah Ketertbatasan Bahan Literasi dan numerasi , Kurangnya Program Kepala sekolah terkait Literasi dan Numerasi.

Tabel 2.44
Rata-rata Nilai Asessmen Tingkat Nasional

NO	INDIKATOR	SATUAN	HASIL EVALUASI CAPAIAN PEMBANGUNAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)
	Rata-Rata Nilai Asessmen Tingkat Nasional:	Nilai/persen					
	A. Literasi Membaca			0	43,09%	44,09%	53,04%
	B. Numerasi			0	34,16%	34,86%	51,01%

Sumber : Rapor Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar & Menengah, Tahun 2025

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan literasi masyarakat di suatu wilayah. Indeks ini dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sebagai bagian dari upaya untuk memahami dan meningkatkan budaya baca dan akses informasi di masyarakat.

Dengan literasi, kemampuan seseorang dalam memahami dan menarik kesimpulan dari informasi yang diterima menjadi lebih baik. IPLM mengukur upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai sarana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi di masyarakat. Terdapat tujuh unsur dalam pembangunan literasi masyarakat, yaitu pemerataan layanan perpustakaan, kecukupan koleksi, kecukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan harian, jumlah perpustakaan ber-SNP, partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial/promosi, dan jumlah anggota perpustakaan. Perpustakaan Nasional mengelompokkan nilai IPLM ke dalam lima kategori: Sangat Rendah (0-29,9), Rendah (30- 49,9), Sedang (50-79,9), Tinggi (80-89,9), dan Sangat Tinggi (90-100).

Pada tahun 2020 -2024 ILM Kabupaten Halmahera Selatan masih berada pada kategori rendah yaitu 27,86 Persen dikarenakan tahun 2020 dan 2021 Indeks Literasi Tidak ada karena dampak Covid. Pada tahun 2022, kendala yang dihadapi adalah belum terpenuhinya rasio ketercukupan koleksi. Di tahun 2023 terdapat beberapa kendala diantara

rendahnya jumlah anggota perpustakaan dan rendahnya persentasi Perpustakaan yang ber – NSP sedangkan Tahun 2024 juga terdapat kendala kekuranya tenaga perpustakaan untuk memenuhi standar. Untuk lebih jelas gambaran indeks literasi masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan dapat dilihat pada Tabel 2.45.

Tabel 2.45
Gambaran Indeks Literasi Masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan
Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	HASIL EVALUASI CAPAIAN PEMBANGUNAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Indeks Literasi Masyarakat	Persen	0	0	37,05	17,82	27,86

Sumber : Perpustakaan Nasional Tahun 2025

2.5.5 Perlindungan Sosial yang Adaptif

Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sebagai Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan program penting dalam memberikan perlindungan bagi pekerja terhadap risiko sosial ekonomi, seperti kecelakaan kerja, kematian, dan hari tua. Namun, data cakupan kepesertaan menunjukkan adanya pertumbuhan peserta setiap tahun. Tercatat jumlah peserta sebesar 51,811 Orang di Tahun 2024 . terjadi Kenaikan cakupan kepesertaan 31.133 orang selama 5 Tahun, dapat dilihat pada Tabel 2.46

Tabel 2.46
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

NO	INDIKATOR	SATUAN	HASIL EVALUASI CAPAIAN PEMBANGUNAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Orang	5.870	20,678	23,787	53,653	51,811
		%					

Sumber Data : Laporan Exsum BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2025

Fluktuasi ini menunjukkan bahwa partisipasi tenaga kerja dalam program jaminan sosial belum merata dan belum sepenuhnya optimal. Beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. **Kurangnya kesadaran dan pemahaman** tenaga kerja, khususnya di sektor informal, terhadap pentingnya jaminan sosial.
2. **Minimnya sosialisasi dan edukasi** dari pihak penyelenggara kepada pekerja dan pemberi kerja.
3. **Keterbatasan akses**, terutama bagi pekerja di daerah terpencil atau sektor non-formal.
4. **Tingkat kepatuhan pemberi kerja** yang masih rendah dalam mendaftarkan pekerjaannya sebagai peserta.
5. **Ketergantungan pada lonjakan sesaat**, misalnya akibat program insentif atau kewajiban administratif, bukan karena kesadaran yang berkelanjutan.

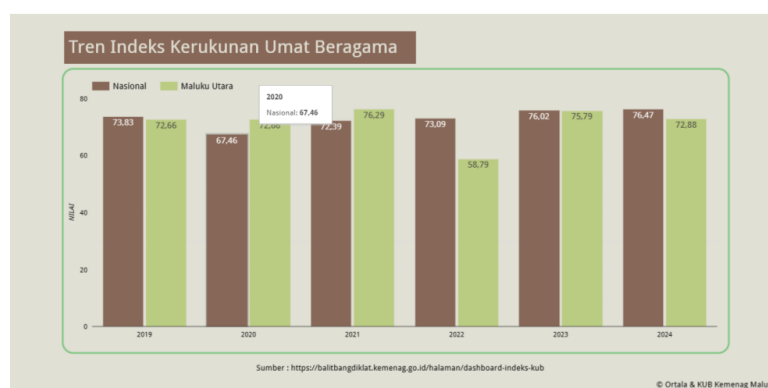
Peningkatan signifikan pada periode terakhir bisa jadi merupakan hasil dari intervensi kebijakan atau program masif, namun untuk menjaga keberlanjutan, diperlukan strategi jangka panjang yang terfokus pada edukasi, regulasi, dan pengawasan.

2.5.6 Beragama maslahat dan berkebudayaan maju

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) adalah instrumen utama yang digunakan untuk mengukur pencapaian program-program kerukunan. IKUB diukur berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Kriteria pencapaian IKUB dibagi menjadi beberapa kategori diantaranya IKUB Sangat Rendah (0- 20), IKUB Rendah (21-40), IKUB Sedang (41-60), IKUB Tinggi (61-80), dan IKUB Sangat Tinggi (80-100). Adapun Indeks Kerukunan Umat Beragama di provinsi maluku Utara mencapai angka 76,4 di Tahun 2025.

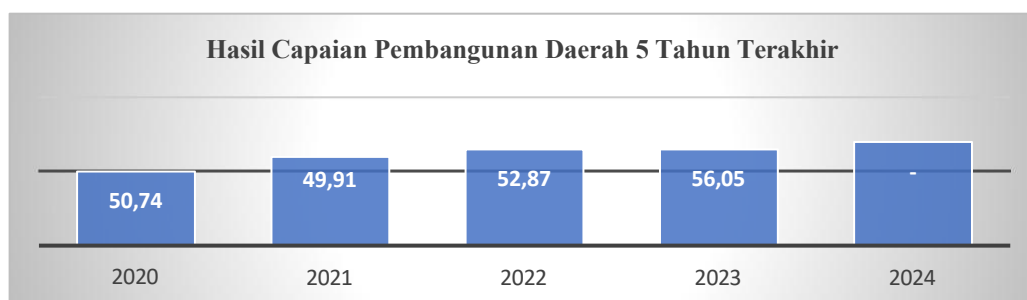
Tabel 2.47

INDEX KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2025



Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) adalah seperangkat komprehensif 31 indikator yang dikelompokkan ke dalam 7 dimensi yang bertujuan untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan. IPK mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam kebijakan kebudayaan melalui pendekatan berbasis data dan informasi akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Grafik 2.6
Hasil Capaian Pembangunan Daerah Tahun 2020 - 2024



Sumber: Data dari Kemendikbudristek, Kementerian PPN/Bappenas dan BPS Tahun 2024

Perkembangan indeks kebudayaan nasional dengan Provinsi Maluku Utara menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan selama kurun waktu 4 (empat) Tahun hal ini tergambar secara jelas sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.48.

Tabel 2.48
Perbandingan Indeks Kebudayaan Nasional dengan Maluku Utara

Tahun	Nasional	Maluku Utara
(1)	(2)	(3)
2020	54,65	50,74
2021	51,90	49,91
2022	55,13	52,87
2023	57,13	56,05

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Tahun 2025

2.5.7 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, Dan Masyarakat Inklusi

Indeks Kualitas Keluarga (IKK) merupakan tolok ukur basis perencanaan dan indikator keberhasilan Pembangunan Keluarga dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak. Indeks ini dibentuk oleh lima dimensi yaitu dimensi kualitas legalitas dan struktur, kualitas ketahanan fisik, kualitas ketahanan ekonomi, kualitas ketahanan sosial psikologi, dan kualitas ketahanan sosial budaya. Data yang digunakan dalam publikasi ini bersumber dari berbagai survei yang dilaksanakan oleh BPS.

Capaian keberhasilan Program Pembangunan Keluarga diukur menggunakan Indeks pembangunan Keluarga (iBangga). i-Bangga menjelaskan kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga. i-Bangga memberikan gambaran peran dan fungsi keluarga untuk mewujudkan kualitas keluarga. Dengan adanya iBangga maka suatu wilayah dapat diketahui keberhasilan terkait program pembangun keluarga. Hasil perhitungan i-Bangga Tahun 2024 sebesar 64,93 %. Artinya, nilai i-Bangga pada tahun 2024 diatas target yang telah ditetapkan yaitu 55 atau dengan persentase capaian sebesar 108,55 % dengan klasifikasi adalah “Berkembang”. Dan diharapkan pada tahun 2029 akan naik sebesar 70 %, hal ini sangat beralasan karena selama tahun 2025 – 2029, program kemendukbangga focus pada 5 program unggulan yang dimasukkan dalam kategori Quick Wins, 5 Quick Wins tersebut yakni Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting), Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya), Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), Lansia Berdaya, dan Super Apps 'Keluarga Indonesia'.

Sebagaimana diketahui bahwa Indeks Pembangunan Keluarga atau disebut iBangga dimaksudkan untuk memotret dan mencari solusi terhadap permasalahan keluarga secara tepat. Karena keluarga itu menjadi unit analisis terkecil di dalam masyarakat yang perlu diketahui secara mikro. Oleh karena itu pengumpulan data keluarga yang dapat diidentifikasi dan didiagnosis secara mikro permasalahan masing-masing keluarga secara tepat dapat mengatasi permasalahan bangsa secara komprehensif.

Jadi Indeks Pembangunan Keluarga atau disebut i-Bangga adalah Pengukuran perbandingan dari kualitas keluarga, serta mengklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga maju, berkembang atau rentan, yang dapat dilihat pada Tabel 2.49.

Tabel 2.49
Indeks Pembangunan Keluarga

NO	INDIKATOR	SATUAN	HASIL EVALUASI CAPAIAN PEMBANGUNAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Indeks Pembangunan Keluarga	Angka	N/a	52,09	54,6	62,15	64,93

Sumber :Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Tahun 2025.

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) atau Gender Inequality Index (GII) adalah indikator yang dikembangkan oleh UNDP untuk mengukur tingkat ketimpangan gender dalam berbagai aspek kehidupan IKG menyoroti kerugian yang dialami perempuan akibat ketimpangan gender. KG mencakup tiga dimensi utama:

a. Kesehatan reproduksi:

- ✚ Angka kematian ibu saat melahirkan
- ✚ Angka kelahiran remaja (15–19 tahun)

b. Pemberdayaan:

- ✚ Proporsi kursi parlemen yang diduduki perempuan
- ✚ Proporsi perempuan dan laki-laki yang menyelesaikan pendidikan menengah ke atas

c. Partisipasi ekonomi:

- ✚ Partisipasi angkatan kerja laki-laki dan perempuan

Nilai Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2024 sebesar 0.579 mencerminkan adanya ketidaksetaraan yang cukup signifikan antara perempuan dan laki-laki dalam tiga dimensi utama yang diukur, walaupun setiap tahun indeks ketimpangan gender mengalami penurunan tetapi di bandingkan Kabupaten/Kota yang lain Halmahera Selatan menempati urutan ke empat dibandingkan kabupaten/kota yang lain di Maluku Utara, yang dapat dilihat pada Tabel 2.50.

Tabel 2.50
Indeks Ketimpangan Gender Menurut Kabupaten/Kota

KABUPATEN/KOTA	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Halmahera Barat	0,550	0,530	0,560	0,532	0,542
Halmahera Tengah	0,610	0,610	0,580	0,606	0,620
Kepulauan Sula	0,860	0,850	0,860	0,857	0,581
Halmahera Selatan	0,660	0,640	0,630	0,615	0,579
Halmahera Utara	0,580	0,570	0,580	0,560	0,509
Halmahera Timur	0,610	0,650	0,620	0,597	0,601
Pulau Morotai	0,610	0,590	0,570	0,556	0,480
Pulau Taliabu	0,580	0,610	0,610	0,617	0,577
Ternate	0,430	0,410	0,380	0,406	0,438
Tidore Kepulauan	0,510	0,470	0,480	0,471	0,414
Maluku Utara	0,550	0,540	0,530	0,519	0,508

Sumber : Badan Pusat Statistik Maluku Utara Tahun 2025

2.6 ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.6.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Angka ketergantungan penduduk adalah rasio antara jumlah penduduk yang tidak produktif secara ekonomi (anak-anak dan lansia) dengan jumlah penduduk yang produktif (usia kerja). Angka ketergantungan penduduk dapat menjadi indikator penting dalam menilai tingkat kesejahteraan suatu masyarakat dan mempengaruhi kebijakan di berbagai sektor. Semakin tinggi angka ketergantungan penduduk, maka semakin besar pula beban yang harus ditanggung oleh penduduk produktif dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri dan keluarga mereka. Ini dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Keberhasilan pembangunan kependudukan diantaranya dapat tercermin dengan semakin rendahnya proporsi penduduk usia tidak produktif secara ekonomi, yakni usia 0-14 tahun (usia muda) dan 65 tahun ke atas (usia tua), terhadap penduduk usia 15-64 tahun (usia produktif secara ekonomi) untuk meningkatkan kualitas dirinya karena semakin kecil beban untuk menanggung penduduk usia tidak produktif.

Angka ketergantungan di Kabupaten Halmahera Selatan pada periode 2019-2023 mengalami penurunan angka beban ketergantungan yang cukup signifikan, dari tahun 2020

dengan nilai sebesar 68,29 menjadi 50,06 di tahun 2022, kemudian mengalami kenaikan di tahun 2023 menjadi 55,16. Angka tersebut dapat diartikan bahwa pada tahun 2020, angka beban ketergantungan sebesar 68,29 berarti bahwa setiap 100 penduduk usia produktif secara ekonomi (15-64 tahun) harus menanggung beban sekitar 68-69 penduduk yang tidak produktif secara ekonomi (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas). Kemudian di tahun 2023, angka ketergantungan menjadi 55,16 yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif secara ekonomi harus menanggung beban sekitar 55-56 penduduk yang tidak produktif secara ekonomi. Hal ini mengindikasikan peningkatan jumlah penduduk usia muda dan tua pada 2020 hingga 2023 berbanding lurus dengan peningkatan penduduk usia produktif. Selain itu, semakin kecilnya angka beban ketergantungan tentunya harus dimanfaatkan dan dijadikan kesempatan bagi penduduk usia produktif secara ekonomi untuk meningkatkan kualitas diri, yang tentunya perlu dijadikan sebagai sebuah momentum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan dapat dilihat bahwa komposisi penduduk di Kabupaten Halmahera Selatan menunjukkan terjadi peningkatan yang cenderung lambat pada penduduk tidak produktif (usia muda dan tua). Proporsi penduduk muda pada periode 2020-2023 cenderung mengalami penurunan dimana pada tahun 2019 sebesar 36,92 dan pada tahun 2023 menjadi sebesar 30,45 persen. Berbeda dengan proporsi penduduk usia tua yang cenderung mengalami kenaikan pada rentang 2020-2023 sebesar 3,45 persen di tahun 2019 menjadi 5,10 persen di tahun 2023.

Pada Tabel 2.49 dapat diperoleh informasi bahwa persentase penduduk usia muda dan usia tua dalam lima tahun terakhir mengalami penurunan, kemudian penduduk usia produktif dalam lima tahun terakhir mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2019 sebesar 59,42 menjadi 64,45 pada tahun 2023. Hal tersebut tentu berdampak kepada angka beban ketergantungan yang cenderung mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 68,29 menjadi 55,16 pada tahun 2023.

Tabel 2.51
Komposisi Penduduk (%) dan Angka Beban Ketergantungan di
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020
-2024

TAHUN	UMUR (TAHUN)			ANGKA BEBAN KETERGANTUNGAN (JIWA)
	0-14	15-64	65+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2020	35,69	60,54	3,77	65,18
2021	31,99	63,24	4,77	58,13
2022	30,06	66,64	3,30	50,06

TAHUN	UMUR (TAHUN)			ANGKA BEBAN KETERGANTUNGAN (JIWA)
	0-14	15-64	65+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2023	30,45	64,45	5,10	55,16
2024	30,45	64,45	5,10	55,16

Sumber : Indeks Kesejahteraan Masyarakat (BPS), Tahun 2025

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan selama lima tahun terakhir, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun pertama, jumlah perempuan yang berpartisipasi dalam angkatan kerja tercatat sebanyak 78.984 orang. Namun, di tahun kedua terjadi penurunan tajam menjadi hanya 387 orang, yang kemungkinan mencerminkan adanya kendala dalam pendataan atau dampak dari kondisi eksternal seperti pandemi. Di tahun ketiga, terjadi lonjakan partisipasi yang sangat tinggi hingga mencapai 125.331 orang, menunjukkan adanya pemulihan atau keberhasilan program pemberdayaan perempuan di sektor ketenagakerjaan. Tren menurun kembali terlihat di tahun keempat dengan jumlah 54.219 orang, sebelum kembali meningkat cukup signifikan di tahun kelima menjadi 93.414 orang. Secara umum, data ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam angkatan kerja bersifat dinamis dan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, sosial, dan kebijakan yang diterapkan pemerintah daerah. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.52 dibawah ini.

Tabel 2.52
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

NO	INDIKATOR	SATUAN	HASIL EVALUASI CAPAIAN PEMBANGUNAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Orang	78.984	387	125.331	54.219	93.414

Sumber : BPS & Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2025.

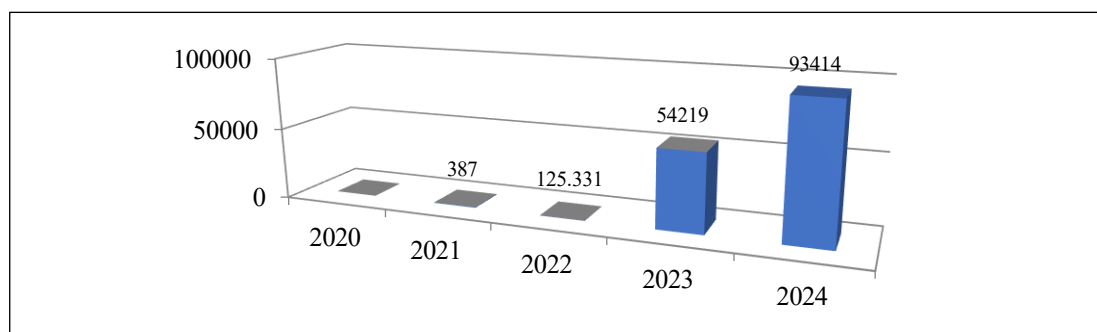
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di daerah masih menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam dan belum stabil selama lima tahun terakhir. Hal ini mencerminkan adanya sejumlah tantangan struktural dan kultural yang memengaruhi keterlibatan perempuan dalam sektor ketenagakerjaan. Rendahnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja bisa disebabkan oleh:

1. **Keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan**, terutama yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

2. **Persepsi dan norma sosial** yang masih menempatkan peran perempuan lebih dominan di ranah domestik.
3. **Minimnya kebijakan afirmatif** dan fasilitas pendukung perempuan bekerja, seperti ketersediaan tempat penitipan anak (daycare) dan cuti melahirkan yang ramah.
4. **Ketimpangan gender dalam kesempatan kerja dan upah**, yang membuat perempuan kurang terdorong untuk masuk atau bertahan dalam dunia kerja.
5. **Dampak eksternal** seperti pandemi, perubahan ekonomi, dan disrupsi teknologi yang lebih berdampak pada sektor pekerjaan informal di mana perempuan banyak terlibat.

Permasalahan ini menjadi penting untuk ditangani karena peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan tidak hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga menjadi indikator kemajuan dalam kesetaraan gender dan pembangunan yang inklusif, yang dapat dilihat pada Grafik 2.7.

Grafik 2.7
Tingkat Partisipasi Angkatan kerja Perempuan



Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2025

Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota adalah laporan informasi data inovasi atau tingkat inovasi daerah berdasarkan hasil pengukuran indeks inovasi daerah berdasarkan hasil pengukuran indeks inovasi daerah yang telah di validasi dan dilakukan quality control oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri dengan melibatkan unit kerja khusus pelayanan dan pengabdian masyarakat (UKKPPM). Dimana indeks ini memperhitungkan berbagai faktor yang berkaitan dengan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan inovasi dan adopsi teknologi. Adapun perkembangan indeks inovasi Kabupaten Halmahera Selatan adalah sebagai berikut

Tabel 2.53
Indeks Inovasi Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara

Kode Daerah	Kabupaten/Kota	2022		2023		2024	
		Skor Indeks	Predikat/ Peringkat	Skor Indeks	Predikat/ Peringkat	Skor Indeks	Predikat/ Peringkat
8201	Kab. Halmahera Barat	38,83	Inovatif/268 dari 415 Kabupaten	39,18	Inovatif/347 dari 415 Kabupaten	39,84	Inovatif/261 dari 415 Kabupaten
8202	Kab. Halmahera Tengah	39,23	Inovatif/266 dari 415 Kabupaten	48,86	Inovatif/135 dari 415 Kabupaten	43,66	Inovatif/225 dari 415 Kabupaten
8203	Kab. Kepulauan Sula	0,80	Kurang Inovatif/379 dari 415 Kabupaten	0,80	Kurang Inovatif/396 dari 415 Kabupaten	30,26	Kurang Inovatif/329 dari 415 Kabupaten
8204	Kab. Halmahera Selatan	45,76	Inovatif/202 dari 415 Kabupaten	53,86	Inovatif/84 dari 415 Kabupaten	55,24	Inovatif/118 dari 415 Kabupaten
8205	Kab. Halmahera Utara	20,44	Kurang Inovatif/326 dari 415 Kabupaten	16,48	Kurang Inovatif/347 dari 415 Kabupaten	34,82	Kurang Inovatif/305 dari 415 Kabupaten
8206	Kab. Halmahera Timur	49,52	Inovatif/157 dari 415 Kabupaten	45,43	Inovatif/191 dari 415 Kabupaten	54,04	Inovatif/131 dari 415 Kabupaten
8207	Kab. Pulau Morotai	39,57	Inovatif/261 dari 415 Kabupaten	41,43	Inovatif/241 dari 415 Kabupaten	40,66	Inovatif/251 dari 415 Kabupaten
8208	Kab. Pulau Taliabu	0,00	Kurang Inovatif/412 dari 415 Kabupaten	0,70	Kurang Inovatif/379 dari 415 Kabupaten	6,00	Kurang Inovatif/389 dari 415 Kabupaten
8271	Kota Ternate	54,96	Inovatif/34 dari 93 Kota	43,60	Inovatif/69 dari 93 Kota	53,58	Inovatif/54 dari 93 Kota
8272	Kota Tidore Kepulauan	52,80	Inovatif/46 dari 93 Kota	56,01	Inovatif/34 dari 93 Kota	70,00	Sangat Inovatif/17 dari 93 Kota
Provinsi Maluku Utara		33,11	Kurang Inovatif/34 dari 34 Provinsi	56,75	Inovatif/12 dari 38 Provinsi	58,47	Inovatif/14 dari 38 Provinsi

Sumber: ^{a)} Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 002.6-5848 Tahun 2021 Tanggal 23 Desember 2021;

^{b)} Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-6301.A Tahun 2022 Tanggal 21 Desember 2022; dan

^{c)} Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-6287 Tahun 2023 Tanggal 6 Desember 2023.

Berdasarkan Tabel 2.51 diatas perkembangan indeks inovasi daerah Kabupaten Halmahera Selatan sudah masuk kategori inovatif pada Tahun 2022 dengan nilai 45,76 di peringkat 202 dari 415 Kabupaten, pada tahun 2023 Kabupaten Halmahera Selatan mengalami peningkatan masuk kategori inovatif dengan nilai 53,86 dengan peringkat 84 dari 415 Kabupaten, sedangkan tahun 2024 Kabupaten Halmahera Selatan masih masuk dalam kategori inovatif dengan peningkatan nilai 55,24 namun mengalami penurunan peringkat ke 118 dari 415 Kabupaten.

2.6.2 Transformasi Digital

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dikembangkan oleh International Telecommunication Union (ITU) dengan nama ICT Development Index (ICT-DI). Indeks Pembangunan TIK merupakan ukuran standar tingkat pembangunan TIK di suatu wilayah yang dapat diperbandingkan antarwaktu dan antarwilayah. Selain itu, Indeks Pembangunan TIK mengukur pertumbuhan pembangunan TIK, mengukur kesenjangan digital antarwilayah, dan mengukur potensi pembangunan TIK.

Di dalam penghitungannya terdapat 11 indikator penyusun IP-TIK yang terbagi menjadi 3 subindeks yaitu subindeks akses dan infrastruktur TIK, subindeks penggunaan TIK, dan subindeks keahlian TIK. Data yang digunakan untuk penghitungan Indeks Pembangunan TIK bersumber dari BPS dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Dengan Kategori penilaian Indeks Pembangunan TIK yaitu tinggi (7,51 – 10), sedang (5,01-7,50), rendah (2,51-5,00), sangat rendah (0 - 2,50).

Minimnya jaringan di wilayah terpencil serta belum optimalnya integrasi sistem menjadi permasalahan dalam indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi dapat dilihat pada tabel 2.54.

Tabel 2.54
Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi

NO	INDIKATOR	SATUAN	HASIL EVALUASI CAPAIAN PEMBANGUNAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi	Indeks (0-10)	-	-	-	5,56 (Sedang) (Provinsi)	-

Sumber : Indeks Pembangunan Teknologi Informasi Dan Komunikasi - Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata - Badan Pusat Statistik (BPS)

2.6.3 Perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi

Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak Sejak tahun 2019, rumah tangga diklasifikasikan memiliki akses terhadap hunian/rumah layak huni apabila memenuhi 4 (empat) kriteria, yaitu:

- kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m² per kapita (sufficient living space);

- b. Memiliki akses terhadap air minum layak;
- c. Memiliki akses terhadap sanitasi layak;
- d. Ketahanan bangunan (durable housing), yaitu atap terluas berupa beton/ genteng/ seng/ kayu/ sirap; dinding terluas berupa tembok/ plesteran anyaman bambu/kawat, kayu/papan dan batang kayu; dan lantai terluas berupa marmer/ granit/ keramik/ parket/vinil/karpet/ ubin/tegel/teraso/ kayu/papan/ semen/bata merah.

Selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 menunjukan tingkat rumah tangga terhadap akses layanan hunian layak memberikan hasil yang cenderung meningkat sebesar 41,67% atau sebanyak 623 unit. Adapun rumah tangga dengan akses hunian yang layak dapat dilihat pada Tabel 2.55.

Tabel 2.55
Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak

NO	INDIKATOR	SATUAN	HASIL EVALUASI CAPAIAN PEMBANGUNAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak	Unit	445	750	857	1.028	1.068
		%	30,43	28,06	25,88	24,34	23,7

Sumber : Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2025

Indeks Desa adalah indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan dan kemandirian desa dalam rangka pencapaian sasaran Pembangunan Desa yang berkelanjutan. lebih lanjut status desa di kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2024 terdapat 5 Desa Sangat tertinggal, 154 Desa Tertinggal, 69 Desa berkembang, 12 Desa Maju dan 9 Desa Mandiri dengan rincian Desa mandiri yaitu Desa Laiwui Kecamatan Obi, Desa Tomori Kecamatan Bacan, Desa Hidayat Kecamatan Bacan, Desa Kampung Makian Kecamatan Bacan Selatan, Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan, Desa Papaloang Kecamatan Bacan Selatan, Desa Tembal Kecamatan Bacan Selatan, Desa Panamboang Kecamatan Bacan Selatan, Desa Dolik Kecamatan Bacan Selatan. sebaaimana dapat dilihat pada tabel 2.56.

Tabel 2.56
Rekapitulasi Indeks Desa Membangun Kabupaten Halmahera Selatan
Tahun 2020-2024

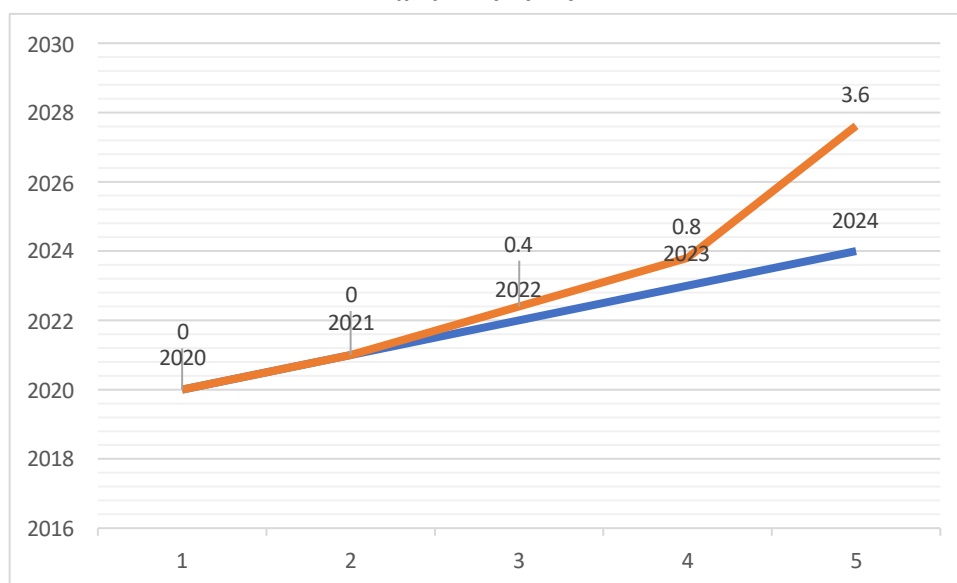
Status Desa	2020	2021	2022	2023	2024
Sangat	21 Desa	21 Desa	17 Desa	8 Desa	5 Desa
Tertinggal					

Status Desa	2020	2021	2022	2023	2024
Tertinggal	170 Desa	170 Desa	167 Desa	161 Desa	154 Desa
Berkembang	48 Desa	48 Desa	53 Desa	67 Desa	69 Desa
Maju	10 Desa	10 Desa	11 Desa	11 Desa	12 Desa
Mandiri			1 Desa	2 Desa	9 Desa
Jumlah Total	249 Desa	249 Desa	249 Desa	249 Desa	249 Desa

Sumber : Indeks Desa Membangun

Desa mandiri pada tahun 2020 – 2024 terjadi kenaikan presentase Desa Mandiri 3,6 %. Kenaikan tidak terjadi hanya pada tahun 2020-2021 dikarenakan Covid – 19. Sebagaimana dapat dilihat pada grafik 2.8.

Grafik 2.8
Presentase Desa Mandiri Kabupaten Halmahera Selatan
Tahun 2020-2024



Sumber : Indeks Desa Mandiri 2020-2024

2.6.4 Stabilitas ekonomi makro

Rasio pajak terhadap PDRB adalah indikator ekonomi yang menunjukkan berapa besar penerimaan pajak suatu wilayah dibandingkan dengan total nilai ekonomi (PDRB) yang dihasilkan wilayah tersebut. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Halmahera Selatan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 naik sekitar 0,27 % dan sempat turun di tahun 2024. Kabupaten Halmahera Selatan dalam rasio Pajak Daerah terhadap PDRB dapat dilihat pada tabel 2.57.

Tabel 2.57
Rasio pajak daerah terhadap PDRB

NO	INDIKATOR	SATUAN	HASIL EVALUASIL CAPAIAN PEMBANGUNAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0.48%	0.46%	0.50%	0.75%	0.68%

Sumber : LHP |Tahun 2020-2023 (Audit)

Tingkat inflasi Kabupaten Halmahera Selatan masih mengacu pada tingkat inflasi Kota Ternate dan Provinsi Maluku Utara dimana pada Januari 2024 terjadi inflasi Year on Year (y-on-y) Provinsi Maluku Utara sebesar 4,33 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,69 dan terendah terjadi di Kota Ternate sebesar 4,19 persen dengan IHK sebesar 106,48. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks pada 10 kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 7,36 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 7,89 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,52 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,88 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,94 persen; kelompok transportasi sebesar 4,33 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 2,38 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,81 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,81 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,14 persen. Sementara kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan terjadi penurunan indeks sebesar 0,12 persen.

Perkembangan harga berbagai komoditas pada Januari 2024 secara umum di Provinsi Maluku Utara menunjukkan adanya kenaikan harga. Berdasarkan hasil pemantauan BPS Provinsi Maluku Utara Kota Ternate, pada Januari 2024 terjadi inflasi Year on Year (y-on-y) sebesar 4,33 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 102,26 pada Januari 2023 menjadi 106,69 pada Januari 2024. Tingkat deflasi month to month (m-to-m) Januari 2024 sebesar 0,02 persen dan tingkat deflasi year to date (y-to-d), Januari 2024 terhadap Desember 2023 sebesar 0,02 persen. Adapun indeks harga konsumen dan Tingkat inflasi dapat dilihat pada Tabel 2.58.

Tabel 2.58
IHK dan Tingkat Inflasi Month to Month (m-to-m), Year to Date (y-to-d), dan
Year on Year (y-on-y) Provinsi Maluku Utara Menurut Kelompok Pengeluaran
(2022=100), Januari 2024

Kelompok Pengeluaran	IHK Januari 2023	IHK Desember 2023	IHK Januari 2024	Tingkat Inflasi m-to-m Januari 2024*) (%)	Tingkat Inflasi y-to-d Januari 2024**) (%)	Tingkat Inflasi y-on-y Januari 2024***) (%)	Andil Inflasi m-to-m Januari 2024 (%)	Andil Inflasi y-on-y Januari 2024 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Umum (Headline)	102,26	106,71	106,69	-0,02	-0,02	4,33	-0,02	4,33
Makanan, Minuman, dan Tembakau	103,28	110,35	110,88	0,48	0,48	7,36	0,16	2,40
Pakaian dan Alas Kaki	100,97	108,93	108,94	0,01	0,01	7,89	0,00	0,38
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah tangga	100,96	102,47	102,49	0,02	0,02	1,52	0,00	0,30
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	101,78	103,99	103,69	-0,29	-0,29	1,88	-0,01	0,08
Kesehatan	99,95	100,69	100,89	0,20	0,20	0,94	0,00	0,01
Transportasi	107,16	113,39	111,80	-1,40	-1,40	4,33	-0,16	0,48
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	100,01	99,90	99,89	-0,01	-0,01	-0,12	0,00	-0,01
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	102,20	104,64	104,63	-0,01	-0,01	2,38	0,00	0,03
Pendidikan	100,00	102,81	102,81	0,00	0,00	2,81	0,00	0,07
Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran	100,54	103,22	103,37	0,15	0,15	2,81	0,01	0,22
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	100,89	106,39	106,08	-0,29	-0,29	5,14	-0,02	0,37

Ket: *) : Persentase perubahan IHK Januari 2024 terhadap IHK Desember 2023.

**) : Persentase perubahan IHK Januari 2024 terhadap IHK Desember 2023.

***) : Persentase perubahan IHK Januari 2024 terhadap IHK Januari 2023.

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks pada 10 kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 7,36 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 7,89 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,52 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,88 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,94 persen; kelompok transportasi sebesar 4,33 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 2,38 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,81

persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,81 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,14 persen. Sementara kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan terjadi penurunan indeks sebesar 0,12 persen.

Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y pada Januari 2024 antara lain: beras, bahan bakar rumah tangga, angkutan udara, Sigaret Kretek Mesin (SKM), cabai rawit, cabai merah, kue kering berminyak, bawang merah, ikan cakalang/ikan sisik, gula pasir, bawang putih, kue basah, sabun mandi, tomat, angkutan laut, ketimun, sekolah menengah atas, shampo, dan angkutan antar kota. Sedangkan komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y, antara lain: kangkung, cat tembok, minyak goreng, telur ayam ras, ikan lolosi, bayam, cakalang diawetkan, ikan kakap merah, seng, sabun cair/cuci piring, tahu mentah, jeruk nipis/limau, ikan bubara, cumi-cumi, semen, dan sawi hijau.

Sementara komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan deflasi m-to-m, antara lain: cabai rawit, cabai merah, angkutan udara, kangkung, bayam, ikan teri, kacang panjang, sawi hijau, parfum, terong, dan pisang. Sedangkan komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi m-to-m pada Januari 2024, antara lain: bawang merah, ikan malalugis/ikan sorihi, ikan cakalang/ikan sisik, tomat, ikan selar/ikan tude, beras, cakalang diawetkan, bawang putih, ikan tongkol/ikan ambu-ambu, ikan kembung/ikan gembung/ikan banyar/ikan gembolo/ikan aso-aso, ikan ekor kuning, wortel, dan tauge/kecambah.

Pada Januari 2024, kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,40 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,38 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,30 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,08 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,01 persen; kelompok transportasi sebesar 0,48 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,03 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,07 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,22 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,37 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y, yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,01 persen.

2.7 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.7.1 Regulasi Dan Tata Kelola Yang Berintegrasi Dan Adaptif

Indeks Reformasi Hukum adalah alat ukur sejauh mana reformasi hukum yang telah dilakukan suatu daerah. Indikator ini penting karena untuk mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang adaptif diperlukan upaya perbaikan dan sinkronisasi produk hukum antar lintas kelembagaan. Berdasarkan hasil capaian Kabupaten Halmahera Selatan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 masih dikategori nilai C. Untuk itu strategi dalam rangka meningkatkan indeks reformasi hukum dilakukan melalui peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana yang memadai.

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai upaya untuk memantapkan pelayanan berbasis digital sekaligus mempermudah dalam transformasi data dalam organisasi pemerintah daerah kabupaten halmahera selatan, untuk menghasilkan birokrasi pemerintah yang integratif, dinamis, transparan dan inovatif serta peningkatan pelayan publik yang terpadu, efektif, responsif dan adaptif.

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah kepada masyarakat. IPP dihitung berdasarkan evaluasi terhadap berbagai aspek pelayanan, termasuk kebijakan pelayanan, profesionalisme sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan publik. Sebagaimana indeks pelayanan publik di Kabupaten Halmahera Selatan dapat dilihat pada tabel 2.52.

Tabel 2.59
Indeks Pelayanan Publik

NO	INDIKATOR	SATUAN	HASIL EVALUASI CAPAIAN PEMBANGUNAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	-	-	3,65 (B)	2,51 (C)	2,23 (C-)

Sumber : Ombudsman Maluku Utara Tahun 2024

Dari tabel diatas permasalahan indeks di Kabnupaten Halmahera Selatan yaitu Belum Adanya Inovasi Pelayanan Publik, Masih terdapat kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi aparatur dalam memberikan pelayanan yang efektif dan efisien, Beberapa unit layanan masih menghadapi keterbatasan dalam hal fasilitas fisik yang memadai untuk mendukung pelayanan publik yang optimal, Perlu adanya standarisasi prosedur pelayanan

yang jelas dan konsisten di seluruh unit layanan untuk memastikan kualitas pelayanan yang merata, Mekanisme pengaduan masyarakat perlu ditingkatkan agar lebih responsif dan efektif dalam menanggapi keluhan serta masukan dari masyarakat.

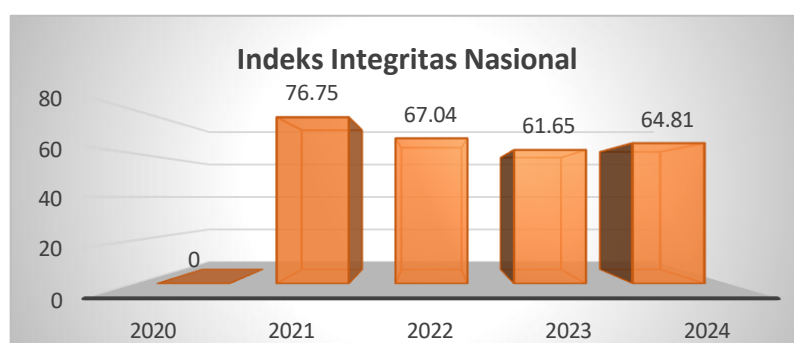
Indeks Integritas Nasional adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat integritas atau kejujuran dalam tata kelola pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Indeks ini dikembangkan untuk memantau dan mengevaluasi praktik anti-korupsi, transparansi, akuntabilitas, serta sistem pengendalian internal dalam lembaga-lembaga pemerintahan.

Di Indonesia, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mengembangkan Survei Penilaian Integritas (SPI) di Kabupaten Halmahera Selatan sebagai instrumen untuk menyusun Indeks Integritas Nasional. Adapun Komponen yang Diukur dalam SPI yaitu :

- Pengadaan barang dan jasa
- Perizinan
- Penerimaan non-pajak dan layanan publik
- Transparansi anggaran
- Pengelolaan SDM
- Sistem pelaporan dan pengaduan
- Budaya anti-korupsi

Skor dan Cakupan indeks berkisar antara 0 sampai 100, di mana semakin tinggi skornya, semakin baik integritas instansi tersebut. Hal ini dapat dilihat indeks integritasi nasional di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan dapat disajikan pada Grafik 2.9 dibawah ini.

Grafik 2.9
Indeks Integritas Nasional



Sumber : Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan, Tahun 2025

Seperti pada diagram di atas Capaian SPI dari tahun ke tahun menunjukkan tren penurunan, dari 76,75 hingga mencapai titik terendah 61,65, sebelum sedikit meningkat menjadi 64,81. Seluruh nilai ini berada dalam kategori rentan dan waspada, yang menandakan bahwa integritas di lingkungan instansi masih lemah dan berisiko tinggi terhadap praktik penyimpangan

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) adalah indikator yang digunakan oleh pemerintah Indonesia—melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB)—untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Adapun Tujuan Utama Indeks Rreformasi Birokrasi

- Menilai efektivitas pelaksanaan program reformasi birokrasi.
- Mendorong terciptanya birokrasi yang bersih, efektif, akuntabel, dan melayani.
- Memberikan insentif (dalam bentuk tunjangan kinerja) berdasarkan capaian reformasi.

Adapun Komponen Penilaian IRB dinilai berdasarkan 8 area perubahan utama reformasi birokrasi:

1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Peraturan Perundang-undangan
3. Penataan dan Penguatan Organisasi
4. Penataan Tata Laksana (Prosedur Bisnis)
5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
6. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
7. Penguatan Pengawasan
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Setiap area memiliki indikator dan bobot penilaian tersendiri dan Skala Penilaian IRB Skor IRB: 0– 100 Dikelompokkan menjadi kategori : > 80 = Sangat Baik, 70–80 = Baik, 60–70 = Cukup, < 60 = Kurang. Berikut Indeks Reformasi Kabupaten Halmahera Selatan dapat dilihat pada Tabel 2.60.

Tabel 2.60
Indeks Reformasi Birokrasi

NO	INDIKATOR	SATUAN	HASIL EVALUASI CAPAIAN PEMBANGUNAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Indeks reformasi birokrasi	Indeks	-	-	38.41 (C)	36.50 (C)	63.63

Sumber : Kementerian Pendayaagunaan Aparatur dan reformasi Birokrasi Tahun 2025

Adapun permasalahan IRB di Kabupaten Halmahera Selatan yaitu Sebagian Indikator Utama belum ditetapkan, Penetapan Sasaran Strategis Pemda dan OPD belum sepenuhnya tepat dan baik yang digunakan belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART dan Cukup untuk mengukur keberhasilan sasasaran RB Tematik.

2.7.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Yang Tangguh, Dan Demokrasi Substansial

Persentase penegakan Peraturan Daerah (PERDA) mengukur sejauh mana Perda yang memuat sanksi ditegakkan oleh pemerintah daerah melalui aparat penegak hukum seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Indikator ini penting untuk menilai efektivitas implementasi regulasi daerah dalam menjaga ketertiban dan kepatuhan masyarakat. Kabupaten halmahera Selatan dalam penegakan 3 (Tiga) PERDA cakupan pelaksanaannya dari tahun 2020 – 2024 adalah 100% sebagaimana terlihat pada Tabel 2.61 dibawah ini:

Tabel 2.61
Presentase Penegakan PERDA

NO	INDIKATOR	SATUAN	HASIL EVALUASI CAPAIAN PEMBANGUNAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Presentase Penegakan PERDA	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025

Presentase Capaian Aksi Ham Pelaksanaan pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia Kabupaten Halmahera Selatan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan,

Evaluasi, dan Pelaporan, serta Sekretariat Panitia Nasional Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional HAM 2021-2025, merupakan dasar hukum pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM Tahun 2021-2025. RANHAM dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional HAM 2021-2025 ini, terdapat 4 (empat) kelompok sasaran Aksi HAM Daerah, yaitu perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat adat. Adapun sasaran strategi RANHAM dan empat fokus Aksi HAM Kabupaten Halmahera Selatan yaitu:

- **Hak Perempuan**

Kelompok perempuan menjadi fokus sasaran kelompok RANHAM karena belum maksimalnya perlindungan dan pemenuhan hak terhadap perempuan di berbagai bidang pembangunan. Secara rinci, jaminan perlindungan perempuan di dalam RANHAM didasarkan pada tantangan dan sasaran strategis sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.62 dibawah ini:

Tabel 2.62
Sasaran Strategis Perlindungan HAM Kelompok Perempuan

TANTANGAN	SASARAN STRATEGIS
(1)	(2)
Masih adanya kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang diskriminatif terhadap perempuan di Kabupaten Halmahera Selatan.	Kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang tidak diskriminatif terhadap perempuan di Kabupaten Halmahera Selatan
Minimnya upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dalam kegiatan dan peluang usaha, baik oleh badan usaha milik daerah maupun pihak swasta.	Meningkatnya upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dalam kegiatan dan peluang usaha, baik oleh badan usaha milik daerah maupun pihak swasta.
Belum optimalnya pemenuhan hak dan layanan bantuan hukum bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan Kelompok Masyarakat Adat yang berhadapan dengan hukum.	Terpenuhinya hak dan layanan bantuan hukum bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan Kelompok Masyarakat Adat yang berhadapan dengan hukum, meliputi:

TANTANGAN	SASARAN STRATEGIS
(1)	(2)
	a. peningkatan sensitivitas gender aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penanganan perkara perempuan berhadapan dengan hukum; b. Penyediaan layanan bantuan hukum, kesehatan, dan psikososial yang efektif bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan Kelompok Masyarakat Adat berhadapan dengan hukum; c. Pelaksanaan pemulihan secara menyeluruh dan efektif bagi perempuan berhadapan dengan hukum.
Rendahnya akses perempuan dalam situasi khusus terhadap pelayanan publik dan penghidupan yang layak, seperti kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan.	Meningkatnya akses perempuan dalam situasi khusus terhadap pelayanan publik dan penghidupan yang layak, seperti d. kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan

- **Hak Anak**

Anak menjadi salah satu kelompok sasaran RANHAM dengan dasar pemikiran bahwa masih terdapat anak-anak dalam situasi khusus tidak mendapatkan hak-hak dasar dan pelayanan publik, terutama untuk bidang administrasi kependudukan, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, anak-anak juga masih sangat rentan mendapatkan tindakan kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, termasuk di bidang ketenagakerjaan. Secara rinci, jaminan perlindungan anak di dalam RANHAM didasarkan pada tantangan dan diarahkan pada sasaran strategis berikut ini:

Tabel 2.63
Sasaran Strategis Perlindungan HAM Kelompok Anak

TANTANGAN	SASARAN STRATEGIS
(1)	(2)
Belum optimalnya pemenuhan hak-hak dasar terhadap anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, terutama di bidang administrasi kependudukan, pendidikan, dan kesehatan.	Terpenuhinya pelayanan hak-hak dasar terhadap anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, terutama di bidang administrasi kependudukan, pendidikan, dan kesehatan.
Masih adanya tindakan kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, termasuk di ranah siber dan digital.	Menguatnya jaminan perlindungan dan penegakan hukum bagi anak-anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, termasuk di ranah siber dan digital.
Belum optimalnya pelaksanaan sistem peradilan pidana anak, terutama dalam penyusunan peraturan pelaksana sistem peradilan pidana anak.	peradilan pidana anak, terutama dalam penyusunan peraturan pelaksana sistem peradilan pidana anak. Tersusunnya regulasi turunan terkait sistem peradilan pidana anak dan efektifnya pelaksanaan sistem peradilan pidana anak.
Belum efektifnya penanganan anak korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).	tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Efektivitas upaya pencegahan dan penanganan kasus anak korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Belum optimalnya penanganan pekerja anak sesuai dengan standar Konvensi Hak Anak di berbagai sektor, khususnya terkait kegiatan usaha yang dikelola oleh badan usaha milik daerah dan swasta.	Menguatnya penanganan pekerja anak sesuai dengan standar Konvensi Hak Anak di berbagai sektor, khususnya terkait kegiatan usaha yang dikelola oleh badan usaha milik daerah dan swasta.

- **Hak Penyandang Disabilitas**

Penyandang disabilitas menjadi kelompok sasaran RANHAM, karena meskipun telah ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak-hak kelompok tersebut masih belum efektif dan optimal. Secara rinci, jaminan perlindungan penyandang disabilitas di dalam RANHAM didasarkan pada tantangan dan diarahkan pada sasaran strategis dapat dilihat pada Tabel 2.64 dibawah ini:

Tabel 2.64
Sasaran Strategis Perlindungan HAM Kelompok Disabilitas

TANTANGAN	SASARAN STRATEGIS
(1)	(2)
Belum optimalnya perumusan peraturan-peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.	Penguatan regulasi dan kebijakan yang menjamin hak-hak penyandang disabilitas dalam peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Masih minimnya penyediaan pelayanan hak-hak dasar bagi penyandang disabilitas, meliputi: a. Ketersediaan dan kualitas layanan sekolah inklusi; b. Ketersediaan layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas, di pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama; c. Jumlah kuota pekerja penyandang disabilitas di sektor pemerintahan, badan usaha milik daerah dan swasta; d. Layanan keuangan ekonomi inklusif bagi penyandang disabilitas; dan e. Pemenuhan hak perlindungan sosial	Meningkatnya akses pelayanan hak-hak dasar bagi penyandang disabilitas, meliputi: a. Peningkatan ketersediaan dan kualitas layanan sekolah inklusi; b. Peningkatan jumlah pelayanan kesehatan yang akses bagi penyandang disabilitas, di pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama; c. Tercapainya kuota pekerja penyandang disabilitas di sektor pemerintahan, badan usaha milik daerah dan swasta; d. Tersedianya Layanan Keuangan Ekonomi Inklusi bagi penyandang disabilitas; dan e. Tersedianya hak perlindungan sosial penyandang disabilitas

TANTANGAN	SASARAN STRATEGIS
(1)	(2)
penyandang disabilitas.	
Belum adanya data terpilah yang terintegrasi di semua sektor pemerintahan dan lembaga tentang penyandang disabilitas.	Tersedianya sistem pendataan terpilah yang terintegrasi di semua sektor pemerintahan dan lembaga tentang penyandang disabilitas.
Belum memadainya akomodasi yang layak dan aksesibilitas penyandang disabilitas di bidang: - Transportasi darat, udara, dan laut; - Tempat ibadah dan fasilitas publik lainnya; dan Sistem peradilan inklusif.	Terpenuhinya hak-hak akomodasi yang layak, aksesibilitas, dan sistem informasi bagi penyandang disabilitas di bidang: - Transportasi darat, udara, dan laut; - Tempat ibadah dan fasilitas publik lainnya; dan Peradilan inklusif.

- **Hak Kelompok Masyarakat Adat**

Kelompok Masyarakat Adat menjadi sasaran kelompok RANHAM dengan dasar pemikiran bahwa hingga saat ini belum tersedia kerangka perlindungan hukum yang memadai bagi Kelompok Masyarakat Adat dan pelanggaran hak atas lahan Kelompok Masyarakat Adat masih sering terjadi. Secara rinci, jaminan perlindungan Kelompok Masyarakat Adat di dalam RANHAM didasarkan pada tantangan dan diarahkan pada sasaran strategis sebagaimana disajikan pada Tabel 2.65 dibawah ini:

Tabel 2.65
Sasaran Strategis Perlindungan HAM Kelompok Masyarakat Adat

TANTANGAN	SASARAN STRATEGIS
(1)	(2)
Belum memadainya perlindungan hukum bagi Kelompok Masyarakat Adat.	Menguatnya jaminan hukum dan kebijakan perlindungan terhadap Kelompok Masyarakat Adat.
Masih adanya kasus-kasus konflik lahan yang melibatkan Kelompok Masyarakat Adat.	Peningkatan penyelesaian jumlah konflik lahan Kelompok Masyarakat Adat berbasis HAM.
Kurangnya pelibatan masyarakat adat	Peningkatan partisipasi masyarakat adat

TANTANGAN	SASARAN STRATEGIS
(1)	(2)
dalam proses perizinan perusahaan yang potensial berdampak pada hak-hak Kelompok Masyarakat Adat, khususnya badan usaha daerah.	dalam proses perizinan perusahaan yang potensial berdampak pada hak-hak Kelompok Masyarakat Adat, khususnya badan usaha milik daerah.

Dalam hal melakukan pelaporan aksi HAM Kabupaten Halmahera setiap tahun dilakukan pelaporan per caturwulan (B04, B08, B12) dengan memenuhi empat kelompok sasaran yaitu perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat adat. Berikut capaian HAM Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2021 – 2024 di gambarkan pada Tabel 2.66.

Tabel 2.66
Capaian Aksi HAM Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2021 – 2024

TAHUN	HASIL PELAPORAN			NILAI	
	CATURUWULAN			CAPAIAN	KETERANGAN
	B04	B08	B12		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2021	54.47	68.06	0	40.84	
2022	23.50	95.00	97.08	71.86	
2023	0	0	44.29	14.76	
2024	0	80.83	80	53.61	

Sumber: Capaian Aksi HAM Kemenkumham 2021 – 2024 (data diolah)

Dari Tabel 2.65 di atas menggambarkan capaian Aksi HAM Kabupaten Halmahera Selatan pada Tahun 2021 – 2024 mengalami fluktuatif, hal ini di karenakan masih lemahnya OPD terkait dalam menindaklanjuti indikator-indikator Aksi HAM. Beberapa kelemahan dan kendala yaitu:

1. Implementasi Perbub Bantuan Hukum yang belum terlaksana secara merata;
2. Masih kurangnya partisipasi dan akses perempuan kepala keluarga pada bidang usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Halmahera Selatan;

3. Masih minimnya akses layanan serta sarana dan prasarana pendidikan/sekolah inklusi bagi penyandang disabilitas yang tersebar di Kabupaten Halmahera Selatan;
4. Belum adanya layanan kesehatan jiwa yang memenuhi standar bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Halmahera Selatan, sehingga dalam beberapa Tahun terakhir penanganan terhadap pasien kesehatan jiwa harus dilakukan di Rumah Sakit Sofifi;
5. Masih minimnya aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di perkantoran serta sektor transportasi darat, laut, dan udara di Kabupaten Halmahera Selatan;
6. Masih belum maksimalnya layanan bantuan Hukum bagi perempuan dan anak, hal ini berkaitan dengan masih kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung terkait layanan tersebut;

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. IDI dihitung berdasarkan tiga aspek utama: kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi. Setiap aspek terdiri dari beberapa variabel dan indikator yang mencerminkan kondisi demokrasi di tingkat nasional dan provinsi.

Adapun Aspek-Aspek IDI

1. Kebebasan Sipil: Menilai sejauh mana individu dapat menikmati kebebasan pribadi tanpa campur tangan negara.
2. Hak-Hak Politik: Mengukur partisipasi politik masyarakat, termasuk pemilu dan kebebasan berpendapat.
3. Lembaga Demokrasi: Evaluasi terhadap kualitas lembaga-lembaga demokrasi, seperti parlemen dan sistem hukum.

Indeks demokrasi Kabupaten Halmahera Selatan di hitung pada saat penyelenggaraan pemilu selesai sebagaimana Tabel 2.67 dibawah ini:

Tabel 2.67
Indeks Demokrasi Indonesia

NO	INDIKATOR	SATUAN	HASIL EVALUASI CAPAIAN PEMBANGUNAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Indeks Demokrasi Indonesia	%	71,68				

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2025

Indeks Rasa Aman adalah suatu ukuran atau indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana masyarakat merasa aman dalam kehidupan sehari-hari, baik secara fisik, sosial, maupun psikologis. Indeks ini biasanya dikembangkan oleh pemerintah, lembaga riset, atau organisasi internasional untuk membantu memahami persepsi dan realitas keamanan di suatu wilayah.

Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IKKU) adalah indikator yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk mengukur tingkat keberhasilan daerah dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan tenteram bagi masyarakat. Indeks ini sering digunakan dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah dan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Adapun tujuan IKKU adalah sebagai berikut :

1. Menilai efektivitas upaya pemerintah daerah dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
2. Menjadi indikator kinerja Satpol PP, Dinas Damkar, dan perangkat lainnya.
3. Dasar perencanaan dan peningkatan pelayanan publik terkait keamanan dan ketertiban.

Komponen Penilaian IKKU dihitung berdasarkan beberapa variabel utama, seperti:

1. Jumlah kejadian gangguan ketertiban umum (tawuran, pengemis, pelanggaran Perda)
2. Jumlah pelanggaran terhadap Perda/Perkada yang berhasil ditindak
3. Tingkat respons Satpol PP terhadap aduan masyarakat
4. Jumlah kegiatan patroli dan pengawasan
5. Efektivitas penanganan kerawanan sosial

Setiap indikator dinilai dan diolah untuk menghasilkan skor akhir dalam bentuk indeks. Skala Penilaian IKKU adalah :

- Rentang nilai: 0 – 100
 - > 80 = Sangat Tertib dan Tenram
 - $70-80$ = Tertib
 - $60-70$ = Cukup Tertib
 - < 60 = Kurang Tertib

Berikut nilai indeks ketenteraman dan ketertiban di Kabupaten Halmahera Selatan menunjukkan nilai positif dan dalam kondisi terkendali sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.68 dibawah ini.

Tabel 2.68
Indeks Ketentraman Dan Ketertiban

NO	INDIKATOR	SATUAN	HASIL EVALUASI CAPAIAN PEMBANGUNAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Indeks Ketentraman Dan Ketertiban	Skala	100	100	100	100	100

Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2025

2.7.3 Ketangguhan Diplomasi Dan Pertahanan Budaya Gentar Kawasan

Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan berkelanjutan. Indikator yang diukur antara lain: produktivitas total daerah, laju pertumbuhan investasi, pendapatan per kapita, laju pertumbuhan ekspor, kualitas infrastruktur daerah, iklim investasi, tingkat kunjungan wisatawan mancanegara, dan kualitas SDM.

Kinerja Setiap Urusan Pemerintah Daerah

Sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2025–2029, perlu dilakukan evaluasi terhadap capaian kinerja setiap urusan pemerintahan daerah selama empat tahun terakhir, yakni periode 2021 hingga 2024. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan kewenangan masing-masing urusan, serta mengidentifikasi keberhasilan, kendala, dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penilaian dilakukan dengan mengacu pada indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan sebelumnya, sehingga dapat memberikan gambaran yang objektif terhadap capaian pembangunan daerah. Hasil evaluasi ini menjadi landasan penting dalam perumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan ke depan. Penyajian capaian kinerja setiap urusan pemerintahan daerah Kabupaten Halmahera Selatan selama periode Tahun 2021–2024, dapat dilihat pada Tabel 2.69 dibawah ini.

Tabel. 2.69
Capaian kinerja Setiap Urusan Pemerintah Daerah Empat Tahun Terakhir Tahun 2021 – 2024

BIDANG URUSAN / SKPD / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(9)	(10)
DINAS PENDIDIKAN											
Urusan Pendidikan											
Program Pengembangan Kurikulum	Prosentase sekolah dengan akreditasi minimal B	%	10,00	15	10%	20%	15%	25*	17%		
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru dengan Kualifikasi S1/S2	%	20,25	25	15%	35	20%	45	25%		
	Persentase Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik	%	40,00	40	15%	45	20%	50	255		
Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya akses pendidikan anak usia 4-6 tahun (PAUD)	% APS	25,00	26	25%	27	25%	28	25%		
	Meningkatnya akses pendidikan penduduk usia 7-12 Tahun (SD/MI)	% APM	97,90	97,90	70%	98,10	75%	98,30	85%		
	Meningkatnya akses pendidikan penduduk usia 13-15 Tahun (SMP/MTs)	% APM	75,60	77,00	50%	79,00	60%	81,00	65%		
	Meningkatnya akses pendidikan penduduk usia 7-	% APK	117,60	117,60	90.50%	117,60	91.20%	117,60	93.50%		

BIDANG URUSAN / SKPD / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(9)	(10)
	12 Tahun (SD/MI)										
	Meningkatnya akses pendidikan penduduk usia 13-15 Tahun (SMP/MTs)	% APK	91,89	92,39	60%	92,89	65%	93,39	70%		
	Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0,65	0,55	0.50	0,45	0,45%	0,35	0.30%		
	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%	4,81	4,71	3,31%	3,71	3,25%	2,71	2,00%		
	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	%	99,50	100	95%	100	96%	100	97%		
	Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA	%	78,00	80	75%	82	80%	84	82%		
	Persentase SD yang memenuhi prasarana dan sarana sesuai SNP	%	35,00	35	20%	40	25%	45	30%		
	Persentase SMP yang memenuhi prasarana dan sarana sesuai SNP	%	40,00	40	20%	45	25%	50	30%		
	Angka Melek Huruf usia > 15 tahun	%	98,05	98,20	90%	98,40	92%	98,60	92%		

BIDANG URUSAN / SKPD / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(9)	(10)
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase sekolah yang membebaskan siswa dari pungutan IURAN SEKOLAH (Gratis biaya pendidikan dari SD s.d SMP dan sederajat	%	100	100	100%	100	100%	100	100%		
DINAS KESEHATAN (A)											
Urusan Kesehatan											
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM yang memiliki sertifikat kesehatan	%	7,11	18,22		31,78		50		66,67	6,13
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Puskesmas yang terakreditasi	%	0	3,12	100	9,37	100	15,62	100	21,87	38
	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan layanan kesehatan	%	-	50						50	0
	Persentase layanan kesehatan pada event OR	%	-	100	100	100	100	100	100	100	0
	Presentase ketersediaan Obat dan perbekalan kesehatan	%	90	90		90		90		90	100
	Presentase penurunan	%	-							0	0

BIDANG URUSAN / SKPD / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(9)	(10)
	keracunan obat dan bahan makanan										
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	-	100		100		100		100	75,3
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit Kusta	%	-	100	100	100	100	100	98	100	52,4
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit Malaria	%	0	0	0,01	0	0,2	0		0	Api 0,57‰
	Persentase penurunan penyakit tidak menular	%								100	54
	Persentase desa dengan status ODF	%	0,8	1,2		4,02		9,62		19,24	34
	Persentase Balita Gizi Buruk	%	4,04	4,04	0,29	3,54	0,16	3,04		2,54	0,1
	Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100

BIDANG URUSAN / SKPD / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(9)	(10)
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Angka Kematian Bayi (AKB)	%	0,05	0,05	11,5	0,03	11,8	0,01		0,01	12
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan masyarakat terhadap air bersih	%	54,31	54,31	91	55	66	60		70	40
	Cakupan masyarakat terhadap sanitasi yang layak	%	45	47,5	4	50	71	60		65	75
RSUD LABUHA (BLUD)											
Urusan Kesehatan											
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat >80%	%	75,72	77,5	85	80	85	82,5	85	85,00	80,05
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Tingkat layanan kefarmasian (resep obat)	%	75	75	100	75	100	75	100	75,00	85
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (kelas III) melalui BPJS/KHS di RSUD Labuha	%	100	100		85		85		90,00	43,01
	Pelayanan rujukan dari RSUD Labuha ke RSUD Chasan Boesorie	%	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100

BIDANG URUSAN / SKPD / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(9)	(10)
	Ternate										
	Cakupan Pemulangan Jenazah dan Pemakaman Gratis	%	100	100		100		100		100,00	100
	Status / Tipe RS	Tipe	D	D	C	D	C	C	C	B	C
	Persentase pemenuhan SPM sarana prasarana rumah sakit	%	100	100	80	100	80	100	80	100,00	85
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (A)											
Urusan Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang											
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase infrastruktur irigasi dalam lahan pertanian	%	5%	6%	8%	7%	10%	8%	10%	9%	9%
	Persentase lahan pertanian yang teraliri irigasi	%	300(18%)	320 Ha (19 %)	19%	350Ha (21%)	21%	375 Ha (22 %)	22%	400 Ha (24%)	24%
	Persentase kawasan sumber air baku untuk pertanian yang tersedia dan terpelihara	%	50%	51%		53%		55%		58%	55%

BIDANG URUSAN / SKPD / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(9)	(10)
	Persentase kawasan sumber air baku untuk air minum yang tersedia dan terpelihara	%	27%	35%	0%	45%	0%	65%	0%	80%	0%
	Persentase berkurangnya Kawasan Rawan Longsor dan Abrasi	%	16%	17%		19%		21%		23%	23,5%
Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan baru yang terbangun	%	2,5%	1%	0,26%	1,5%	1,63%	0,5%	0,49%	12%	21,79%
	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik/Mantap	%	23%	23,61%	23,87%	24,00%	25,63%	25,70%	26,19%	25,00%	27,34%
	Persentase meningkatnya kondisi struktur jalan	%	23%	23,87%	23,87%	25,13%	25,63%	26,63%	26,19%	35,90%	42,82
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase saluran drainase yang berfungsi dengan baik	%	15%	25%	25,19%	37%	37%	50%	50%	65%	65%
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Peningkatan ratio tenaga ahli konstruksi bersertifikat	%	0%	5%	79%	10%	84%	20%	84,20%	30%	0
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase luas kawasan yang sesuai dengan fungsi dan	%	50%	50%	50%	65%	65%	75%	75%	90%	87%

BIDANG URUSAN / SKPD / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(9)	(10)
	peruntukannya dalam tata ruang										
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman											
Program Kawasan Permukiman	Persentase Pemenuhan Listrik Perkotaan (PJU)	%	60%	60%		70%		80%			
	Persentase Desa Yang Sudah Terakses Listrik	%	44%	44%		56%		68%			
	Persentase Desa Yang Memiliki PJU	%	55%	55%		67%		78%			
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN (A)											
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman											
Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	%	29%	27%	24,24%	25%	21%	23%	16%		
	Cakupan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana alam	%	60%	60%	97,90%	70%	97,90%	80%	97,90%		

BIDANG URUSAN / SKPD / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(9)	(10)
	Cakupan fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemda	%	100%	100%	0%	100%	0%	100%	0%		
Program Kawasan Permukiman	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	%	30%	28%	N/A	26%	9,45%	24%	9,45%		
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Luas Kawasan Kumuh Perkotaan	%	177,66%	100%	N/A	75%	9,45%	50%	9,45%		
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Lokasi Taman Kota Yang Dikelola	%	48,5%	0%	1,49%	25%	2,11%	43%	0,75%		
	Persentase Lokasi pemakaman Yang Dikelola	%	-	0%	14,20%	10%	21,31%	20%	21,31%		
Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Cakupan layanan PBG yang diterbitkan	%	N/A	0%	0%	0%	0%	10%	1%		
Urusan Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang											
Program Pengembangan Permukiman	Rasio bangunan yang ber IMB (Kawasan Perkotaan)	%	1%	1%	0%	5%	0%	10%	1%		

BIDANG URUSAN / SKPD / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(9)	(10)
Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase pemukiman yang tertata	%	10%	12%	0%	15%	0%	18%	0%		
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase penurunan lingkungan permukiman kumuh	%	20%	22%	N/A	24%	9,45%	26%	9,45%		
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rumah tangga pengguna air bersih (Cakupan RT yang memiliki akses air bersih yang layak)	%	54,31%	60%	59,69%	65%	61,54%	70%	61,64%		
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rumah Tangga Ber Sanitasi (Cakupan RT yang memiliki akses sanitasi yang layak)	%	56,25%	60%	68,40%	65%	50%	70%	50,02%		
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Proporsi drainase lingkungan dalam kondisi baik	%	60%	60%	25,72%	65%	32,82%	70%	35,47%		
DINAS LINGKUNGAN HIDUP (B)											
Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan											
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase usaha dan/ atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi	%	N/A	0	0	10	6	15	15	19,00%	15,00%

BIDANG URUSAN / SKPD / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(9)	(10)
	persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara										
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan LIMBAH B3	Jumlah limbh B3 yang dikelola	angka	N/A	0	0	10	16	15	3	18	5
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan	Persentase usaha/ kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	%	5,26	10,53	0	26,32	26,50	52,63	50,50	78,95%	65,00%
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Status pengelolaan kawasan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya		N/A	-	0	MOU, Survey dan Persiapan Kawasan	Belum ada MOU, Survey dan Persiapan Kawasan	Rencana Induk dan Rencana Aksi	Belum ada Rencana Induk dan Rencana Aksi	Action	Belum ada Rencana Induk dan Rencana Aksi
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB sesuai	%	50	50	0	50	40	50	0	45%	45%

BIDANG URUSAN / SKPD / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(9)	(10)
	RTRW										
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	N/A	0	0	11	11	16	11	22%	20%
Urusan Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang											
Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Penanganan Sampah Perkotaan Dengan Prinsip Menuju 3R	%	37%	45%	0	65%	29,75%	70%	30,90%	75,00%	0,00%
DINAS PERHUBUNGAN											
Urusan Perhubungan											
Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan darat dan laut	%	33%	35%	45%	40%	55%	45%	45%	50%	50%
	Persentase Desa yang terlayani Angkutan laut	%	53%	57%	65%	60%	65%	62%	62%	64%	64%

BIDANG URUSAN / SKPD / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(9)	(10)
	Persentase pengguna fasilitas Pemda di bandara	%	30%	33%	55%	40%	55%	50%	55%	60%	60%
	Persentase menurunnya tingkat Kecelakaan Darat	%	30%	28%	25%	26%	26%	23%	20%	19%	25%
	Persentase Menurunnya tingkat Kecelakaan Laut	%	<1%	<1%	<1%	<1%	<1%	<1%	<1%	0%	0%
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Keandaraan Yang Layak Operasi	%	75%	75%	70%	80%	75%	90%	80%	90%	95%
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN (A)											
Urusan Komunikasi dan Informatika											
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Desa Terlayani Jaringan Informasi	%	53%	53%	53%	63%	63%	74%	74%	83%	83%
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Implementasi E-Government di Kabupaten Halmahera Selatan	%	22%	22%	22%	44%	44%	66%	66%	88%	88%
Urusan Persandian											

BIDANG URUSAN / SKPD / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(9)	(10)
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Terpenuhiya Pengembangan dan Pengendalian Sandi Negara	%	0%	0%	0%	10%	10%	20%	20%	25%	25%
Urusan Statistik Daerah											
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase ketersediaan data dan informasi (Buku Profil Halsel, Buku PDRB, Buku Indikator Ekonomi, Buku IPM, Buku Inkesra, IKM) untuk perencanaan pembangunan	%	100	6 Dok(20.00)	3 Dok(10.00)	6 Dok(20.00)	3 Dok(10.00)	6 Dok(20.00)	4 Dok(17.00)	6 dok (20.00)	3 dok (10.00)
DINAS SOSIAL (A)											
Urusan Sosial											
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase pelayanan kelembagaan sosial di masyarakat	%	50,00	50,00	50,00	60,00	60,00	70,00	70,00		
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Menurunnya angka PMKS	%	22,46	20,42	20,42	18,39	18,00	16,36	16,36		
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase cakupan pelayanan sosial masyarakat	%	2,96	2,59	2,55	2,33	2,33	2,37	2,37		

BIDANG URUSAN / SKPD / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(9)	(10)
	Cakupan korban bencana yang menerima bantuan	%	22,50	30,00	20,00	40,00	35,00	50,00	48,00		
	Persentase tersedianya tenaga kesejahteraan sosial di tiap kecamatan	%	46,67	46,67		63,33		80,00			
	Persentase Pemberian Bantuan Tepat Guna dan Tepat Sasaran	%	70,00	70		100,00		100,00			
	Persentase cakupan pelayanan sosial keagamaan	%	2,96	2,59		2,33		2,37			
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (A)											
Urusan Pengendalian Penduduk dan KB											
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan Peserta KB Aktif	%	29,73	57,08	57,1	57,08	54,00	82,73	83,56	95,56	83
	Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR)	%	65,2	65,4	76,28	65,4	77,00	65,8	66,9	66,0	83

BIDANG URUSAN / SKPD / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(9)	(10)
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	10,6	10,4	22,34	10,2	29,00	10	25,46	9,91	10
	Persentase TRIBINA yang mendapatkan pembinaan berkelanjutan dari target 275 kel.	%	63,64	70,91	71,82	78,18	76,78	85,45	87,56	92,73	262
Program Pengendalian Penduduk	Persentase Menurunnya Keluarga Pra Sejahtera	%	14,30	13	12	12	12	11	11	10	0
	Persentase Meningkatnya Keluarga Sejahtera 1	%	32	0	32	34	33	35	33	36	0
	Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15 – 19 tahun)	%	3,8	3,7	3,9	3,6	3,9	3,5	3,7	3,4	3
	Persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun)	%	7,89	7	7	6,5	6,2	6	6	5,5	0,34
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase KK yang pendapatannya meningkat setelah diberikan bantuan	%	40	40	3,6	50		55		60	0

BIDANG URUSAN / SKPD / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(9)	(10)
	dari UPPKS										
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	50,87	0	52,24	50,93	47,72	50,97	49,91	51,01	74,86
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase penurunan angka KDRT	%	0,12	0,15	0,13	0,14	0,14	0,12	0,16	0,10	0,25
Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	0,17	0	100	0,16	100	0,15	100	0,13	0,05
Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Perlindungan Khusus Anak	Persentase jumlah tenaga kerja	%	N/A	< 5%	0	< 5%	0	< 5%	0	< 5%	

BIDANG URUSAN / SKPD / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(9)	(10)
	dibawah umur										
Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Kota Labuha sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak	%	5	10	0 (COVID)	20	46	40	52	60	54,5
	Persentase Kota Kecamatan Layak Anak	%	0	3,33	0 (COVID)	10,00	0	16,67	0	23,33	0
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (A)											
Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil											
Program Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk usia 17 tahun keatas yang memiliki e-KTP	%	48,86	50,01	69,29	59,57	79,44	69,14	89,59		
	Persentase penduduk usia 17 tahun kebawah yang memiliki KIA	%	N/A	0	17,4	2	27,22	5	28,79		
	Persentase Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga (KK)	%	25,10	50,01	62,87	59,57	98,74	69,14	99,93		
Program Pengelolaan Informasi Administrasi	Cakupan pelaksanaan	%	80	85,00	100,00	90,00	100,00	95,00	100,00		

BIDANG URUSAN / SKPD / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(9)	(10)
Kependudukan	sistem informasi administrasi kependudukan										
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase data kependudukan dan capil yang akurat dan akuntabel	%	75,00	80,00	75,22	85,00	87,25	90,00	93,32		
Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	%	14,22	15	78,87	20,00	98,23	30,00	98,72		
	Persentase cakupan bantuan akta/buku nikah gratis	%	N/A	0	52,57	20	53,17	40	57,69		
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN											
Urusan Perpustakaan											
Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah	%	57,7	66,85	66,85	75,14	75,14	83,43	83,43		
	Angka kunjungan perpustakaan	%	16,92	20	20	30	30	40	40		
	Persentase Perpustakaan Desa / Khusus yang Aktif	%	12,05	12,05	12,05	14,06	14,06	16,06	16,06		
Program Pelestarian Koleksi Nasional dan	Persentase koleksi nasional dan	%	N/A	5	0	10	1	15	2		

BIDANG URUSAN / SKPD / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(9)	(10)
Naskah Kuno	naskah kuno yang disimpan										
Urusan Kearsipan											
Program Pengelolaan Arsip	Tingkat pengelolaan arsip secara baku	%	0	0	0	20	20	40	40		
	Persentase dokumen penitng yang diarsipkan	%	0,42	0,69	0,65	24,31	24,31	50	50		
Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase arsip yang dimusnahkan dan diselamatkan	%	N/A	50	0	60	119	70	128		
Program Perijinan Penggunaan Arsip	Tingkat layanan informasi kearsipan	%	0	0	0	50	50	50	50		
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA											
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase SDM Aparatur Pemerintah Desa yang kapasitasnya meningkat	%	30,12	0	50%	60,24	65	70,28	89		
	Persentase desa yang telah memiliki prasarana pemerintahan	%	35,74	37,35	40,45	38,15	50	40,00	65		

BIDANG URUSAN / SKPD / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(9)	(10)
	desa dan berfungsi baik										
	Persentase Perempuan di Dalam Kelembagaan Desa	%	5	5	10	10	15	15	30		
	Rasio Posyandu Aktif	%	100	100	100	100	100	100	100		
	Rasio PKK Aktif	%	100	100	100	100	100	100	100		
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase BUMDES yang beroperasi aktif	%	7,23	0	3	21,29	25,09	33,82	35,00		
	Rata-rata peningkatan Pendapatan Asli Desa (PA Desa)	%	0	0	0	4,02	0	8,05	0		
	Rasio Produktifitas Pemanfaatan TTG	%	2,01	2,41	5,00	12,45	17,54	22,49	30		
	Tingkat peran serta kelembagaan masyarakat perdesaan	%	8,03	10,71	12	14,73	17,53	20,08	30,50		
Program Penataan Desa	Jumlah desa mandiri	Desa	1	1	0	5	0	10	1		
	Jumlah desa tertinggal	Desa	199	190	60,02	187	68,42	175	71,75		
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA											

BIDANG URUSAN / SKPD / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(9)	(10)
Urusan Trantib dan Perlindungan Masyarakat (Satpol-PP)											
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Ketersediaan Juknis SP / SOP Patrol, Penertiban, Penegakan Perda, Regulasi Penetapan Jumlah POL PP dan Regulasi PKD / Ketertiban Kantor	%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	100,00%	40,00%	100,00%	55,00%	100,00%
	Rasio Tenaga SATPOL PP Per 10.000 Penduduk	Per 10.000 Penduduk	4,41	5,00	100,00%	6,00	100,00%	7,00	100,00%	8,00	100,00%
	Rasio Linmas Terlatih Pamswakarsa per 10.000 penduduk;	Per 10.000 Penduduk	-	0	0,00%	0	0,00%	4,78	0,00%	9,55	0,00%
	Cakupan Keterlibatan dalam Pengendalian Kamtib di Daerah	Frekwensi Pengaman an	0 Kali dalam setahun	0,3 Kali	100,00%	0,3 Kali	100,00%	0,5 Kali	100,00%	0,5 Kali	100,00%
	Cakupan Patroli Siaga Trantib;	Frekwensi Patroli	0,03 Kali Per Wil	0,00 Kali	100,00%	0,20 Kali	100,00%	0,30 Kali	100oto%	0,90 Kali	100,00%
	Cakupan Penegakan Perda/K3;	%	41,40%	50%	100,00%	50%	100,00%	50%	100,00%	60%	100,00%
	Persentase Desa Tersosialisasi Standar Penyelenggaraan	%	--- %	--- %	0,00%	--- %	0,00%	24,10	0,00	30,00	0,00%

BIDANG URUSAN / SKPD / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(9)	(10)
	Linmas.										
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN											
Urusan Trantib dan Perlindungan Masyarakat (Pemadam Kebakaran)											
Program Penanggulangan Kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) kurang dari 24 jam	%	25	25	180	30	110	35	150		
SEKRETARIAT DAERAH (A)											
Program Penunjang											
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang terpenuhi	%	100	100	94%	100	95%	100	88%		
	Tersedianya informasi perencanaan, kinerja, dan keuangan OPD	%	100	5 dok (19,23)	96%	6 dok (42,31)	87%	5 dok (61,54)	85%		
Penataan Organisasi	Persentase Peningkatan Kinerja SKPD	%	6,67	20,00	53,47	37,04	55,85	51,85	56,03		

BIDANG URUSAN / SKPD / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(9)	(10)
	Minal CC										
	Hasil Penilaian Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah	skor	C	CC	CC	B	CC	B	CC		
<i>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</i>	Persentase pelayanan keprotokoleran dan komunikasi pimpinan	%	100	100							
Urusan Pemerintahan (Umum)											
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat											
<i>Administrasi Tata Pemerintahan</i>	Persentasi Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Kecamatan	%	100%	69 Desa	69 Desa	40 Desa	44 Desa	20 Desa	21 Desa		
	Persentase Tanah dan Bangunan Yang Termanfaatkan Untuk Pelayanan Masyarakat Kecamatan	%	70	75%		80		90			
<i>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</i>	Persentase pelayanan bansos	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	93%		
	Persentase pelaksanaan pembinaan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

BIDANG URUSAN / SKPD / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(9)	(10)
	keagamaan (MTQ, PABN dan PMBN)										
<i>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</i>	Persentase Jumlah Perda yang telah memiliki Perbup	%	35	45 Perbup	47 Perbup	40 Perbup	53 Perbup	50 Perbup	60 Perbup		
	Persentase pemberian bantuan Hukum (kasus)	%	50	100	4 Kasus	100	3 Kasus	100	25 Kasus		
Program Perekonomian Dan Pembangunan											
<i>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</i>	Persentase pengendalian inflasi daerah	%	100	100%	98%	100%	88%	100%	93%		
<i>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</i>	Persentase data monev pembangunan	%	100	100%	93%	100%	70%	100%	82%		
<i>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</i>	Persentase ASN yang memiliki sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa	%	100%	100%	98%	73%	95%	100%	84%		
	Persentase Peningkatan PBJ Tepat Waktu	% (Paket)	10	20	29%	50	38%	70	35%		
	Tercapainya ISO 9000	Kategori	Belum Sertifikasi	Belum		Persipan		TERSER TIFIKASI			
<i>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</i>	Persentase kajian pengelolaan SDA	%	100	100%	60%	100%	41%	100%	84%		
SEKRETARIAT DPRD (B)											

BIDANG URUSAN / SKPD / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(9)	(10)
Program Pemerintahan (Umum)											
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Ranperda yang disahkan	Perda	N/A	10	18	5	14	5	8	7	7
INSPEKTORAT DAERAH (A)											
Urusan Pemerintahan (Pengawasan)											
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase SKPD dan Desa mendapat temuan berindikasi tindak pidana korupsi	%	5,38	4,66	2,60	3,94	2,08	3,23	2,65	2,51	2,50
	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti	%	0,00	20,00	12,61	40,00	29,00	60,00	25,00	80,00	30,02
	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	%	58,49	60,00	80,14	70,00	76,05	80,00	72,12	90,00	70,00
	Maturitas Implementasi SPIP	Level	Level 1	Level 1	Level 2	Level 1	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3
	Persentase SKPD yang memiliki Nilai Evaluasi LAKIP/AKIP oleh Inspektorat Minimal B	%	20,00	23,33	20,00	55,56	22,22	74,01	46,66	81,48	53,33

BIDANG URUSAN / SKPD / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(9)	(10)
	Persentase Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi	%	60,00	70,00	56,75	80,00	45,23	90,00	62,22	92,50	62,79
	Level Kapabilitas APIP	Level	Level 1	Level 1	Level 3	Level 1	Level 3	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase pedoman pengawasan yang diterbitkan, digunakan dalam kegiatan pengawasan	%	N/A	100	100	100	100	100	100	100	100
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANGDA (A)											
Urusan Pemerintahan (Perencanaan)											
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tersedianya informasi perencanaan daerah	%	100	19	20	18,75	19	18,75	19	18,75	19,00
	Persentase Hasil Musrenbang Kecamatan yang terakomodir dalam RKPD	%	25	30	27	35	28	40	31	45	45,00
	Persentase kesesuaian antara Program RPJMD dengan RKPD	%	90	90	90	80	80	90	90	90,00	90,00

BIDANG URUSAN / SKPD / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(9)	(10)
	Persentase kesesuaian antara Program RKPD dengan PPAS	%	90	90	90	90	90	90	90	90	90,00
Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase luas wilayah yang peruntukannya telah sesuai dengan RTRW, RDTR dan Peraturan Zonasi	%		> 60%	35	> 60%	40	> 60%	50	>60	60,00
Program Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data evaluasi (Dok Evaluasi semesteran, Dok evaluasi tahunan, Dok Kemajuan Indeks Pembangunan Desa, Dok Laporan Monitoring)	%	100	5 dok (20.00)	100	5 dok (20.00)	100	5 dok (20.00)	100		
	Persentase Program RPJMD yang tercapai target kinerjanya	%	n.a	50	39	50	50	70	70	70	70
	Persentase OPD yang berkinerja baik (realisasi kinerja ≥ 76 %)	%	n.a	50	42	60	60	70	70	80	80

BIDANG URUSAN / SKPD / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(9)	(10)
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian program RPJMD dengan program OPD	%		95%	75%	95%	78%	95%	81%	80	80,00
Urusan Pemerintahan (Litbang)											
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Prosentase hasil penelitian dan pengembangan inovasi daerah yang dimanfaatkan oleh Pemda, masyarakat dan stakeholder lainnya	%	n.a	10	8	50	45	60	54	70	32,00
BADAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH (A)											
Urusan Pemerintahan (Keuangan Daerah)											
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase LKPD tepat waktu	%	Ya	Ya	100	Ya	100	Ya		Ya	0
	Persentase SKPD, UPTD, PUSKESMAS, dan Kecamatan yang menyusun LK secara mandiri dan sesuai SAP	%	2,46	6,56	85,00	35,25	85,00	59,02		82,79	0,00

BIDANG URUSAN / SKPD / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(9)	(10)
	Presentase Pemanfaatan Teknologi informasi berbasis IT yang berkesinambungan.	%	24,59	40,98	100,00	57,38	100,00	73,77		81,97	0,00
	Persentase Pemenuhan Dokumen Anggaran Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Presentase Peningkatan Realisasi Jumlah PAD/total Pendapatan Daerah.	%	46,97	50,00	89,00	55,00	78,00	60,00	103,00	0,00	0,00
	Presentase meningkatnya Jumlah kesadaran wajib pajak dan retribusi.	%	26,00	31,19	80,00	34,76	80,00	38,32	80,00	44,56	27,00
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase SKPD, UPTD, Kantor Camat dan Puskesmas yang tertib administrasi barang/aset daerah	%	24,59	32,79	90,00	35,25	90,00	59,02	90,00	0,00	0,00
Urusan Pertanahan											

BIDANG URUSAN / SKPD / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(9)	(10)
Program Penatagunaan Tanah	Presentase luas tanah yang dibebaskan untuk kebutuhan pembangunan daerah	%	21	20		20		20		20	1,07
Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Presentase luas tanah yang diselesaikan ganti rugi	%	40	45		50		60		70	
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH											
Urusan Pemerintahan (Kepegawaian dan Diklat)											
Program Kepegawaian Daerah	Persentasi Penurunan Pelanggaran Disiplin ASN (PP 53 Tahun 2010)	%	100 Pelanggaran (2,22)	10	10	10	10	10	10	10	10
	Persentase aparatur yang meningkat kapasitasnya	%	35	40	38	45	44	50	48	55	44
	Persentase ASN yang Mengakses Data Base Pegawai	%	10	15	15	30	30	50	50	70	70
	Persentase Peningkatan Karir Pegawai	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100

BIDANG URUSAN / SKPD / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(9)	(10)
	Persentase Peningkatan PNS dengan kualifikasi S1/S2/S3	%	35,21	38,67	36	39,17	37,4	40,07	38,2	39,57	40,02
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Meningkatnya Profesionalisme Pejabat Struktural	%	15,69	18,94	18,93	26,07	26	33,2	33,1	40,34	33,1
	Persentase Meningkatnya Profesionalisme Pejabat Fungsional	%	3,00	3	3	5	4	8	6	11	6
DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DANN KETAHANAN PANGAN (A)											
Urusan Pertanian											
Urusan Pertanian (Sub Sektor Tanaman Pangan)											
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produksi Tanaman Pangan :	ton	14.374	13.500	14.647	15.200	619	15.250	5205	5.945	1.011
	Produksi Tanaman Hortikultura :	ton	9.682	5500	9.338	10100	4.672,72	10250	4.958,72	9.906	1.487
	Produtivitas Tanaman Pangan :	ton	13,50	38	38	38	44	45,00	34,50	6.600	14,50
Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani yang mendapat penyuluhan	%	50	55	55	50	60	65	65	70	67,44
Urusan Pertanian (Sub Sektor Tanaman Perkebunan)											

BIDANG URUSAN / SKPD / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(9)	(10)
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Produksi tanaman perkebunan:	ton	28.238,00		29.241,00		28.239,00		24.688,00	28.163	28.091
	Produtivitas tanaman perkebunan:	ton	9.978		10.039		9.940		9.800	3.524	9.903
	Persentase Jalan Usaha Tani yang terbangun dari target	%	0,00	50,00	33,00	60,00	100,00	70,00	100,00	80,00	100,00
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase luas tanaman Perkebunan yang terserang OPT Perkebunan	%	40,00	40,00	100,00	35,00	100,00	30,00	100,00	25	0,00
Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase pertumbuhan investasi industri pengolahan hasil- hasil perkebunan	%	0,00	0,00	0,00	5,00	3,93	5,00	3,93	5	1,00
Urusan Pertanian (Sub Sektor Peternakan)											
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Ketersediaan telur lokal ditingkat konsumen	kg	600	680	680	760	869	840	920	920	378
	Ketersediaan daging lokal ditingkat konsumen	kg	56.000	64.800	68.200	73.600	36.210	82.400	90.500	91.200	85.500
Urusan Ketahanan Pangan											
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan	Ketersediaan energy per kapita per hari	Kkal/kapit a/hari	1.940,00	0,00	1.790	22,50	1.962	22,50		22,5	-

BIDANG URUSAN / SKPD / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(9)	(10)
Masyarakat	Skor PPH	gr/kapita/ hari	50,20	0,00	78,00	51,17	79,00	52,67	82,00	54,17	78,90
	Jumlah persediaan bahan pangan pokok setara beras per tahun	ton	0	0	0	250	0	250	202,30	250	-
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Stabilitas harga pangan (beras) ditingkat konsumen (CV <10%)	% coefisien variasi (CV)	0	0	0	20	20.359	20	480.253	20	20,00
	Stabilitas harga pangan (beras) ditingkat produsen	sesuai HPP (Rp)	11.500	0	0	10.000	13.000	10.000	17.000	10	15.000,00
	Prosentase Pangan yang Aman dikonsumsi	%	0	0	100	5	100	5	100	5	-
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Kawasan Rumah Pangan Lestari (RPL)	kawasan	6	0	11	2	6	10	22	1	-
	Prosentase penanganan wilayah/desa rawan pangan	%	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	37,35	5	-
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase penyuluh pertanian bersertifikat	%	7,10	7,10	32,00	21,40	70,00	21,43	62,00	23,81	-
	Persentase Kelompok Tani baru yang terbentuk	Kelompok	269	100	100	150	165	150	175	160	-

BIDANG URUSAN / SKPD / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(9)	(10)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN											
Urusan Kelautan dan Perikanan											
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi perikanan tangkap	Ton	38.237,88	39.121,20	45.644,30	40.041,42	44.680,90	41.069,42	44.644.300	42.105,08	45.044.490
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Budidaya Perikanan	Ton	14.084,06	15.674,96	536,20	17.462,53	805,20	19.471,57	1.351,40	21.729,73	928,50
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Produksi hasil pengolahan ikan	Ton	442,00	460,00	764,00	479,00	788,60	501,00	720,00	525,00	1.027,00
	Persentase ketaatan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	%	35,00	50,00	55,00	60,00	-	70,00	-	85	87,00
	Persentase peningkatan produksi perikanan di kawasan Minapolitan	%	50,00	55,00	60,00	60,00	-	65,00	-	70	80,00
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN											
Urusan Perindustrian											
Program Pere+B7:C22ncanaan dan Pembangunan	Persentase sentra industri yang mudah diakses masyarakat	%	3	100	41	100	59	100	94	3	2

BIDANG URUSAN / SKPD / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(9)	(10)
Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Cakupan Bina Usaha IKM	%	...	100	49	100	54	100	100	46	100
Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase IKM yang meningkatkan volume produksinya	%	...	6	6	7	7	100	100	32	14
Urusan Perdagangan											
Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Tingkat keamanan : barang beredar, air bersih, BBM dan produk-produk UKM	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Tingkat Inflasi Daerah	%	5,25	5,25		5,25		5,25		5,25	
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Tingkat pemanfaatan gudang (resi gudang)	%	N/A	N/A		25		40		60	
	Persentase pasar (Los) yang dimanfaatkan	%	3	3		30		40		60	
Urusan Koperasi dan UKM											
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Cakupan Bina Usaha UMKM	%	13.20	17.40						32,40	0,14
	Persentase UMKM binaan yang meningkatkan volume usahanya	%	35	37.00	3.1	40	0.81	43.00	0.99	48,00	4,77

BIDANG URUSAN / SKPD / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(9)	(10)
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Prosentase koperasi aktif	%	38.18	50	42.00	52.50	44.00	54.00	44.00	56,50	71,56
Program Kesehatan Koperasi	Prosentase koperasi aktif	%	38.18	50	42.00	52.50	44.00	54.00	44.00	56,50	9,5
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi aktif yang volume usahanya meningkat	%	5	8		10		20		30	6,86
Program Pengembangan UMKM	Cakupan UMK penerima dana bergulir dari Pemerintah Daerah	%		0.07		2.00		4.00		6,00	
	Persentase Usaha Mikro dampingan (penerima bantuan) yang volume usahanya meningkat	%	4.00	50.00	3.1	55.00	11.4	60.00	0.99	65,00	5,2
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) (A)											
Urusan Penanaman Modal dan PTSP											
Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase perizinan yg dikeluarkan dan sesuai peruntukannya	%	90	90	991	1976		90		90	90
	FISKAL				97		56		33	100,00	24
	OSS				707		1.681			1000	807

BIDANG URUSAN / SKPD / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(9)	(10)
									2.547		
	IMB				187		239		7	100	15
	Persentase Peningkatan Retribusi Daerah	%	24,68	20,00	4.901.730.2 13	14.000.00 0.000	7.531.533.2 41	10.000.00 0.000	468.882.48 1	8.000.00 0.000	3.030.749.00 6
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	presentasi pengaduan perizinan yang ditindaklanjuti	%	N/A	80	-	80	-	80	-	80	
Program Promosi Penanaman Modal	Persentase investor yg berinvestasi	75%	N/A	70	61	35	28	30	25	> 50	100
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Tersedianya informasi PMPTSP (Persentase peningkatan akses terhadap informasi PMPTSP)	web (%)	N/A	-		-	Ada Web	Ada Web	Ada Web	20	Ada Web
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN											
Urusan Pariwisata											
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah kawasan pariwisata yang dikembangkan	Kawasan	4	3	2	3	2	3	3	3	3
Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	%	N/A	2,38	7,78	4,49	14,9	6,25	18	18	
	Angka kunjungan wisatawan Manca	orang	150	150	9	160	343	170	1223	180	1620

BIDANG URUSAN / SKPD / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(9)	(10)
	Negara										
	Angka kunjungan wisatawan Domestik	orang	2243	2300	7780	2400	14600	2550	17000	2750	23425
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase peningkatan kualitas Sumber Daya Pariwisata dan ekonomi kreatif	%	N/A			20	5	40	5	45	17
Urusan Kebudayaan											
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	cagar budaya	6	6	5	6	6	6	5	6	1
Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Kesenian Daerah yang Dilestarikan	%	17	17	17	44	35	72	50	89	54
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA											
Urusan Kepemudaan dan Olah Raga											
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rata-rata Tingkat Partisipasi Organisasi Kepemudaan	%	N/A	80		70	60	80	40	90	40
Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Jumlah event Olah Raga Tingkat Kabuapten	Event	2	2		2	2	4	5	2	2

BIDANG URUSAN / SKPD / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(9)	(10)
	Jumlah atlet berprestasi pada event Olah Raga Tingkat Provinsi / Nasional	Orang	N/A	5		5	150	5	72	5	32
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase peningkatan kapasitas kepramukaan	%	0,00	50		60	40	70	50	80	50
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA											
Urusan Tenaga Kerja											
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja terdaftar dan mendapatkan pelatihan serta ditempatkan	%	60,00	50,00	0	50,00	324	70,00	574	70,00	
	Persentase peningkatan TKM	%	60,00	50,00		60,00	20	70,00	73	70,00	14
	Persentase TKM yang memanfaatkan TTG dan volume usahanya meningkat	%	60,00	50,00	0	50,00	0	70,00	0	70,00	
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	60,00	50,00	0	50,00	0	70,00	0	70,00	8

BIDANG URUSAN / SKPD / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(9)	(10)
Program Hubungan Industrial	Persentase kasus ketengakerjaan yang diselesaikan	%	60,00	50,00	12	50,00	11	60,00	1	60,00	7
	Persentase tenaga kerja yang menjadi peserta JAMSOSTEK/ BPJS Ketenagakerjaan	%	50,00	50,00	7.977,00	50,00	9.392,00	60,00	10 392	70,00	478
Urusan Transmigrasi											
Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Tersedianya informasi kawasan transmigrasi	%	100	100		100		100		100	
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase peserta transmigrasi yang berhasil ditempatkan pada kawasan baru	%		0	0	10	0	15	0	20	
Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase kawasan transmigrasi lama yang ditingkatkan kualitas sarana dan prasarannya	%	60	60	0	65		70		75	
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK											
Urusan Trantib dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol)											

BIDANG URUSAN / SKPD / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(9)	(10)
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Tingkat partisipasi masyarakat dalam PEMILU	%		68	60	70	70	73	73	78	80
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan pembinaan wawasan kebangsaan dan edialogi negara terhadap aparatur dan masyarakat per 1.000 penduduk	Per 1000 Penduduk		7	7	8	8	10	10	12	12
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase pembinaan terhadap Ormas dan Forum-forum daerah	%		49,02	40,02	58,82	55,82	78,43	78,43	88,24	88,20
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Prosentase penyelesaian konflik di masyarakat	%		55	55	60	60	65	65	70,00	78
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH											
Urusan Pemerintahan Umum											

BIDANG URUSAN / SKPD / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(9)	(10)
Program Penanggulangan Bencana	Persentase Pembinaan Penduduk di daerah Rawan Bencana	%	13	20	0	25	338,33333	30	130		
	Persentase Kecukupan Logistik	%	50	60	0,0013644	70	91,071429	80	125,31771		
Sumber Data : LKPJ Kabupaten Halmahera Selatan 2021-2025											

2.8 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

2.8.1 gambaran ringkas kondisi keuangan daerah tahun 2019-2023

Keuangan daerah merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa gambaran keuangan daerah dimaksudkan untuk menjelaskan tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Dalam lingkup mikro gambaran keuangan daerah meliputi analisis pengelolaan keuangan daerah baik dari segi pendapatan maupun belanja daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. **Fungsi otorisasi**, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;
2. **Fungsi perencanaan**, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;
3. **Fungsi pengawasan**, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
4. **Fungsi alokasi**, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;
5. **Fungsi distribusi**, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan
6. **Fungsi stabilisasi**, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Beberapa prinsip yang digunakan dalam penyusunan anggaran yaitu:

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;
2. Penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD; dan
3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dibukukan dalam rekening Kas Umum Daerah.

Bagian ini membahas kinerja keuangan masa lalu yakni kondisi keuangan selama 5 tahun, yaitu sejak tahun 2019 hingga tahun 2023. Keuangan daerah merupakan komponen paling penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan pemecahan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro, serta memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Maka kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dengan sistematis dan terpola. Tujuan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya adalah menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara lebih baik. Salah satu aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan antara kebijakan perencanaan dan penganggaran antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Otonomi daerah berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut maka secara bertahap daerah dituntut untuk mengupayakan kemandirian pendapatannya dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimilikinya. Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Halmahera Selatan meliputi pencapaian kinerja pendapatan daerah, perkembangan belanja daerah dan pembiayaan daerah yang diuraikan pada Tabel 2.70

Tabel 2. 70
Realisasi Struktur APBD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2020 – 2024

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	PENDAPATAN					
	A. Pendapatan Asli Daerah	75.395.567.850,83	85.425.441.557,71	120.476.660.856,60	196.656.159.658,04	228.357.213.255,62
	B. Pendapatan Transfer	1.126.407.496.473	1.440.522.691.007	1.515.674.799.345	1.644.543.937.948,25	1.853.438.007.540
	C. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	280.239.206.573,25	54.007.442.700	0	9.127.524.165	0
	JUMLAH PENDAPATAN	1.482.042.270.897,08	1.579.955.575.264,71	1.636.151.460.198,60	1.850.327.621.771,29	2.081.795.220.795,62
2.	BELANJA					
	A. Belanja Operasi	836.134.572.150,3	870.822.125.221,90	931.712.524.302,35	1.056.304.814.470,19	1.078.595.431.750,05
	B. Belanja Modal	330.034.171.928,47	306.432.785.344,33	361.796.898.934,88	466.277.335.376,52	593.377.522.523,05
	C. Belanja tak Terduga	38.014.336.253	4.025.244.872,00	6.263.643.195	2.624.727.075	3.490.363.500
	D. Belanja Transfer	276.169.065.462	281.522.063.566	286.089.021.561	324.067.722.822	341.684.849.664
	JUMLAH BELANJA	1.480.352.145.793,77	1.462.802.219.004,23	1.585.862.087.993,23	1.849.274.599.743,71	2.017.148.167.437,10
	SURPLUS/DEFISIT	1.690.125.103,31	117.153.356.260,48	50.289.372.205,37	1.053.022.027,58	64.647.053.358,52
3.	PEMBIAYAAN					
	A. Penerimaan Pembiayaan	73.755.814.283,04	33.804.338.049,35	105.838.227.193,83	121.362.999.062,20	66.491.689.879,78
	B. Pengeluaran Pembiayaan	41.641.601.337	45.119.467.116	34.764.600.337	55.924.331.210	4.500.000.000
	PEMBIAYAAN NETTO	32.114.212.946,04	(11.315.129.066,65)	71.073.626.856,83	65.438.667.852,20	61.991.689.879,78
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	33.804.338.049,35	105.838.227.193,83	121.362.999.062,20	66.491.689.879,78	126.638.743.238,30

Sumber : LHP atas LKPD Kabupaten Halmahera Selatan, 2025

- **Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2019-2023**

Mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, pendapatan daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan yang terdiri atas:

1. **Pendapatan Asli Daerah**

Mengacu pada Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Pendapatan Asli Daerah meliputi :

- Pajak daerah;
- Retribusi daerah;
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2. **Pendapatan Transfer**, meliputi **Transfer Pemerintah Pusat** terdiri atas: Dana Perimbangan; Dana Insentif Daerah; Dana Otonomi Khusus; Dana Keistimewaan; dan Dana Desa. Pengalokasian transfer Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DBH dan DAU merupakan kategori dari Dana Transfer Umum, sedangkan DAK merupakan kategori dari Dana Transfer Khusus.

1. DBH terdiri atas Bagi hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam;
2. DAU yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
3. DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

Dana Insentif Daerah (DID) bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.

Dana otonomi khusus dialokasikan kepada Daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan undangundangan.

Dana keistimewaan dialokasikan kepada Daerah istimewa sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan.

Dana desa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Transfer antar-daerah meliputi: Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

Pendapatan **Bagi Hasil** merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan Keuangan terdiri atas:

- a. bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan
- b. bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota.

Bantuan keuangan yang berasal dari provinsi dan/atau kabupaten/kota, terdiri atas:

- 1) Bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerjasama daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan. 2) Bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu.

- **Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.;

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

antara lain Pendapatan Hibah Dana BOS, dan Pendapatan Pengembalian Hibah tahun sebelumnya.

2. Pendapatan daerah Kabupaten Halmahera Selatan selama kurun waktu 2019-2023 bersumber dari:

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas: (1) Pajak Daerah; (2) Retribusi Daerah; (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Pendapatan Transfer yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang meliputi: (1) Dana Perimbangan (DBH, DAU, dan DAK; (2) DID; dan (3) Dana Desa.
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah yang bersumber dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang terdiri atas (1) Pendapatan Hibah; (2) Dana Darurat; dan (3) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.8.2 Realisasi Pendapatan Tahun 2019-2023

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2019 sebesar Rp.1.508.732.180.434,00. Pada tahun 2020, realisasi pendapatan daerah sebesar Rp.1.482.042.270.897,08 menurun 1,67 persen dari tahun 2019. Namun, sejak tahun 2021 hingga tahun 2023, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Halmahera Selatan terus meningkat, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.71.

Tabel 2.71
Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
Tahun Anggaran 2019-2023

NO.	URAIAN	PERKEMBANGAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH (Rp Juta)				
		2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PENDAPATAN DAERAH	1.507.208,54	1.482.042,27	1.579.955,58	1.636.151,46	1.850.327,62
1.1	Pendapatan Asli Daerah	58.523,67	75.395,57	85.425,44	120.476,66	196.656.16
1.1.1	Pendapatan Pajak daerah	29.539,55	41.686,10	50.080,59	71.229,42	133.929,70
1.1.2	Pendapatan Retribusi daerah	5.759,92	4.139,23	10.245,92	21.867,85	35.832,26

NO.	URAIAN	PERKEMBANGAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH (Rp Juta)				
		2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.1.3	Pendapatan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	0,00	1.217,73	1.454,80	882,47	1.409,76
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	23.224,19	28.352,51	23.644,12	26.496,93	25.484,44
1.2	Pendapatan Transfer	1.406.133,18	1.354.110,21	1.440.522,69	1.515.674,80	1.644.543,94
1.2.1	Dana Perimbangan	1.189.943,60	1.126.407,50	1.184.586,50	1.284.578,60	1.386.171,37
1.2.2	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	11.924,60	34.877,79	18.274,27	25.896,12
1.2.3	Dana Desa	194.264,70	196.441,11	196.438,96	196.078,38	206.565,96
1.2.4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	21.924,88	19.337,01	24.619,46	16.743,55	25.910,48
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	42.551,70	52.536,49	54.007,44	0,00	9.127,52
1.3.1	Pendapatan Hibah	36.786,18	0,00	1.212,00	0,00	1.998,00
1.3.2	Dana Darurat	5.765,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0,00	52.536,49	52.795,44	0,00	7.129,52

Sumber: LHP atas LKPD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2019-2023.

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Halmahera Selatan rata-rata tumbuh 5,40 persen dalam kurun waktu tahun anggaran 2019-2023. Pertumbuhan tersebut terutama bersumber dari peningkatan realisasi PAD dan realisasi dana transfer. Pendapatan transfer masih memberikan kontribusi terbesar yaitu 91,47 persen terhadap pendapatan daerah Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2019- 2023, disusul PAD sebesar 6,47 persen, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan kontribusi rata-rata sebesar 2,06 persen, dapat dilihat pada Tabel 2.71.

Berdasarkan data realisasi pendapatan selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan trend dan pertumbuhan positif. Hal ini terlihat jelas bahwa kontribusi terbesar dalam struktur pendapatan APBD Kabupaten Halmahera Selatan bersumber dari pendapatan transfer. Oleh karena itu untuk mengurangi gap yang terlalu besar serta menjaga situasi keterbatasan keuangan negara dalam pembiayaan pembangunan daerah maka perlu penggalan sumber-sumber pendanaan dari daerah, pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu ditingkatkan dengan berbagai terobosan dan inovasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Disamping itu juga manajemen keuangan daerah yang transparan berazaskan efektif dan efisien dalam penggunaannya. Kondisi demikian maka dapat diproyeksikan rencana pendapatan pada selama 5 (lima) tahun kedepan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.72

Tabel 2.72
Pertumbuhan dan Kontribusi Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2019-2023

No.	Uraian	Pertumbuhan (%)					Kontribusi Terhadap Total Pendapatan Daerah (%)					
		2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	Rata-rata	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata
1	PENDAPATAN DAERAH	(1,67)	6,61	3,56	13,09	5,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	28,83	13,30	41,03	63,23	36,60	3,88	5,09	5,41	7,36	10,63	6,47
1.1.1	Pendapatan Pajak daerah	41,12	20,14	42,23	88,03	47,88	1,96	2,81	3,17	4,35	7,24	3,91
1.1.2	Pendapatan Retribusi daerah	(28,14)	147,53	113,43	63,86	74,17	0,38	0,28	0,65	1,34	1,94	0,92
1.1.3	Pendapatan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	0,00	19,47	(39,34)	59,75	9,97	0,00	0,08	0,09	0,05	0,08	0,06
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	22,08	(16,61)	12,07	(3,82)	3,43	1,54	1,91	1,50	1,62	1,38	1,59
1.2	Pendapatan Transfer	(3,70)	6,38	5,22	8,50	4,10	93,29	91,37	91,17	92,64	88,88	91,47
1.2.1	Dana Perimbangan	(5,34)	5,17	8,44	7,91	4,04	78,95	76,00	74,98	78,51	74,91	76,67
1.2.2	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	192,49	(47,60)	41,71	46,65	0,00	0,80	2,21	1,12	1,40	1,11
1.2.3	Dana Desa	1,12	(0,00)	(0,18)	5,35	1,57	12,89	13,25	12,43	11,98	11,16	12,34
1.2.4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	(11,80)	27,32	(31,99)	54,75	9,57	1,45	1,30	1,56	1,02	1,40	1,35
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	23,47	2,80	(100,00)	0,00	(18,43)	2,82	3,54	3,42	0,00	0,49	2,06
1.3.1	Pendapatan Hibah	(100,00)	0,00	(100,00)	0,00	(50,00)	2,44	0,00	0,08	0,00	0,11	0,53
1.3.2	Dana Darurat	(100,00)	0,00	0,00	0,00	(25,00)	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
1.3.3	Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0,00	0,49	(100,00)	0,00	(24,88)	0,00	3,54	3,34	0,00	0,39	1,45

Sumber: BPKAD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2025

2.8.3 Realisasi Belanja Daerah 2019 Sampai dengan 2023

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 serta disesuaikan dengan nomenklatur peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 yang dapat dijabarkan kedalam beberapa jenis belanja daerah meliputi:

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 56 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 meliputi:

- (1) belanja pegawai;
- (2) belanja barang dan jasa;
- (3) belanja bunga;
- (4) belanja subsidi;
- (5) belanja hibah; dan
- (6) belanja bantuan sosial.

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja modal sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 64 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 meliputi:

- (1) belanja modal tanah;
- (2) belanja modal Peralatan dan Mesin;
- (3) belanja modal gedung dan bangunan;
- (4) belanja modal jalan, irigasi dan jaringan;
- (5) belanja modal aset tetap lainnya;
- (6) belanja modal aset lainnya.

Belanja tak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019.

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 56 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019.

Dapat dilihat pada Tabel 2.72. ini diketahui bahwa realisasi belanja daerah cenderung menurun pada tahun anggaran 2020 dan 2021 bila dibandingkan dengan realisasi belanja tahun anggaran 2019. Namun pada tahun anggaran 2022, realisasi belanja kembali meningkat

menjadi kurang lebih Rp. 1,5 Trilyun bila dibandingkan dengan realisasi belanja daerah tahun 2021 sebesar kurang lebih Rp. 1,4 Trilyun. Selanjutnya, realisasi belanja meningkat cukup signifikan pada tahun anggaran 2023 menjadi sebesar kurang lebih 1,8 Trilyun bila dibandingkan dengan realisasi belanja daerah pada tahun 2022.

Tabel 2.73
Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun
Anggaran 2019-2023

No.	Uraian	Perkembangan Realisasi Belanja Daerah (Rp Juta)				
		2019	2020	2021	2022	2023
2	BELANJA DAERAH	1.576.370,43	1.480.352,15	1.462.802,22	1.585.862,09	1.849.274,60
2.1	Belanja Operasi	811.647,73	836.134,57	870.822,13	931.712,52	1.056.304,81
2.1.1	Belanja Pegawai	341.471,05	331.086,04	364.623,70	373.743,06	408.433,57
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	447.243,54	415.027,28	429.910,15	471.008,32	494.000,58
2.1.3	Belanja Bunga	4.625,44	4.496,65	8.569,41	4.673,62	4.445,83
2.1.4	Belanja Subsidi	117,60	0,00	0,00	0,00	316,12
2.1.5	Belanja Hibah	14.690,10	83.525,10	31.944,13	45.563,37	86.070,94
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	3.500,00	1.999,50	35.774,73	36.724,15	63.037,78
2.2	Belanja Modal	480.543,68	330.034,17	306.432,79	361.796,90	466.277,34
2.2.1	Belanja Modal Tanah	7.949,48	1.269,86	3.040,33	6.199,84	13.430,69
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.464,43	42.213,15	116.672,39	103.529,17	102.566,14
2.2.3	Belanja Modal Gedung Modal dan Bangunan	186.360,80	143.178,29	104.021,55	85.213,37	136.732,74
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	228.049,77	142.829,34	79.438,62	166.150,98	159.894,34
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.719,20	543,53	3.259,90	703,54	53.101,86
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	551,57
2.3	Belanja Tidak Terduga	3.770,00	38.014,34	4.025,24	6.263,64	2.624,73
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	3.770,00	38.014,34	4.025,24	6.263,64	2.624,73
2.4	Belanja Transfer	280.409,02	276.169,07	281.522,06	286.089,02	324.067,72
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	0,00	1.651,79	4.361,56	3.218,38	12.497,77
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	280.409,02	274.517,27	277.160,50	282.870,64	311.569,96

Sumber: LHP atas LKPD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2019 sampai Tahun 2023.

Belanja operasi merupakan salah satu komponen belanja terbesar dalam APBD Kabupaten Halmahera Selatan selama periode 2019-2023 dengan proporsi rata-rata 56,67 persen per tahun, disusul belanja modal dengan proporsi 24,35 persen, dan kemudian belanja transfer sebesar 0,72 persen. Adapun pertumbuhan dan kontribusi belanja daerah Kabupaten Halmahera Selatan dalam APBD Tahun Anggaran 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.74

Tabel 2.74
Pertumbuhan dan Kontribusi Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2019-2023

No.	Uraian	Pertumbuhan (%)					Kontribusi Terhadap Total Belanja Daerah (%)					
		2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	Rata-rata	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata
2	BELANJA DAERAH	(6,09)	(1,19)	8,41	16,61	4,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1	Belanja Operasi	3,02	4,15	6,99	13,37	6,88	51,49	56,48	59,53	58,75	57,12	56,67
2.1.1	Belanja Pegawai	(3,04)	10,13	2,50	9,28	4,72	21,66	22,37	24,93	23,57	22,09	22,92
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	(7,20)	3,59	9,56	4,88	2,71	28,37	28,04	29,39	29,70	26,71	28,44
2.1.3	Belanja Bunga	(2,78)	90,57	(45,46)	(4,87)	9,36	0,29	0,30	0,59	0,29	0,24	0,34
2.1.4	Belanja Subsidi	(100,00)	0,00	0,00	0,00	(25,00)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
2.1.5	Belanja Hibah	468,58	(61,76)	42,63	88,90	134,59	0,93	5,64	2,18	2,87	4,65	3,26
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	(42,87)	1,689,18	2,65	71,65	430,15	0,22	0,14	2,45	2,32	3,41	1,71
2.2	Belanja Modal	(31,32)	(7,15)	18,07	28,88	2,12	30,48	22,29	20,95	22,81	25,21	24,35
2.2.1	Belanja Modal Tanah	(84,03)	139,42	103,92	116,63	68,99	0,50	0,09	0,21	0,39	0,73	0,38
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	(22,49)	176,39	(11,27)	(0,93)	35,42	3,46	2,85	7,98	6,53	5,55	5,27
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	(23,17)	(27,35)	(18,08)	60,46	(2,04)	11,82	9,67	7,11	5,37	7,39	8,27
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	(37,37)	(44,38)	109,16	(3,77)	5,91	14,47	9,65	5,43	10,48	8,65	9,73
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	(85,39)	499,76	(78,42)	0,00	83,99	0,24	0,04	0,22	0,04	2,87	0,68
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01
2.3	Belanja Tidak Terduga	908,34	(89,41)	55,61	(58,10)	204,11	0,24	2,57	0,28	0,39	0,14	0,72
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	908,34	(89,41)	55,61	(58,10)	204,11	0,24	2,57	0,28	0,39	0,14	0,72
2.4	Belanja Transfer	(1,51)	1,94	1,62	13,28	3,83	17,79	18,66	19,25	18,04	17,52	18,25
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	0,00	164,05	(26,21)	288,32	106,54	0,00	4,35	108,36	51,38	476,15	128,05
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	(2,10)	0,96	2,06	10,15	2,77	17,79	18,54	18,95	17,84	16,85	17,99

Sumber: BPKAD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2025

2.8.4 Realisasi Surplus/Defisit APBD Tahun 2019-2023

Berdasarkan Pasal 83 sampai dengan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan dalam surplus dan defisit APBD adalah sebagai berikut:

1. Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.
2. Surplus APBD merupakan selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
3. Defisit APBD merupakan selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
4. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk:
 - 6.1 Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - 6.2 Penyertaan modal daerah;
 - 6.3 Pembentukan dana cadangan;
 - 6.4 Pemberian pinjaman daerah; dan/atau
 - 6.5 Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok utang yang belum cukup tersedia anggaran dalam pengeluaran pembiayaan sesuai dengan perjanjian.
8. Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi surplus APBD kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.
9. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan menetapkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD masing-masing Daerah yang dibiayai dari Pinjaman Daerah setiap tahun anggaran.

10. Penetapan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD masing-masing daerah paling lambat bulan Agustus untuk tahun anggaran berikutnya.
11. Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi defisit APBD kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.
12. Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi penundaan penyaluran Dana Transfer Umum.
13. Menteri melakukan pengendalian defisit APBD provinsi berdasarkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD masing-masing Daerah yang dibiayai Pinjaman Daerah yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
14. Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat melakukan pengendalian defisit APBD kabupaten/kota berdasarkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD masing-masing Daerah yang dibiayai Pinjaman Daerah yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
15. Pengendalian dilakukan pada saat evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
16. Defisit APBD harus dapat ditutup dari Pembiayaan neto.
17. Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan Pembiayaan dengan pengeluaran Pembiayaan.

APBD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2019 mengalami defisit sebesar Rp. 69,16 Milyar. Selanjutnya, pada tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun 2023, APBD Kabupaten Halmahera Selatan mengalami surplus. Surplus/defisit APBD Kabupaten Halmahera Selatan pada dapat dilihat pada Tabel 2.75.

Tabel 2.75
Surplus/Defisit APBD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023

No	URAIAN	REALISASI APBD (Rp Juta)				
		2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pendapatan	1.507.208,54	1.482.042,27	1.579.955,58	1.636.151,46	1.850.327,62
2	Belanja	1.295.961,41	1.204.183,08	1.181.280,16	1.299.773,07	1.525.206,88

No	URAIAN	REALISASI APBD (Rp Juta)				
		2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Transfer	280.409,02	276.169,07	281.522,06	286.089,02	324.067,72
	Surplus/(Defisit)	(69.161,89)	1.690,13	117.153,36	50.289,37	1.053,02

Sumber: LHP atas LKPD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2019-2023.

2.8.5 Realisasi Pembiayaan Daerah dan Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Tahun Berkenaan (SILPA) Tahun 2019-2023

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, pembiayaan daerah terdiri atas:

- 1) Penerimaan pembiayaan Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari:
 - 1.1 SiLPA;
 - 1.2 Pencairan Dana Cadangan;
 - 1.3 Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - 1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah;
 - 1.5 Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - 1.6 Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan Daerah dapat digunakan untuk:

 - 2.1 Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
 - 2.2 Penyertaan modal daerah;
 - 2.3 Pembentukan Dana Cadangan;
 - 2.4 Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - 2.5 Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 mengatur ketentuan Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Tahun Berkenaan (SILPA) sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah menganggarkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) tahun berkenaan bersaldo nihil.
2. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, Pemerintah Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program, kegiatan, sub kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
3. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif, Pemerintah Daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan. yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program, kegiatan dan sub kegiatan.

Penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Halmahera Selatan pada tahun anggaran 2019 dan 2020 bersumber dari SiLPA dan penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp. 127,87 Milyar. Sejak tahun 2021 hingga 2023, penerimaan pembiayaan hanya bersumber dari SiLPA saja. Di sisi lain, pengeluaran pembiayaan diperuntukan bagi pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo dan penyertaan modal daerah. Perkembangan pembiayaan daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.76 dibawah ini.

Tabel 2.76
Perkembangan Pembiayaan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2019-2023

NO	URAIAN	PERKEMBANGAN REALISASI SURPLUS/DEFISIT DAN PEMBIAYAAN DAERAH (RP Juta)				
		2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	SURPLUS/(DEFISIT)	(69.161,89)	1.690,13	117.153,36	50.289,37	1.053,02
B	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	136.987,80	73.755,81	33.804,34	105.838,23	121.363,00
B.1	SiLPA	26.342,92	56.526,35	33.804,34	105.838,23	121.363,00
B.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	110.644,88	17.229,47	0,00	0,00	0,00
B.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.6	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NO	URAIAN	PERKEMBANGAN REALISASI SURPLUS/DEFISIT DAN PEMBIAYAAN DAERAH (RP Juta)				
		2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	dengan ketentuan peraturan perundang-undangan					
C	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	11.299,57	41.641,60	45.119,47	34.764,60	55.924,33
C.1	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	5.299,57	34.141,60	38.619,47	28.964,60	48.274,33
C.2	Penyertaan modal daerah	6.000,00	7.500,00	6.500,00	5.800,00	7.650,00
C.3	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.5	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	PEMBIAYAAN NETTO	125.688,23	32.114,21	(11.315,13)	71.073,63	65.438,67
E	SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	56.526,35	33.804,34	105.838,23	121.363,00	66.491,69

Sumber: LHP atas LKPD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2019-2023.

Realisasi sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) tahun 2020 adalah sebesar Rp33.804,34 juta. Jika dibandingkan dengan realisasi sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) tahun 2019 yang sebesar Rp56.526,35 juta maka realisasi sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak (40,20 persen) atau sebesar (Rp22.721,95). Perhitungan SILPA pada laporan realisasi anggaran berasal dari perhitungan surplus/(defisit) anggaran tahun 2020 sebesar Rp1.690,13 juta ditambah dengan realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp32.114,21 juta sehingga menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) untuk tahun 2020 sebesar Rp33.804,34.

Realisasi sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) tahun 2021 adalah sebesar Rp105.838,23 juta. Jika dibandingkan dengan realisasi sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) tahun 2020 yang sebesar Rp33.804,34 juta maka realisasi sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) tahun 2021 mengalami kenaikan sebanyak 213,09 persen atau sebesar Rp72.033,89 juta. Perhitungan SILPA pada laporan realisasi anggaran berasal dari perhitungan surplus/(defisit) anggaran tahun 2021 sebesar Rp117.153,36 juta ditambah dengan realisasi Pembiayaan Netto sebesar (Rp11.315,13 juta) sehingga menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) untuk tahun 2021 sebesar Rp105.838,23 juta.

Realisasi sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) tahun 2022 adalah sebesar Rp121.363,00 juta. Jika dibandingkan dengan realisasi sisa lebih pembiayaan anggaran

(SiLPA) tahun 2021 yang sebesar Rp105.838,23 Juta maka realisasi sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) tahun 2022 mengalami kenaikan sebanyak 14,67 persen atau sebesar Rp15.524,77 juta. Perhitungan SILPA pada laporan realisasi anggaran berasal dari perhitungan surplus/(defisit) anggaran tahun 2022 sebesar Rp50.289,37 juta ditambah dengan realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp71.073,63 juta sehingga menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) untuk tahun 2022 sebesar Rp121.363,00 juta.

Realisasi sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) tahun 2023 adalah sebesar Rp66.491,69 juta. Jika dibandingkan dengan realisasi sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tahun 2022 yang sebesar Rp121.363,00 Juta maka realisasi sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) tahun 2023 mengalami penurunan sebesar (45,21 persen) atau sebesar (Rp54.871,31 juta). Perhitungan SILPA pada laporan realisasi anggaran berasal dari perhitungan surplus/(defisit) anggaran tahun 2023 sebesar Rp1.053,02 juta ditambah dengan realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp65.438,67 juta, sehingga menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) untuk tahun 2023 sebesar Rp 66.491,69 juta.

2.8.6 Neraca Daerah Tahun 2020-2024

Posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dalam kurun waktu enam tahun terakhir (2019–2024) menunjukkan dinamika yang menggambarkan upaya konsisten dalam memperkuat fondasi fiskal dan meningkatkan kapasitas ekonomi daerah. Neraca daerah yang meliputi unsur aset, kewajiban, dan ekuitas, secara umum mengalami pertumbuhan yang menggambarkan arah pengelolaan keuangan yang semakin sehat, transparan, dan akuntabel. Tabel Neraca daerah selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel. 2.77.

Tabel 2.77
Neraca Daerah Tahun 2020 – 2024

NO .	URAIAN	REALISASI TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ASET					
	A. Aset Lancar	62,719,665,580.64	15,682,920,213,128.00	189,843,864,417.92	228,589,962,369.59	62,719,665,580.00
	B. Investasi Jangka Panjang	49,523,793,813.00	52,706,263,334.00	50,662,209,098.55	52,570,929,893.58	
	C. Aset Tetap	1,973,686,516,620.46	2,058,601,914,777.97	2,302,529,791,078.61	2,557,858,900,626.79	
	D. Aset Lainnya	33066264461,49	2,556,702,373,134.00	47,697,417,135.11	213,738,060,234.11	
	JUMLAH ASET	2,118,996,240,475.60	2,293,704,403,974.59	2,590,733,281,730.19	3,052,757,853,124.07	
2	KEWAJIBAN					
	A. Kewajiban Jangka Pendek	72,627,506,471.74	6,982,219,207,066.00	86,032,326,510.11	32,318,540,101.13	
	B. Kewajiban Jangka Panjang	90,271,780,874.00	40,291,845,402.00	-	-	
	JUMLAH KEWAJIBAN	162,899,287,345.74	110,114,037,472.66	8,603,232,651,011.00	32,318,540,101.13	
3	EKUITAS					
	Ekuitas	1,956,096,953,129.86	218,359,036,650,193.00	2,504,700,955,220.08	3,020,439,313,022.94	
	JUMLAH EKUITAS	1,956,096,953,129.86	218,359,036,650,193.00	2,504,700,955,220.08	3,020,439,313,022.94	
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2,118,996,240,475.60	2,293,704,403,974.59	2,590,733,281,730.19	305,275,785,312,407.00	

Sumber : BPKAD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2025

2.8.7 PROYEKSI KEUANGAN DAERAH TAHUN 2025-2029

Proyeksi APBD Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2025- 2029 dilakukan sesuai dengan kapasitas pendapatan daerah dan kondisi fiskal daerah selama 5 (lima) terakhir. Berdasarkan hal tersebut dapat disajikan proyeksi APBD selama 5 tahun kedepan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.76.

Tabel 2.78
Proyeksi APBD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2025-2029

NO	URAIAN	BASELINE TAHUN		PROYEKSI TAHUN			
		2024	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	PENDAPATAN						
	A. Pendapatan Asli Daerah	228.357.213.255,62	255.408.685.425,62	268.179.119.697	281.588.075.682	295.667.479.466	310.450.853.439
	B. Pendapatan Transfer	1.853.438.007.540	2.105.986.507.267,10	2.200.427.098.880	2.299.589.720.074	2.403.710.472.328	2.513.037.262.195
	C. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0	7.485.000.000,00	7.485.000.000	7.485.000.000	7.485.000.000	7.485.000.000
	JUMLAH PENDAPATAN	2.081.795.220.795,62	2.368.880.192.693	2.476.091.218.577	2.588.662.795.756	2.706.862.951.794	2.830.973.115.634
2.	BELANJA						
	A. Belanja Operasi	1.078.595.431.750,05	909.237.578.083	953.932.089.431	1.001.309.814.932	1.051.504.915.219	1.104.658.259.255
	B. Belanja Modal	593.377.522.523,05	945.552.077,0777	988.436.487.431	1.033.465.118.302	1.080.745.180.718	1.130.389.246.254
	C. Belanja tak Terduga	3.490.363.500	60.319376.078	65.419.376.078	70.519.376.078	75.619.376.078	80.719.376.078
	D. Belanja Transfer	341.684.849.664	448.771.161.455	463.303.265.637	478.368.486.444	493.993.479.707	510.206.234.047
	JUMLAH BELANJA	2.017.148.167.437,10	2.363.880.192.693	2.471.091.218.577	2.583.662.795.756	2.701.862.951.794	2.825.973.115.634
	SURPLUS/DEFISIT	64.647.053.358,52	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
3.	PEMBIAYAAN						
	A. Penerimaan Pembiayaan	66.491.689.879,78	0	0	0	0	0
	B. Pengeluaran Pembiayaan	4.500.000.000	(5.000.000.000)	(5.000.000.000)	(5.000.000.000)	(5.000.000.000)	(5.000.000.000)
	PEMBIAYAAN NETTO	61.991.689.879,78	0	0	0	0	0

2.9 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan harus mampu memilah dan menelaah secara detail faktor internal dan eksternal yang dapat dijadikan isu utama pembangunan untuk menentukan permasalahan pokok yang harus ditanggulangi secara cepat dan mendesak. Berdasarkan atas evaluasi dan hasil pembangunan yang dicapai maka dilakukan analisis yang tepat agar menjadi solusi dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan sasaran pembangunan baik tingkat pusat dan daerah. berdasarkan data base potensi sumberdaya alam Kabupaten Halmahera Selatan sangat besar apabila dikelola secara optimal akan memberikan hasil yang positif bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat serta menjadi barometer kemandirian daerah.

Potensi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan bagi perekonomian daerah dapat dilihat dari struktur perekonomian masyarakat di Kabupaten Halmahera Selatan yang diukur dari PDRB ADHB. Pada Tahun 2023 didominasi oleh sektor usaha industri pengolahan, dan kontribusinya semakin meningkat. Kontribusi industri pengolahan pada Tahun 2021 sebesar 41,34% dan Tahun 2023 menjadi 52,48%. Demikian juga pertambangan dan penggalan daeri 15,92% pada Tahun 2021 menjadi 16,50% pada Tahun 2023. Sebaliknya sektor usaha pertanian, kehutanan dan perikanan kontribusinya semakin menurun dari 16,66% pada Tahun 2021 menjadi 11,97% pada Tahun 2023. Namun sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi tiga sektor andalan utama dalam menyumbang PDRB, disamping sektor Pertambangan dan Penggalan serta sektor Industri Pengolahan.

Dari dua sektor primer andalan PDRB, sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan yang paling potensial untuk dikembangkan karena tiga alasan :

- 1) Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan berbasis pada sumber daya alam terbarukan, sehingga bisa dijaga keberlanjutannya pada jangka panjang. Sementara sektor pertambangan dan penggalan merupakan sumberdaya tak terbarukan yang suatu saat akan habis.
- 2) Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan kebutuhan pokok masyarakat, yang permintaan pasarnya terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk.
- 3) Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menghasilkan bahan baku untuk industri pengolahan yang dapat menciptakan nilai tambah dan multiplier effect bagi sektor industri pengolahan dan sektor terkait lainnya.

Berdasarkan pada karakteristik wilayah dan potensi sumberdaya alam yang dimiliki maka perlu mengoptimalkan pengembangan dan penguatan komoditas unggulan daerah yang sesuai dengan ciri dan kultur budaya masyarakat yang didukung dengan kebijakan pemerintah daerah yang tepat.

2.9.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Berdasarkan identifikasi permasalahan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen rancangan teknokratik RPJMD Tahun 2025-2030 dan pemaduan dengan hasil kunjungan lapang dan penjangkaran aspirasi masyarakat dalam forum tertentu, maka dapat dijabarkan berbagai permasalahan sesuai dengan urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan. Adapun permasalahan dari masing-masing urusan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

1) Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan

Urusan pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang telah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM). Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Halmahera Selatan meningkat dalam kurun waktu 2021-2023. Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pendidikan adalah sekolah (SD+SMP) yang terakreditasi dengan nilai akreditasi minimal A belum mencapai target RPJMD Tahun 2021-2026.

2) Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan

Usia Harapan Hidup masyarakat di Kabupaten Halmahera Selatan terus meningkat dari tahun 2021-2023. Namun, permasalahan yang masih dihadapi di bidang Kesehatan adalah angka kesakitan dan jumlah rumah sakit yang mencapai standar pelayanan minimum (SPM) berdasarkan indikator yang ditetapkan (anggaran, SDM, dan sarana-prasarana) belum mencapai target RPJMD tahun 2021-2026.

3) Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang adalah :

- 1) Jalan kabupaten dalam kondisi baik/mantap baru mencapai 26,19 persen dari total panjang jalan 950,80 km dan belum mencapai target hingga tahun 2023 sesuai RPJMD tahun 2021-2026.

- 2) Jaringan irigasi Kabupaten dalam kondisi baik hingga tahun 2023 juga belum mencapai target pada tahun 2021-2023.

4) Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman adalah sebagai berikut:

- 1) Rumah layak huni pada tahun 2023 hanya mencapai 69 persen yang lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2021 dengan proporsi sebesar 75,76 persen;
- 2) Kawasan permukiman layak huni meningkat dari 4 persen pada tahun 2021 menjadi 17 persen pada tahun 2023 namun belum mencapai target pada tahun berkenaan sesuai RPJMD tahun 2021-2026;
- 3) Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) belum optimal pada tahun 2022 dan 2023;
- 4) Akses Rumah Tangga (RT) terdapat air bersih yang layak masih rendah;
- 5) Akses Rumah Tangga (RT) terdapat sanitasi yang layak juga masih rendah.

5) Urusan Pemerintah Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, serta Pelindungan Masyarakat

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat adalah resiko bencana masih tinggi, meskipun kapasitas penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan terus meningkat.

1.6 Urusan Pemerintah Bidang Sosial

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan sosial adalah penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) sudah optimal, namun belum mencapai target RPJMD tahun 2021-2026.

2. Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1) Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan tenaga kerja adalah produktifitas tenaga kerja masih rendah.

2) Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sudah optimal pada periode 2021-2023. Permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan urusan

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah masih rendahnya akses dan kualitas perempuan terhadap pendidikan; kesejahteraan perempuan dan kesetaraan gender; kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemberdayaan perempuan; akses perempuan terhadap teknologi; optimalisasi pemantauan dan evaluasi kemajuan IDG; belum tersedianya sarana dan prasarana Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A); dan belum optimalnya kerjasama dari semua pihak, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan masyarakat untuk mengatasi kekerasan terhadap terhadap anak dan perempuan.

3) Urusan Pemerintah Bidang Pangan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pangan adalah meskipun demikian, dampak *El nino* harus diantisipasi sehingga tidak mengurangi stok pangan serta masih rendahnya akses dan distribusi pangan maupun investasi di sektor pertanian.

4) Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Halmahera Selatan terus meningkat pada tahun 2021-2023. Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan lingkungan hidup adalah pengelolaan sampah yang belum optimal.

5) Urusan Pemerintah Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah masih terdapat penduduk usia 17 tahun ke atas di Kabupaten Halmahera Selatan yang belum memiliki e-KTP dengan proporsi 10,41 persen pada tahun 2023. Di samping itu, penduduk usia 17 tahun ke bawah yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) pada tahun 2023 hanya sekitar 28 persen.

6) Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah masih terdapat 94,78 persen desa yang masih berstatus “Sangat tertinggal” dan “Tertinggal” hingga tahun 2023 dari 249 desa yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan. Di samping itu, evaluasi perkembangan kecamatan belum dilakukan hingga tahun 2023.

7) Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengembangan keluarga yang berkualitas telah berhasil dilakukan guna mewujudkan keluarga yang aman, tentram, mandiri dan memiliki harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin di Kabupaten Halmahera Selatan. Permasalahan yang masih dihadapi adalah belum optimalnya pengentasan kemiskinan, peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas, pembangunan kesetaraan gender, serta mitigasi resiko bencana alam. Di sisi lain, perempuan usia 15-49 tahun yang menggunakan kontrasepsi modern meningkat dari 54 persen pada tahun 2022 menjadi 62 persen pada tahun 2023. Permasalahan yang harus diantisipasi adalah masih rendahnya akses terhadap kontrasepsi modern serta pengetahuan dan kesadaran tentang kontrasepsi modern; serta adanya pengaruh faktor sosial dan budaya yang dapat menghambat penggunaan kontrasepsi modern oleh perempuan usia 15-49 tahun.

8) Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan perhubungan adalah sarana perhubungan layak operasi dan layak fungsi yang tersedia masih kurang memadai. Hasil identifikasi permasalahan pada konsultasi publik Iii (kedua) penyusunan dokumen Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024-2044 yang dilaksanakan pada Bulan Juli 2024 sebagai berikut:

- 1) prasarana jaringan jalan di masing-masing pulau masih belum terkoneksi dengan baik, sehingga masyarakat mengandalkan transportasi laut dengan biaya yang lebih besar;
- 2) pergerakan yang terjadi antar pulau sangat tinggi, khususnya menuju pusat- pusat utama, sedangkan moda angkutan yang tersedia terbatas;
- 3) moda angkutan *ferry* di rute tertentu tidak memiliki *backup* armada sehingga ketika mengalami kerusakan dapat menghambat kelancaran transportasi;
- 4) terminal di pusat halmahera selatan tidak efektif atau tidak berjalan optimal, tidak terintegrasi dengan pusat-pusat pelayanan;
- 5) beberapa pelabuhan tidak efektif;
- 6) beberapa tempat yang memiliki potensi komoditas pertanian tinggi belum didukung oleh frekuensi pelayanan yang baik;
- 7) waktu perjalanan yang panjang/lama karena banyak tempat untuk transit;
- 8) biaya transportasi darat dan laut tergolong tinggi di beberapa tempat;
- 9) kapasitas prasarana dan pelayanan transportasi udara terbatas;

- 10) pelayanan pengangkutan transportasi laut belum mementingkan aspek keselamatan;
- 11) hasil kinerja transportasi menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian berada dibawah 100%, sehingga belum memenuhi apa yang dianggap penting oleh masyarakat; dan
- 12) minim mobilisasi kemampuan swasta untuk pembangunan sektor transportasi.

9) Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika adalah Perangkat daerah yang menerapkan sistem informasi manajemen (SIM) dan WEB (*Smart City*) baru mencapai 58,06 persen pada tahun 2023 dari 60 Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan. Permasalahan lain adalah pembangunan desa cerdas (*smart village*) yang belum optimal.

10) Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah adalah masih kurangnya koperasi yang berkualitas yaitu koperasi aktif dan volume usahanya meningkat pada tahun 2021-2023. Di samping itu, proporsi usaha mikro dan kecil (UMK) yang aktif dan volume usahanya meningkat/usaha kecil yang menjadi wirausaha cenderung berfluktuasi selama kurun waktu 2021-2023.

11) Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal adalah realisasi investasi di Kabupaten Halmahera Selatan serta perizinan dan non perijinan yang diterbitkan sesuai peruntukannya oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP belum mencapai target kinerja khususnya di tahun 2023 sesuai RPJMD Tahun 2021-2026.

12) Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga adalah sarana dan prasarana pengembangan olahraga belum mencukupi; pembinaan olahraga prestasi belum optimal; dan penganggaran bidang olahraga belum memadai.

13) Urusan Pemerintah Bidang Statistik

Permasalahan yang ditemukan pada urusan pemerintah bidang statistik adalah Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan yang menggunakan data statistik

dalam perencanaan pembangunan daerah hanya sebesar 38,71 persen dari yang ditargetkan sebesar 100 persen pada tahun 2023.

14) Urusan Pemerintah Bidang Persandian

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan persandian adalah belum diterapkannya tanda tangan elektronik di semua perangkat daerah. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan *E-Government*, seluruh pimpinan pemerintahan diharapkan dapat mengintegrasikan dan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam sistem manajemen dan proses kerja pemerintahan. Salah satu bentuk transformasi yang dilakukan adalah penerapan tanda tangan elektronik. Namun, sampai saat ini, penerapan tanda tangan elektronik belum dapat diterapkan menyeluruh di Kabupaten Halmahera Selatan.

15) Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kebudayaan adalah perlindungan dan pelestarian cagar budaya, kesenian tradisional dn tradisi budaya masih kurang optimal pada tahun 2023 bila dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2022 dan 2021.

16) Urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan perpustakaan adalah jumlah pengunjung perpustakaan daerah Kabupaten Halmahera Selatan masih rendah pada tahun 2023 bila dibandingkan dengan jumlah pengunjung pada tahun 2022 dan 2021.

17) Urusan Pemerintah Bidang Kearsipan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kearsipan adalah pengelolaan arsip secara baku baru mencapai 50 persen atau belum mencapai target 65 persen pada tahun 2023 sesuai RPJMD 2021-2026.

3. Urusan Pemerintahan Pilihan

1) Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan adalah penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan serta terjadi serangan penyakit pada organisme budidaya.

2) Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pariwisata adalah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Halmahera Selatan meningkat dari tahun 2021 ke tahun 2022, namun jumlahnya menurun pada tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan daya saing dan daya jual destinasi wisata Kabupaten Halmahera Selatan masih rendah.

3) Urusan Pemerintah Bidang Pertanian

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pertanian adalah produksi pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) terus menurun dalam kurun waktu 2021-2023.

4) Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan perdagangan adalah kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Halmahera Selatan cenderung menurun selama periode 2021-2023 bila dibandingkan dengan kontribusi sektor pertambangan dan penggalian serta sektor industri pengolahan.

5) Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan perindustrian adalah persaingan pasar; permodalan yang terbatas khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah; serta sarana prasarana dan SDM pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan yang belum tersedia secara memadai.

6) Urusan Pemerintah Bidang Transmigrasi

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan transmigrasi adalah belum optimalnya pengembangan kawasan transmigrasi Nusliku di Gane Timur dan belum terlaksanakan pembangunan kawasan transmigrasi Kusubi-Jojame di Pulau Bacan.

4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1) Urusan Sekretariat Daerah

Permasalahan yang masih dihadapi Sekretariat Daerah adalah:

- 1) belum optimalnya implementasi SAKIP.
- 2) pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Halmahera Selatan pada tahun 2021 dan 2022 belum memadai.

- 3) belum ada Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan yang meraih nilai “minimal A” dalam implementasi SAKIP berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat dalam kurun waktu 2021-2023.

2) Urusan Sekretariat DPRD

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan sekretariat DPRD antara lain realisasi kinerja pencapaian PROLEGDA (Program Legislasi Daerah) belum sesuai target di tahun 2022 dan 2023 bila dibandingkan dengan capaian realisasi kinerja pada tahun 2021 yang mencapai 100 persen.

5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1) Perencanaan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan perencanaan adalah sebagai berikut:

- 1) perhatian perangkat daerah terhadap pentingnya dokumen perencanaan masih kurang;
- 2) kemampuan perangkat daerah dalam mengartikulasikan kebutuhan masyarakat masih kurang;
- 3) kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan program pembangunan masih terbatas;
- 4) data pendukung perencanaan pembangunan kurang akurat;
- 5) kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan pembangunan masih kurang;
- 6) partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan masih rendah;
- 7) belum sinerginya proses perencanaan pembangunan nasional dari pendekatan politik (proses politik) ke pendekatan teknokratik;
- 8) dokumen perencanaan yang disusun belum menekankan pada perencanaan yang terfokus dan langsung dapat dilaksanakan, cenderung masih berupa *wishing list*, serta program dan kegiatan yang direncanakan masih belum disusun berdasarkan pada ketersediaan anggaran;
- 9) adanya anggapan atau asumsi bahwa dokumen perencanaan tersebut kurang mengakomodasi kebutuhan yang sebenarnya dari daerah dan antar wilayah;
- 10) proses perencanaan teknokratik yang berbasis pada data sekunder dan primer, baik dari hasil monitoring dan evaluasi maupun hasil kajian/telaahan, dianggap

masih belum memadai sehingga kekuatan data dan informasi dalam memproyeksikan arah pembangunan berikutnya masih lemah;

- 11) masih terdapat kesulitan untuk memastikan adanya konsistensi antara perencanaan (program/kegiatan) pembangunan dan alokasi penganggarnya;
- 12) belum optimalnya sistem pengendalian dan evaluasi pembangunan;
- 13) hasil-hasil pengawasan belum sepenuhnya menjadi input perencanaan pembangunan;
- 14) kondisi geografis Halmahera Selatan sebagai daerah kepulauan menyebabkan beberapa wilayah masih terisolir yang sering tidak dijadikan bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan;
- 15) masih rendahnya kapasitas SDM Aparatur khususnya Perencana baik di Bappelitbangda maupun di perangkat daerah lainnya.

2) Keuangan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan keuangan adalah :

- 1) BPKAD dan BAPPELITBANGDA belum melaksanakan survei dalam rangka penyusunan indeks pengelolaan keuangan daerah (IPKD) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 2) kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah Kabupaten Halmahera Selatan masih rendah sejak tahun anggaran 2021;
- 3) tanah aset Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan belum seluruhnya bersertifikat.

3) Kepegawaian

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan adalah profesionalisme ASN Kabupaten Halmahera Selatan yang masih rendahnya. Selain itu pula belum diterapkan sistem meritokratik dan ASN bertalenta secara totalitas dalam manajemen kepegawaian.

4) Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pendidikan dan pelatihan adalah masih kurangnya kompetensi pegawai yang mendukung pelaksanaan tugas fungsi organisasi dan pelayanan masyarakat. Era industri 4.0 menuntut ASN sebagai human capital untuk memiliki integritas, jiwa nasionalisme, profesional, berwawasan internasional/global, penguasaan teknologi informasi dan

bahasa asing, memiliki kemampuan melayani (*hospitality*) dan menjalin jejaring serta memiliki jiwa *entrepreneurship* (kewirausahaan) dan inovatif. Kompetensi pegawai dapat ditingkatkan salah satunya dengan pendidikan dan pelatihan.

5) Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan penelitian dan pengembangan adalah terjadi perubahan mendasar pada beberapa regulasi Pemerintah Pusat sehingga berpengaruh terhadap upaya Bappelitbangda untuk meningkatkan kualitas inovasi Kabupaten Halmahera Selatan. Di sisi lain, permasalahan yang dihadapi adalah belum ada kesadaran kolektif dari pimpinan dan staf perangkat daerah untuk menjadikan inovasi sebagai budaya.

6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan inspektorat adalah hasil pemeriksaan internal dan eksternal tahun 2021-2023 belum seluruhnya dapat ditindaklanjuti sesuai rekomendasi Inspektorat dan BPK.

7. Unsur Kewilayahan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kewilayahan (kecamatan) sebagai berikut :

- 1) belum optimalnya pelayanan publik di kecamatan. Perlu ada perubahan pemahaman dan *mindset* pegawai sebagai pelayan masyarakat maupun masyarakat selaku penerima layanan;
- 2) belum optimalnya koordinasi, baik dengan instansi vertikal maupun pemerintah desa, terutama dalam meningkatkan ketenteraman dan ketertiban wilayah, peningkatan ketertiban administrasi kependudukan, pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan tata ruang (alih fungsi lahan), berbagai perizinan untuk level kecamatan dan desa;
- 3) masih rendahnya responsifitas pegawai dalam memahami perubahan regulasi yang cepat; serta
- 4) belum lengkapnya ketersediaan *standard operating prosedure* (SOP) dan standar pelayanan kegiatan pada unit organisasi dalam rangka penyempurnaan layanan publik.

8. Unsur Pemerintahan Umum

1) Kesatuan Bangsa dan Politik

Kualitas demokrasi di Kabupaten Halmahera Selatan terus meningkat dari tahun 2021-2023. Namun, permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik adalah penanganan potensi gangguan/konflik yang belum optimal selama tahun 2021-2023.

2.9.2 Isu Strategis Daerah

Berdasarkan gambaran kondisi daerah dengan hasil identifikasi atas permasalahan dan isu lingkungan yang dikemukakan diatas, maka dirumuskan isu strategis yang akan dihadapi Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dalam pembangunan daerah selama periode 2025-2030 adalah sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi dan pelayanan publik prima

Dengan sasaran makin mantapnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan didukungn dengan pelayanan publik prima melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dan transparan; serta makin meningkatnya kualitas pelayanan publik, kapasitas pegawai Pemerintah yang memadai, dan data kependudukan yang baik, dan meningkatnya investasi di daerah.

2. Perluasan akses ekonomi dan daya saing daerah

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang merata dan berdaya saing harus diperluas akses ekonomi dalam segala bidang baik pemasarannya maupun lembaga yang memadai. Penguatan hilirisasi sumberdaya alam berbasis komoditi unggulan daerah sesuai dengan zona pengembangan wilayah. selain itu pula Pangsa pasar dan tingkat permintaan konsumen serta harga pasar menjadi point penting dalam pengembangan dan penilaian produk hasil produksi tidak hanya jumlah tetapi kualitas yang akan memberikan nilai tambah dan mampu bersaing dengan produk daerah lain.

3. Peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia dan Penguatan Inovasi Daerah.

Salah satu indikator untuk untuk mengukur sumberdaya manusia suatu daerah adalah indeks pembangunan manusia. HDI merupakan indeks komposit yang meliputi aspek pendidikan, kesehatan, dan aspek kesejahteraan melalui pengukuran daya beli. HDI Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2023 adalah 65,85 dan masih berada di urutan ke-6 di Provinsi Maluku Utara. pemajuan ilmu pengetahuan dan Inovasi selalu berkembang seiring dengan zaman yang penuh kompetitif. Begitu

pula program unggulan yang digulirkan tidaklah cukup dalam memberikan hasil yang optimal karena masih saja ditemukan permasalahan, oleh karena itu perlu diintegrasikan dengan riset dan inovasi dalam implementasi program yang menjadi prioritas daerah. Inovasi sebagai salah satu solusi dalam mengambil strategi dan kebijakan untuk menguatkan dalam pengambilan keputusan agar tidak salah arah dalam perencanaan pembangunan daerah.

4. Konektivitas dan ketimpangan antar pulau.

Konektivitas kepulauan yang ditunjukkan dengan keterbatasan sarana transportasi menjadi hambatan utama dalam mobilitas penduduk dan distribusi barang, minumannya infrastruktur laut dan darat menyebabkan biaya logistic tinggi dan waktu tempu yang lama antar pulau. Hal ini menghambat pertumbuhan ekonomi dan akses masyarakat terhadap layanan esensial. Disisi lain ketimpangan antar pulau memberikan gambaran bahwa sebagai daerah kepulauan, Halmahera Selatan mengalami ketidakmerataan pembangunan antar pulau. Pulau-Pulau kecil seringkali tertinggal dalam hal infrastruktur dasar seperti listrik, air bersih, dan fasilitas kesehatan. Beberapa studi menunjukkan bahwa akses terhadap layanan public dipulau-pulau terpencil masih sangat terbatas yang berdampak pada rendahnya kualitas hidup masyarakat setempat.

5. Lingkungan Hidup dan Resiliensi Bencana

Salah satu komponen dalam permasalahan lingkungan yang sering terjadi adalah masih adanya deforestasi yang menyebabkan lajunya degradasi lingkungan yang berdampak pada banjir dan kekeringan serta penurunan debit mata air. Selain itu pula aspek pencemaran lingkungan yang menjadi permasalahan pokok adalah masih terbatasnya penanganan sampah, baik dari sisi kelembagaan maupun regulasi daerah yang memberikan komitmen yang kuat dalam mengatasi sampah.

6. Kemiskinan, Perlindungan Sosial dan Ketahanan Pangan.

Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan terus berupaya untuk mengurangi penduduk miskin sebagai salah satu target dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Tahun 2030. Angka kemiskinan Kabupaten Halmahera Selatan masih diatas 5%, tentu diperlukan kerja keras dan menjalin kolaborasi antar instansi serta didukung dengan program-program yang produktif dan peningkatan SDM dalam rangka meningkatkan pendapatan dan daya usahanya.

Disisi lain Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan meningkatkan komoditas unggulan dan pangan alternatif untuk mengatasi ketidakstabilan pangan, serta mempermudah aksesibilitas masyarakat dalam mengakses pangan.

7. Pengelolaan Pembiayaan Pembangunan.

Dengan diterapkan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat, maka pemerintah daerah harus mampu melakukan terobosan dalam untuk mengantisipasi penambahan pendapatan baik melalui inovasi menggenjot PAD maupun melalui pembiayaan pembangunan. Mengingat tingginya kebutuhan anggaran dalam mewujudkan penyediaan infrastruktur dan layanan publik lainnya serta terbatasnya anggaran yang dapat dialokasikan untuk keperluan dimaksud, maka Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dituntut untuk mampu mencari sumber-sumber alternatif pembiayaan lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ada beberapa alternatif pembiayaan non APBD yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dan dimungkinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, di antaranya adalah skema Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan skema penerbitan Obligasi Daerah. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan harus mempertimbangkan dan mampu menghitung kemampuan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dalam menjalankan kewajiban pengembalian pembiayaan yang diperoleh dari berbagai skema dimaksud. Skema KPBU dan Obligasi Daerah merupakan skema yang relatif baru dalam penyediaan infrastruktur dan layanan publik di Kabupaten Halmahera Selatan sehingga perlu melakukan berbagai langkah strategis dalam penyiapan pengimplementasian dari sisi regulasi, kelembagaan, kapasitas SDM, dan lain-lain. Selain skema pembiayaan yang relatif baru tersebut, adapula bentuk pelibatan lain dari pihak swasta yang telah dimanfaatkan, yaitu skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TSLDU)/Corporate Social Responsibility (CSR). Sejauh ini, sudah cukup banyak layanan publik dan fasilitas kepada masyarakat yang diperoleh dari skema TSLDU. Namun demikian, dirasakan masih ada peluang dan ruang untuk optimalisasi baik dari sisi swasta maupun Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan didalam pengelolaannya, diantaranya sinergi antara kegiatan TSLDU dengan program pembangunan dan kesesuaian dengan kebutuhan riil di masyarakat.

Gambaran scenario dalam merumuskan isu strategis daerah dapat disajikan pada Tabel 2.79.

Tabel 2.79
Teknik Menyimpan Isu Strategis Daerah

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Potensi Pertanian tanaman pangan dan hortikultura sangat luas yang baru dimanfaatkan seluas 8.576,30 ha dari total luasan 27.616,80 ha	Terbatasnya infratraktur dan pengairan irigasi, dan kemampuan teknis petani serta akses pemasaran yang sulit terjangkau. Selain itu pula diversifikasi pangan lokal masih rendah	Alih Fungsi Lahan	Pencemaran plastik	Ketahanan Pangan	Perubahan Iklim	Reformasi Birokrasi dan pelayanan publik prima
Sektor Perkebunan memiliki potensi yang besar yang ditinjau dari segi lahan, iklim dan komoditas yang akan dikembangkan, komoditi perkebunan seperti kelapa, pala, cengkeh dan lainnya sangat berlimpah.	Terbatasnya Kemampuan dalam pengolahan dan pemasaran hasil produk perkebunan, serta pada umumnya harga komoditas perkebunan tidak stabil	Daya Saing Sumberdaya Manusia	Perubahan iklim	Pencemaran Tambang dan Pesisir	Deforestasi	Perluasan akses ekonomi dan daya saing daerah
Sesuai kondisi alam Halsel memiliki garis pantai terpantai dengan	Belum optimalnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perikanan seperti	Kebencanaan dan Perubahan Iklim	Deforestasi	Konflik Agraria	Pencemaran Lingkungan	Peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia dan Penguatan Inovasi Daerah.

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
gugusan pulau memiliki potensi perikanan sangat menjanjikan baik perikanan tangkap maupun untuk pengembangan budidaya perikanan.	pabrik es, ABF dan cold storage untuk menjaga rantai dingin ikan, maupun sarana penangkapan ikan untuk nelayan kecil, serta akses pemodal nelayan belum merata.					
Halmahera Selatan yang ditetapkan sebagai PSN memiliki potensi bahan tambang seperti nikel, emas serta memiliki potensi energy panas bumi yang dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan energy listrik masyarakat dan industri.	Belum optimalnya kontribusi sektor pertambangan dan industri terhadap sektor PAD serta masih ditemukan kegiatan pertambangan rakyat tanpa izin. Selain itu pula ketergantungan yang tinggi pada sumber energi dari fosil, sementara potensi energi terbarukan seperti energi matahari, panas bumi dan mikrohidro belum dimanfaatkan secara	Kesejahteraan Masyarakat	Pencemaran Udara	Kriminalisasi dan Kejahatan Lingkungan	Kualitas udara yang menurun	Konektivitas dan ketimpangan antar pulau

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	optimal.					
Halmahera Selatan memiliki luas perairan sebesar 78% dan 22% luas daratan, serta memiliki 4011 pulau dengan karakteristik daya tarik tertentu menjadi sumber potensi yang layak dikembangkan.	Masih maraknya bom ikan di perairan wisata yang menyebabkan warga resah. Selain itu Masih belum optimalnya pengelolaan pendapatan pada sektor Pariwisata baik pada sarana-prasarana dan ketersediaan SDM handal.	Kerusakan wilayah pesisir	Perubahan Iklim	Pencemaran lingkungan, sampah dan kerusakan ekosistem	Infrastruktur dan aksesibilitas	Lingkungan hidup dan resiliensi bencana
Halmahera selatan memiliki kawasan strategis untuk pengembangan lahan pangan di Sumber Makmur, wailmili dan Kusubibi Jojame serta Yaba	Masih terbatas aksesibilitas dan infrastruktur yang memadai	Pengembangan produk unggulan lokal	Perubahan iklim	Ketahanan pangan	Keamanan, ketersediaan dan keterjangkauan pangan	Kemiskinan, perlindungan sosial dan ketahanan pangan

BAB III

VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

3.1.1 Visi Jangka Menengah Kabupaten Halmahera Selatan

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan visi RPJPD Kabupaten Halmahera Selatan, visi RPJMN tahun 2025-2029 dan visi RPJMD Provinsi Maluku Utara serta kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi dan isu-isu strategis maka dirumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029

Tabel 3.1
Visi RPJPD Kabupaten Halmahera Selatan, RPJMN dan RPJMD Provinsi Maluku Utara

Visi RPJPD Kabupaten Halmahera Selatan	VISI RPJMN Tahun (2025 – 2029)	Visi RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun (2025 – 2029)
Halmahera Selatan Pusat Agromaritim yang Maju Dan Berkelanjutan Dalam Bingkai Saruma	Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	Menjaga Keberagaman dan Pemerataan Pembangunan Maluku Utara Bangkit, Maju, Sejahtera, Berkeadilan Dan Berkelanjutan

Berdasarkan acuan visi RPJPD Kabupaten Halmahera Selatan, Visi RPJMN Tahun 2025 -2030 serta RPJMD Provinsi Maluku Utara dan janji politik dari Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2025-2030 pada saat kampanye pemilihan kepada daerah, maka Visi Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2025-2030 adalah :

“MEWUJUDKAN SENYUM HALMAHERA SELATAN YANG ADIL, MAJU DAN BERKELANJUTAN BERBASIS AGROMARITIM DALAM BINGKAI SARUMA PENUH BERKAH”

Penjelasan Visi:

1. Mewujudkan Senyum Halmahera Selatan: Menggambarkan semangat nyata untuk membangun yang menghadirkan senyum sebagai manifestasi ekspresi kebahagiaan dan kesejahteraan untuk mencapai Halmahera Selatan yang maju dan Mewujudkan senyum berkelanjutan;
2. Adil: Adanya pemerataan dalam segala aspek kehidupan tanpa ada diskriminasi, seperti dalam hal distribusi sumber alam dan perlakuan pelayanan;
3. Maju: Halmahera Selatan menjadi daerah yang berdaya, modern, tangguh, inovatif dan berdaya saing ;
4. Berkelanjutan: Sebagai daerah yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan berkontribusi dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Berbasis Agromaritim: Halmahera Selatan yang memiliki potensi sumberdaya alam di laut dan di darat yang memerlukan sinkronisasi pemanfaatan antara darat dan laut untuk memastikan keadilan dan keberlanjutan;
6. Dalam Bingkai Saruma: Tekad segenap unsur masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan untuk mewujudkan semangat kebersamaan, kerukunan hidup beragama dan bermasyarakat sesuai nilai-nilai luhur dan adat seatorang;
7. Penuh Berkah: Suatu puncak harapan dan cita-cita dalam menghadirkan nilai- nilai spiritualitas untuk memperoleh ridho Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa;

Tabel 3.2
Perwujudan Visi Jangka Menengah Pembangunan Kab. Halmahera Selatan Tahun 2025-2029

Perwujudan Visi	Pokok-Pokok Visi	Pernyataan Visi
✓ Pertumbuhan ekonomi yang inklusif ✓ Peningkatan pelayanan publik berkualitas yang ditandai dengan meningkatnya indeks kepuasan masyarakat ✓ Terjaganya ketenteraman dan ketertiban umum ✓ Peningkatan pendapatan perkapita	SENYUM	

Perwujudan Visi	Pokok-Pokok Visi	Pernyataan Visi
✓ Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan infrastruktur yang berkualitas ✓ Pemerataan pembangunan berbasis gugus pulau ✓ Kemudahan akses pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi secara merata ✓ Ketimpangan berkurang ✓ No one left behind	ADIL	“MEWUJUDKAN <i>SENYUM</i> HALMAHERA SELATAN YANG ADIL, MAJU DAN BERKELANJUTAN BERBASIS AGROMARITIM DALAM BINGKAI SARUMA PENUH BERKAH”
✓ Kemandirian desa ✓ Penurunan angka kemiskinan ✓ Penurunan tingkat pengangguran terbuka ✓ Peningkatan pembangunan infrastruktur dasar	MAJU	
✓ Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	BERKELANJUTAN	
✓ Peningkatan pembangunan sektor Agromaritim ✓ Ketahanan pangan ✓ Kontribusi PDRB sektor Agromaritim	AGROMARITIM	

Visi ini dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan yang terdiri dari aparatur pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, organisasi politik, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, lembaga pendidikan, dunia usaha, tokoh masyarakat, dan seluruh anggota masyarakat untuk menjalankannya dalam upaya mewujudkan cita-cita masa depan Kabupaten Halmahera Selatan.

3.1.2 Misi Jangka Menengah Kabupaten Halmahera Selatan

Upaya mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas, maka dirumuskan pernyataan misi yang merupakan langkah atau cara yang harus dikerjakan dalam usaha menyatakan Visi tersebut. Misi diartikan sebagai tujuan dan sasaran sekaligus penunjuk arah yang memberikan batasan dalam proses pencapaian Visi. Jadi misi tidak lain merupakan langkah atau cara untuk mencapai tujuan. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau

langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Berdasarkan visi diatas, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka dapat dijelaskan masing masing misi yang dikonstruksikan dalam 5 (lima) transformasi senyum (Panca Transformasi Senyum), sebagai berikut:

1. Transformasi Senyum Unggul Berdaya:

Mewujudkan transformasi sosial untuk melahirkan sumber daya manusia Halmahera Selatan yang sehat, cerdas, berkarakter, berdaya saing dan Sejahtera. Misi ini merupakan langkah transformatif Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dalam menyiapkan kualitas sumber daya manusia Halmahera Selatan yang sehat, cerdas, berkarakter, berdaya saing dan Sejahtera;

2. Transformasi Senyum Maju Berkelanjutan:

Menyediakan infrastruktur yang merata, berkualitas dan berwawasan lingkungan berbasis kawasan sebagai daya dukung pengembangan wilayah bagi pembangunan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Misi kedua ini merupakan langkah transformatif Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan untuk membangun infrastruktur berbasis kawasan sesuai kebutuhan secara merata, berkualitas dan berwawasan lingkungan untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan:

3. Transformasi Senyum Produktif Sejahtera:

Mewujudkan transformasi ekonomi daerah yang produktif, inovatif, berdaya saing dan berkelanjutan melalui hilirisasi agromaritim, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pariwisata unggulan. Misi Ketiga ini merupakan langkah transformatif Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dalam mewujudkan inklusifitas ekonomi daerah yang produktif, inovatif, berdaya saing dan berkelanjutan melalui pemberdayaan kewirausahaan, peningkatan nilai tambah hilirisasi pertambangan dengan mendorong hilirisasi sektor agromaritim, transformasi digital, ekonomi kreatif dan pariwisata dengan mempertimbangkan tumbuhnya ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan pendapatan perkapita dan meminimalisir kesenjangan antar kelompok pendapatan, merealisasikan komitmen penciptaan lapangan kerja dalam upaya menurunkan tingkat pengangguran terbuka, menjaga stabilitas ketahanan pangan dengan mendorong kemandirian pangan berkualitas sehingga mengurangi ketergantungan importasi bahan pangan dari luar Halmahera Selatan dan penurunan angka kemiskinan.

4. Transformasi Senyum Prima Bernilai:

Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang profesional, berintegritas,

adaptif, dan melayani; Misi Ketiga ini merupakan langkah transformatif Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas;

5. Transformasi Senyum Saruma Tangguh:

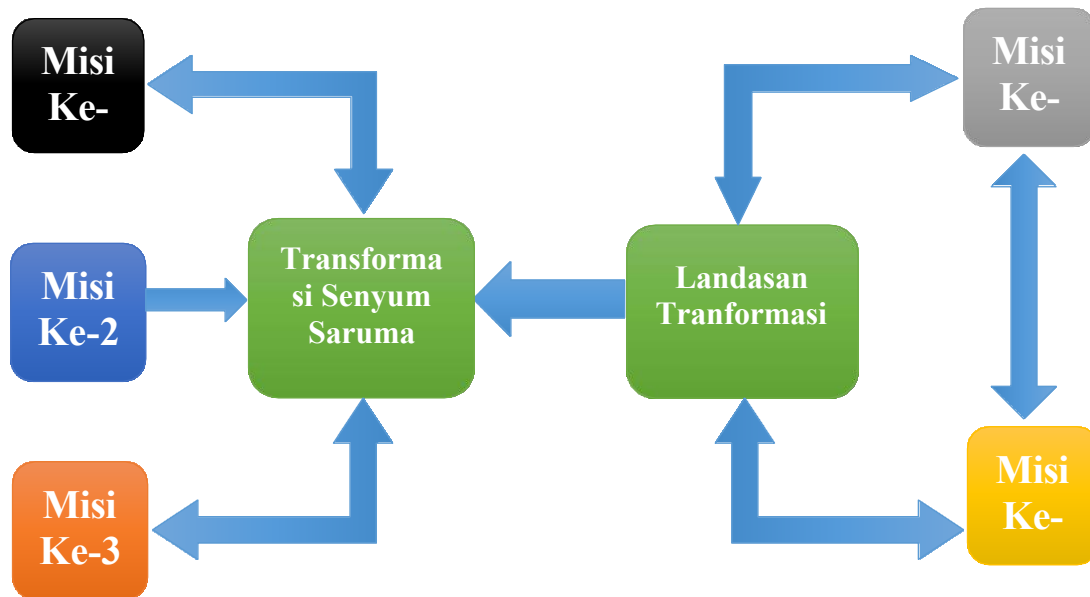
Mewujudkan stabilitas dan ketahanan daerah yang tangguh dan responsif terhadap perkembangan zaman; Misi Keempat ini merupakan langkah transformatif Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan untuk menjaga stabilitas pemerintahan yang kuat dan ketahanan daerah yang tangguh dan responsif.

Tentunya misi di atas, adalah breackdown dari Visi, yang merupakan upaya mempercepat pembangunan ekonomi, menarik investasi ke daerah dengan memperkuat hilirisasi sektor pertambangan dan akselerasi hilirisasi potensi sumber daya alam unggulan lainnya seperti hilirisasi sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan untuk mendukung sektor agromaritim sebagai pilar ketahanan ekonomi masyarakat berkelanjutan sehingga Kabupaten Halmahera Selatan mampu memposisikan diri sebagai salah satu daerah yang memiliki daya saing kompetitif dan eksistensinya dapat disandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia.

3.1.3 Relasi Antar Misi Pembangunan

Untuk merealisasikan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Halmahera Selatan periode 2025 - 2029 maka pemaknaan yang lebih komprehensif terhadap formulasi misi harus dijelaskan substansi dan relasi antar misi dengan pendekatan crosscutting. Untuk menyederhanakan pemaknaan maka rumusan Kelima misi itu disebut sebagai PANCA TRANSFORMASI SENYUM. Dalam formulasi PANCA TRANSFORMASI SENYUM maka ada 3 misi yang menjadi rumah besar transformasi senyum yang disebut sebagai TRANSFORMASI SENYUM SARUMA dan 2 misi lainnya menjadi penopang yang disebut LANDASAN TRANSFORMASI. Tiga misi TRANSFORMASI SENYUM SARUMA adalah misi pertama TRANSFORMASI SENYUM UNGGUL BERDAYA, misi kedua TRANSFORMASI SENYUM MAJU BERKELANJUTAN dan misi ketiga TRANSFORMASI SENYUM PRODUKTIF SEJAHTERA. Sedangkan dua misi yang menjadi LANDASAN TRANSFORMASI yaitu misi keempat TRANSFORMASI SENYUM PRIMA BERNILAI dan misi kelima TRANSFORMASI SENYUM SARUMA TANGGUH. Selengkapny dapat dilihat pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1
Hubungan Antar Misi Panca Transformasi Senyum



Misi pertama TRANSFORMASI SENYUM UNGGUL BERDAYA merupakan langkah transformatif Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dalam menyiapkan kualitas sumber daya manusia Halmahera Selatan yang sehat, cerdas, berkarakter, berdaya saing dan Sejahtera. Misi ini menjadi salah satu sisi penyanggah rumah besar transformasi senyum. Namun untuk mewujudkan penyiapan kualitas SDM yang diharapkan maka dibutuhkan misi kedua yaitu TRANSFORMASI SENYUM MAJU BERKELANJUTAN yang akan memperkuat sisi lain rumah besar transformasi senyum dari aspek infrastruktur. Penyiapan SDM tanpa dukungan infrastruktur yang berkualitas maka akan melemahkan daya dorong dan daya ungkit pembangunan daerah.

Selain itu misi pertama dan kedua harus diperkuat juga dengan misi ketiga yaitu TRANSFORMASI SENYUM PRODUKTIF SEJAHTERA. Misi ketiga ini merupakan langkah transformatif Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dalam mewujudkan inklusifitas ekonomi daerah yang produktif, inovatif, berdaya saing dan berkelanjutan melalui pemberdayaan kewirausahaan, peningkatan nilai tambah hilirisasi pertambangan dengan mendorong hilirisasi sektor agromaritim, transformasi digital, ekonomi kreatif dan pariwisata dengan mempertimbangkan tumbuhnya ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan pendapatan perkapita dan meminimalisir kesenjangan antar kelompok pendapatan, merealisasikan komitmen penciptaan lapangan kerja dalam upaya menurunkan

tingkat pengangguran terbuka, menjaga stabilitas ketahanan pangan dengan mendorong kemandirian pangan berkualitas sehingga mengurangi ketergantungan importasi bahan pangan dari luar Halmahera Selatan dan penurunan angka kemiskinan.

Dengan misi ketiga ini diharapkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berkarakter yang didukung oleh infrastruktur daerah yang berkualitas harus mampu menjawab tuntutan dan kebutuhan masyarakat dari aspek kesejahteraan. Untuk itu maka ketiga misi tersebut diletakkan sebagai TRANSFORMASI SENYUM SARUMA yang akan menjadi lokomotif bagi kedua misi lainnya yang berada pada posisi LANDASAN TRANSFORMASI sebagai gerbong untuk menyempurnakan ketiga misi pada TRANSFORMASI SENYUM SARUMA. Secara paradigmatis, relasi antara ketiga misi tersebut akan ditemukan titik singgung perencanaan pembangunan daerah yaitu penguatan pada aspek sumber daya manusia, infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Ketiga aspek ini menjadi aspek pengendali dalam mewujudkan visi pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan yaitu “MEWUJUDKAN SENYUM HALMAHERA SELATAN YANG ADIL, MAJU DAN BERKELANJUTAN BERBASIS AGROMARITIM DALAM BINGKAI SARUMA PENUH BERKAH” .

Misi keempat dan kelima yaitu TRANSFORMASI SENYUM PRIMA BERNILAI dan TRANSFORMASI SENYUM SARUMA TANGGUH akan menjadi gerbong untuk mengikuti lokomotif TRANSFORMASI SENYUM SARUMA yang terdiri dari misi pertama, kedua dan ketiga dalam upaya pencapaian visi besar Kabupaten Halmahera Selatan. Untuk mewujudkan transformasi senyum saruma maka harus ditopang dengan tata kelola pemerintahan oleh aparatur sipil negara yang profesional dan berintegritas pada misi keempat sebagai pelaksana pembangunan. Selain itu jika hanya ditopang oleh aparatur yang profesional sebagai pelaksana pembangunan maka rumah besar TRANSFORMASI SENYUM SARUMA tidak dapat berdiri secara seimbang. Untuk itu maka rumah besar ini harus ditopang juga dengan stabilitas pemerintahan yang kuat dan ketahanan daerah yang tangguh dan responsif pada misi kelima yaitu TRANSFORMASI SENYUM SARUMA TANGGUH.

Untuk itu misi keempat dan kelima menjadi LANDASAN TRANSFORMASI yang juga menjadi penopang rumah besar TRANSFORMASI SENYUM SARUMA. Relasi antara misi ini menjadi dasar pijakan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Halmahera Selatan periode 2025-2029, lebih jelasnya pada Gambar 3.2.

Gambar 3.2
Relasi Antar Misi Pembangunan 2025-2029



3.1.4 Tujuan Dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan terpilih menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dalam hal ini tujuan dan sasaran merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Mengacu pada visi dan misi yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan jangka menengah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2025- 2029 adalah sebagai berikut:

Tujuan dan Sasaran Misi Pertama **TRANSFORMASI SENYUM UNGGUL BERDAYA** (Mewujudkan transformasi sosial untuk melahirkan sumber daya manusia Halmahera Selatan yang sehat, cerdas, berkarakter, berdaya saing dan Sejahtera) memiliki tujuan :

- T.1. Meningkatkan daya saing sumber daya manusia yang sehat, cerdas, unggul dan berdaya dengan sasaran :
 - 1) Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan serta derajat kesehatan masyarakat

- 2) Meningkatnya Keluarga Berkualitas, kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif;
- 3) Meningkatnya kompetensi Kesempatan dan Kompetensi Tenaga Kerja;
- 4) Meningkatnya sistem jaminan perlindungan sosial

Tujuan dan Sasaran Misi Kedua **TRANSFORMASI SENYUM MAJU BERKELANJUTAN** (Menyediakan infrastruktur yang merata, berkualitas dan berwawasan lingkungan berbasis kawasan sebagai daya dukung pengembangan wilayah bagi pembangunan yang berkelanjutan dan berkesinambungan) memiliki tujuan :

T.2. Meningkatkan infrastruktur berkualitas dan berwawasan lingkungan dengan sasaran :

- 1) Meningkatnya konektivitas Daerah dan Pembangunan Desa Serta Daerah Transmigrasi;
- 2) Meningkatnya infrastruktur dasar, Perumahan dan Permukiman;
- 3) Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup

Tujuan dan Sasaran Misi Ketiga **TRANSFORMASI SENYUM PRODUKTIF SEJAHTERA** (Mewujudkan transformasi ekonomi daerah yang produktif, inovatif, berdaya saing dan berkelanjutan melalui hilirisasi agromaritim, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pariwisata unggulan) memiliki tujuan :

T.3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan dengan sasaran :

- 1) Meningkatnya Daya Saing Pangan dan produktivitas sektor unggulan (Agromaritim);
- 2) Meningkatnya kewirausahaan, UMKM, Koperasi dan ekonomi kreatif;
- 3) Meningkatnya investasi sektor unggulan (Agromaritim)
- 4) Meningkatnya Ekonomi Keuangan Syariah

Tujuan dan Sasaran Misi Keempat **TRANSFORMASI SENYUM PRIMA BERNILAI** (Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang profesional, berintegritas, adaptif, dan melayani) memiliki tujuan :

T.4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan adaptif dengan sasaran :

- 1) Meningkatnya kinerja tata kelola, reformasi birokrasi dan pelayanan publik;
- 2) Meningkatnya Transformasi Digital dan Inovasi Daerah

3) Meningkatnya kapasitas aparatur

4) Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah

Tujuan dan Sasaran Misi Kelima **TRANSFORMASI SENYUM SARUMA TANGGUH** (Mewujudkan stabilitas dan ketahanan daerah yang tangguh dan responsif terhadap perkembangan zaman) memiliki tujuan :

T.5. Memperkuat ketahanan daerah dan harmoni sosial yang berkarakter dengan sasaran :

- 1) Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan yang berlandaskan Nilai Adat Budaya dan Keagamaan;
- 2) Meningkatnya Mitigasi dan Penanggulangan Bencana.

Tabel 3.3
Indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
Mewujudkan Senyum Halmahera Selatan Yang Adil, Maju dan Berkelanjutan Berbasis Agro Maritim Dalam Bingkai Saruma Penuh Berkah - Transformasi Senyum Unggul Berdaya: Mewujudkan Transformasi Sosial untuk Melahirkan Sumberdaya Manusia Halmahera Selatan yang Sehat, Cerdas, Berkerakter, Berdaya Saing dan Sejahtera - Transformasi Senyum Produktif Mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah yang Produktif, Inovatif, Berdaya Saing dan Berkelanjutan Melalui Hilirisasi Agromaritim, Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Pariwisata Unggulan - Transformasi Senyum Prima Mewudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional. Berintegritas, Adabtif, dan Melayani - Transformasi Senyum Saruma Mewujudkan Stabilitas dan Ketahanan Daerah yang Tangguh dan	1. Meningkatkan Daya Saing Sumberdaya Manusia yang Sehat, Cerdas, Unggul dan Berdaya		Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	66,66	67,96	68,46	68,46	68,86	69,19	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
Responsif Terhadap Perkembangan Zaman - Transformasi Senyum Maju Menyediakan Infrastruktur yang Merata, Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan Berbasis Kawasan Sebagai Daya Dukung Pengembangan Wilayah Bagi Pembangunan yang Berkelanjutan dan Berkesinambungan										

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
			Tingkat Kemiskinan ((%))	5,63	5,63	4,43	4,03	3,63	3,26	
			Rasio Gini (Indeks)	0,237	235	0,233	0,23	0,228	226	
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Pendidikan (Indeks)	68,43	69,31	70,19	71,95	72,83	73,71	
			Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))	66,98	67,25	67,52	67,79	68,06	68,33	
		Meningkatnya Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga* ((%))	65,64	66,35	67,07	67,78	68,49	68,49	
		Meningkatnya Kesempatan dan Kompetensi Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,9	1,9	1,8	1,7	1,6	1,5	
		Meningkatnya Sistem Jaminan Perlindungan Sosial	persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani (%)	67	71	74	78	82	86	
	2. Meningkatkan Infrastruktur Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan		Indeks Daya Saing Daerah (Angka)	2,6	2,7	2,8	2,9	3	3,1	
			Indeks Ketimpangan Wilayah (Angka)	160	154	147	141	134	134	
			Persentase Penurunan Emisi GRK (Persentase)	80,36	80,37	80,39	80,7	80,8	81,03	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
		Meningkatnya Konektivitas Daerah dan Pembangunan Desa Serta Daerah Transmigrasi	Rasio Konektivitas Wilayah (%)	63	65	67	73	75	81	
			Indeks Infrastruktur (Angka)	40	45	50	55	60	65	
			Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang (Persentase)	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	
			Persentase Desa Mandiri (%)	5,62	5,62	5,62	5,62	5,62	5,62	
		Meningkatnya Infrastruktur Dasar, Perumahan dan Permukiman	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	77,02	77,11	77,19	77,28	77,37	77,46	
		Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Indeks)	83,55	83,72	83,89	84,06	84,23	84,23	
	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan		Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	21,34	22,04	22,64	23,14	23,54	24	
			PDRB per Kapita (Rp)	74,24	74,24	77,54	81,11	84,31	142,95	
		Meningkatnya Daya Saing Pangan dan Produktivitas Sektor Unggulan (Agromaritim)	Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	12,4	12,4	13,9	15,4	16,9	18,4	
			Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)	53,76	54,36	54,96	55,56	56,16	56,76	
		Meningkatnya Kewirausahaan, UMKM,	Kontribusi PDRB Kabupaten Halmahera Selatan (%)	22,47	22,47	22,51	22,55	22,62	35	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
		Koperasi dan Ekonomi Kreatif	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	5,2	8,5	7,7	8,9	9,5	10	
		Meningkatnya Investasi Sektor Unggulan (Agromaritim)	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota (%)	27,35	28,4	29,1	30	31	31,9	
		Meningkatnya Ekonomi Keuangan Syariah	Indeks Zakat Nasional (IZN) (Poin)	0,2	0,23	0,26	0,29	0,3	0,32	
	4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Adaptif		Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	65	69	74	78	85	90	
		Meningkatnya Kinerja Tata Kelola, Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	3,1	3,6	3,9	4,1	4,4	4,6	
			Indeks Integritas Nasional (Persentase)	73,7	74,5	75,4	76,6	77,5	77,6	
		Meningkatnya Kapasitas Aparatur	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	25,42	27,13	29,87	30,58	31,76	32,54	
		Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Rasio Kemandirian Fiskal (Nilai)	11,5	14	17	21	25	30	
			Return on Asset (ROA) BUMD (%)	1	1	1	1	1	1	
		Meningkatnya Tranformasi Digital dan Inovasi Daerah	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Angka)	5	5,2	5,4	5,6	5,8	6,2	
			Indeks Inovasi Daerah (Angka)	55,24	60,24	61,24	62,24	63,24	64,24	
	5. Mewujudkan Stabilitas dan Ketahanan Daerah yang Tangguh dan Responsif Terhadap Perkembangan Zaman		Indeks Ketahanan Daerah (Angka)	0,4	0,5	0,6	0,75	0,8	0,85	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
		Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan yang Berlandaskan Nilai Adat Budaya dan Keagamaan	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) ((%))	65	68	70	75	78	80	
			Indeks Ketenteraman dan Ketertiban (Angka)	50	65	70	80	85	100	
		Meningkatnya Mitigasi dan Penanggulangan Bencana	Indeks Risiko Bencana (Indeks)	193,6	191,6	190,1	188,6	187,1	186,6	

3.2 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 merupakan tahapan awal dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Halmahera Selatan periode 2025-2045 sehingga sangat strategis untuk menjadi pijakan fundamental keberhasilan RPJPD Kabupaten Halmahera Selatan 20 tahun mendatang. RPJMD tahun 2025-2029 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPD untuk menjadikan ***"HALMAHERA SELATAN PUSAT AGROMARITIM YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI SARUMA"***.

Sesuai RPJPD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2025-2045, Arah kebijakan Pembangunan Lima Tahun pertama 2025 – 2029 adalah: perkuatan fondasi transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan daerah untuk mewujudkan **Kabupaten Halmahera Selatan Sebagai pusat Agromaritim Yang Maju Dan Berkelanjutan Dalam Bingkai Saruma**. Kebijakan periode pertama RPJPD ini diarahkan pada :

1. Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial;
2. Hilirisasi SDA; penguatan riset inovasi dan produktifitas tenaga kerja
3. Perwujudan kelembagaan pemerintah daerah tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil
4. Penguatan supremasi hukum dan stabilitas keamanan sebagai landasan Transformasi Halmahera Selatan
5. Penguatan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar Transformasi Halmahera Selatan
6. Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan
7. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
8. Optimalisasi pembiayaan pembangunan daerah

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, untuk melaksanakan strategi diperlukan arah kebijakan pembangunan daerah. Hal ini dilakukan karena arah kebijakan merupakan keputusan dan intervensi pemerintah untuk dapat melaksanakan strategi pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan mengaitkan antara strategi dan arah kebijakan maka pencapaian sasaran pembangunan akan menjadi lebih terjamin. Untuk itu dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Halmahera

Selatan tahun 2025-2029, maka strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah harus dirumuskan secara komprehensif. Strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan. Strategi tersebut disusun dalam rangka pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah. Setiap strategi harus mampu di orientasikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan yang dituju, dan mendukung pencapaian misi yang telah ada. Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Selanjutnya, agar perumusan strategi dan arah kebijakan menjadi lebih terarah, sebelumnya dilakukan analisis lingkungan dan analisis strategi pilihan.

3.2.1 Strategi, Arah Kebijakan Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Perumusan strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan 2025 - 2029, juga mempertimbangkan kebijakan dalam penguatan pemerataan pembangunan dengan konsep pembangunan berbasis zonasi. Setiap zonasi akan dibangun secara bertahap dengan timeline satu tahun anggaran selama 5 (lima) tahun. Perumusan strategi dan arah kebijakan juga mempertimbangkan aspek inovasi daerah dengan membangun basis data, menyusun regulasi, mengembangkan mekanisme insentif dan disinsentif, menguatkan jejaring antar pemangku kepentingan, membangun sistem difusi inovasi berbasis teknologi informasi dan forum komunikasi antar pemangku kepentingan, membangun sistem apresiasi kreativitas yang inovatif, membangun penguatan kelembagaan vertikal dan horizontal melalui komunikasi dan koordinasi antar lembaga, meningkatkan kualitas layanan infrastruktur fisik, meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap keterbukaan informasi dan pengetahuan yang mendukung perdagangan dan jasa.

1. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

Untuk mewujudkan visi misi Kabupaten Halmahera Selatan 2025-2029 perlu dirumuskan langkah-langkah strategis dan arah kebijakan yang komprehensif. Berikut ini merupakan strategi dan arah kebijakan yang dijabarkan berdasarkan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2025-2029:

Tujuan 1	:	Meningkatnya Daya Saing sumber daya manusia yang sehat cerdas, Unggul dan berdaya;
Sasaran 1	:	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidikan dan Derajat Kesehatan Masyarakat
Strategi dan arah kebijakan meliputi	:	1. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan; 2. Pembangunan dan Revitalisasi sarana dan prasarana Pendidikan; 3. Perluasan layanan pendidikan anak usia dini; 4. Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah; 5. Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul; 6. penguatan pengelolaan guru meliputi formasi rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (pelatihan) dan kesejahteraan berbasis kinerja; 7. Pemberian makan siang dan susu gratis di sekolah; 8. Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat; 9. Peningkatan budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga; 10. Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi. 11. Peningkatan Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak 12. Penguatan program pembinaan sekolah berbasis nilai 1. Pemenuhan Kesehatan Untuk Semua; 2. Pemberian makan dan bantuan gizi gratis untuk anak balita, ibu menyusui dan ibu hamil. 3. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, 4. pembangunan Infrastruktur rumah sakit lengkap dan berkualitas 5. Pengembangan pelayanan Kesehatan bergerak dan Kecamatan/Desa sulit Akses 6. Penurunan kematian ibu dan anak; 7. Pencegahan dan penurunan stunting 8. Penuntasan TBC 9. Eliminasi penyakit Malaria

10. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk Halmahera Selatan
11. Peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk seluruh masyarakat Halmahera Selatan
12. Pemenuhan dan pendayagunaan SDM kesehatan;

Sasaran 3

Strategi dan arah kebijakan meliputi

Meningkatnya Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender dan Masyarakat Inklusif

1. Peningkatan Kesenjangan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak;
2. Penguatan Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)
3. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.

Sasaran 4

Strategi dan arah kebijakan meliputi

: Meningkatkan Kesempatan dan Kompetensi Tenaga Kerja

1. Peningkatan kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja
2. Memanfaatkan keberadaan perguruan tinggi lokal dan BLK untuk melakukan *upskilling* dan *reskilling* tenaga kerja
3. Memberdayakan Jumlah penduduk usia produktif yang terus meningkat dengan mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja lokal
4. Meningkatkan angka partisipasi kerja dan memperluas kesempatan kerja melalui kewirausahaan, peningkatan investasi dan kerjasama antar daerah untuk mendukung investasi hilirisasi agromaritim dan industri pengolahan
5. Memfokuskan penyediaan instrumen pendidikan dan pelatihan vokasi bekerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi lokal dan BLK untuk mendukung ketersediaan tenaga kerja terlatih
6. Meningkatkan *up-skilling* dan *re-skilling* SDM terutama terkait perikanan, perkebunan (termasuk pangan), pariwisata, dan industri

Sasaran 5

Strategi dan arah kebijakan meliputi

: Meningkatkan Sistem Jaminan Perlindungan Sosial

1. Percepatan penurunan Kemiskinan;
2. Penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran
3. Melakukan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal
4. Melakukan perlindungan dan pemenuhan hak dasar bagi keluarga miskin dan rentan miskin
5. Mengentaskan kemiskinan terutama pada DTPK (daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan)

		melalui optimalisasi pengelolaan bantuan sosial, kolaborasi dengan lembaga filantropi
		6. Memberdayakan keluarga miskin dengan menciptakan kesempatan kerja
		7. Meningkatkan kualitas infrastruktur jaringan dan keterjangkauan masyarakat terhadap kebutuhan air bersih
		8. Membangun Rumah Sehat Layak Huni secara merata untuk mengurangi pemukiman kumuh
		9. Melakukan koordinasi lintas sektor untuk validasi data terpadu sosial ekonomi
Tujuan 2	:	Meningkatnya Infrastruktur berkualitas dan berwawasan lingkungan
Sasaran 6	:	Meningkatnya Konektivitas Daerah dan Pembangunan Desa Serta Transmigrasi
Strategi dan arah kebijakan meliputi		1. Pemenuhan Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten, Kecamatan dan Desa. 2. Pemenuhan infrastruktur wilayah dalam dan antar pusat kegiatan 3. Meningkatkan ketersediaan pelayanan dasar dengan pendekatan pembangunan berbasis zonasi 4. Meningkatkan pembangunan jalan dan jembatan berbasis zonasi untuk mendukung kelancaran transportasi; 5. Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal Transmigrasi; 6. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa.
Sasaran 7	:	Meningkatnya Infrastruktur Dasar, Perumahan dan Permukiman
Strategi dan arah kebijakan meliputi		1. Penguatan ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air; 2. Pemenuhan pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang; 3. Pemenuhan rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan; 4. Penguatan pencapaian Ketahanan Energi 5. pembangunan infrastruktur Kecamatan dan Desa; 6. Pengembangan SPAM; 7. Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU; 8. Transformasi digital layanan publik prioritas; 9. Percepatan akselerasi transformasi pemerintah digital; 10. Penyediaan dan pengawasan sanitasi aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim berbasis CWIS; 11. Pembangunan infrastruktur jaringan ketenagalistrikan dan digitalisasinya; 12. Konservasi sumberdaya air;

13. Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau;
14. Percepatan pembangunan destinasi Pariwisata Kabupaten Halmahera Selatan
15. Membangun infrastruktur penunjang ekonomi (listrik, telekomunikasi, bandara, pelabuhan, internet) yang representatif sebagai penopang pengembangan hilirisasi agromaritim
16. Meningkatkan pembangunan jalan dan jembatan berbasis zonasi untuk mendukung kelancaran transportasi
17. Membangun Rumah Sehat Layak Huni secara merata untuk mengurangi pemukiman kumuh
18. Melakukan percepatan pemenuhan Kota Layak Anak dan Lansia untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih humanis

Sasaran 8

Strategi dan arah kebijakan meliputi

: Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Menjamin pelestarian lingkungan hidup;
2. Peningkatan pengelolaan hutan lestari sebagai sumber pertumbuhan baru, pengentasan kemiskinan, serta ketahanan pangan, air dan energi;
3. Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan;
4. Peningkatan pengumpulan dan pengelolaan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR;
5. Pengawasan Pencemaran lingkungan;
6. Optimalisasi penyediaan ruang terbuka hijau dan penguatan standar pengelolaan ekonomi hijau serta penurunan gas rumah kaca (GRK)
7. Membangun RTH dan taman kota sebagai ruang interaksi sosial masyarakat dan menopang keindahan kota
8. Meningkatkan sistem pengelolaan sampah modern dan pengembangan tempat pembuangan akhir
9. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap fungsi lingkungan hidup terintegrasi
10. Melakukan penguatan pengawasan dan pengendalian dalam penyediaan fasilitas pengolahan limbah dan sampah masyarakat
11. Membangun pengelolaan sampah terpadu untuk menunjang pelestarian lingkungan dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*)

Tujuan 3

: Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan

Sasaran 9

: Meningkatnya Daya Saing Pangan dan Produktivitas Sektor Unggulan (Agromaritim)

Strategi dan arah kebijakan meliputi

1. Penguatan ketahanan pangan;
2. Penguatan nilai tambah komoditas pertanian, perkebunan dan perikanan menggunakan konsep hilirisasi

3. Penguatan Tata Kelola Perikanan yang Berkelanjutan;
4. Peningkatan Produksi Pertanian
5. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air;
6. Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan Halmahera Selatan;
7. Pembangunan pangan hewani
8. Pembangunan pangan lokal dan nabati
9. ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani.
10. Menyiapkan program agromaritim untuk mengurangi importasi bahan pangan dari luar daerah
11. Melakukan perwilayahan komoditas melalui penetapan kesesuaian lahan pertanian dan sentra perikanan berbasis zonasi
12. Memperkuat inovasi, menjamin perlindungan, dan memperluas daya dukung sarana prasarana bagi pertanian berkelanjutan untuk mendukung sektor agromaritim
13. Percepatan pengembangan lumbung ikan nasional

Sasaran 10

: Meningkatnya Kewirausahaan, UMKM, Koperasi dan ekonomi Kreatif

Strategi dan arah kebijakan meliputi

1. Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM
2. Pengembangan koperasi sektor produksi
3. Peningkatan Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Halmahera Selatan;
4. Peningkatan Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global;
5. Percepatan pertumbuhan sektor industri pengolahan
6. Meningkatkan perlindungan dan kapasitas usaha mikro melalui kolaborasi program dengan usaha kecil menengah dan swasta besar
7. Memperkuat produk lokal melalui IKM dan UMKM sebagai penguatan ekonomi wilayah
8. Meningkatkan manajemen UMKM untuk mendorong kemandirian dan daya saing daerah
9. Memperkuat perlindungan dan menyederhanakan alur investasi bagi pengembangan ekonomi lokal baik skala mikro, kecil, menengah dan koperasi
10. Menumbuhkan semangat kewirausahaan dan kemandirian ekonomi lokal, serta pendampingan dalam penciptaan mekanisme pemasaran digital
11. Memberikan peluang tumbuhnya ekonomi kreatif

Sasaran 11

Meningkatnya Investasi Sektor Unggulan (Agromaritim)

- Strategi dan arah kebijakan meliputi :
1. Pemenuhan pencapaian Target realisasi Penanaman Modal
 2. Peningkatan daya saing agromaritim
 3. Memanfaatkan posisi strategis dan potensi sumberdaya wilayah yang tersedia untuk menarik investasi, terutama di sektor pertambangan, perkebunan, perikanan dan pariwisata
 4. Meningkatkan nilai tambah industri pertambangan dengan kolaborasi program perencanaan pembangunan daerah dan CSR
 5. Meningkatkan nilai tambah hilirisasi tambang terhadap kesejahteraan masyarakat
 6. Memperkuat kemitraan antar daerah, swasta dan antar negara dengan memanfaatkan peluang ekspor produk hilirisasi agromaritim
 7. Melakukan penguatan sumber daya agromaritim dengan memanfaatkan peluang minat investasi hilirisasi
 8. Memberdayakan potensi pariwisata lokal berkelas nasional dan internasional dengan menarik minat investor untuk berinvestasi
 9. Membangun, memperbaiki, dan merawat destinasi wisata melalui pelibatan pihak swasta
 10. Mengembangkan ekonomi kreatif melalui penguatan strategi pemasaran serta peningkatan kapasitas pengelola dan masyarakat pelaku usaha
 11. Mengembangkan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif dengan prinsip pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*)
 12. Mengembangkan kawasan pariwisata premium (*premium tourism*) yaitu kawasan pariwisata dengan target wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara minat khusus
 13. Mengembangkan kawasan pariwisata lokal yaitu kawasan pariwisata yang diarahkan untuk dapat meningkatkan jumlah wisatawan dan peningkatan minat wisatawan lokal

Sasaran 12

Strategi dan arah kebijakan meliputi

Meningkatnya ekonomi Keuangan Syariah

1. Peningkatan pengelolaan ekonomi dan keuangan syariah di daerah;
2. Optimalisasi pengelolaan zakat infaq dan sadaqah
3. Mengembangkan peningkatan sektor riil ekonomi syariah

Tujuan 4

Meningkatnya Tata kelola, Pemerintahan yang Efektif dan Adaptif

Sasaran 13

Meningkatnya Kinerja tata kelola, Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Strategi dan arah kebijakan meliputi

1. Penguatan Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif;
2. Penguatan Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa;

3. Penguatan keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan;
4. Penguatan kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN);
5. Penguatan sistem tata kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa;
6. Peningkatan kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital;
7. Pembangunan sarana prasarana pemerintahan
8. Melakukan penguatan program Pembinaan Aparatur Berbasis Nilai sebagai sistem manajemen SDM Aparatur khas Halmahera Selatan
9. Melakukan pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi
10. Melakukan penguatan manajemen talenta (*talent pool*) untuk meningkatkan manajemen ASN dan kelembagaannya
11. Melakukan pemantapan reformasi birokrasi dengan penguatan merit system berbasis IT didukung pembinaan berbasis nilai bagi ASN daerah
12. Melakukan penguatan kualitas dan integritas OPD dengan penerapan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
13. Mengoptimalkan peran dan fungsi OPD untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat

Sasaran 14

Strategi dan arah kebijakan meliputi

: Meningkatnya kapasitas Aparatur

1. Reformasi Birokrasi Kabupaten Halmahera Selatan;
2. Pengembangan Manajemen talenta Riset dan Inovasi;
3. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, fungsional dan teknis
4. Mendorong sistem layanan kepegawaian berbasis IT

Sasaran 15

Strategi dan arah kebijakan meliputi

: Meningkatnya Pengelolaan keuangan Daerah

1. Ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan dan retribusi daerah;
2. Intensifikasi penerimaan Daerah bukan pajak

Sasaran 16

Strategi dan arah kebijakan meliputi

Meningkatnya Tranformasi Digital dan Inovasi Daerah

1. Optimalisasi pelayanan publik dengan memanfaatkan transformasi digital;
2. Meningkatkan kecamatan dan desa yang terakses jaringan telekomunikasi seluler dan internet

- berkualitas untuk mendukung perekonomian masyarakat dan pelayanan publik;
- 3. Meningkatkan transformasi digital pada ekosistem pemerintahan dan ekonomi masyarakat;
- 4. Penguatan kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN);
- 5. Penguatan keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah.

Tujuan 5

Sasaran 17

Strategi dan arah kebijakan meliputi

Mewujudkan Stabilitas dan Ketahanan Daerah yang Tangguh dan Responsif Terhadap Perkembangan Zaman Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan yang Berlandaskan Nilai Adat Budaya dan Keagamaan

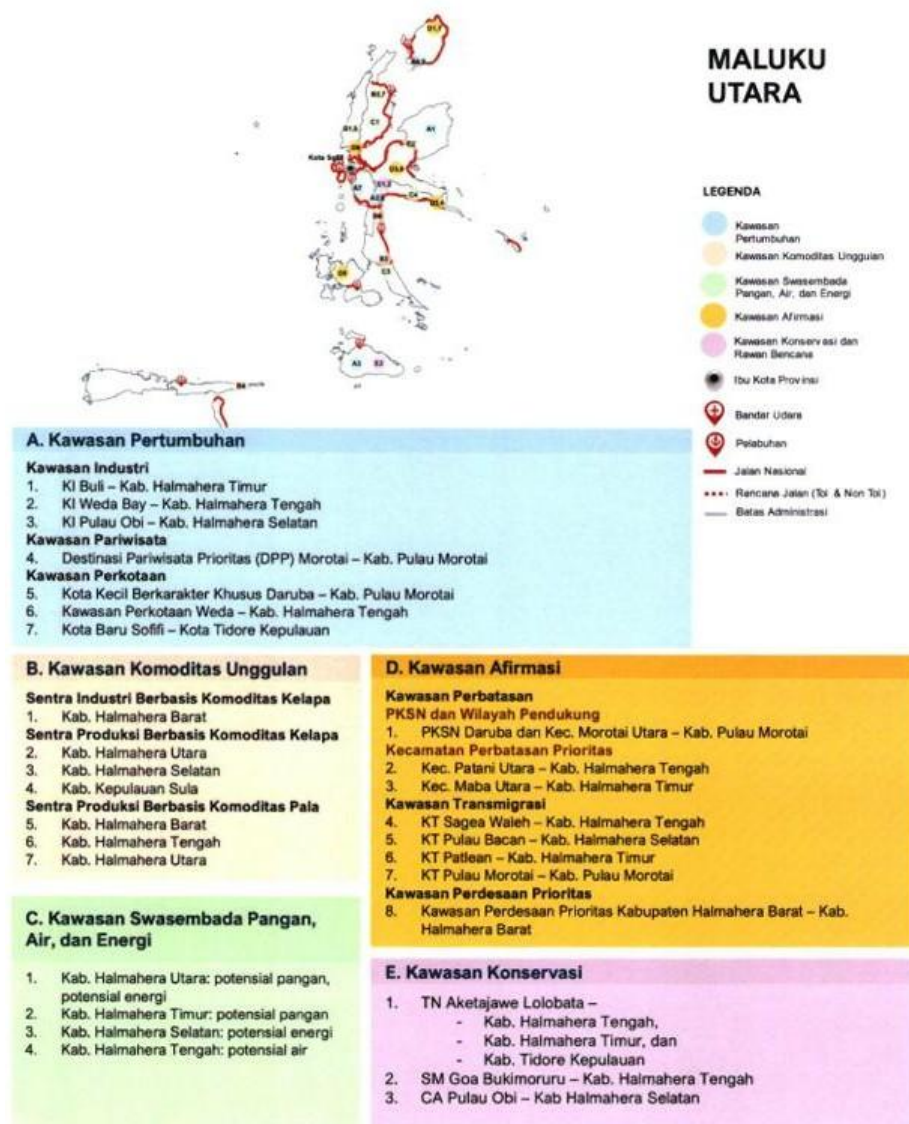
- 1. Pelestarian seni budaya;
- 2. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga adat masyarakat untuk mendukung pemberdayaan budaya dan kearifan adat masyarakat lokal;
- 3. Internalisasi nilai-nilai tradisi dan budaya bersendikan agama untuk menangkal pengaruh negatif masuknya nilai budaya asing akibat maraknya industrialisasi;
- 4. Memantapkan ketahanan sosial budaya serta ekologi melalui penguatan ketangguhan individu, keluarga dan komunitas untuk membangun keseimbangan dan hubungan timbal balik;
- 5. Melakukan pelestarian nilai-nilai budaya melalui penguatan kelembagaan kesultanan dan paguyuban;
- 6. Peningkatan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah;
- 7. Melakukan penguatan Program Pembinaan Masyarakat Berbasis Nilai serta Pembinaan siswa dan Kampus Berbasis Nilai;
- 8. Mengembangkan manajemen pemerintahan berbasis nilai;
- 9. Pemenuhan Pelayanan keamanan dan ketertiban serta satuan perlindungan masyarakat sesuai standar minimal;
- 10. Meningkatkan Mitigasi dan penanganan Bencana;
- 11. Meningkatkan hubungan koordinasi dengan lembaga keagamaan dan forum antar umat beragama untuk mendukung keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 12. Memanfaatkan semua sumberdaya untuk mengantisipasi gangguan terhadap kamtibmas, pengaruh nilai dan budaya asing serta pengaruh dari perjanjian-perjanjian multilateral oleh pemerintah Indonesia;
- 13. Menumbuhkan kembali nilai-nilai cinta tanah air dan kebersamaan yang adil dalam masyarakat disertai semangat toleransi dan gotong royong;
- 14. Melakukan penguatan dialog antar umat beragama,

	komunitas dan berbagai komponen politik sebagai upaya membangun sinergi kebersamaan;
Sasaran 18	15. Melakukan penguatan nilai-nilai kebangsaan, kebhinekaan dan persatuan sebagai pilar pemersatu
	: Meningkatnya mitigasi dan penanggulangan bencana
Strategi dan arah kebijakan meliputi	1. Pemenuhan manajemen bencana yang terintegrasi antar sektor 2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur mitigasi bencana dan dampak kebencanaan dengan mengurangi potensi kerusakan lingkungan 3. Melakukan enguatan literasi kebencanaan melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan dan pemerintah desa 4. Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat dan mempercepat tumbuhnya desa mandiri tangguh bencana 5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dalam mendukung peningkatan pemahaman masyarakat terhadap kebencanaan 6. Melakukan penguatan sistem manajemen kebencanaan dan kedaruratan dalam rangka menguatkan deteksi dini dan membangun resiliensi bencana

2. Arah Kebijakan Pembangunan

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan pusat, oleh karena itu arah pembangunan Kabupaten Halmahera Selatan memiliki keselarasan dengan arah pembangunan nasional yang tertuang dalam dokumen RPJMN Tahun 2025-2029. Berikut arah pembangunan Kabupaten Halmahera Selatan yang menjadi prioritas nasional sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 3.3

Gambar 3.3
Arah Pembangunan kabupaten Halmahera Selatan Menurut
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029



Sumber : Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 - RPJMN 2025-2029.

Berdasarkan gambar diatas Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan lampiran IV Peraturan presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 arah pembangunannya dibagi atas beberapa kawasan antara lain:

- a. Kawasan Pertumbuhan dimana Kawasan industri dengan KI Pulau Obi
- b. Kawasan Komoditas Unggulan yaitu sentra Industri produksi berbasis komoditi kelapa
- c. Kawasan Swasembada pangan, Air dan Energi dengan Kabupaten Halmahera Selatan sebagai kawasan potensial energi
- d. Kawasan Afirmasi dengan kawasan transmigrasi berada KT Pulau Bacan
- e. Kawasan konservasi dengan CA Pulau Obi

1. Arah Kebijakan Pembangunan berdasarkan Misi Kabupaten Halmahera Selatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah agar tetap sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2025 – 2029 maka perlu ditetapkan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah yang nantinya akan menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan daerah lima tahun yang akan datang. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2025 – 2030 sesuai misi disajikan dalam **Tabel 3.4** berikut.

Tabel 3. 4
Arah Kebijakan Pembangunan sesuai Misi
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2025-2030

NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN	KETERANGAN
1	TRANSFORMASI SENYUM UNGGUL BERDAYA	Mewujudkan transformasi sosial untuk melahirkan sumber daya manusia Halmahera Selatan yang sehat, cerdas, berkarakter, berdaya saing dan Sejahtera	
2	TRANSFORMASI SENYUM MAJU BERKELANJUTAN	Menyediakan infrastruktur yang merata, berkualitas dan berwawasan lingkungan berbasis kawasan sebagai daya dukung pengembangan wilayah bagi pembangunan yang berkelanjutan dan berkesinambungan	
3	TRANSFORMASI SENYUM PRODUKTIF SEJAHTERA	Mewujudkan transformasi ekonomi daerah yang produktif, inovatif, berdaya saing dan berkelanjutan melalui hilirisasi a5gromaritim, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pariwisata unggulan	
4	TRANSFORMASI SENYUM PRIMA BERNILAI	Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang profesional, berintegritas, adaptif, dan melayani	
5	TRANSFORMASI SENYUM SARUMA TANGGUH	Mewujudkan stabilitas dan ketahanan daerah yang tangguh dan responsif terhadap perkembangan zaman	

Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2025 – 2030 sesuai misi disajikan dalam **Tabel 3.5** berikut:

Tabel 3. 5

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2025-2030

Arah Kebijakan Pembangunan				
2026	2027	2028	2029	2030
Akselerasi Transformasi struktural melalui transformasi birokrasi yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas dan daya saing SDM untuk meningkatkan inovasi daerah serta pelayanan publik yang berkualitas	Percepatan transformasi sistem perlindungan social dan percepatan infrastruktur dasar untuk menunjang aksestabilitas wilayah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat	Percepatan transformasi ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi agromaritim dan percepatan infrastruktur kawasan dan ekonomi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing daerah	Penguatan transformasi pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan melalui digitalisasi sistem pelayanan serta pemantapan pembangunan infrastruktur kawasan dan ekonomi yang berkelanjutan	Pemantapan transformasi ketahanan daerah melalui pembangunan sumber daya manusia yang unggul, pemantapan sistem pelayanan publik dan sistem jaring pengaman social, penguatan hilirisasi agromaritim serta pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan

2. Arah Kebijakan Tahun 2026 difokuskan pada ***Akselerasi Transformasi struktural melalui transformasi birokrasi yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas dan daya saing SDM untuk meningkatkan inovasi daerah serta pelayanan publik yang berkualitas.***

Arah kebijakan tahun 2026 juga diarahkan untuk menyelesaikan target pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) setiap urusan dan tugas-tugas pemerintahan yang mendukung otonomi daerah, dengan harapan pada akhir tahun 2026 target arah kebijakan tersebut dapat tercapai. Oleh karena itu tahun pertama perencanaan dalam RPJMD ini diprioritaskan pada:

- 1) Penguatan program Pembinaan Aparatur Berbasis Nilai sebagai sistem manajemen SDM Aparatur khas Halmahera Selatan
- 2) Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi

- 3) Penguatan manajemen talenta (talent pool) untuk meningkatkan manajemen ASN dan kelembagaannya
- 4) Pemantapan reformasi birokrasi dengan penguatan merit system berbasis IT didukung pembinaan berbasis nilai bagi ASN daerah
- 5) Penguatan kualitas dan integritas OPD dengan penerapan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
- 6) Penyiapan dukungan kemungkinan dibukanya moratorium daerah otonomi baru bagi Kabupaten Halmahera Selatan
- 7) Pembangunan kantor kantor organisasi pemerintah daerah secara bertahap
- 8) Peningkatan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, fungsional dan teknis
- 9) Mendorong sistem layanan kepegawaian berbasis IT
- 10) Pendelegasian peran dan kewenangan UPTD pendidikan Korwil Kecamatan untuk pengawasan mutu pendidikan, kualitas dan kompetensi tenaga pendidik serta infrastruktur pendidikan
- 11) Peningkatan kompetensi tenaga pendidik;
- 12) Peningkatan akses dan kualitas Pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi wilayah
- 13) Peningkatan pencapaian standar pelayanan minimal pendidikan untuk menjamin kualitas pendidikan sesuai standar yang ditentukan
- 14) Penyediaan kebijakan afirmasi akses pendidikan
- 15) Peningkatan pemerataan dan pemenuhan standar pendidikan inklusif serta pengembangan pendidikan berbasis nilai
- 16) Peningkatan kompetensi tenaga pendidik
- 17) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui keterpaduan program dan kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan
- 18) Perbaikan sistem dan pengembangan infrastruktur pendidikan dan pengembangan desa berbasis sarjana
- 19) Peningkatan rasio guru dan siswa
- 20) Peningkatan kompetensi tenaga pendidik
- 21) Peningkatan cakupan jaminan kesehatan masyarakat

- 22) Peningkatan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat
- 23) Percepatan penurunan stunting
- 24) Peningkatan akses dan keterjangkauan pelayanan kesehatan
- 25) Beasiswa dokter dan tenaga medis putra daerah untuk mengatasi krisis dokter dan tenaga medis pada daerah kepulauan
- 26) Peningkatan pemberantasan penyakit menular guna mencapai eliminasi malaria, kusta, TBC, HIV, Demam Berdarah, Diare dan Infeksi Saluran Pernafasan
- 27) Peningkatan kualitas sarana prasarana kesehatan dasar dan ketersediaan layanan kesehatan secara merata
- 28) Pembangunan Puskesmas rawat inap dan modern serta peningkatan pembangunan Puskesmas pembantu
- 29) Peningkatan cakupan jaminan kesehatan yang dibiayai pemerintah dan pemerintah daerah
- 30) Peningkatan beasiswa dokter putra daerah untuk mengantisipasi kekurangan dokter di daerah terpencil
- 31) Penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk menyediakan anggaran peningkatan derajat kesehatan masyarakat
- 32) Peningkatan cakupan layanan kepesertaan jaminan kesehatan
- 33) Kerjasama perguruan tinggi lokal dan BLK untuk melakukan *upskilling* dan *reskilling* tenaga kerja
- 34) Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi, serta pengembangan perguruan tinggi lokal
- 35) Peningkatan kualifikasi pendidikan tinggi masyarakat melalui pengembangan perguruan tinggi lokal
- 36) Pengembangan SDM dengan memberdayakan keberadaan perguruan tinggi lokal
- 37) Optimalisasi penyerapan tenaga kerja lokal
- 38) Peningkatan angka partisipasi kerja dan memperluas kesempatan kerja melalui kewirausahaan, peningkatan investasi dan kerjasama antar daerah

untuk mendukung investasi hilirisasi agromaritim dan industri pengolahan

- 39) Melakukan re-skilling dan up skilling tenaga kerja bekerjasama dengan perguruan tinggi lokal
- 40) Peningkatan kompetensi tenaga kerja
- 41) Pengentasan kemiskinan secara terpadu, terarah dan tepat sasaran
- 42) Pemberdayaan keluarga miskin dan menciptakan kesempatan kerja untuk keluarga miskin
- 43) Peningkatan pembangunan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman untuk pemenuhan layanan dasar masyarakat miskin dan rentan miskin
- 44) Peningkatan infrastruktur jaringan air bersih
- 45) Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni secara merata untuk mengurangi pemukiman kumuh
- 46) Perkuatan sistem satu data Indonesia

3. Arah Kebijakan Tahun 2027 difokuskan pada ***Percepatan transformasi sistem perlindungan social dan percepatan infrastruktur dasar untuk menunjang aksestabilitas wilayah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.***

Arah kebijakan tahun 2027 juga diarahkan untuk menyelesaikan target pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) setiap urusan dan tugas-tugas pemerintahan yang mendukung otonomi daerah, dengan harapan pada akhir tahun 2027 target arah kebijakan tersebut dapat tercapai. Oleh karena itu tahun kedua perencanaan dalam RPJMD ini diprioritaskan pada:

- 1) Peningkatan sistem perlindungan sosial
- 2) Penguatan perlindungan dan pemenuhan hak dasar bagi keluarga miskin dan rentan miskin Melakukan pembagian zonasi pembangunan dan tahapan pembangunan
- 3) Peningkatan pembangunan jalan dan jembatan berbasis zonasi untuk mendukung kelancaran transportasi
- 4) Pembangunan infrastruktur dasar
- 5) Melakukan mapping simpul transportasi

- 6) Peningkatan pelayanan publik berbasis IT
- 7) Pembangunan jaringan telekomunikasi seluler dengan menggandeng mitra strategis dan pihak swasta
- 8) Mendoron Pengembangan infrastruktur ibukota kecamatan pemanfaatan IT pada seluruh komponen birokrasi dan bisnis
- 9) Setiap desa terakses telepon seluler
- 10) Peningkatan pembangunan kawasan perkotaan dan ibukota kecamatan berbasis TIK
- 11) Pengembangan infrastruktur ibukota kecamatan
- 12) Peningkatan jumlah desa yang terhubung jalan darat dalam satu kawasan zonasi
- 13) Pembangunan infrastruktur dasar berbasis gugus pulau
- 14) Peningkatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman berbasis zonasi
- 15) Pembangunan infrastruktur jaringan air bersih berbasis kawasan
- 16) Pembangunan infrastruktur penunjang pengembangan hilirisasi agromaritim
- 17) Pembangunan jalan dan jembatan berbasis kawasan zonasi
- 18) Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni secara merata untuk mengurangi pemukiman kumuh
- 19) Percepatan pemenuhan Kota Layak Anak dan Lansia untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih humanis
- 20) Menjaga kualitas sarana dan prasarana publik
- 21) Memastikan seluruh wilayah Kabupaten Halmahera Selatan ramah transportasi
- 22) Pembangunan rumah tidak layak huni
- 23) Pemanfaatan aset pemerintah daerah yang terbengkalai
- 24) Pemetaan wilayah yang harus didukung RDTR dan pembuatan RDTR
- 25) Peningkatan kualitas pengendalian pemanfaatan ruang
- 26) Penyediaan ruang terbuka hijau dan penguatan standar pengelolaan ekonomi hijau serta penurunan gas rumah kaca (GRK)

- 27) Pemetaan dan pembangunan spot taman kota pada Ibukota Kabupaten dan ibukota kecamatan
 - 28) Penyusunan dokumen induk pengembangan infrastruktur dan permukiman berbasis kawasan yang komprehensif dan terintegrasi sebagai acuan dalam pembangunan infrastruktur
 - 29) Pengembangan sistem pengelolaan sampah modern dan pengembangan tempat pembuangan akhir
 - 30) Sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan
 - 31) Pengawasan dan pengendalian dalam penyediaan fasilitas pengolahan limbah dan sampah masyarakat
 - 32) Pembangunan pengelolaan sampah terpadu untuk menunjang pelestarian lingkungan dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*)
 - 33) pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup
 - 34) penyediaan ruang terbuka hijau dan penguatan standar pengelolaan ekonomi hijau serta penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)
4. Arah Kebijakan Tahun 2028 difokuskan pada ***Percepatan transformasi ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi agromaritim dan percepatan infrastruktur kawasan dan ekonomi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing daerah.***

Arah kebijakan tahun 2028 juga diarahkan untuk menyelesaikan target pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) setiap urusan dan tugas-tugas pemerintahan yang mendukung otonomi daerah, dengan harapan pada akhir tahun 2028 target arah kebijakan tersebut dapat tercapai. Oleh karena itu tahun kedua perencanaan dalam RPJMD ini diprioritaskan pada :

- 1) Penerbitan peraturan daerah (PERDA) LP2B
- 2) Pemetaan perwilayahan komoditas berbasis zonasi dan penerbitan buku evaluasi kesesuaian lahan per kecamatan
- 3) Pengembangan sentra-sentra industri berbasis komoditas unggulan dengan model KPDBU
- 4) Peningkatan dukungan infrastruktur untuk sektor agromaritim

- 5) Pengembangan ekonomi biru dan bioekonomi sebagai sumber pertumbuhan baru perekonomian wilayah
- 6) pengembangan lumbung ikan nasional
- 7) Peningkatan perlindungan dan kapasitas usaha mikro melalui kolaborasi program dengan usaha kecil menengah dan swasta besar
- 8) Pengembangan produk lokal melalui IKM dan UMKM berbasis zonasi atau kecamatan
- 9) Peningkatan manajemen UMKM untuk mendorong kemandirian dan daya saing daerah
- 10) Penyederhanaan alur perijinan investasi
- 11) Pendampingan kewirausahaan untuk kemandirian ekonomi lokal, serta pendampingan dalam penciptaan mekanisme pemasaran digital
- 12) Koordinasi ketersediaan pasokan energi untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat
- 13) Pengembangan tumbuhnya ekonomi kreatif
- 14) Peningkatan investasi hilirisasi sumber daya agromaritim dan pariwisata
- 15) Peningkatan kerjasama sinergi pendanaan belanja pembangunan daerah dengan CSR kawasan industri PSN pulau Obi
- 16) Peningkatan nilai tambah industri pertambangan dengan kolaborasi program perencanaan pembangunan daerah dan CSR
- 17) Pemanfaatan potensi pertambangan nikel secara berkelanjutan
- 18) Peningkatan nilai tambah hilirisasi tambang terhadap kesejahteraan masyarakat
- 19) Penguatan kemitraan antar daerah, swasta dan antar negara dengan memanfaatkan peluang ekspor produk hilirisasi agromaritim
- 20) Pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi (listrik, telekomunikasi, bandara, pelabuhan, internet) yang representatif sebagai penopang pengembangan hilirisasi agromaritim
- 21) penguatan sumber daya agromaritim dengan memanfaatkan peluang minat investasi hilirisasi
- 22) Pemberdayaan potensi pariwisata lokal berkelas nasional dan

- internasional dengan menarik minat investor untuk berinvestasi
- 23) Pengembangan destinasi wisata melibatkan pihak swasta
 - 24) Pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni musik, kriya (tenun), serta seni pahat dan ukir kayu melalui penguatan strategi pemasaran serta peningkatan kapasitas pengelola dan masyarakat pelaku usaha
 - 25) Pengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif dengan prinsip pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*)
 - 26) Pengembangan kawasan pariwisata premium (*premium tourism*) yaitu kawasan pariwisata dengan target wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara minat khusus
 - 27) Pengembangan kawasan pariwisata lokal yaitu kawasan pariwisata yang diarahkan untuk dapat meningkatkan jumlah wisatawan dan peningkatan minat wisatawan lokal
 - 28) Pembangunan infrastruktur untuk mendukung ketahanan pangan
 - 29) Penguatan ketahanan pangan daerah dengan memanfaatkan kelancaran transportasi darat, laut dan udara serta kebijakan nasional ketahanan pangan
 - 30) Penyiapan program dan anggaran untuk mendukung kebijakan makan bergizi gratis
 - 31) Peningkatan nilai transaksi ekonomi dan keuangan syariah pada pemerintah daerah
 - 32) Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah
 - 33) Peningkatan pengelolaan zakat infaq dan sadaqah
 - 34) Peningkatan sektor riil ekonomi syariah

5. Arah Kebijakan Tahun 2029 difokuskan pada ***Penguatan transformasi pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan melalui digitalisasi sistem pelayanan serta pemantapan pembangunan infrastruktur kawasan dan ekonomi yang berkelanjutan.***

Arah kebijakan tahun 2029 juga diarahkan untuk menyelesaikan target

pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) setiap urusan dan tugas-tugas pemerintahan yang mendukung otonomi daerah, dengan harapan pada akhir tahun 2029 target arah kebijakan tersebut dapat tercapai. Oleh karena itu tahun kedua perencanaan dalam RPJMD ini diprioritaskan pada :

- 1) Penguatan program Pembinaan Aparatur Berbasis Nilai sebagai sistem manajemen SDM Aparatur khas Halmahera Selatan
 - 2) Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi
 - 3) Penguatan manajemen talenta (*talent pool*) untuk meningkatkan manajemen ASN dan kelembagaannya
 - 4) Pemantapan reformasi birokrasi dengan penguatan merit system berbasis IT didukung pembinaan berbasis nilai bagi ASN daerah
 - 5) Penguatan kualitas dan integritas OPD dengan penerapan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
 - 6) Penyiapan dukungan kemungkinan dibukanya moratorium daerah otonomi baru bagi Kabupaten Halmahera Selatan
 - 7) Pembangunan kantor kantor organisasi pemerintah daerah secara bertahap
 - 8) Peningkatan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, fungsional dan teknis
 - 9) Mendorong sistem layanan kepegawaian berbasis IT
6. *Arah Kebijakan Tahun 2030 difokuskan pada **Pemantapan transformasi ketahanan daerah melalui pembangunan sumber daya manusia yang unggul, pemantapan sistem pelayanan publik dan sistem jaring pengaman social, penguatan hilirisasi agromaritim serta pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.***

Arah kebijakan tahun 2030 juga diarahkan untuk menyelesaikan target pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) setiap urusan dan tugas-tugas pemerintahan yang mendukung otonomi daerah, dengan harapan pada akhir tahun 2030 target arah kebijakan tersebut dapat tercapai. Oleh karena itu tahun

kedua perencanaan dalam RPJMD ini diprioritaskan pada :

- 1) Peningkatan kegiatan adat dan budaya dengan memanfaatkan Keberagaman etnis dan budaya daerah
- 2) Peningkatan kerjasama dengan lembaga adat masyarakat untuk mendukung pemberdayaan budaya dan kearifan adat masyarakat lokal
- 3) Peningkatan Internalisasi nilai-nilai tradisi dan budaya bersendikan agama untuk menangkal pengaruh negatif masuknya nilai budaya asing akibat maraknya industrialisasi
- 4) Pemantapan ketahanan sosial budaya serta ekologi melalui penguatan ketangguhan individu, keluarga dan komunitas untuk membangun keseimbangan dan hubungan timbal balik
- 5) Pelestarian nilai-nilai budaya melalui penguatan kelembagaan kesultanan dan paguyuban
- 6) Peningkatan hubungan koordinasi dengan lembaga keagamaan dan forum antar umat beragama untuk mendukung keamanan dan ketertiban masyarakat
- 7) Pengendalian gangguan terhadap kamtibmas, pengaruh nilai dan budaya asing serta pengaruh dari perjanjian-perjanjian multilateral oleh pemerintah Indonesia
- 8) Penguatan nilai-nilai cinta tanah air dan kebersamaan yang adil dalam masyarakat disertai semangat toleransi dan gotong royong
- 9) Penguatan nilai-nilai kebangsaan, kebhinekaan dan persatuan sebagai pilar pemersatu
- 10) Peningkatan kapasitas dan kualitas sumberdaya manusia untuk mengantisipasi pengaruh nilai dan budaya asing yang negatif, resiliensi bencana, serta gangguan kamtibmas
- 11) Peningkatan pembangunan infrastruktur mitigasi bencana dan dampak kebencanaan dengan mengurangi potensi kerusakan lingkungan
- 12) Penguatan literasi kebencanaan melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan dan pemerintah desa

- 13) Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan mempercepat tumbuhnya desa mandiri tangguh bencana
- 14) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana dalam mendukung peningkatan pemahaman masyarakat terhadap kebencanaan
- 15) Penguatan sistem manajemen kebencanaan dan kedaruratan dalam rangka menguatkan deteksi dini dan membangun resiliensi bencana
- 16) Penguatan Program Pembinaan Masyarakat Berbasis Nilai serta Pembinaan siswa dan Kampus Berbasis Nilai
- 17) Pengembangan manajemen pemerintahan berbasis nilai
- 18) Peningkatan peran dan fungsi OPD untuk mengantisipasi pengaruh negatif nilai dan budaya asing terhadap perilaku masyarakat
- 19) Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi, serta pengembangan perguruan tinggi lokal
- 20) Peningkatan kualifikasi pendidikan tinggi masyarakat melalui pengembangan perguruan tinggi lokal
- 21) Pengembangan SDM dengan memberdayakan keberadaan perguruan tinggi lokal
- 22) Peningkatan sistem perlindungan sosial
- 23) Penguatan perlindungan dan pemenuhan hak dasar bagi keluarga miskin dan rentan miskin Melakukan pembagian zonasi pembangunan dan tahapan pembangunan
- 24) Peningkatan pembangunan jalan dan jembatan berbasis zonasi untuk mendukung kelancaran transportasi
- 25) Pembangunan infrastruktur dasar
- 26) Melakukan mapping simpul transportasi
- 27) Peningkatan pelayanan publik berbasis IT
- 28) Pembangunan jaringan telekomunikasi seluler dengan menggandeng mitra strategis dan pihak swasta
- 29) Mendorong Pengembangan infrastruktur ibu kota kecamatan pemanfaatan IT pada seluruh komponen birokrasi dan bisnis
- 30) Setiap desa terakses telepon seluler

- 31) Peningkatan pembangunan kawasan perkotaan dan ibukota kecamatan berbasis TIK
- 32) Peningkatan dukungan infrastruktur untuk sektor agromaritim
- 33) Pengembangan ekonomi biru dan bioekonomi sebagai sumber pertumbuhan baru perekonomian wilayah
- 34) pengembangan lumbung ikan nasional
- 35) Peningkatan perlindungan dan kapasitas usaha mikro melalui kolaborasi program dengan usaha kecil menengah dan swasta besar
- 36) Pengembangan produk lokal melalui IKM dan UMKM berbasis zonasi atau kecamatan
- 37) Peningkatan manajemen UMKM untuk mendorong kemandirian dan daya saing daerah

3.2.2 Pentahapan Pembangunan dan Arah Kebijakan Kewilayahan

Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Untuk memudahkan pemahaman terhadap kesinambungan pembangunan setiap tahun dalam jangka 5 (lima) tahun, terlebih dahulu disederhanakan dalam agenda atau pentahapan pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Atas dasar pentahapan pembangunan inilah disusun arah kebijakan lebih jelas agar RPJMD mudah dituangkan dalam RKPD. Selanjutnya, tahapan-tahapan dimaksud dijadikan sebagai dasar dan disesuaikan dengan pentahapan RKPD. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Pentahapan tahunan pembangunan merupakan penekanan fokus perhatian berupa kebijakan/rencana/program pembangunan tiap tahunnya yang ditujukan untuk memberikan penekanan terhadap pencapaian visi dan misi dengan tetap memperhatikan keterpaduan pembangunan multisektor.

Penahapan Tema Pembangunan RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2025-2030 adalah :

Tabel 3. 6
Penahapan Pembangunan Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2025-2030

Penahapan Pembangunan					
2025	2026	2027	2028	2029	2030
Penguatan pondasi Transformasi Agromaritim yang Berlandaskan Pemerataan Kualitas Pelayanan Publik Serta Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Melalui Transformasi Struktural dan Pembangunan Infrastruktur Terintegritas”.	Pengembangan sistem manajemen aparatur berbasis meritokrasi dan peningkatan sistem pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan berkelanjutan demi terwujudnya pelayanan masyarakat yang bermutu, inovatif dan merata	Penguatan sistem penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang merata dan berkualitas mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik	Pengembangan hilirisasi agromaritim berbasis komoditas unggulan dan pengembangan infrastruktur kawasan dan ekonomi yang terintegrasi untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan daya saing daerah	Percepatan implementasi digitalisasi sistem pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat serta penguatan pembangunan infrastruktur kawasan dan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Pengokohan tranformasi senyum yang berkelanjutan berbasis sumber daya manusia yang adaptif dan inovatif, transformasi birokrasi yang berkesinambungan, ekosistem hilirisasi agromaritim yang tumbuh dan berkembang serta instruktur kawasan dan ekonomi yang merata dan berkelanjutan

1. Penahapan Pembangunan Tahun I (2026)

Pentahapan pembangunan tahun pertama 2026 adalah “Pengembangan sistem manajemen aparatur berbasis meritokrasi dan peningkatan sistem pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan berkelanjutan demi terwujudnya pelayanan masyarakat yang bermutu, inovatif dan merata”.

Pentahapan pembangunan ini diprioritaskan untuk mendukung pencapaian 2 Misi yaitu Misi Keempat : “Transformasi Senyum Prima Bernilai” dan Misi Pertama “Transformasi Senyum Unggul Berdaya”.

Pada tahap ini, pembangunan difokuskan pada pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) dan upaya memenuhi target pencapaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan.

Pada tahap ini pembangunan difokuskan untuk melakukan revitalisasi aset aset pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Selatan yang terbengkalai dan pada tahap ini diarahkan pada revitalisasi pasar modern Tuwokona Kecamatan Bacan Selatan dan pasar rakyat Desa Amasing Kota Kecamatan Bacan sehingga dapat difungsikan sebagaimana mestinya.

Fokus pembangunan juga diarahkan pada pembangunan gedung perkantoran pemerintah daerah dan meubelair Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD)

Kabupaten Halmahera Selatan.

Selain fokus pembangunan tersebut pada tahap ini fokus pembangunan pengembangan wilayah diarahkan pada revitalisasi pembangunan ibukota kecamatan pada zona II yaitu wilayah Makian dan Kayoa yang terdiri dari 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Pulau Makian, Kecamatan Makian Barat, Kecamatan Kayoa Utara, Kecamatan Kayoa, Kecamatan Kayoa Selatan dan Kecamatan Kayoa Barat. Fokus pembangunan revitalisasi ibukota kecamatan tersebut diarahkan pada 23 (Dua Puluh Tiga) kegiatan prioritas pembangunan (KP) sebagai berikut :

- 1) Peningkatan infrastruktur jalan hotmix/lapen dan jembatan dalam ibukota kecamatan
- 2) Peningkatan infrastruktur darat dan laut dari dan ke ibukota kecamatan
- 3) Peningkatan infrastruktur penunjang yang mendukung pengembangan zonasi/kawasan
- 4) Peningkatan infrastruktur drainase di ibukota kecamatan
- 5) Peningkatan pelayanan moda transportasi laut dan/ darat antar desa
- 6) Pembangunan ruang terbuka hijau dan taman bermain anak
- 7) Pemenuhan akses air bersih dan sanitasi layak di ibukota kecamatan
- 8) Peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman ibukota kecamatan
- 9) Revitalisasi sarana ibadah di Ibukota kecamatan
- 10) Pengelolaan persampahan berkelanjutan dan pengendalian dampak pencemaran lingkungan
- 11) Revitalisasi lapangan sepak bola kecamatan
- 12) Revitalisasi pasar kecamatan yang tersedia
- 13) Peningkatan layanan kelistrikan permukiman dan penerangan jalan umum di ibukota kecamatan
- 14) Peningkatan layanan koneksi internet 4G/5G
- 15) Peningkatan puskesmas standar rawat inap
- 16) Peningkatan produksi dan nilai tambah komoditas unggulan hasil perikanan dan atau pertanian
- 17) Revitalisasi infrastruktur SD sederajat dan SMP sederajat
- 18) Revitalisasi Madrasah Diniyyah Awwaliyah yang terintegrasi dengan Sekolah Dasar
- 19) Aktivasi dan optimalisasi kinerja seluruh perangkat kecamatan dalam menjalankan

- fungsi pelayanan kecamatan sesuai dengan pendelegasian kewenangan
- 20) Revitalisasi BUMDesa / Keperasi merah putih unggulan
 - 21) Optimalisasi pelaksanaan Program Pembinaan Berbasis Nilai (PABN, PSBN, PABN)
 - 22) Revitalisasi Perpustakaan, LPTQ dan Rumah Qur'an Kecamatan
 - 23) Pelayanan Administrasi Kependudukan pada setiap kecamatan

Pada tahap ini juga arah kebijakan pembangunan agromaritim difokuskan pada :

TAHAP I TAHUN 2026 :

Tema : Penguatan Dasar & Mapping Potensi

Fokus : Identifikasi sumber daya, pelaku, dan peluang investasi

Aksi Strategis	Penjelasan
Pemetaan Komoditas Potensial	Fokus pada komoditas utama seperti rumput laut, ikan, kopra, kelapa, dan pala.
Pendataan UMKM & Koperasi	Identifikasi pelaku ekonomi lokal untuk dilibatkan dalam rantai hilirisasi.
Penyusunan Masterplan Hilirisasi	Kerja sama dengan perguruan tinggi untuk menyusun cetak biru pengolahan SDA.
Penguatan SDM Lokal	Pelatihan teknis pengolahan hasil laut dan hasil pertanian sederhana.

2. Penahapan Pembangunan Tahun II (2027)

Pentahapan pembangunan tahun kedua 2027 adalah “Penguatan sistem penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang merata dan berkualitas mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik”.

Pentahapan pembangunan ini diprioritaskan untuk mendukung pencapaian Misi pertama “Transformasi Senyum Unggul Berdaya dan Misi kedua yaitu “Transformasi Senyum Maju Berkelanjutan”.

Pada tahap ini, pembangunan difokuskan pada pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) dan upaya memenuhi target pencapaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan.

Pada tahap ini juga fokus pembangunan diarahkan untuk melakukan revitalisasi aset aset pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Selatan yang terbengkalai dan pada

tahap ini difokuskan pada revitalisasi Taman Budaya Saruma Kecamatan Bacan dan operasionalisasi kapal milik pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Selatan MV. Halsel Ekspres sehingga dapat difungsikan sebagaimana mestinya.

Fokus pembangunan pada tahap ini juga diarahkan pada pembangunan gedung perkantoran pemerintah daerah dan meubelair Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, Dinas Kesehatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Halmahera Selatan.

Selain fokus pembangunan tersebut pada tahap ini fokus pembangunan pengembangan wilayah diarahkan pada revitalisasi pembangunan ibukota kecamatan pada zona III yaitu wilayah Gane dan Pulau Joronga yang terdiri dari 7 Kecamatan yaitu Kecamatan Gane Timur, Kecamatan Gane Barat Utara, Kecamatan Gane Barat, Kecamatan Gane Timur Tengah, Kecamatan Gane Timur Selatan, Kecamatan Gane Barat Selatan dan Kecamatan Kepulauan Joronga. Fokus pembangunan revitalisasi ibukota kecamatan tersebut diarahkan pada 23 (Dua Puluh Tiga) kegiatan prioritas pembangunan sebagai berikut :

- 1) Peningkatan infrastruktur jalan hotmix/lapen dan jembatan dalam ibukota kecamatan
- 2) Peningkatan infrastruktur darat dan laut dari dan ke ibukota kecamatan
- 3) Peningkatan infrastruktur penunjang yang mendukung pengembangan zonasi/kawasan
- 4) Peningkatan infrastruktur drainase di ibukota kecamatan
- 5) Peningkatan pelayanan moda transportasi laut dan/ darat antar desa
- 6) Pembangunan ruang terbuka hijau dan taman bermain anak
- 7) Pemenuhan akses air bersih dan sanitasi layak di ibukota kecamatan
- 8) Peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman ibukota kecamatan
- 9) Revitalisasi sarana ibadah di Ibukota kecamatan
- 10) Pengelolaan persampahan berkelanjutan dan pengendalian dampak pencemaran lingkungan
- 11) Revitalisasi lapangan sepak bola kecamatan
- 12) Revitalisasi pasar kecamatan yang tersedia
- 13) Peningkatan layanan kelistrikan permukiman dan penerangan jalan umum di ibukota kecamatan
- 14) Peningkatan layanan koneksi internet 4G/5G
- 15) Peningkatan puskesmas standar rawat inap

- 16) Peningkatan produksi dan nilai tambah komoditas unggulan hasil perikanan dan atau pertanian
 - 17) Revitalisasi infrastruktur SD sederajat dan SMP sederajat
 - 18) Revitalisasi Madrasah Diniyyah Awwaliyah yang terintegrasi dengan Sekolah Dasar
 - 19) Aktivasi dan optimalisasi kinerja seluruh perangkat kecamatan dalam menjalankan fungsi pelayanan kecamatan sesuai dengan pendelegasian kewenangan
 - 20) Revitalisasi BUMDesa / Keperasi merah putih unggulan
 - 21) Optimalisasi pelaksanaan Program Pembinaan Berbasis Nilai (PABN, PSBN, PABN)
 - 22) Revitalisasi Perpustakaan, LPTQ dan Rumah Qur'an Kecamatan
 - 23) Pelayanan Administrasi Kependudukan pada setiap kecamatan
- Pada tahap ini juga arah kebijakan pembangunan agromaritim difokuskan pada :

TAHAP II TAHUN 2027

Tema : Pengembangan Sentra Industri Kecil Menengah

Fokus : Pembangunan infrastruktur hilirisasi dan teknologi pengolahan

Aksi Strategis	Penjelasan
Mendirikan Sentra Olahan Komoditas	Misalnya: sentra pengolahan kopra, rumput laut, dan perikanan (di Gane, Obi, Bacan, dll.)
Distribusi Teknologi Tepat Guna	Mesin pengering rumput laut, pengepres minyak kelapa, pengemasan ikan, dsb.
Inkubator UMKM Agromaritim	Fasilitasi UMKM masuk ke tahap produksi dan distribusi modern.
Konektivitas Transportasi	Perbaikan pelabuhan dan jalan untuk memperlancar distribusi bahan baku & produk.

3. Penahapan Pembangunan Tahun III (2028)

Pentahapan pembangunan tahun ketiga 2028 adalah “Pengembangan hilirisasi agromaritim berbasis komoditas unggulan dan pengembangan infrastruktur kawasan dan ekonomi yang terintegrasi untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan daya saing daerah”.

Pentahapan pembangunan ini diprioritaskan untuk mendukung pencapaian Misi ketiga yaitu “Transformasi Senyum Produktif Sejahtera” dan Misi kedua yaitu “Transformasi Senyum Maju Berkelanjutan”

Pada tahap ini, pembangunan difokuskan pada pencapaian indikator kinerja kunci

(IKK) dan upaya memenuhi target pencapaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan.

Pada tahap ini fokus pembangunan diarahkan untuk membangun gedung perkantoran pemerintah daerah dan meubelair Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Halmahera Selatan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan.

Selain fokus pembangunan tersebut pada tahap ini fokus pembangunan pengembangan wilayah diarahkan pada revitalisasi pembangunan ibukota kecamatan pada zona IV yaitu wilayah Obi yang terdiri dari 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Obi Timur, Kecamatan Obi Selatan, Kecamatan Obi, Kecamatan Obi Utara dan Kecamatan Obi Barat. Fokus pembangunan revitalisasi ibukota kecamatan tersebut diarahkan pada 23 (Dua Puluh Tiga) kegiatan prioritas pembangunan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan infrastruktur jalan hotmix/lapen dan jembatan dalam ibukota kecamatan
- 2) Peningkatan infrastruktur darat dan laut dari dan ke ibukota kecamatan
- 3) Peningkatan infrastruktur penunjang yang mendukung pengembangan zonasi/kawasan
- 4) Peningkatan infrastruktur drainase di ibukota kecamatan
- 5) Peningkatan pelayanan moda transportasi laut dan/ darat antar desa
- 6) Pembangunan ruang terbuka hijau dan taman bermain anak
- 7) Pemenuhan akses air bersih dan sanitasi layak di ibukota kecamatan
- 8) Peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman ibukota kecamatan
- 9) Revitalisasi sarana ibadah di Ibukota kecamatan
- 10) Pengelolaan persampahan berkelanjutan dan pengendalian dampak pencemaran lingkungan
- 11) Revitalisasi lapangan sepak bola kecamatan
- 12) Revitalisasi pasar kecamatan yang tersedia
- 13) Peningkatan layanan kelistrikan permukiman dan penerangan jalan umum di ibukota kecamatan
- 14) Peningkatan layanan koneksi internet 4G/5G
- 15) Peningkatan puskesmas standar rawat inap
- 16) Peningkatan produksi dan nilai tambah komoditas unggulan hasil perikanan dan atau pertanian

- 17) Revitalisasi infrastruktur SD sederajat dan SMP sederajat
 - 18) Revitalisasi Madrasah Diniyyah Awwaliyah yang terintegrasi dengan Sekolah Dasar
 - 19) Aktivasi dan optimalisasi kinerja seluruh perangkat kecamatan dalam menjalankan fungsi pelayanan kecamatan sesuai dengan pendelegasian kewenangan
 - 20) Revitalisasi BUMDesa / Keperasi merah putih unggulan
 - 21) Optimalisasi pelaksanaan Program Pembinaan Berbasis Nilai (PABN, PSBN, PABN)
 - 22) Revitalisasi Perpustakaan, LPTQ dan Rumah Qur'an Kecamatan
 - 23) Pelayanan Administrasi Kependudukan pada setiap kecamatan
- Pada tahap ini juga arah kebijakan pembangunan agromaritim difokuskan pada :

TAHAP III TAHUN 2028

Tema : Standardisasi dan Sertifikasi Produk

Fokus : Meningkatkan kualitas dan daya saing pasar

Aksi Strategis	Penjelasan
Sertifikasi Halal & BPOM	Agar produk bisa masuk pasar nasional dan ekspor.
Branding Produk Lokal	Contoh: "Sarden Hal-Sel", "Virgin Coconut Oil Gane", "Pala Premium Bacan".
Pelatihan e-Commerce & Digital Marketing	UMKM dibekali kemampuan menjual online dan ekspor.
Kampanye “Bangga Produk Hal-Sel”	Gerakan lokal untuk mendukung konsumsi produk dalam daerah.

4. Penahapan Pembangunan Tahun IV (2029)

Pentahapan pembangunan tahun keempat 2029 adalah “Percepatan implementasi digitalisasi sistem pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat serta penguatan pembangunan infrastruktur kawasan dan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat”.

Pentahapan pembangunan ini diprioritaskan untuk mendukung pencapaian Misi keempat yaitu “Transformasi Senyum Prima Bernilai” dan Misi Kedua yaitu “Transformasi Senyum Maju Berkelanjutan”

Pada tahap ini, pembangunan difokuskan pada pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) dan upaya memenuhi target pencapaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan.

Fokus pembangunan juga diarahkan pada pembangunan gedung perkantoran

pemerintah daerah dan meubelair Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Dinas Perhubungan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selain fokus pembangunan tersebut pada tahap ini fokus pembangunan pengembangan wilayah diarahkan pada revitalisasi pembangunan ibukota kecamatan pada zona V yaitu wilayah Bacan Timur dan Mandioli yang terdiri dari 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Bacan Timur, Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kecamatan Bacan Selatan, Kecamatan Mandioli Selatan dan Kecamatan Mandioli Utara.

Fokus pembangunan revitalisasi ibukota kecamatan tersebut diarahkan pada 23 (Dua Puluh Tiga) kegiatan prioritas pembangunan sebagai berikut :

- 1) Peningkatan infrastruktur jalan hotmix/lapen dan jembatan dalam ibukota kecamatan
- 2) Peningkatan infrastruktur darat dan laut dari dan ke ibukota kecamatan
- 3) Peningkatan infrastruktur penunjang yang mendukung pengembangan zonasi/kawasan
- 4) Peningkatan infrastruktur drainase di ibukota kecamatan
- 5) Peningkatan pelayanan moda transportasi laut dan/ darat antar desa
- 6) Pembangunan ruang terbuka hijau dan taman bermain anak
- 7) Pemenuhan akses air bersih dan sanitasi layak di ibukota kecamatan
- 8) Peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman ibukota kecamatan
- 9) Revitalisasi sarana ibadah di Ibukota kecamatan
- 10) Pengelolaan persampahan berkelanjutan dan pengendalian dampak pencemaran lingkungan
- 11) Revitalisasi lapangan sepak bola kecamatan
- 12) Revitalisasi pasar kecamatan yang tersedia
- 13) Peningkatan layanan kelistrikan permukiman dan penerangan jalan umum di ibukota kecamatan
- 14) Peningkatan layanan koneksi internet 4G/5G
- 15) Peningkatan puskesmas standar rawat inap
- 16) Peningkatan produksi dan nilai tambah komoditas unggulan hasil perikanan dan atau pertanian
- 17) Revitalisasi infrastruktur SD sederajat dan SMP sederajat
- 18) Revitalisasi Madrasah Diniyyah Awwaliyah yang terintegrasi dengan Sekolah Dasar

- 19) Aktivasi dan optimalisasi kinerja seluruh perangkat kecamatan dalam menjalankan fungsi pelayanan kecamatan sesuai dengan pendelegasian kewenangan
- 20) Revitalisasi BUMDesa / Keperasi merah putih unggulan
- 21) Optimalisasi pelaksanaan Program Pembinaan Berbasis Nilai (PABN, PSBN, PABN)
- 22) Revitalisasi Perpustakaan, LPTQ dan Rumah Qur'an Kecamatan
- 23) Pelayanan Administrasi Kependudukan pada setiap kecamatan

Pada tahap ini juga arah kebijakan pembangunan agromaritim difokuskan pada :

TAHAP IV TAHUN 2029

Tema : Ekspansi pasar dan investasi industri

Fokus : Menarik investasi dan memperluas pasar domestik & ekspor

Aksi Strategis	Penjelasan
Kemitraan B2B & Pemerintah	Gandeng perusahaan besar untuk joint venture (contoh: eksportir rumput laut, investor VCO).
Promosi Produk di Expo Nasional/Internasional	Ikut serta dalam expo pangan, perikanan, dan industri kreatif.
Zona Industri Agromaritim	Siapkan kawasan industri kecil menengah berbasis komoditas lokal.

5. Penahapan Pembangunan Tahun V (2030)

Pentahapan pembangunan tahun kelima 2030 adalah “Pengokohan transformasi senyum yang berkelanjutan berbasis sumber daya manusia yang adaptif dan inovatif, transformasi birokrasi yang berkesinambungan, ekosistem hilirisasi agromaritim yang tumbuh dan berkembang serta instruktur kawasan dan ekonomi yang merata dan berkelanjutan”.

Tema pembangunan ini diprioritaskan untuk mendukung pencapaian Misi Pertama yaitu “Transformasi Unggul Berdaya, Misi kelima yaitu “Transformasi Senyum Saruma Tangguh”, Misi Keempat yaitu “Transformasi Senyum Prima Bernilai, Misi ketiga “Transformasi Senyum Produktif Sejahtera dan Misi Kedua yaitu “Transformasi Senyum Maju

Pada tahap ini, pembangunan difokuskan pada pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) dan upaya memenuhi target pencapaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan.

Fokus pembangunan juga diarahkan pada pembangunan gedung perkantoran pemerintah daerah dan meubelair Dinas Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dan Dinas Perikanan

Selain fokus pembangunan tersebut pada tahap ini fokus pembangunan pengembangan wilayah diarahkan pada revitalisasi pembangunan ibukota kecamatan pada zona I yaitu wilayah Bacan, Kasiruta dan Botanglomang yang terdiri dari 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Bacan Barat, Kecamatan Bacan Barat Utara, Kecamatan Bacan, Kecamatan Kasiruta Timur, Kecamatan Kasiruta Barat dan Kecamatan Botanglomang Fokus pembangunan revitalisasi ibukota kecamatan tersebut diarahkan pada 23 (Dua Puluh Tiga) kegiatan prioritas pembangunan sebagai berikut :

- 1) Peningkatan infrastruktur jalan hotmix/lapen dan jembatan dalam ibukota kecamatan
- 2) Peningkatan infrastruktur darat dan laut dari dan ke ibukota kecamatan
- 3) Peningkatan infrastruktur penunjang yang mendukung pengembangan zonasi/kawasan
- 4) Peningkatan infrastruktur drainase di ibukota kecamatan
- 5) Peningkatan pelayanan moda transportasi laut dan/ darat antar desa
- 6) Pembangunan ruang terbuka hijau dan taman bermain anak
- 7) Pemenuhan akses air bersih dan sanitasi layak di ibukota kecamatan
- 8) Peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman ibukota kecamatan
- 9) Revitalisasi sarana ibadah di Ibukota kecamatan
- 10) Pengelolaan persampahan berkelanjutan dan pengendalian dampak pencemaran lingkungan
- 11) Revitalisasi lapangan sepak bola kecamatan
- 12) Revitalisasi pasar kecamatan yang tersedia
- 13) Peningkatan layanan kelistrikan permukiman dan penerangan jalan umum di ibukota kecamatan
- 14) Peningkatan layanan koneksi internet 4G/5G
- 15) Peningkatan puskesmas standar rawat inap
- 16) Peningkatan produksi dan nilai tambah komoditas unggulan hasil perikanan dan atau pertanian
- 17) Revitalisasi infrastruktur SD sederajat dan SMP sederajat
- 18) Revitalisasi Madrasah Diniyyah Awwaliyah yang terintegrasi dengan Sekolah Dasar

- 19) Aktivasi dan optimalisasi kinerja seluruh perangkat kecamatan dalam menjalankan fungsi pelayanan kecamatan sesuai dengan pendelegasian kewenangan
- 20) Revitalisasi BUMDesa / Keperasi merah putih unggulan
- 21) Optimalisasi pelaksanaan Program Pembinaan Berbasis Nilai (PABN, PSBN, PABN)
- 22) Revitalisasi Perpustakaan, LPTQ dan Rumah Qur'an Kecamatan
- 23) Pelayanan Administrasi Kependudukan pada setiap kecamatan

Pada tahap ini juga arah kebijakan pembangunan agromaritim difokuskan pada :

TAHAP V TAHUN 2030

Tema : Konsolidasi dan Keberlanjutan

Fokus : Menjamin system hilirisasi berjalan mandiri dan berkelanjutan

Aksi Strategis	Penjelasan
Integrasi Ekosistem Digital Agromaritim	Platform digital untuk pencatatan produksi, distribusi, dan transaksi.
Sistem Insentif Pajak & Subsidi	Untuk pelaku hilirisasi yang berkelanjutan dan menyerap tenaga kerja lokal.
Monitoring Dampak Sosial & Lingkungan	Evaluasi berkala dampak hilirisasi terhadap masyarakat & ekosistem.
Pengembangan Riset & Inovasi Daerah	Lembaga riset lokal didorong untuk membuat inovasi olahan berbasis kearifan lokal.

3.2.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan

Salah satu fokus pembangunan Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2025-2029 diarahkan pada pembangunan berbasis zonasi dan pengembangan agromaritim dengan memperhatikan potensi unggulan setiap kawasan. Fokus pembangunan tersebut harus memperhatikan kebutuhan kawasan yang secara fungsional dapat berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut. Secara umum kebijakan pembangunan kewilayahan wajib memperhatikan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai berikut :

1. Pengembangan wilayah berdasarkan struktur ruang meliputi :

- a) Pusat kegiatan wilayah (PKW) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Provinsi atau beberapa Kabupaten/Kota yaitu kawasan perkotaan Labuha di Pulau Bacan
- b) Pusat kegiatan lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan yaitu kawasan

perkotaan Guruapin, Maffa, Saketa dan Babang

- c) Pusat pelayanan kawasan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa yaitu kawasan perkotaan Laiwui, Loleo Jaya, Gane Dalam dan Waikyon
- d) Pusat pelayanan lingkungan (PPL) adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa yang tersebar pada 21 Kecamatan yaitu Indari, Yaba, Mandawong, Wayaua, Bibinoi, Kukupang, Dolik, Gane Luar, Bisui, Palamea, Bajo, Busua, Laluin, Laromabati, Mateketen, Jiko, Indong, Jikohay, Wayaloar, Sum dan Madopolo.

2. Pengembangan kawasan strategis meliputi :

- a) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi
- b) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya
- c) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan SDA dan teknologi tinggi dan
- d) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan daya dukung lingkungan

Arah kebijakan Bupati Halmahera Selatan Hasan Ali Bassam Kasuba dan Wakil Bupati Helmi Umar Muksin dalam pengembangan wilayah adalah Pembangunan berbasis Zonasi . Pembangunan berbasis zonasi dilakukan untuk memberi arah dan fokus yang jelas serta ketuntasan dalam pemenuhan kebutuhan prioritas wilayah terhadap pemerataan pembangunan daerah tanpa meninggalkan pembangunan pada wilayah yang lain.

1. Pengembangan wilayah zona I (Bacan, Kasiruta dan Botanglomang)

Pembangunan pada wilayah pengembangan zona I (Bacan, Kasiruta dan Botanglomang) difokuskan untuk pembangunan pada 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Bacan Barat, Kecamatan Bacan Barat Utara, Kecamatan Bacan, Kecamatan Kasiruta Timur, Kecamatan Kasiruta Barat dan Kecamatan Botanglomang.

2. Pengembangan wilayah zona II (Makian Kayoa)

Pembangunan pada wilayah pengembangan zona II (Makian Kayoa) difokuskan untuk pembangunan pada 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Pulau Makian, Kecamatan Makian Barat, Kecamatan Kayoa Utara, Kecamatan Kayoa, Kecamatan Kayoa

Selatan dan Kecamatan Kayoa Barat dengan 23 (dua puluh tiga) kegiatan prioritas yang diberlakukan sama untuk seluruh zona/kawasan.

3. Pengembangan wilayah zona III (Gane dan Pulau Joronga)

Pembangunan pada wilayah pengembangan zona III (Gane dan Pulau Joronga) difokuskan untuk pembangunan pada 7 Kecamatan yaitu Kecamatan Gane Timur, Kecamatan Gane Barat Utara, Kecamatan Gane Barat, Kecamatan Gane Timur Tengah, Kecamatan Gane Timur Selatan, Kecamatan Gane Barat Selatan dan Kecamatan Kepulauan Joronga dengan 23 (dua puluh tiga) kegiatan prioritas yang diberlakukan sama untuk seluruh zona/kawasan

4. Pengembangan wilayah zona IV (Obi)

Pembangunan pada wilayah pengembangan zona IV (Obi) difokuskan untuk pembangunan pada 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Obi Timur, Kecamatan Obi Selatan, Kecamatan Obi, Kecamatan Obi Utara dan Kecamatan Obi Barat dengan 23 (dua puluh tiga) kegiatan prioritas yang diberlakukan sama untuk seluruh zona/kawasan

5. Pengembangan wilayah zona V (Bacan Timur dan Mandioli)

Pembangunan pada wilayah pengembangan zona V (Bacan Timur dan Mandioli) difokuskan untuk pembangunan pada 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Bacan Timur, Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kecamatan Bacan Selatan, Kecamatan Mandioli Selatan dan Kecamatan Mandioli Utara dengan 23 (dua puluh tiga) kegiatan prioritas yang diberlakukan sama untuk seluruh zona/kawasan.

6. Pengembangan Pulau Obi untuk mendukung Kawasan PSN (Proyek Strategis Nasional) dalam pembangunan Industri Pengolahan Nikel dan Logam Dasar.

Pengembangan Kawasan Pulau Obi dilakukan untuk mendukung pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sesuai Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Stategis Nasional terkait dengan aspek keamanan investasi, penyiapan kapasitas SDM daerah, proteksi terhadap daya dukung dan korservasi lingkungan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta penyediaan infrastuktur dasar dan penunjang masyarakat.

Pengembangan Proyek Strategis Nasional Pengolahan Nikel dan Logam Dasar di Pulau Obi diarahkan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta menjaga iklim investasi industri yang sudah ada.

Arah Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Pengembangan Pulau Obi dilakukan secara seimbang dan komprehensif dalam rangka peningkatan infrastruktur dasar di pulau Obi, peningkatan kualitas hidup masyarakat Obi dan peningkatan aktifitas perekonomian masyarakat Obi meliputi:

- 1) Penguatan Koordinasi dan Sinergisitas dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pihak Perusahaan dalam rangka Pembangunan Ruas Jalan Lingkar dan Jembatan Pulau Obi, Pembangunan Pelabuhan, Pembangunan Bandara dan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang terintegrasi dengan perencanaan pembanguna daerah.
- 2) Pemberian Subsidi Transportasi untuk membuka akses ke daerah terpencil
- 3) Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi dan Internet.
- 4) Pengembangan dan Revitalisasi Pukesmas, Pustu, Polindesa serta Rumah Sakit Obi sebagai Rumah Sakit Rujukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
- 5) Peningkatan produksi pertanian dan perikanan desa lingkar tambang untuk menopang kebutuhan industri melalui penguatan kapasitas petani/nelayan dan peningkatan sarana pertanian dan perikanan masyarakat.
- 6) Peningkatan Kapasitas Petani dan Nelayan melalui penyuluhan dan bantuan bibit, pupuk, sarana produksi dan alat tangkap serta program pemberdayaan
- 7) Pengembangan PDAM Laiwui dalam rangka peningkatan kapasitas air bersih di Pulau Obi
- 8) Peningkatan Kapasitas PLN Laiwui dalam rangka penyediaan listrik yang merata bagi seluruh masyarakat Obi
- 9) Penguatan Program Konservasi Lingkungan terutama pada Daerah Aliran Sungai dan Daerah Rawan Bencana
- 10) Peningkatan Kualitas Pendidikan melalui program rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan, penyediaan dan peningkatan kapasitas tenaga pendidik yang merata dan berkualitas dan program beasiswa kemitraan
- 11) Penguatan Lembaga BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih sebagai

sentra pengelolaan potensi dan komoditi lokal unggulan

- 12) Penguatan kerjasama dengan perbankan dalam pembiayaan, penyaluran KUR dan modal bergulir bagi pelaku UMKM di Obi untuk menggerakkan sektor usaha riil yang menopang kebutuhan industri
 - 13) Pembangunan Pasar dan Sentra Ekonomi masyarakat
 - 14) Pembangunan Rumah Layak Huni bagi masyarakat tidak mampu
7. Pengembangan Kawasan Transmigrasi Gane Timur seluas lk. 5.517,19 hektar dan Kawasan Transmigrasi Kusubibi sebagai lumbung pangan Halmahera Selatan.

Wilayah Gane Timur khususnya Kawasan Transmigrasi di SP 1, SP2, SP3, SP4, SP5 dan SP6 memiliki peranan penting sebagai Lumbung Pangan Daerah karena memiliki potensi sebagai sentra produksi padi (bahan pangan utama) sehingga diharapkan bisa berperan dalam pemenuhan kebutuhan beras dalam daerah secara mandiri (swasembada) sekaligus sebagai *buffer stock* dalam mengantisipasi kerawanan dan krisis pangan serta gejolak harga atau keadaan darurat. Demikian juga dengan kawasan transmigrasi Kusubibi yang baru akan dikembangkan menjadi salah satu kawasan transmigrasi pendukung ketersediaan pangan daerah. Kawasan transmigrasi Kusubibi adalah kawasan transmigrasi baru yang akan dikembangkan sebagai salah satu kawasan yang dapat mendorong tumbuhnya kawasan ekonomi baru. Sebagai salah satu kawasan transmigrasi yang dekat dengan ibukota Kabupaten Halmahera Selatan, maka kawasan transmigrasi Kusubibi diharapkan dapat menjadi salah satu sentra komoditas unggulan dengan rantai pasok distribusi hasil komoditas pertanian yang lebih cepat efektif dan efisien. Oleh karena itu arah kebijakan Pemerintah Daerah dalam mendukung Lumbung Pangan Halmahera Selatan baik pada kawasan transmigrasi Gane Timur maupun Kusubibi antara lain:

- 1) Peningkatan dan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan
- 2) Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi
- 3) Peningkatan kapasitas Petani dan Penyuluh Pertanian dalam melaksanakan pendampingan pada petani.
- 4) Penyediaan Saprodi berupa: Bibit, Pupuk dan Obat-Obatan
- 5) Penyediaan Saprotan/Alsintan berupa: *Hand Tractor, Jhonn Deer*, RMU (

RiceMilling Unit) dan bangunannya, Pengereng Padi (*Driyer*)

- 6) Pembangunan dan Revitalisasi Lumbung Pangan Masyarakat di SP2 Desa Sumber Makmur.
 - 7) Penguatan kelembagaan BUMDes/Koperasi Desa Merah Putih dalam rangka optimalisasi distribusi dan pemasaran hasil pertanian
 - 8) Pembangunan kawasan transmigrasi Kusubibi
 - 9) Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan pada kawasan transmigrasi Kusubibi
 - 10) Pembangunan jaringan irigasi
 - 11) Peningkatan kapasitas transmigran untuk pengembangan produksi komoditas unggulan
 - 12) Menjamin pemasaran hasil produksi komoditas yang dihasilkan warga transmigrasi
8. Pengembangan kawasan Kasiruta sebagai pusat kawasan Agromaritim terpadu (*Integrated Agromaritim Zone*)
- Kawasan pulau Kasiruta adalah kawasan bekas hak guna usaha (HGU) yang sudah selesai masa berlakunya. Hamparan seluas 3.890,2 hektar membentang dari Desa Palamea, Desa Doko, Desa Bisori, Desa Imbu-Imbu, Desa Marikapal dan Desa Kukupang yang terletak di Kecamatan Kasiruta Barat. Pasca HGU berakhir, kawasan ini menjadi tanah negara di bawah pengendalian lembaga bank tanah Kementerian ATR/BPN. Dengan perubahan status tersebut pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan bekerjasama dengan lembaga Bank Tanah Kementerian ATR/BPN akan mengembangkan kawasan tersebut menjadi pusat kawasan agromaritim terpadu (*Integrated Agromaritim Zone*). Sebagai pusat kawasan agromaritim terpadu maka kawasan tersebut akan dikembangkan menjadi sentra pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata bahari dan industri pengolahan komoditas unggulan.
- Untuk mendukung kawasan Kasiruta sebagai pusat kawasan agromaritim terpadu maka arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan adalah sebagai berikut :

- a. Penetapan lembaga pengelola kawasan agromaritim terpadu
- b. Pemetaan zona pengembangan agromaritim dalam kawasan tersebut
- c. Melakukan promosi investasi untuk pengembangan hilirisasi komoditas unggulan
- d. Memastikan program pengembangan agromaritim dalam kawasan berjalan dua arah yaitu untuk peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi dan ketahanan pangan dengan pemberdayaan BUMdesa, Koperasi, UMKM dan lembaga ekonomi lainnya

Tabel 3.7

PROGRAM PRIORITAS MENDUKUNG VISI MISI RPJMD

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
20252029 - Mewujudkan Senyum Halmahera Selatan Yang Adil, Maju dan Berkelanjutan Berbasis Agro Maritim Dalam Bingkai Saruma Penuh Berkah - Transformasi Senyum Unggul Berdaya: Mewujudkan Transformasi Sosial untuk Melahirkan Sumberdaya Manusia Halmahera Selatan yang Sehat, Cerdas, Berkerakter, Berdaya Saing dan Sejahtera - Transformasi Senyum Maju Menyediakan Infrastruktur yang Merata, Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan Berbasis Kawasan Sebagai Daya Dukung Pengembangan Wilayah Bagi Pembangunan yang Berkelanjutan dan Berkesinambungan - Transformasi Senyum Produktif Mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah yang Produktif, Inovatif, Berdaya Saing dan Berkelanjutan Melalui Hilirisasi Agromaritim, Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Pariwisata Unggulan - Transformasi Senyum Prima Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang	1. Meningkatkan Daya Saing Sumberdaya Manusia yang Sehat, Cerdas, Unggul dan Berdaya			Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
Profesional. Berintegritas, Adabtif, dan Melayani - Transformasi Senyum Saruma Mewujudkan Stabiilitas dan Ketahanan Daerah yang Tangguh dan Responsif Terhadap Perkembangan Zaman						
				Tingkat Kemiskinan((%))		
				Rasio Gini(Indeks)		
		Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidikan Serta Derajat Kesehatan Masyarakat		Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))		
				Indeks Pendidikan (Indeks)		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (Persentase)	1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	
			Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	
			Meningkatnya Layananan Perpustakaan Sesuai standar nasional perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (%)	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	
			Meningkatnya Mutu dan Distribusi Pendidik dan Distribusi Institusi Pendidikan	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
			Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Iklim Kebinekaan SMP (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Iklim Keamanan SMP (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS) (Persentase)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Iklim Inklusivitas SMP (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Iklm Kebinekaan SD (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Iklm Keamanan SD (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) (Persentase)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Iklm Inklusivitas SD (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan (APS) (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Rata - Rata Kemampuan Literasi SD Berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) (Persentase)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) (Persentase)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			Meningkatnya Kualitas Kepramukaan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kepramukaan (%)	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	
			Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Persentase keterlibatan masyarakat dalam olahraga (%)	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
				Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (Persentase)	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
			Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	
			Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Persentase keterlibatan masyarakat dalam olahraga (%)	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
				Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (Persentase)	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
			Meningkatnya efektivitas program sediaan farmasi dan pangan olahan di Pemerintah Daerah	Penertiban Dan Pemenuhan Komitmen SPPIRT Sesuai Standar (Persentase)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Presentase Pangan Industri Rumah Tangga Aman Dan Bermutu (Persentase)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
				Presentase Sarana IRTP Yang Memenuhi Ketentuan (Persentase)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
				Presentase Apotek Dan Toko Obat Yang Mampu Memelihara Persyaratan Perizinan (Persentase)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
				Presentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Dan Lintas Sektor Yang Ditindaklanjuti Oleh Pemerintah Daerah (Persentase)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
			Meningkatnya kualitas Pelayanan urusan Kesehatan-Rumah Sakit	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah (Persentase)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Bulan)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Persentase Ketepatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran (%)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM kesehatan	Presentase Puskesmas dengan SDMK Sesuai Standar (Persentase)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
				Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (Persentase)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					DAYA MANUSIA KESEHATAN	
				Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
				Rasio tenaga Kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (Persentase)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
			Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM Rumah Sakit	Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (Persentase)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
				Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
			Meningkatnya Masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (Persentase)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup. (Orang)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Jumlah infeksi baru HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksi. (Orang)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Angka Kejadian Malaria per 1000 orang (Angka)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase lanjut usia yang mandiri (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (Persentase)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe. (Persentase)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Penemuan Kasus TBC (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
		Meningkatnya Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif		Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga*) ((%))		
			Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
			Terjaminnya Pemenuhan Hak Semua Anak Secara Komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	
				Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) (Nilai)	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	
			Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun (Rata-rata Anak per Wanita)	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
				Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun) (Angka)	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	

			Meningkatkan Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja (Indeks)	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
				Indeks Lansia Berdaya (Indeks)	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
			Meningkatkan Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (%)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
				Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) (Persentase)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
				Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri (Persentase)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
			Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Pelantaran, Perkawinan dan Perlakuan Salah Lainnya Terhadap Anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
				Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
			Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah (Nilai)	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
		Meningkatnya Kesempatan dan Kompetensi Tenaga Kerja		Tingkat Pengangguran Terbuka(%)		
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri (Orang)	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal ((%))	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
				Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (%)	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
		Meningkatnya Sistem Jaminan Perlindungan Sosial	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani (%)		
				Persentase Daerah Yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin (%)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi (Persentase)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
	2. Meningkatkan Infrastruktur Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan			Indeks Ketimpangan Wilayah(Angka)		
				Persentase Penurunan Emisi GRK(Persentase)		
				Indeks Daya Saing Daerah(Angka)		
		Meningkatnya Konektivitas Daerah dan Pembangunan Desa Serta Daerah Transmigrasi		Rasio Konektivitas Wilayah (%)		
				Indeks Infrastruktur(Angka)		
				Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang (Persentase)		
				Persentase Desa Mandiri (%)		
			Meningkatnya efektifitas kerja sama Desa	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa (Persentase)	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Persentase Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap akses kualitas informasi publik pemerintah daerah (Survei) (%)	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
			Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	
			Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (Persentase)	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintah Desa	Persentase BUM Desa Maju (Persentase)	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
				Jumlah Desa yang tertib dalam pengelolaan Aset Desa pada Aplikasi Sipades (Desa)	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
				Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
				Jumlah Desa yang menerapkan sistem informasi desa berbasis Prodeskel/Epdeskel dalam perencanaan dan Pelaporan (Desa)	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
				Jumlah Desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa berbasis digital (Desa)	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks SPBE (%)	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ruang	Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) (Dokumen)	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	
				Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang (Kasus)	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni) (%)	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
			Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	
			Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigrasi dalam pengembangan kawasan transmigrasi	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan (Persentase)	3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (Persentase)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
				Kapasitas Air Baku ((%))	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
				Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (Persentase)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
				Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob (Persentase)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
			Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan menengah	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU (Persentase)	1.04.06 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
			Presentase Fasilitasi Penataan Desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (Persentase)	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	
			Tercapainya kolaborasi integrasi dan starisasi dalam penyelenggaraan sistem statistik nasional	Persentase Publikasi Data Statistik Sektorial Daerah (DSSD) dalam Modul E- Walidata SIPD (Persentase)	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
				Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota (%)	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
				Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota (%)	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
		Meningkatnya Infrastruktur Dasar, Perumahan dan Permukiman		Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)		
				Panjang Jalan yang Dibangun (Km)	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
			Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Panjang Jalan yang Ditingkatkan (Struktur dan fungsi) (Km)	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
				Jumlah Jembatan Yang Di pelihara (Jembatan)	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
				Jumlah Jembatan Yang Di Bangun (Jembatan)	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
				Panjang Jalan yang Direkonstruksi atau di Rehabilitasi (Km)	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Konektivitas Laut (Unit)	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	
				Persentase Tingkat Kecelakaan Transportasi Laut (%)	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	
				Jumlah Pelabuhan Laut yang terbangun/direhabilitasi (Pelabuhan)	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	
				Jumlah pelabuhan Penyebrangan (Pelabuhan)	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Persentase Tingkat Kecelakaan Transportasi Jalan (%)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
				Tersedianya Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) dengan Akreditasi Minimal B (Unit)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
				Konektivitas Darat (Persentase)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
		Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Indeks)		
			Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Poin)	3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	
			Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
			Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase penurunan sampah terbuang ke laut (%)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan			Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)		
				PDRB per Kapita (Rp)		
		Meningkatnya Daya Saing Pangan dan Produktivitas Sektor Unggulan (Agromaritim)		Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Kontribusi PDRB Kabupaten Halmahera Selatan		
				Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)		
				Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura jenis bawang merah (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Jumlah Produksi Daging (sapi, kerbau, domba, kambing, ayam, itik, babi) (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kelapa (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Jumlah Produksi Telur (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Jumlah Produksi Padi (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kakao (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kopi (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Jumlah Produksi Jagung (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Jumlah Produksi Pangan Lokal Non Beras (Ubi Kayu dan Ubi Jalar) (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Cengkeh (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Jenis Cabai (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Pala (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)		
				Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)		
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
			Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	
		Meningkatnya Investasi Sektor Unggulan (Agromaritim)		Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota (%)		
			Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
				Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya diverifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
			Meningkatnya kapasitas SDM dan Ekonomi Kreatif	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif (Rp)	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
			Meningkatnya Kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (Persentase)	3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	
			Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	
			Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan) (%)	2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	
			Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
				Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
	4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Adaptif		Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
		Meningkatnya Ekonomi Keuangan Syariah		Indeks Zakat Nasional (IZN) (Poin)		
				Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)		
		Meningkatnya Kinerja Tata Kelola, Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik		Indeks Integritas Nasional (Persentase)		
				Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)		
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (Persentase)	2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)	2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	
			menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik dan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan			
			Peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP)	Level Kapabilitas APIP (Level)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
		Meningkatnya Kapasitas Aparatur		Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)		
			Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional (Orientasi, Prajabatan, PKP, PKA, PKN, Diklat Fungsional)	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan Fungsional (%)	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
			Meningkatnya Kualitas Penilaian Kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
			Meningkatnya layanan penjaminan mutu pengelolaan tugas belajar serta sertifikasi kompetensi	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi (Persentase)	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
			Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
		Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah		Rasio Kemandirian Fiskal (Nilai)		
				Return on Asset (ROA) BUMD (%)		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
				Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
		Meningkatnya Tranformasi Digital dan Inovasi Daerah		Indeks Inovasi Daerah (Angka)		
				Indeks Pembangunan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Angka)		
			Meningkatnya Kajian yang Termanfaatkan Sebagai Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Pengembangan Potensi Unggulan	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			Meningkatnya Pemanfaatan Inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5. Mewujudkan Stabilitas dan Ketahanan Daerah yang Tangguh dan Responsif Terhadap Perkembangan Zaman			Indeks Ketenteraman dan Ketertiban(Angka)	Indeks Ketahanan Daerah (Angka)	
				Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) ((%))		
				Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya ((%))		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	Rasio Wirausaha Muda (Rasio)	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	
				Jumlah Sarana Prasarana Olahraga Yang Terbangun (Unit)	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	
				Prestasi pada Event Olahraga Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional (Orang)	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	
			Meningkatnya Kesenian Tradisional yang dikembangkan dan dimanfaatkan	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan dan dimanfaatkan (%)	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	
				Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
			Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	
			Meningkatnya Warisan Budaya yang Dilestarikan dan Dikelola	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Persentase)	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
		Meningkatnya Mitigasi dan Penanggulangan Bencana		Indeks Risiko Bencana (Indeks)		
			Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
			Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya (%)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
				Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
				presentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial (%)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	

1. Prioritas Daerah

Tujuan dan sasaran-sasaran tersebut selanjutnya disimplifikasi ke dalam prioritas daerah. Prioritas daerah merupakan operasionalisasi dari tujuan dan sasaran strategis daerah serta menjadi pemandu bagi program-program prioritas pembangunan daerah, yang didasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan masyarakat dan pencapaian target-target pembangunan daerah secara keseluruhan. Memperhatikan isu-isu strategis pembangunan daerah, prioritas-prioritas daerah dimaksud, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia; yang diturunkan dari Tujuan 1 : meningkatkan daya saing sumber daya manusia yang sehat, cerdas. Unggul dan berdaya;
2. Memperkuat infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan; yang diturunkan dari Tujuan 2: meningkatkan infrastruktur berkualitas dan berwawasan lingkungan;
3. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi; yang diturunkan dari Tujuan 3: meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan;
4. Mengakselerasi reformasi birokrasi yang adaptif; yang diturunkan dari Tujuan 4: meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan adaptif
5. Memajukan kebudayaan daerah dan memperkuat harmoni sosial serta resiliensi bencana; yang diturunkan dari Tujuan 6: memperkuat ketahanan daerah dan harmoni sosial yang berkarakter;

Urutan prioritas-prioritas daerah tersebut dapat berubah setiap tahunnya disesuaikan kebutuhan, urgensi dan kemendesakan pada tahun perencanaan. Kelima prioritas daerah tersebut dilaksanakan dengan mengkonsolidasikan peran dari berbagai urusan/unsur pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat 32 bidang urusan pemerintahan daerah yang terbagi dalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 urusan wajib non pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan, termasuk unsur-unsur pendukung (Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD), unsur- unsur penunjang (perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pengelolaan perbatasan), unsur pengawasan, dan pemerintahan umum (Kesatuan Bangsa

dan Politik).

PD-1 Meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia, dilaksanakan dengan mengkonsolidasikan peran urusan-urusan pemerintahan daerah, yaitu Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Sosial, Perumahan dan Kawasan Permukiman, PUPR dan Komunikasi dan Informatika.

PD-2 Memperkuat infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan, dilaksanakan dengan mengkonsolidasikan peran urusan pemerintahan daerah, yaitu Pekerjaan umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Lingkungan Hidup, Pemuda dan Olahraga, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Pengelolaan keuangan dan aset daerah, dan Perencanaan.

PD-3 Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi, dilaksanakan dengan mengkonsolidasikan peran urusan pemerintahan daerah, yaitu Pertanian dan Ketahanan pangan, Koperasi, Perindustrian dan perdagangan, Perikanan, Penanaman modal dan perijinan, Perencanaan, Komunikasi dan Informatika, Pengelola keuangan dan aset daerah,

PD-4 Mengakselerasi reformasi birokrasi yang adaptif, dilaksanakan dengan mengkonsolidasikan peran urusan pemerintahan daerah, yaitu Sekretariat daerah, Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah, semua urusan pemerintahan daerah, Pekerjaan umum dan penataan ruang.

PD-5 Memajukan kebudayaan daerah dan memperkuat harmoni sosial serta resiliensi bencana, dilaksanakan dengan mengkonsolidasikan peran urusan pemerintahan daerah, yaitu Pariwisata dan kebudayaan, Kesatuan bangsa dan politik, Sekretariat daerah, Penanggulangan bencana, Satuan polisi pamong praja, Pemadam kebakaran dan penyelamatan dan Pendidikan.

2. Proyek Strategis Daerah

Proyek Strategis Daerah adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Pertama, Proyek strategis pengembangan agromaritim untuk tujuan peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi dan mendukung ketahanan pangan berkelanjutan. Proyek strategis ini mendukung misi ketiga **TRANSFORMASI SENYUM PRODUKTIF SEJAHTERA**

Kedua, Proyek strategis pembangunan berbasis zonasi/kawasan dengan pendekatan

revitalisasi ibukota kecamatan, pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan aktifitas ekonomi. Proyek strategis ini mendukung misi kedua **TRANSFORMASI SENYUM MAJU BERKELANJUTAN**

Ketiga, Proyek strategis pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan menghubungkan antara satu desa dengan desa lainnya dalam rangka mengakselerasi peningkatan konektivitas wilayah Proyek strategis ini mendukung misi kedua **TRANSFORMASI SENYUM MAJU BERKELANJUTAN**

Keempat, Proyek strategis peningkatan jaminan kesejahteraan sosial untuk mendukung pemenuhan *Universal Health Coverage* (UHC). Proyek strategis ini mendukung misi pertama **TRANSFORMASI SENYUM UNGGUL BERDAYA**

Kelima, Proyek strategis optimalisasi aset-aset pemerintah daerah yang terbengkalai sehingga dapat difungsikan sesuai penggunaannya. Proyek strategis ini mendukung misi kedua **TRANSFORMASI SENYUM MAJU BERKELANJUTAN**

Keenam, Proyek strategis penguatan manajemen talenta (talent pool) dan pengembangan kinerja ASN berbasis IT untuk mendukung pelayanan publik yang efektif dan efisien. Proyek strategis ini mendukung misi keempat **TRANSFORMASI SENYUM PRIMA BERNILAI**

Ketujuh, Proyek strategis penguatan nilai budaya dan keadatan untuk memperkuat harmoni sosial. Proyek strategis ini mendukung misi kelima **TRANSFORMASI SENYUM SARUMA TANGGUH**

3. Program Unggulan

Program unggulan merupakan komitmen kampanye Bupati/Wakil Bupati untuk dilaksanakan pada tahun 2025-2030, yang menjadi janji kerja sebagai bentuk pendukungan langsung terhadap upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan 2025-2030.

Adapun program unggulan Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba dan Wakil Bupati Helmi Umar Muksin adalah sebagai berikut :

1. **TRANSFORMASI SENYUM UNGGUL BERDAYA**: dengan kegiatan-kegiatan yang meliputi:
 - 1) Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat;
 - 2) Percepatan penurunan stunting terutama dengan meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal;

- 3) Peningkatan akses dan keterjangkauan pelayanan kesehatan prima melalui pemenuhan UHC, penguatan RSUD Labuha sebagai RS KJSU-KIA (Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi, Kesehatan Ibu dan Anak) sistem rujukan kepulauan (termasuk RS Perairan) dan penguatan telemedicine serta kerjasama dengan RS pengampuh;
- 4) Pemenuhan tenaga medis dan Kesehatan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan dan pendidikan profesional yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif dan peningkatan tenaga medis dari masyarakat lokal terutama di daerah sulit akses dan afirmasi 3T;
- 5) Optimalisasi pemberantasan penyakit menular guna mencapai eliminasi malaria, kusta, TBC, HIIV, Demam Berdarah, Diare dan Infeksi Saluran Pernafasan;
- 6) Percepatan pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar dan konektivitas yang menjangkau intra dan antar wilayah berbasis gugus pulau;
- 7) Percepatan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi, serta pengembangan perguruan tinggi lokal; Pemanfaatan TIK yang menjangkau seluruh pulau-pulau berpenduduk;
- 8) Penguatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif, serta peningkatan proporsi dosen kualifikasi Strata-3;
- 9) Peningkatan akses dan kualitas Pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi wilayahHalmahera Selatan seperti industri, pertanian, perikanan, pertambangan, dan pariwisata;
- 10) Penyediaan afirmasi akses pendidikan, terutama untuk daerah kepulauan yang masih belum terjangkau termasuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK yang menjangkau daerah terpencil, penyediaan asrama siswa dan guru, dan penguatan sekolah terbuka;
- 11) Pengentasan kemiskinan terutama pada DTPK (daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan) melalui optimalisasi pengelolaan bantuan sosial, kolaborasi dengan lembaga filantropi, pemberdayaan;
- 12) Perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal melalui penyediaan pusat rehabilitasi PMKS, penyediaan insentif jaminan ketenagakerjaan bagi usia pekerja, perlindungan dan keamanan ekonomi untuk penduduk lansia, serta bantuan sosial terhadap PMKS;

- 13) Penguatan Program Pembinaan Masyarakat Berbasis Nilai dan Pembinaan Sekolah dan Kampus Berbasis Nilai.

2. **TRANSFORMASI SENYUM MAJU BERKELANJUTAN:** dengan kegiatan-kegiatan yang meliputi:

- 1) Penyusunan dokumen induk pengembangan infrastruktur dan permukiman berbasis kawasan yang komprehensif dan terintegrasi sebagai acuan dalam pembangunan infrastruktur; Pembangunan infrastruktur dasar (jalan, jembatan, air bersih, perumahan dll) yang merata dan berkualitas;
- 2) Pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi (listrik, telekomunikasi, bandara, pelabuhan, internet) yang representatif sebagai penopang pengembangan hilirisasi agromaritim;
- 3) Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni secara merata untuk mengurangi pemukiman kumuh;
- 4) Pengembangan kawasan perkotaan berbasis Smart City sebagai ekosistem kota yang ramah, mudah dan terintegrasi;
- 5) Percepatan pemenuhan Kota Layak Anak dan Lansia untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih humanis;
- 6) Pengelolaan sampah terpadu untuk menunjang pelestarian lingkungan dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle);
- 7) Pembangunan RTH dan taman kota sebagai ruang interaksi sosial masyarakat dan menopang keindahan kota.

3. **TRANSFORMASI SENYUM PRODUKTIF SEJAHTERA:** dengan kegiatan-kegiatan yang meliputi:

- 1) Pengembangan sentra-sentra industri berbasis komoditas unggulan perikanan tangkap, perikanan budidaya (rumput laut), dan perkebunan (pala, cengkeh, dan kelapa) termasuk tanaman pangan (padi, ubi kayu, jagung), dilengkapi dengan pusat riset, inovasi, dan teknologi (*maritime, science technopark, seaweed science technopark, coconut science technopark serta spices technopark*) di kawasan perkotaan, sentra-sentra produksi di kawasan perdesaan untuk meningkatkan keterkaitan pembangunan desa-kota, dan kawasan pariwisata yang

berkelanjutan);

- 2) Pengembangan ekonomi biru dan bioekonomi sebagai sumber pertumbuhan baru perekonomian wilayah antara lain pengembangan kawasan utama produsen perikanan secara berkelanjutan;
- 3) Percepatan pengembangan lumbung ikan nasional;
- 4) Optimalisasi potensi pertambangan nikel secara berkelanjutan;
- 5) Penguatan produk lokal melalui IKM dan UMKM sebagai penguatan ekonomi wilayah;
- 6) Penguatan pasokan energi untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat;
- 7) Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional dengan Asia Timur, Pasifik dan Australia;
- 8) Peningkatan up-skilling dan re-skilling SDM terutama terkait perikanan, perkebunan (termasuk pangan), pariwisata, dan industri;
- 9) Pengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif dengan prinsip pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism);
- 10) Pengembangan kawasan pariwisata premium (premium tourism) yaitu kawasan pariwisata dengan target wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara minat khusus;
- 11) Pengembangan kawasan pariwisata lokal yaitu kawasan pariwisata yang diarahkan untuk dapat meningkatkan jumlah wisatawan dan peningkatan minat wisatawan lokal; Pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni musik, kriya (tenun), serta seni pahat dan ukir kayu melalui penguatan strategi pemasaran serta peningkatan kapasitas pengelola dan masyarakat pelaku usaha;
- 12) Optimalisasi pusat-pusat pertumbuhan eksisting melalui peningkatan investasi dan pengembangan kota-kota pesisir yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung sebagai pusat pertumbuhan wilayah.

4. **TRANSFORMASI SENYUM PRIMA BERNILAI:** dengan kegiatan-kegiatan yang meliputi:

- 1) Optimasi dan harmonisasi regulasi, termasuk proses pra-regulasi yang

memadai di daerah;

- 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat sipil yang bermakna termasuk pelibatan masyarakat;
- 3) Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat;
- 4) Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM Aparatur Sipil Negara (ASN), dan pengelolaan aset daerah;
- 5) Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk penguatan aspek pemerintahan digital;
- 6) Penguatan program Pembinaan Aparatur Berbasis Nilai sebagai sistem manajemen SDM Aparatur khas Halmahera Selatan;
- 7) Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi; transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital; Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi;
- 8) Penyusunan kebijakan afirmatif mengedepankan kontekstual kewilayahan untuk mendorong pembangunan wilayah;
- 9) Penguatan monitoring program pembangunan melalui manajemen risiko terkait dampaknya terhadap masyarakat sebagai *end user*;
- 10) Penguatan manajemen talenta (talent pool) untuk meningkatkan manajemen ASN dan kelembagaannya.

5. **TRANSFORMASI SENYUM SARUMA TANGGUH:** dengan kegiatan-kegiatan yang meliputi:

- 1) Pembangunan perdamaian (peace building) sebagai pondasi dalam membangun semangat kebersamaan dan persatuan antar komponen Masyarakat;
- 2) Penguatan sistem manajemen kebencanaan dan kedaruratan dalam rangka menguatkan deteksi dini dan membangun resiliensi bencana;

- 3) Penguatan dialog antar umat beragama, komunitas dan berbagai komponen politik sebagai upaya membangun semangat toleransi dan gotong royong;
- 4) Penguatan nilai-nilai kebangsaan, kebhinekaan dan persatuan sebagai pilar pemersatu;
- 5) Memantapkan ketahanan sosial budaya serta ekologi melalui penguatan ketangguhan individu, keluarga dan komunitas untuk membangun keseimbangan dan hubungan timbal balik;
- 6) Pelestarian nilai-nilai budaya melalui penguatan kelembagaan kesultanan dan paguyuban.

3.2.4 Kerangka Penyelarasan Misi Pembangunan Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2025-2029

Penyelarasan misi pembangunan Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2025-2029 merupakan bagian penting dalam penyusunan dokumen RPJMD agar program yang dilaksanakan dipastikan selaras dan memiliki relasi yang kuat dengan program sesuai misi pembangunan nasional. Penyelarasan misi pembangunan Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2025-2029 dengan misi pembangunan di atasnya tersaji dalam Tabel 3.9 berikut.

Tabel 3.8

Kerangka Penyelarasan Misi Pembangunan Jangka Menengah

NO	RPJMD KABUPATEN HALMAHERA SELATAN	RPJPD KABUPATEN HALMAHERA SELATAN	RPJPD PROVINSI MALUKU UTARA	RPJMD PROVINSI MALUKU UTARA	ASTA CITA	17 PROGRAM UNGGULAN NASIONAL
1.	TRANSFORMASI SENYUM UNGGU BERDAYA: Mawujudkan transformasi sosial untuk melahirkan sumber daya manusia Halmahera Selatan yang sehat, cerdas, berkarakter, berdaya saing dan sejahtera	Mewujudkan transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola pemerintahan	Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang berkualitas, unggul dan berdaya saing tercermin dari modal manusia (insani) Maluku Utara yang sehat, cerdas, kreatif, produktif, serta memiliki keunggulan kompetitif	Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dengan menyediakan pendidikan tingkat SMA/SMK gratis, bantuan beasiswa perguruan tinggi, dan kesehatan gratis serta emastikan ketersediaan tenaga medis, dokter, guru dan sekolah unggulan	Penguatan ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Mencapai swasembada pangan, energi, dan air
2.	TANSFORMASI SENYUM MAJU BERKELANJUTAN: Menyediakan infrastruktur yang merata, berkualitas dan berwawasan lingkungan berbasis kawasan sebagai daya dukung pengembangan wilayah bagi pembangunan yang berkelanjutan dan berkesinambungan	Mewujudkan supermasi hukun dan stabilitas wilayah	Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas, inklusivitas, dan daya saing berkelanjutan	Mewujudkan kemandirian ekonomi melalui peningkatan produktifitas sektor unggulan yang bernilai tambah (hilirisasi) serta pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja	Penguatan Pertahanan dan Keamanan Nasional	Penyempurnaan sistem penerimaan negara
3.	TRANSSFORMASI SENYUM PRODUKTIF SEJAHTERA: Mewujudkan transformasi ekonomi daerah yang produktif, berdaya saing dan berkelanjutan melalui hilirisasi agromaritim, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pariwisata unggulan	Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi	Mewujudkan transformasi tata kelola untuk pemerintahan yang berintegritas, inovatif dan adaptif	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, melayani, bebas dari korupsi (ZI-WBK) inovatif dan adaptif	Penciptaan Lapangan Kerja Berkualitas dan Pengembangan Kewirausahaan	Reformasi politik, hukum dan birokrasi
4.	TRANSFORMASI SENYUM PRIMA BERNILAI: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang profesional, berintegritas,	Mewujudkan pembangunan wilayah yang merata dan berkeadilan	Mewujudkan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah	Mewujudkan supermasi hukum, stabilitas keamanan dan stabilitas ekonomi dengan mengatasi konflik sosial dan kriminal serta	Pegembangan Sumber Daya Manusia dan Kesetaraan Gender	Pencegahan dan pemberantasan korupsi

NO	RPJMD KABUPATEN HALMAHERA SELATAN	RPJPD KABUPATEN HALMAHERA SELATAN	RPJPD PROVINSI MALUKU UTARA	RPJMD PROVINSI MALUKU UTARA	ASTA CITA	17 PROGRAM UNGGULAN NASIONAL
	adaptif, dan melayani			mengendalikan inflasi harga sembako		
5.	TRANSFORMASI SENYUM SARUMA TANGGUH: Mewujudkan stabilitas dan ketahanan daerah yang tangguh dan responsif terhadap perkembangan zaman	Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi untuk pembangunan berkelanjutan	Mewujudkan ketahanan pangan, sosial budaya, adat istiadat dan ekologi melalui pembelian kartu perlindungan sosial bagi lansia, janda, anak yatim, buruh, rumah ibadah, imam, pendeta	Hilirisasi dan industrialisasi untuk Nilai Tambah Ekonomi	Pemberantasan Kemiskinan
6.			Mewujudkan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan berbasis wilayah kepulauan secara merata dan berkeadilan	Mewujudkan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan berbasis wilayah kepulauan termasuk Sofifi Halmahera Metropolitan, jaringan telekomunikasi dan jaringan listrik	Pembangunan dan Desa untuk Pemerataan Ekonomi	Pencegahan dan pemberantasan Narkoba
7.			Mewujudkan sarana dan prasarana yang handal, serta mendorong integrasi intrapulau, intrakepulauan, domestik dan global	Membangun infrastruktur dan sarana prasarana berkualitas untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas dermaga, bandara, jalan Nasional/Provinsi, jalan tani, jembatan, penyediaan air bersih, rumah layak huni, dapur sehat dan sanitasi	Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan Penyediaan obat untuk rakyat
8.			Mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif	Mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui sinergi perencanaan, pengurangan risiko bencana, perlindungan kawasan hutan, laut, mata air, mangrove dan pusat-pusat peninggalan sejarah untuk pembangunan daerah yang berkesinambungan dan efektif	Harmoni Lingkungan, Budaya, dan Toleransi Beragama	Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi.
9.						Penguatan pertahanan dan

NO	RPJMD KABUPATEN HALMAHERA SELATAN	RPJPD KABUPATEN HALMAHERA SELATAN	RPJPD PROVINSI MALUKU UTARA	RPJMD PROVINSI MALUKU UTARA	ASTA CITA	17 PROGRAM UNGGULAN NASIONAL
						keamanan Negara dan pemeliharaan Internasional yang kondusif
10.						Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas
11.						Menjamin pelestarian lingkungan hidup
12.						Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani
13.						Menjamin pembangunan hunian berkualitas, terjangkau, bersanitasi baik untuk masyarakat pedesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan
14.						Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan IKN serta kota-kota inovatif-karakteristik-mandiri lainnya
15.						Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis SDA, termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi.
16.						Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah
17.						Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga

3.3 KONSEP DAN STRATEGI AGROMARITIM

Konsep agromaritim di Kabupaten Halmahera Selatan merupakan strategi pembangunan yang mengintegrasikan sektor pertanian dan kelautan secara berkelanjutan. Tujuan utama dari konsep ini adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam, baik di darat maupun di laut, untuk menjaga stabilitas ketahanan pangan dan meningkatkan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat melalui hilirisasi sumber daya unggulan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah kepemimpinan Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba, dan Wakil Bupati Helmi Umar Muksin menetapkan visi menjadikan daerah ini sebagai pusat agromaritim yang maju dan berkelanjutan. Visi ini menekankan pentingnya pembangunan yang adil, transparan, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Fokus utama dalam implementasi konsep agromaritim meliputi penguatan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pemanfaatan teknologi dalam pemerintahan

Salah satu langkah konkret yang diambil adalah menjalin kerja sama dengan Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sektor agromaritim. Kerja sama ini bertujuan untuk memanfaatkan potensi kelautan dan pertanian secara optimal, sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, organisasi perangkat daerah terkait seperti Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dan Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Selatan serta OPD terkait lainnya harus memiliki komitmen yang sama untuk mendukung visi agromaritim dengan memaksimalkan potensi masing-masing dan sumber daya yang tersedia sehingga menjadi faktor penting dalam mengukur keberhasilan konsep ini. Dengan integrasi hasil kelautan dan pertanian yang melimpah, diharapkan angka pengangguran dapat berkurang dan pertumbuhan ekonomi masyarakat semakin meningkat.

Namun, implementasi konsep agromaritim juga menghadapi tantangan, seperti memastikan prinsip keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam dan memperhatikan kedaulatan serta kepentingan masyarakat lokal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang seimbang antara pengelolaan sumber daya alam dan kepentingan masyarakat setempat agar manfaat dari konsep ini dapat dirasakan secara merata.

Secara keseluruhan, konsep agromaritim di Kabupaten Halmahera Selatan merupakan upaya strategis dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam secara optimal, dengan mengintegrasikan sektor pertanian dan kelautan, guna mencapai pembangunan yang adil, maju,

dan berkelanjutan.

Konsep agromaritim memiliki 2 (dua) tujuan akhir yaitu pertama meningkatkan nilai tambah ekonomi melalui peran hilirisasi sumber daya unggulan dan kedua meningkatkan stabilitas kemandirian pangan Kabupaten Halmahera Selatan.

A. Peran Hilirisasi Sumber Daya Alam Dalam Konsep Agromaritim

Peran hilirisasi sumber daya alam dalam konsep agromaritim sangat krusial karena menjadi jembatan antara produksi bahan mentah dan nilai tambah ekonomi. Dalam konteks agromaritim—yang merupakan penggabungan sinergis antara sektor agrikultur (pertanian) dan maritim (kelautan)—hilirisasi berfungsi untuk meningkatkan nilai produk, membuka lapangan kerja, dan memperkuat daya saing daerah di tingkat nasional, regional maupun internasional.

Peran hilirisasi sumber daya alam dalam konsep agromaritim:

1. Meningkatkan Nilai Tambah Produk

Kabupaten Halmahera Selatan memiliki kekayaan sumber daya alam di sektor pertanian dan kelautan, menjadikannya wilayah potensial dalam pengembangan ekonomi berbasis agromaritim. Namun, nilai tambah dari sektor ini masih rendah karena dominasi produk sektor sekunder, lemahnya infrastruktur, serta kurangnya pengolahan dan teknologi. Untuk itu diperlukan integrasi antara pengolahan produk, pemberdayaan petani-nelayan, serta sinergi kebijakan dan investasi mampu mendorong transformasi ekonomi agromaritim di Halmahera Selatan. Pengembangan sektor ini tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat lokal, tetapi juga membuka peluang ekspor dan pariwisata berbasis sumber daya alam lokal.

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi agromaritim yang besar. Salah satu wilayah yang merepresentasikan potensi ini adalah Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, yang kaya akan hasil laut seperti ikan, rumput laut, dan hasil pertanian seperti kelapa, pala, dan kakao. Namun demikian, mayoritas produk yang dihasilkan masih dijual dalam bentuk mentah tanpa pengolahan lebih lanjut. Hal ini menyebabkan nilai tambah ekonomi dari sektor agromaritim belum optimal.

Konsep agromaritim tidak hanya menekankan pada produksi pertanian dan kelautan, tetapi juga integrasi antara keduanya dalam sistem produksi, distribusi, dan konsumsi yang berbasis lokal dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan strategi konkret untuk meningkatkan nilai tambah sektor ini melalui pembangunan

infrastruktur, hilirisasi, pemberdayaan sumber daya manusia (SDM), serta adopsi teknologi dan digitalisasi.

Hilirisasi memungkinkan sumber daya alam—seperti hasil laut (ikan, rumput laut, kerang, dll.) dan hasil pertanian (kopra, pala, cengkeh, kelapa, dll.)—untuk diproses lebih lanjut sebelum dijual. Dengan varian produk diantaranya :

1. Ikan segar diolah menjadi ikan asap, abon, atau produk kaleng.
2. Rumput laut diolah menjadi agar-agar, kosmetik, atau farmasi.
3. Kelapa menjadi minyak kelapa, sabun, hingga bioenergi.

Aktifitas tersebut akan berdampak pada produk tidak hanya dijual dalam bentuk mentah, tapi memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi, sehingga petani dan nelayan mendapat keuntungan lebih besar.

Peran industrialisasi skala nasional dalam hilirisasi agromaritim di Kabupaten Halmahera Selatan sangat strategis dan multifaset. Dengan hilirisasi berskala nasional maka akan mendorong investasi infrastruktur seperti pelabuhan dan jalan logistik untuk mempercepat arus barang dari desa ke pusat pengolahan dan distribusi serta akan terbangun kawasan Sentra industri terpadu yang dapat digunakan untuk pengolahan hasil laut (ikan, rumput laut) dan hasil pertanian (pala, cengkeh, kelapa).

Dengan hilirisasi berskala nasional maka akan terbangun industri pengolahan yang akan memberikan nilai tambah yang cukup besar terhadap produk agromaritim. Produk mentah seperti ikan, rumput laut, atau hasil perkebunan tidak langsung diekspor, tapi diolah terlebih dahulu di Kabupaten Halmahera Selatan sebagai daerah penghasil. Halmahera Selatan bisa menjadi lokasi pabrik pengalengan ikan, pengolahan rumput laut menjadi agar-agar, bioetanol dari kelapa, atau minyak pala yang praktis akan meningkatkan nilai tambah.

Selain itu hilirisasi juga menjadi wahana untuk transfer teknologi dan keterampilan. Industri nasional membawa teknologi pengolahan dan manajemen rantai pasok yang modern, dan dapat diterapkan oleh pelaku lokal melalui pelatihan atau kemitraan. meningkatkan produktivitas dan efisiensi sektor agromaritim dan meningkatkan Akses Pasar dan Daya Saing. Produk hilirisasi dari Halmahera Selatan juga bisa masuk ke pasar nasional dan internasional dengan standar mutu yang lebih tinggi apalagi didukung oleh branding nasional atau label industri Indonesia yang kuat.

Hilirisasi skala nasional juga dapat memperkuat konektivitas dan jejaring usaha dengan membentuk Ekosistem usaha terintegrasi antara pelaku lokal, BUMN, dan swasta nasional serta kolaborasi antara UMKM lokal dan perusahaan besar melalui kemitraan bisnis. Hilirisasi skala nasional juga dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal sehingga akan terjadi peningkatan lapangan kerja baik di sektor produksi, pengolahan, distribusi, maupun logistic yang akan mengurangi ketergantungan pada sektor informal atau migrasi keluar daerah.

Hilirisasi sektor agromaritim juga akan memperkuat ketahanan ekonomi lokal karena dengan rantai pasok yang lengkap dari hulu sampai ke hilir maka ekonomi Kabupaten Halmahera Selatan menjadi lebih mandiri dan tidak hanya bergantung pada ekspor bahan mentah dan produk pertambangan saja sehingga ketahanan pangan dan ekonomi local masyarakat juga akan ikut meningkat.

Industrialiasi skala nasional berperan sebagai pendorong utama hilirisasi agromaritim di Kabupaten Halmahera Selatan melalui penyediaan infrastruktur, teknologi, pasar, dan kelembagaan. Jika sinergi antara kebijakan nasional dan potensi lokal dapat terjalin optimal, maka Halmahera Selatan berpeluang menjadi model keberhasilan hilirisasi agromaritim berbasis wilayah kepulauan.

2. Mendorong Industrialisasi Lokal

Selain hilirisasi agromaritim berskala nasional, konsep agromaritim juga bisa didesain untuk mendorong tumbuhnya industrialisasi local. Industrilisasi local juga memiliki dampak yang sangat luas dan strategis, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Industrialisasi lokal di sini maksudnya adalah pembangunan industri pengolahan yang berbasis pada potensi pertanian dan kelautan setempat — selain industri besar skala nasional, tetapi industri kecil-menengah (IKM) yang menyerap hasil lokal dan memberdayakan masyarakat sekitar.

Dampak ekonomi dari industrialisasi agromaritim dapat meningkatkan nilai tambah produk. Produk yang sebelumnya dijual dalam bentuk mentah (ikan segar, kelapa, pala) kini bisa diolah menjadi produk jadi (ikan kaleng, minyak kelapa, sirup pala) yang harganya jauh lebih tinggi dan bisa langsung menaikkan pendapatan petani dan nelayan. Selain itu juga dapat menciptakan lapangan kerja baru karena Industri pengolahan lokal memerlukan tenaga kerja mulai dari produksi, pengemasan, pemasaran, hingga distribusi. Hal ini membuka banyak peluang kerja terutama di pedesaan dan kawasan pesisir. Hilirisasi juga dapat menguatkan ekonomi local dan

daerah karena Industri berbasis agromaritim yang tumbuh di daerah akan meningkatkan perputaran ekonomi lokal, memperbesar kontribusi PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), dan mengurangi ketergantungan pada produk luar daerah serta dampak ekonomi lainnya jika industrialisasi produk agromaritim dilaksanakan maka akan meningkatkan daya saing produk lokal. Dengan pengolahan yang baik dan kemasan menarik, produk lokal bisa masuk pasar nasional bahkan ekspor. Ini juga membuka akses ke e-commerce dan pasar modern.

Hilirisasi produk agromaritim selain memiliki dampak ekonomi juga memiliki dampak social. Dengan hilirisasi agromaritim maka akan mendorong partisipasi masyarakat dalam Industri lokal sebagai pelaku usaha, bukan hanya sebagai buruh. Petani dan nelayan juga bisa menjadi mitra dalam rantai pasok industri. Selain itu hilirisasi sektor agromaritim akan memberi penguatan pada kelembagaan social ekonomi. Koperasi, BUMDes, dan kelompok usaha bersama akan berkembang pesat untuk mendukung industri lokal, memperkuat solidaritas dan kemandirian desa. Dengan pencapaian tersebut maka praktis akan mendorong peningkatan kualitas hidup yang ditandai dengan pendapatan meningkat, infrastruktur membaik, dan peluang pendidikan/latihan terbuka luas seiring dengan berkembangnya sektor industri agromaritim.

Hilirisasi agromaritim juga memiliki dampak lingkungan yang mendorong terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Industri lokal yang tumbuh dari komunitas biasanya lebih peduli pada kelestarian sumber daya, misalnya, budidaya rumput laut yang tidak merusak ekosistem, atau pertanian organik yang ramah tanah. Selain itu pemanfaatan limbah sebagai energi atau produk baru. Industri lokal memungkinkan limbah hasil pengolahan (kulit kelapa, sisa ikan, ampas pala) dimanfaatkan untuk produk lain seperti pupuk, pakan ternak, atau bioenergi. Namun ancaman lingkungan juga bisa terjadi jika industrialisasi dilakukan tanpa regulasi dan kesadaran lingkungan, bisa terjadi eksploitasi berlebihan, pencemaran, dan kerusakan ekosistem laut dan darat. Maka, industrialisasi lokal harus berbasis prinsip ekonomi hijau dan berkelanjutan.

Selain dampak ekonomi, social dan lingkungan, hilirisasi juga dapat berdampak pada ketahanan pangan dan energy. Ketahanan pangan bisa meningkat, karena masyarakat tidak hanya menjual bahan mentah, tapi juga bisa mengonsumsi produk olahannya sendiri. Selain itu hilirisasi agromaritim juga memiliki potensi energi

terbarukan, seperti biomassa dari limbah agromaritim, juga dapat dikembangkan untuk mendukung kebutuhan energi lokal.

Dengan hilirisasi juga akan berdampak pada urbanisasi dan migrasi. Industrialisasi lokal bisa menghambat urbanisasi berlebihan karena masyarakat tidak perlu pindah ke kota besar untuk mencari pekerjaan. Wilayah desa dan pesisir menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri dan atraktif. Agromaritim yang didorong dengan industrialisasi lokal memberikan dampak positif multidimensi: meningkatkan ekonomi, memberdayakan sosial, mendukung keberlanjutan lingkungan, dan memperkuat kedaulatan daerah. Namun, agar dampaknya maksimal dan tidak menimbulkan efek negatif, perlu ada perencanaan yang inklusif, berbasis komunitas, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Hilirisasi menciptakan industri pengolahan di tingkat lokal, baik skala kecil (UMKM) maupun menengah. Dalam konteks agromaritim di Kabupaten Halmahera Selatan maka konsep ini bisa dilakukan melalui Industri pengeringan dan fermentasi hasil laut, Pabrik minyak kelapa atau olahan buah pala dan unit pengemasan dan distribusi hasil pertanian dan kelautan. Dampak signifikan dari upaya tersebut adalah menyerap tenaga kerja lokal, mengurangi ketergantungan terhadap industri luar daerah dan menumbuhkan ekosistem ekonomi baru di desa-desa pesisir dan pedalaman yang dapat menjalin kemitraan dengan industri besar skala nasional yang melakukan proses hilirisasi sektor agromaritim.

3. Menstabilkan Harga dan Menjaga Ketahanan Ekonomi

Peran agromaritim dalam menstabilkan harga dan menjaga ketahanan ekonomi di Kabupaten Halmahera Selatan sangat penting dan strategis, terutama karena wilayah ini memiliki karakteristik geografis kepulauan dengan potensi sumber daya alam yang melimpah.

Hilirisasi agromaritim dapat menstabilkan harga komoditas karena mengurangi ketergantungan pada musim panen. Dalam sistem hulu (produksi bahan mentah), harga sering anjlok saat panen raya karena pasokan berlebih. Hilirisasi memungkinkan produk diolah dan disimpan lebih lama (misalnya ikan diawetkan, rumput laut dijadikan bubuk, kelapa dijadikan minyak), sehingga penjualan bisa diatur waktu dan volumenya, bukan hanya tergantung pada musim. Selain itu hilirisasi juga dapat meningkatkan nilai tambah produk. Produk olahan seperti abon ikan, minyak kelapa, tepung pala, atau keripik pisang memiliki nilai jual lebih tinggi dan stabil dibanding

produk mentah. Hal ini dapat menaikkan daya tawar petani dan nelayan, serta menstabilkan pendapatan mereka. Apalagi dengan konsep hilirisasi memungkinkan terjadinya diversifikasi produk atau satu komoditas memiliki banyak turunan produk, disamping diversifikasi juga bisa mengurangi risiko fluktuasi harga pada satu jenis produk.

Dengan hilirisasi sektor agromaritim juga dapat menjaga ketahanan ekonomi daerah dengan tumbuhnya industri lokal dan UMKM. Dengan adanya hilirisasi, tumbuh berbagai industri kecil dan menengah di Kabupaten Halmahera Selatan seperti pabrik pengalengan ikan, pengolahan rumput laut, atau rumah produksi pangan lokal. Selain itu hilirisasi sektor agromaritim juga mengurangi ketergantungan ekonomi eksternal. Ketika daerah mampu mengolah dan mengonsumsi hasilnya sendiri, maka ketahanan ekonomi lebih kuat terhadap gangguan eksternal, seperti krisis global atau embargo ekspor-impor.

Dengan hilirisasi agromaritim juga akan memperkuat rantai pasok local. Hilirisasi membangun ekosistem produksi dan distribusi di dalam daerah itu sendiri. Hal ini membuat daerah lebih mandiri secara ekonomi dan memperkuat integrasi antar-sektor (perikanan, pertanian, industri, distribusi, dan jasa). Hilirisasi agromaritim juga akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Produk yang dijual dengan nilai tambah lebih tinggi menghasilkan pendapatan pajak dan retribusi yang lebih besar untuk pemerintah daerah. Dana tersebut bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik lainnya.

Hilirisasi sektor agromaritim juga akan memberi perlindungan dari gejolak pasar global. Fakta selama ini komoditas kelapa, cengkeh, pala dan ikan dalam bentuk mentah sangat tergantung pada harga pasar internasional, yang ketika mengalami tekanan supply and demand maka harga pada level petani dan nelayan akan sangat turun dan memberikan dampak kerugian yang cukup besar bagi petani dan nelayan. Dengan mengandalkan produk olahan lokal, daerah tidak mudah terguncang saat harga komoditas dunia turun.

Hilirisasi agromaritim adalah kunci untuk membangun ekonomi daerah yang tangguh, stabil, dan berkelanjutan. Hal ini bukan hanya soal industri, tapi soal memperkuat struktur ekonomi dari akar, yakni petani dan nelayan, hingga ke pasar regional dan nasional. Dengan kata lain, hilirisasi mengubah potensi menjadi kekuatan. Hilirisasi juga adalah kunci sukses dari konsep agromaritim. Tanpa hilirisasi, agromaritim hanya akan berhenti pada penggalan sumber daya mentah,

yang cepat habis dan memberi sedikit manfaat bagi masyarakat lokal. Namun dengan hilirisasi maka potensi alam diolah secara berkelanjutan, ekonomi masyarakat meningkat dan daerah menjadi kuat secara ekonomi, sosial, dan lingkungan.

B. Peran Agromaritim Dalam Menjaga Stabilitas Ketahanan Pangan

Salah satu permasalahan besar Kabupaten Halmahera Selatan adalah ketergantungan importasi bahan pangan dari luar daerah. Padahal sumber daya yang tersedia seperti lahan yang belum tergarap, tanah yang subur dan karakteristik demografis masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan yang lebih banyak menggantungkan kehidupannya dari sektor pertanian dan kelautan, maka sangat memungkinkan bagi Halmahera Selatan untuk memotong mata rantai importasi pangan dari luar daerah. Kebijakan besar Pemerintahan Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba dan Wakil Bupati Helmi Umar Muksin dengan mendorong konsep agromaritim menjadi kebijakan strategis dalam upaya menjaga stabilitas ketahanan pangan daerah dan peningkatan nilai tambah ekonomi masyarakat.

Peran agromaritim dalam menjaga stabilitas ketahanan pangan di Kabupaten Halmahera Selatan sangat penting karena wilayah ini memiliki karakteristik kepulauan dengan kekayaan alam yang melimpah baik dari darat maupun laut yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan. Kabupaten Halmahera Selatan dikelilingi perairan kaya ikan pelagis dan demersal (seperti tuna, cakalang, kerapu). Komoditas ini menjadi sumber protein hewani utama yang relatif stabil dan bisa dikembangkan secara berkelanjutan. Selain itu Halmahera Selatan juga memiliki sejumlah potensi diversifikasi pangan laut seperti rumput laut, kerang, dan hasil laut lainnya yang bisa diolah menjadi pangan fungsional dan produk turunan seperti agar-agar atau cemilan laut. Produk tersebut bisa memperkaya jenis pangan lokal dan memperkuat ketahanan gizi masyarakat.

Selain potensi perikanan Halmahera Selatan juga memiliki potensi pertanian dan perkebunan sebagai penopang pangan lokal. Dalam mendukung kemandirian pangan lokal, Halmahera Selatan juga memiliki diversifikasi pangan lokal seperti ubi, pisang, sagu, dan kelapa, yang merupakan sumber karbohidrat alternatif selain beras. Pemanfaatan pangan lokal ini penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap beras impor atau beras dari luar daerah. Selain itu juga Halmahera Selatan memiliki potensi perkebunan produktif yang terdiri dari komoditas pala, cengkeh, dan kelapa. Selain menjadi komoditas ekspor, juga bisa menjadi sumber bahan pangan dan olahan

lokal untuk konsumsi sehari-hari. Banyak desa pesisir dan pedalaman di Halmahera Selatan yang hidup dari hasil laut dan hasil kebun sendiri. Kondisi tersebut menegaskan bahwa Kabupaten Halmahera Selatan dapat menciptakan sistem pangan yang lebih mandiri dan tahan terhadap gangguan distribusi dari luar dalam upaya membangun kemandirian Pangan berbasis Komunitas.

Agromaritim di Halmahera Selatan adalah tulang punggung ketahanan pangan daerah. Melalui pengelolaan laut dan darat yang terpadu, masyarakat bisa memperoleh sumber pangan yang beragam. kemandirian pangan lokal dan daya tahan terhadap krisis pangan karena pengaruh pasokan luar daerah. Dengan dukungan infrastruktur, teknologi, dan kebijakan lokal yang tepat, Halmahera Selatan bisa menjadi model ketahanan pangan berbasis agromaritim untuk wilayah kepulauan Indonesia.

3.4 PERWILAYAHAN KOMODITAS

Untuk merealisasikan konsep ketahanan pangan dengan potensi agromaritim maka salah satu strategi yang harus dilaksanakan adalah dengan perwilayahan komoditas. Secara administrative Kabupaten Halmahera Selatan memiliki 249 Desa dan 30 Kecamatan. Konsep perwilayahan komoditas harus dikluster berdasarkan zona pengembangan wilayah agromaritim (ZPWA). Zona pengembangan wilayah agromaritim (ZPWA) dibagi menjadi 5 wilayah yaitu :

1. Zona 1 wilayah Bacan, Kasiruta dan Botanglomang yang terdiri dari 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Bacan Barat, Kecamatan Bacan Barat Utara, Kecamatan Bacan, Kecamatan Kasiruta Timur, Kecamatan Kasiruta Barat dan Kecamatan Botanglomang
2. Zona 2 wilayah Makian dan Kayoa yang terdiri dari 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Pulau Makian, Kecamatan Makian Barat, Kecamatan Kayoa Utara, Kecamatan Kayoa, Kecamatan Kayoa Selatan dan Kecamatan Kayoa Barat
3. Zona 3 wilayah Gane dan Pulau Joronga yang terdiri dari 7 Kecamatan yaitu Kecamatan Gane Timur, Kecamatan Gane Barat Utara, Kecamatan Gane Barat, Kecamatan Gane Timur Tengah, Kecamatan Gane Timur Selatan, Kecamatan Gane Barat Selatan dan Kecamatan Kepulauan Joronga.
4. Zona 4 wilayah Obi yang terdiri dari 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Obi Timur, Kecamatan Obi Selatan, Kecamatan Obi, Kecamatan Obi Utara dan Kecamatan Obi Barat
5. Zona 5 wilayah Bacan Timur dan Mandioli yang terdiri dari 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Bacan Timur, Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kecamatan Bacan

Timur Selatan, Kecamatan Bacan Selatan, Kecamatan Mandioli Selatan dan Kecamatan Mandioli Utara

Kebijakan agromaritim di Halmahera Selatan dari perspektif pertanian diarahkan pada upaya optimalisasi potensi lahan dan perkebunan demi terciptanya produk unggul, bernilai tambah, dan mampu bersaing. Hal ini dapat diwujudkan melalui penetapan kawasan pertanian unggulan, yaitu area yang berdasarkan kesesuaian agroekologis dan potensi ekonomi diprioritaskan untuk pengembangan komoditas perkebunan, padi, dan hortikultura. Pengelolaan kawasan tersebut nantinya diintegrasikan secara holistik, mulai dari aspek budidaya, pengolahan, hingga pemasaran, demi tercapainya efektivitas dan efisiensi.

Penguatan kelembagaan petani juga menjadi aspek penting. Hal ini dapat ditempuh melalui pembentukan dan penguatan kelompok tani, Gabungan Kelompok Tani, dan koperasi multiguna, sehingga dapat tercipta skala usaha yang lebih ekonomis, terjadi transfer teknologi secara kolektif, dan akses permodalan lebih mudah. Dalam implementasi, peran penyuluh dan ahli pertanian juga penting demi mendampingi petani menerapkan teknologi budidaya yang sesuai, penggunaan benih unggul, pengendalian hama dan penyakit secara terpadu, hingga manajemen pasca panen.

Kabupaten Halmahera Selatan terletak di sebelah selatan Provinsi Maluku Utara, Indonesia, dan merupakan kabupaten kepulauan terbesar di provinsi Maluku Utara. Halmahera Selatan memiliki 371 pulau, termasuk pulau besar Halmahera, Bacan, Obi, Kayoa, Makian, dan Gane. Letak geografisnya yang dikelilingi laut dan selat, dipadu dengan tanah yang subur, iklim tropis basah, dan curah hujan yang cukup, memberikan potensi besar bagi pengembangan agromaritim, khususnya di sektor pertanian.

Dari aspek pertanian, Halmahera Selatan memiliki lahan perkebunan dan pertanian yang luas, tersebar di 30 kecamatan dan 249 desa. Komoditas unggulan seperti kelapa, pala, cengkih, kakao, dan pisang dapat dibudidayakan secara luas, sementara padi, jagung, dan umbi-umbian juga cocok ditanam di kawasan dataran rendah dan perbukitan. Keanekaragaman geografi dan kesuburan tanah tersebut menjadi modal penting untuk mendukung visi Halmahera Selatan sebagai pusat pengembangan pertanian unggul, bernilai tambah, dan mampu menjadi motor perekonomian daerah.

A. Potensi Pengembangan Lahan Pertanian untuk mendukung Agromaritim Kabupaten Halmahera Selatan

Tanaman perkebunan telah menjadi salah satu sektor andalan masyarakat Halmahera selatan, terutama di wilayah-wilayah pedesaan yang bergantung pada hasil panen tahunan seperti kelapa, pala, cengkeh, dan kakao. Komoditas kelapa, misalnya, tersebar luas di hampir seluruh kecamatan dan menjadi sumber utama produksi kopra, yang merupakan salah satu komoditas ekspor penting. Selain itu, komoditas seperti pala dan cengkeh juga memiliki nilai ekonomi tinggi dan terus dikembangkan di wilayah Gane, Bacan, dan Obi.

Pengembangan tanaman perkebunan di Halmahera Selatan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga membuka lapangan kerja, mendukung ketahanan pangan, dan memperkuat daya saing daerah.

Berikut adalah analisis potensi pengembangan komoditas pala, kelapa, kakao dan cengkeh di Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan data luas lahan dan produksi

SUB SEKTOR TANAMAN PERKEBUNAN Kelapa

Potensi kelapa :

- Komoditas utama perkebunan dengan areal terluas
- Permintaan tinggi untuk kopra, VCO, minyak kelapa, sabut, dan tempurung

Isu :

- Banyak pohon tua produktivitas rendah → perlu program replanting
- Minim industri pengolahan lokal

Peluang :

- Agroindustri berbasis kelapa, ekspor langsung produk olahan

Pala

Potensi pala :

- Nilai ekonomi tinggi, permintaan ekspor stabil (biji, fuli, minyak atsiri).
- Tumbuh baik di dataran menengah dan tanah vulkanik

Isu :

- Serangan hama/busuk buah, panen musiman
- Kurangnya unit pengolahan.

Peluang :

- Pengembangan produk turunan: sirup, minyak, rempah-rempah olahan.
- Integrasi pertanian–pariwisata (agrowisata rempah).

Cengkeh

Potensi Cengkeh

- Komoditas ekspor rempah penting, juga bahan baku industri rokok
- Adaptif di dataran tinggi sedang

Isu :

- Produksi fluktuatif, harga pasar tidak stabil.

Peluang :

- Ekspansi areal tanam, penanaman baru berbasis kelompok tani.
- Produk turunan: minyak cengkeh, produk herbal.

Kakao

Potensi Kakao :

- Komoditas berorientasi ekspor, cocok di dataran rendah–sedang
- Berpeluang besar dikembangkan di wilayah Gane dan Bacan Timur

Isu :

- Masalah utama: hama penggerek buah, kualitas biji belum seragam
- Masih kurang fasilitas fermentasi dan pengeringan

Peluang :

- Pelatihan pasca panen (fermentasi, pengolahan biji)
- Pengembangan koperasi kakao berbasis ekspor

SUB SEKTOR TANAMAN HORTIKULTURA

Pengembangan Tanaman Hortikultura (Buah dan Sayuran)

1. Pengembangan sayuran: seperti cabai, tomat, terong, Sawi, pare dan sebagainya.
2. Tanaman buah unggulan daerah: seperti Duku, pisang, dan mangga lokal, Rambutan dan Durian
3. Benih unggul dan tahan iklim ekstrem: untuk mengurangi risiko gagal panen

SUB SEKTOR PETERNAKAN

Pengembangan sektor peternakan di Halmahera Selatan memiliki landasan yang kuat, didukung ketersediaan lahan yang luas, sumber pakan hijauan yang melimpah,

dan kondisi iklim tropis yang sesuai. Hal ini memberikan peluang signifikan untuk mengoptimalkan budidaya ternak, seperti sapi, kambing, dan unggas, baik secara ekstensif, semi-intensif, maupun intensif. Selain memenuhi kebutuhan daging dan protein hewani masyarakat, peternakan juga dapat menjadi sumber pendapatan keluarga, menyerap tenaga kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi perdesaan. Dengan pendekatan teknologi, pelatihan, dan penguatan kelembagaan, pengembangan peternakan dapat berjalan secara terencana, bernilai tambah, dan mampu mendukung visi Halmahera Selatan sebagai kawasan agromaritim unggul dan mandiri.

B. Strategi Pengembangan Kawasan Agromaritim

Permasalahan dan Tantangan

1. Masalah utama sub sektor perikanan

Permasalahan mendasar pada sub sektor perikanan Kabupaten Halmahera Selatan adalah sebagai berikut :

- a.* Pelabuhan pendaratan ikan belum tersedia secara merata sesuai kondisi wilayah Kabupaten Halmahera Selatan
- b.* Tingginya penangkapan ikan dari luar wilayah Halmahera Selatan menyebabkan produksi perikanan tangkap yang masuk wilayah Halmahera Selatan menjadi kecil
- c.* Rantai dingin (cold storage / ABF) dengan kapasitas besar masih minim dan belum tersedia secara merata pada gugus pulau penghasil perikanan.
- d.* Rantai pasok distribusi perikanan belum terintegrasi dengan kawasan sentra perikanan
- e.* Harga ikan masih tinggi pada level masyarakat
- f.* Fasilitas BBM dan es bagi nelayan belum optimal

Rencana pengembangan :

- a.* Peningkatan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bacan;
- b.* Pengembangan, peningkatan dan pemantapan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sayoang;
- c.* Pengembangan, peningkatan dan pemantapan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Jikohai dan PPI Panamboang
- d.* Peningkatan frekwensi tol laut jalur Surabaya, Makassar dan Bitung
- e.* Pembangunan pelabuhan perikanan pada sentra agromaritim

- f. Pembangunan Coldstorage dan ABF kapasitas besar
- g. Pembangunan pabrik es dengan kapasitas besar
- h. Hilirisasi produk perikanan
- i. Pengembangan perikanan budidaya

2. Masalah Utama sub sektor perkebunan

Beberapa tantangan utama dalam penguatan infrastruktur tanaman perkebunan di Halmahera Selatan antara lain:

- 1. Aksesibilitas rendah ke lokasi perkebunan akibat kondisi jalan tani dan jalan produksi yang rusak atau belum tersedia.
- 2. Minimnya sarana pengolahan pascapanen seperti rumah pengeringan, gudang komoditas, dan alat pengolahan.
- 3. Transportasi antar pulau belum terintegrasi sehingga distribusi hasil perkebunan lambat dan mahal.
- 4. Kurangnya irigasi lahan kering dan konservasi tanah pada areal miring dan rentan longsor.
- 5. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi untuk sistem logistik dan pemasaran.

3. Strategi penguatan infrastruktur sektor perkebunan

Beberapa langkah strategis untuk penguatan infrastruktur tanaman perkebunan di Halmahera Selatan mencakup:

a. Pembangunan Jalan Produksi dan Jalan Tani

- 1. Perluasan dan perbaikan jalan dari desa ke lokasi kebun dan gudang komoditas.
- 2. Pembangunan jembatan kecil atau akses penyeberangan di wilayah terpencil.

b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pascapanen

- 1. Pembangunan rumah pengeringan kopra dan kakao.
- 2. Penyediaan gudang penyimpanan pala dan cengkeh yang memenuhi standar mutu ekspor.
- 3. Sentra industri kecil untuk pengolahan turunan

c. Transportasi dan Logistik

1. Penguatan pelabuhan kecil dan dermaga rakyat untuk pengiriman hasil pertanian antarpulau.
2. Subsidi atau kerja sama transportasi laut (perintis) khusus komoditas perkebunan.

d. Irigasi dan Konservasi Lahan

1. Irigasi tetes atau semprot untuk tanaman kakao dan cengkeh.
2. Terasering dan penanaman tanaman pelindung untuk menghindari erosi.
3. Digitalisasi dan Kelembagaan Petani
4. Sistem informasi harga dan cuaca berbasis SMS atau aplikasi desa.
5. Penguatan kelembagaan kelompok tani agar mampu mengelola sarana bersama

4. Strategi penguatan infrastruktur sektor tanaman pangan dan hortikultura

Penguatan infrastruktur pertanian di Kabupaten Halmahera Selatan sangat penting untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi distribusi, dan kesejahteraan petani. Berikut ini adalah poin-poin strategis penguatan infrastruktur pertanian Halsel, berdasarkan tantangan dan potensi wilayah:

a. Infrastruktur Irigasi dan Air

Masalah Umum:

1. Banyak lahan tadah hujan → tergantung musim.
2. Terbatasnya sistem irigasi teknis dan pompanisasi.

Penguatan yang Dibutuhkan:

1. Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi (primer, sekunder, tersier).
2. Pompa air tenaga surya untuk wilayah terpencil atau belum teraliri listrik.
3. Embung dan sumur bor untuk lahan hortikultura dan tanaman pangan.
4. Penerapan irigasi tetes/irigasi sprinkle pada hortikultura intensif.

b. Jalan Usaha Tani & Akses Transportasi

Masalah Umum:

1. Akses ke lahan produksi sulit, terutama saat musim hujan.
2. Biaya angkut hasil panen tinggi.

Penguatan yang Dibutuhkan:

1. Pembangunan jalan usaha tani dan jembatan kecil ke sentra produksi.
2. Perbaikan jalan produksi dari desa ke pasar.
3. Transportasi hasil pertanian (mobil pick-up desa, motor roda tiga).

c. Infrastruktur Pasca Panen**Masalah Umum:**

1. Kehilangan hasil panen cukup tinggi karena minim fasilitas penyimpanan dan pengolahan.

Penguatan yang Dibutuhkan:

1. Gudang hasil panen di tingkat desa/kecamatan.
2. Cold storage dan rumah pengering (drying house) untuk hortikultura dan padi.
2. Alat pengolahan hasil pertanian: seperti rice milling unit (RMU), mesin pengering, dan vacuum sealer.

d. Mekanisasi Pertanian (Alsintan)**Masalah Umum:**

1. Pengolahan lahan masih manual → lambat dan mahal.
2. Kurangnya brigade alsintan di tingkat kecamatan.

Penguatan yang Dibutuhkan:

1. Distribusi alat dan mesin pertanian (traktor, cultivator, rice transplanter, combine harvester).
2. Pelatihan operator alsintan dan unit layanan alsintan (UPJA/Brigade Alsintan).
3. Perbengkelan dan bengkel alsintan desa.

e. Infrastruktur Digital dan Akses Informasi**Masalah Umum:**

1. Banyak petani belum terhubung dengan sistem informasi harga, cuaca, dan teknologi.

Penguatan yang Dibutuhkan:

1. Jaringan internet dan sinyal seluler di desa sentra pertanian.
2. Aplikasi pertanian digital (e-Tani, smart farming, e-market).

3. Pusat layanan data pertanian desa.

f. Sarana Produksi dan Laboratorium

1. Balai penyuluhan pertanian (BPP) diperkuat dengan alat uji tanah cepat (PUTS).
2. Gudang pupuk, pestisida, dan benih yang terjangkau dan merata.
3. Laboratorium mini pertanian untuk cek kualitas benih dan tanah.

5. Strategi penguatan infrastruktur sub sektor peternakan

Masih terbatasnya infrastruktur pendukung seperti kandang komunal, unit pengolahan pakan, dan klinik hewan perlu mendapatkan perhatian. Pembangunan infrastruktur transportasi untuk distribusi hasil peternakan juga perlu menjadi prioritas.

Strategi Utama

1. Pembangunan dan peningkatan Puskesmas serta Rumah Potong Hewan (RPH) bersertifikat.
2. Penguatan akses jalan ke sentra peternakan melalui program infrastruktur pedesaan.
3. Pengembangan kawasan budidaya terintegrasi seperti sapi-kelapa.
4. Penyediaan laboratorium pakan dan sertifikasi mutu produk (NKV).
5. Integrasi perencanaan pembangunan melalui RPJPD dan DAK sektor peternakan.
6. Pengoptimalan Gudang Pakan agar bisa memproduksi Konsentrat dan Silase sebagai bahan baku utama pakan ternak

6. Inovasi system dan bisnis sub sektor perkebunan

Dalam rangka meningkatkan daya saing komoditas perkebunan dan mempercepat pembangunan ekonomi berbasis agribisnis, inovasi dalam sistem dan model bisnis perkebunan menjadi suatu keharusan. Inovasi ini mencakup seluruh rantai nilai (value chain), mulai dari budidaya, panen, pascapanen, pengolahan hasil, hingga pemasaran. Berikut beberapa bentuk inovasi sistem dan bisnis yang bisa menjadi referensi pertimbangan :

a. Inovasi Sistem Produksi

1. Pertanian Presisi dan Digitalisasi: Pemanfaatan teknologi digital seperti drone, dan sistem informasi geografis (GIS) untuk meningkatkan efisiensi produksi dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT). (AMTE DO PUE)
2. Sistem Budidaya Terpadu : Integrasi antara tanaman perkebunan dengan tanaman sela, peternakan, atau agroforestry untuk meningkatkan pendapatan dan keberlanjutan lingkungan.
3. Penggunaan Varietas Unggul : Pengembangan benih unggul adaptif terhadap iklim dan tahan hama, serta penggunaan pupuk organik dan agen hayati

b. Inovasi Model Bisnis

Dalam inovasi bisnis Bidang Perkebunan sedang dalam tahapan perencanaan inovasi seperti berikut :

1. Kemitraan Petani-Korporasi (Inclusive Business): Kolaborasi antara petani kecil dengan perusahaan pengolahan atau eksportir melalui skema yang saling menguntungkan (contract farming).
2. Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani: Pengembangan koperasi tani, BUMDes, atau kelompok tani menjadi entitas bisnis yang mampu mengakses pembiayaan, teknologi, dan pasar.
3. E-Commerce dan Digital Marketing: Pemasaran hasil perkebunan melalui platform digital untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan nilai jual produk

7. Inovasi system dan bisnis sub sektor tanaman pangan dan hortikultura Halmahera

Selatan memiliki potensi besar dalam subsektor tanaman pangan dan hortikultura, didukung oleh kesuburan lahan dan iklim tropis basah yang sesuai untuk budidaya padi, jagung, umbi-umbian, cabai, tomat, pisang, dan berbagai buah tropis. Optimalisasi dapat dilakukan melalui penerapan pertanian presisi, penggunaan benih unggul adaptif, irigasi hemat air, serta sistem tanam terpadu yang meningkatkan efisiensi lahan dan ketahanan iklim.

Dari sisi bisnis, penguatan pasca-panen seperti rumah kemas, sortasi, dan cold storage menjadi kunci menjaga mutu dan nilai jual produk. Skema contract farming, digitalisasi pemasaran, serta pengembangan koperasi agribisnis dapat memperluas akses pasar dan meningkatkan posisi tawar petani. Integrasi teknologi budidaya dan sistem bisnis berbasis kelompok akan mendorong subsektor ini tumbuh lebih produktif, adaptif, dan kompetitif secara berkelanjutan

8. Inovasi system dan bisnis sub sektor peternakan

Pengembangan peternakan di Halmahera Selatan dapat dioptimalkan melalui pendekatan inovatif yang tengah diterapkan secara luas. Salah satunya yaitu penerapan pakan fermentasi dan silase, yaitu teknologi pengawetan pakan dari limbah perkebunan dan hijauan, sehingga ketersediaan pakan dapat terjamin sepanjang tahun dan biaya pakan dapat ditekan. Selain pakan, sistem perkawinan buatan (IB) dan vaksinasi massal juga dapat diterapkan demi perbaikan mutu genetik ternak dan pencegahan penyakit. Penggunaan teknologi aplikasi ternak turut mendukung manajemen yang lebih presisi, mulai dari pencatatan silsilah, kesehatan, bobot, hingga jadwal pemberian pakan dan vitamin.

Selain pendekatan teknologi, peternakan terintegrasi juga dapat menjadi model unggulan di Halmahera Selatan. Dalam pendekatan ini, peternakan diintegrasikan dengan perkebunan dan perikanan, sehingga terjadi sinergi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Limbah ternak dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik untuk perkebunan, sementara limbah perkebunan dapat diolah menjadi pakan ternak, dan kolam perikanan dapat diberi nutrisi dari kotoran ternak. Hal ini tidak hanya dapat menurunkan biaya, tapi juga meningkatkan pendapatan dan keberlanjutan usaha.

Dari aspek bisnis, inovasi dapat diwujudkan melalui pembentukan koperasi peternak digital, yaitu koperasi yang dikelola secara online dan terhubung langsung ke pembeli, lembaga pembiayaan, dan supplier pakan. Hal ini dapat memangkas biaya perantara, meningkatkan margin peternak, dan membuka akses yang lebih luas ke pasar. Selain itu, teknologi pengolahan daging, susu, dan kulit dapat diterapkan demi terciptanya produk turunan

bernilai tambah, seperti sosis, yogurt, keju, dan kerajinan kulit, yang nantinya dapat dipasarkan secara luas, termasuk secara online

9. Inovasi system dan bisnis tenaga penyuluhan

Salah satu langkah strategis yang mendukung perogram pemerintah pusat dan daerah dalam rangka peningkatan produksi pangan nasional melauai kegiatan Sekolah lapang untuk tenaga pendamping pertanian. Bentuk kegiatan ini adaalah merekrut 100 orang petani muda/ milenial diantaranya 70 orang sarjana dan 30 orang SLTA di 100 desa yang tersebar di seluruh kabupaten Halmahera Selatan kemudian di berikan pembinaan, pengenalan penyampaian materi-materi tentang pertanian mulai dari persiapan lahan, pengolahan tanah, pemilihan dan benih/bibit unggul, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan hasil produksi dan pemasaran.

Tabel 3. 9 Perwilayahan Komoditas Agromaritim

No	Zona Pengembangan Wilayah Agromaritim (ZPWA)	Kecamatan	Perwilayahan Komoditas		
			Perkebunan	Hortikultura	Padi
1	ZPWA I (Bacan, Kasiruta dan Botanglomang)	1. Bacan Barat		Jagung, Kedelai	Padi ladang
		2. Bacan Barat Utara		Kedelai	Padi sawah
		3. Bacan		Jagung, Cabe	Padi ladang,
		4. Kasiruta Timur		Jagung, Kedelai	Padi ladang
		5. Kasiruta Barat			
		6. Botanglomang		Cabe	Padi ladang
2	ZPWA II (Makian dan Kayoa)	1. Pulau Makian		Bawang merah, Jagung	
		2. Makian Barat		Jagung	
		3. Kayoa Utara			
		4. Kayoa		Jagung	
		5. Kayoa Selatan			
		6. Kayoa Barat		Jagung, Kedelai	Padi ladang,
3	ZPWA III (Gane dan Pulau Joronga)	1. Gane Timur			Padi sawah
		2. Gane Barat utara		Kedelai	
		3. Gane Barat		Jagung, Kedelai	Padi sawah

No	Zona Pengembangan Wilayah Agromaritim (ZPWA)	Kecamatan	Perwilayahan Komoditas		
			Perkebunan	Hortikultura	Padi
		4. Gane Timur Tengah		Bawang merah, Kedelai	
		5. Gane Timur Selatan			
		6. Gane Barat Selatan		Jagung	
		7. Kepulauan Joronga			
4	ZPWA IV (Obi)	1. Obi Timur		Jagung	
		2. Obi Selatan			
		3. Obi			Padi sawah
		4. Obi Utara		Jagung	
		5. Obi Barat			
5	ZPWA (Bacan Timur dan Mandioli)	1. Bacan Timur		Bawang merah, Jagung, Kedelai, Cabe	Padi ladang
		2. Bacan Timur Tengah		Bawang merah, Jagung	
		3. Bacan Timur Selatan		Bawang merah, Cabe	
		4. Bacan Selatan		Bawang merah, Jagung, Cabe	
		5. Mandioli Selatan			
		6. Mandioli Utara		Jagung	Padi ladang

Perwilayahan komoditas dibagi berdasarkan Zona pengembangan wilayah agromaritim (ZPWA) dengan varian komoditas yang ditentukan tanpa mengesampingkan komoditas varian lain yang telah dikembangkan masyarakat. Tujuan perwilayahan komoditas adalah untuk optimalisasi pengembangan komoditas penunjang pangan daerah berbasis kawasan. Dengan perwilayahan komoditas maka setiap ZPWA akan mengembangkan komoditas yang telah ditentukan. Proses penanaman komoditas pertanian pada setiap ZPWA mencakup beberapa tahapan penting, mulai dari persiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, hingga panen. Setiap tahap memiliki perannya masing-masing untuk memastikan keberhasilan budidaya tanaman tersebut.

Untuk komoditas yang telah tersedia seperti kelapa, pala dan cengkeh maka yang dilakukan adalah langkah pemeliharaan dan pengembangan komoditas. Pemeliharaan komoditas meliputi antisipasi serangan hama, pemupukan dan pembinaan kepada petani. Langkah selanjutnya untuk komoditas yang telah tersedia adalah upaya peningkatan nilai

tambah dengan mendorong ke arah hilirisasi komoditas.

Untuk optimalisasi pengembangan komoditas penunjang pangan daerah berbasis kawasan maka dilakukan beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan Lahan

Dalam persiapan lahan harus dipastikan tanah gembur dan bebas dari rumput liar atau sisa tanaman sebelumnya. Selanjutnya pemberian pupuk dasar untuk memberikan nutrisi yang cukup bagi tanaman dan mengatur irigasi yang tepat agar tanah tetap lembab.

2. Pembibitan

Dalam pembibitan harus juga dipastikan pemilihan bibit yang berkualitas dan sesuai dengan jenis tanaman yang akan ditanam.

3. Penanaman

Dalam proses penanaman harus dipastikan membuat lubang tanam dengan ukuran yang sesuai dengan jenis tanaman serta menanam bibit dengan posisi dan kedalaman yang tepat.

4. Pemeliharaan

Setelah proses penanaman maka langkah selanjutnya adalah pemeliharaan dengan tetap menjaga proses penyiraman tanaman secara teratur sesuai dengan kebutuhan.

5. Pengendalian Hama dan Penyakit

Melakukan tindakan pencegahan dan pengendalian hama serta penyakit tanaman serta memberikan pupuk tambahan jika diperlukan

6. Pemanenan

Dalam proses pemanenan yang paling krusial adalah menentukan waktu panen yang tepat sesuai dengan tingkat kematangan dan menyimpan hasil panen dengan baik untuk menjaga kualitas dan mencegah kerusakan.

7. Pemasaran

Setelah semua proses dilewati maka proses yang sangat krusial juga adalah proses pemasaran hasil produksi. Dalam pemasaran hasil produksi maka perlu pelibatan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) atau Koperasi Desa terpilih yang telah menyiapkan strategi pemasaran secara local dan pemasaran global jika kebutuhan pangan lokal telah terpenuhi dengan harga yang kompetitif.

3.5 ROADMAP HILIRISASI AGROMARITIM TAHUN 2025-2030

Untuk menjabarkan pelaksanaan hilirisasi agromaritim di Kabupaten Halmahera Selatan maka desain roadmap hilirisasi agromaritim harus ditetapkan untuk jangka waktu 5 tahun yang dirancang sebagai *tahapan strategis lima tahun ke depan*, berdasarkan potensi lokal, tantangan daerah, serta visi pembangunan daerah sebagai pusat agromaritim berkelanjutan.

TAHAP I TAHUN 2025 :

Tema : Penguatan Dasar & Mapping Potensi

Fokus : Identifikasi sumber daya, pelaku, dan peluang investasi

Aksi Strategis	Penjelasan
Pemetaan Komoditas Potensial	Fokus pada komoditas utama seperti rumput laut, ikan, kopra, kelapa, dan pala.
Pendataan UMKM & Koperasi	Identifikasi pelaku ekonomi lokal untuk dilibatkan dalam rantai hilirisasi.
Penyusunan Masterplan Hilirisasi	Kerja sama dengan perguruan tinggi untuk menyusun cetak biru pengolahan SDA.
Penguatan SDM Lokal	Pelatihan teknis pengolahan hasil laut dan hasil pertanian sederhana.

TAHAP II TAHUN 2026

Tema : Pengembangan Sentra Industri Kecil Menengah

Fokus : Pembangunan infrastruktur hilirisasi dan teknologi pengolahan

Aksi Strategis	Penjelasan
Mendirikan Sentra Olahan Komoditas	Sentra pengolahan kopra, rumput laut, dan perikanan (di Gane, Obi, Bacan, dll.)
Distribusi Teknologi Tepat Guna	Mesin pengering rumput laut, pengepres minyak kelapa, pengemasan ikan, dsb.
Inkubator UMKM Agromaritim	Fasilitasi UMKM masuk ke tahap produksi dan distribusi modern.
Konektivitas Transportasi	Perbaikan pelabuhan dan jalan untuk memperlancar distribusi bahan baku & produk.

TAHAP III TAHUN 2027

Tema : Standardisasi dan Sertifikasi Produk

Fokus : Meningkatkan kualitas dan daya saing pasar

Aksi Strategis	Penjelasan
Sertifikasi Halal & BPOM	Agar produk bisa masuk pasar nasional dan ekspor.
Branding Produk Lokal	Contoh: "Sarden Hal-Sel", "Virgin Coconut Oil Gane", "Pala Premium Bacan".

Pelatihan e-Commerce & Digital Marketing	UMKM dibekali kemampuan menjual online dan ekspor.
Kampanye “Bangga Produk Hal-Sel”	Gerakan lokal untuk mendukung konsumsi produk dalam daerah.

TAHAP IV TAHUN 2028-2029

Tema : Ekspansi pasar dan investasi industri

Fokus : Menarik investasi dan memperluas pasar domestik & ekspor

Aksi Strategis	Penjelasan
Kemitraan B2B & Pemerintah	Gandeng perusahaan besar untuk joint venture (contoh: eksportir rumput laut, investor VCO).
Promosi Produk di Expo Nasional/Internasional	Ikut serta dalam expo pangan, perikanan, dan industri kreatif.
Zona Industri Agromaritim	Siapkan kawasan industri kecil menengah berbasis komoditas lokal.

TAHAP V TAHUN 2030

Tema : Konsolidasi dan Keberlanjutan

Fokus : Menjamin system hilirisasi berjalan mandiri dan berkelanjutan

Aksi Strategis	Penjelasan
Integrasi Ekosistem Digital Agromaritim	Platform digital untuk pencatatan produksi, distribusi, dan transaksi.
Sistem Insentif Pajak & Subsidi	Untuk pelaku hilirisasi yang berkelanjutan dan menyerap tenaga kerja lokal.
Monitoring Dampak Sosial & Lingkungan	Evaluasi berkala dampak hilirisasi terhadap masyarakat & ekosistem.
Pengembangan Riset & Inovasi Daerah	Lembaga riset lokal didorong untuk membuat inovasi olahan berbasis kearifan lokal.

3.6 STRATEGI PEMBIAYAAN ALTERNATIF

Untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Halmahera Selatan pada periode 2025–2029, pemerintah daerah dapat mengadopsi berbagai konsep pembiayaan alternatif yang telah diidentifikasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta mempercepat realisasi proyek-proyek strategis. Dari sekian banyak skema alternative pembiayaan yang tersedia, maka ada 2 (dua) skema alternative pembiayaan yang dapat dijadikan referensi pertimbangan untuk Kabupaten Halmahera Selatan 5 tahun yang akan datang yaitu :

1. Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU)

Skema KPDBU memungkinkan pemerintah daerah bekerja sama dengan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur publik, seperti jalan, air bersih, dan fasilitas kesehatan. Hal ini dapat mengurangi beban fiskal daerah dan mempercepat penyediaan layanan publik. KPDBU adalah salah satu skema pembiayaan alternative yang bertujuan untuk mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam

Penyediaan Infrastruktur melalui pengerahan dana swasta. Selain itu untuk mewujudkan penyediaan Infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu serta menciptakan iklim investasi yang mendorong keikutsertaan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat serta untuk mendorong digunakannya prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima, atau dalam hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna. Tujuan KPDBU ini juga adalah untuk memberikan kepastian pengembalian investasi Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur melalui mekanisme pembayaran secara berkala oleh pemerintah daerah kepada Badan Usaha.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, maka infrastruktur yang bisa dikerjakan dengan skema KPDBU ini adalah sebagai berikut:

- 1) infrastruktur transportasi;
- 2) infrastruktur jalan;
- 3) infrastruktur sumber daya air dan irigasi;
- 4) infrastruktur air minum;
- 5) infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat;
- 6) infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat;
- 7) infrastruktur sistem pengelolaan persampahan;
- 8) infrastruktur telekomunikasi dan informatika;
- 9) infrastruktur ketenagalistrikan;
- 10) infrastruktur minyak dan gas bumi dan energy terbarukan;
- 11) infrastruktur konservasi energi;
- 12) infrastruktur fasilitas perkotaan;
- 13) infrastruktur fasilitas pendidikan;
- 14) infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga serta kesenian;
- 15) infrastruktur kawasan;
- 16) infrastruktur pariwisata;
- 17) infrastruktur kesehatan;
- 18) infrastruktur lembaga pemasyarakatan; dan
- 19) infrastruktur perumahan rakyat

Namun sekalipun telah ditetapkan daftar proyek yang dapat dibiayai dengan

skema KPDBU, namun KPDBU juga dapat merupakan Penyediaan Infrastruktur yang merupakan gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis infrastruktur. Selain itu dalam rangka meningkatkan kelayakan KPDBU dan/atau memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat maka KPDBU juga dapat mengikutsertakan kegiatan penyediaan sarana komersial.

Kepala Daerah selaku Penanggungjawab Proyek Kerjasama (PJPK) menetapkan bentuk pengembalian investasi yang meliputi penutupan biaya modal, biaya operasional, dan keuntungan Badan Usaha Pelaksana. Pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana atas Penyediaan Infrastruktur bersumber dari 3 (tiga) skema yaitu :

- a. Pembayaran oleh pengguna dalam bentuk tarif;
- b. Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment); dan/atau
- c. Bentuk lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana bersumber dari pembayaran oleh pengguna dalam bentuk tarif, maka PJPK menetapkan tarif awal atas penyediaan infrastruktur. Tarif awal dan penyesuaiannya, ditetapkan untuk memastikan pengembalian investasi yang meliputi penutupan biaya modal, biaya operasional, dan keuntungan dalam kurun waktu tertentu. Dalam hal berdasarkan pertimbangan PJPK, tarif belum dapat ditetapkan untuk mengembalikan seluruh investasi Badan Usaha Pelaksana, maka tarif dapat ditentukan berdasarkan tingkat kemampuan pengguna. Dalam hal tarif ditentukan berdasarkan kemampuan pengguna, maka PJPK memberikan Dukungan Kelayakan sehingga Badan Usaha Pelaksana dapat memperoleh pengembalian investasi.

Pemberian Dukungan Kelayakan hanya diberikan bagi KPBU yang mempunyai kepentingan dan kemanfaatan sosial, setelah Kepala Daerah melakukan kajian yang lengkap dan menyeluruh atas kemanfaatan sosial.

Dalam hal pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana ditetapkan bersumber dari Pembayaran atas Ketersediaan Layanan, maka PJPK mengalokasikan dana Pembayaran Ketersediaan Layanan untuk Penyediaan Infrastruktur yang dilakukan oleh Badan Usaha Pelaksana pada masa operasi selama jangka waktu yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama. Seluruh Penganggaran dana Pembayaran Ketersediaan Layanan dilakukan dengan memperhitungkan:

- a. biaya modal;
- b. biaya operasional; dan/atau
- c. keuntungan Badan Usaha Pelaksana.

Dalam hal Badan Usaha Pelaksana telah mengoperasikan Infrastruktur yang dikerjasamakan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam perjanjian KPBU, maka Kepala Daerah melakukan Pembayaran Ketersediaan Layanan kepada Badan Usaha Pelaksana, melalui anggaran Pemerintah Daerah.

Dalam melakukan Pembayaran Ketersediaan Layanan kepada Badan Usaha maka PJPB harus memastikan telah terpenuhinya kondisi sebagai berikut:

- a. Infrastruktur yang dikerjasamakan telah dibangun dan dinyatakan siap beroperasi; dan
- b. Kepala Daerah menyatakan bahwa infrastruktur telah memenuhi indikator layanan infrastruktur sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

Outcome yang akan diterima pemerintah daerah dengan skema kerjasama KPDBU ini adalah pemerintah daerah tidak perlu menyiapkan anggaran pada awal pembangunan proyek infrastruktur, namun akan disiapkan dan dilaksanakan serta dioperasikan oleh badan usaha pelaksana sesuai perjanjian kerjasama. Setelah jangka waktu kerja sama berakhir dan badan usaha pelaksana telah menyerahkan proyek infrastruktur kepada pemerintah daerah, maka proyek dan segala keuntungannya menjadi milik pemerintah daerah.

Mekanisme pelaksanaan KPDBU diawali dengan melakukan penyiapan KPDBU oleh Kepala Daerah, yang menghasilkan paling kurang:

- a. Prastudi kelayakan;
- b. Rencana Dukungan Pemerintah dan Jaminan Pemerintah;
- c. Penetapan tata cara pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana; dan
- d. pengadaan tanah untuk KPDBU.

Penyiapan KPDBU dapat dilakukan bersama dengan Badan Usaha atau Lembaga / institusi / organisasi internasional berdasarkan kesepakatan dengan Kepala Daerah. Dalam hal terdapat lebih dari satu Badan Usaha atau Lembaga / institusi / organisasi internasional, maka Kepala Daerah melakukan proses seleksi. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Seleksi dalam rangka penyiapan KPDBU, diatur dalam peraturan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kebijakan pengadaan

barang / jasa pemerintah.

Biaya penyiapan KPDBU dengan bantuan Badan Usaha atau lembaga/ institusi/ organisasi internasional dibayarkan dengan tata cara pembayaran secara berkala (retainer fee), pembayaran secara penuh (lump sum), gabungan pembayaran secara berkala dan secara penuh, dan/atau tata cara lain yang disepakati antara Kepala Daerah dengan Badan Usaha / lembaga / institusi / organisasi internasional. Biaya penyiapan KPDBU dan pengadaan Badan Usaha mitra KPDBU yang dilakukan Kepala Daerah dengan bantuan Badan Usaha / Lembaga / institusi / organisasi internasional, pelaksana penyiapan KPDBU dapat dibebankan kepada Badan Usaha pemenang lelang baik sebagian atau seluruhnya.

Selanjutnya Kepala Daerah menyusun prastudi kelayakan atas Infrastruktur yang akan dikerjasamakan. Prastudi kelayakan menghasilkan kesimpulan antara lain:

- a. sumber pembiayaan KPDBU;
- b. identifikasi kerangka kontraktual, pengaturan, dan kelembagaan;
- c. rancangan KPDBU dari aspek teknis;
- d. usulan Dukungan Pemerintah dan Jaminan Pemerintah yang diperlukan;
- e. identifikasi risiko dan rekomendasi mitigasi, serta pengalokasian risiko tersebut; dan
- f. bentuk pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana.

Dalam tahapan penyiapan prastudi kelayakan, Kepala Daerah menyusun dokumen sebagai berikut:

- a. dokumen studi lingkungan; dan
- b. dokumen perencanaan pengadaan tanah.

Selanjutnya PJPK menyiapkan perjanjian KPDBU yang paling kurang memuat ketentuan mengenai:

- a. lingkup pekerjaan;
- b. jangka waktu;
- c. Jaminan pelaksanaan;
- d. tarif dan mekanisme penyesuaiannya;
- e. hak dan kewajiban termasuk alokasi risiko;
- f. standar kinerja pelayanan;
- g. pengalihan saham sebelum KPDBU beroperasi secara komersial;

- h. sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi ketentuan perjanjian;
- i. pemutusan atau pengakhiran perjanjian;
- j. status kepemilikan aset;
- k. mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur secara berjenjang, yaitu musyawarah mufakat, mediasi, dan arbitrase/pengadilan;
- l. mekanisme pengawasan kinerja Badan Usaha Pelaksana dalam melaksanakan pengadaan;
- m. mekanisme perubahan pekerjaan dan/atau layanan;
- n. mekanisme hak pengambilalihan oleh Pemerintah dan pemberi pinjaman;
- o. penggunaan dan kepemilikan aset infrastruktur dan/atau pengelolaannya kepada PJPK;
- p. pengembalian aset infrastruktur dan/atau pengelolaannya kepada PJPK;
- q. keadaan memaksa;
- r. pernyataan dan jaminan para pihak bahwa perjanjian KPDBU sah dan mengikat para pihak dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- s. penggunaan bahasa dalam Perjanjian, yaitu Bahasa Indonesia atau apabila diperlukan dapat dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris (sebagai terjemahan resmi/*official translation*), serta menggunakan Bahasa Indonesia dalam penyelesaian perselisihan di wilayah hukum Indonesia; dan
- t. hukum yang berlaku, yaitu hukum Indonesia.

Besaran jaminan pelaksanaan setingginya-tingginya adalah 5% (lima per seratus) dari nilai investasi KPDBU. Apabila terdapat penyerahan pengelolaan aset yang dimiliki atau dikuasai oleh Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana untuk pelaksanaan KPDBU, maka dalam perjanjian KPBU diatur:

- a. tujuan pemanfaatan aset dan larangan untuk memanfaatkan aset untuk tujuan selain yang telah disepakati;
- b. tanggung jawab pengoperasian dan pemeliharaan, termasuk pembayaran pajak dan kewajiban lain yang timbul akibat pemanfaatan aset;
- c. hak dan kewajiban pihak yang menguasai aset untuk mengawasi dan memelihara kinerja aset selama digunakan;
- d. larangan bagi Badan Usaha Pelaksana untuk mengagunkan aset sebagai jaminan kepada pihak ketiga;
- e. tata cara penyerahan dan/atau pengembalian aset;

- f. hal-hal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Perjanjian KPDBU mengatur penyerahan pengelolaan aset yang diadakan oleh Badan Usaha Pelaksana selama jangka waktu perjanjian, maka perjanjian KPDBU harus mengatur:

- a. kondisi aset yang akan dialihkan;
- b. tata cara pengalihan aset;
- c. status aset yang bebas dari segala jaminan kebendaan atau pembebanan dalam bentuk apapun pada saat aset diserahkan kepada Kepala Daerah;
- d. status aset yang bebas dari tuntutan pihak ketiga; dan
- e. pembebasan dari segala tuntutan yang timbul setelah penyerahan aset.

Pengadaan Badan Usaha Pelaksana dalam rangka KPDBU dilaksanakan setelah diperolehnya penetapan lokasi atas tanah yang diperlukan untuk pelaksanaan KPDBU, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Kepala Daerah membentuk panitia pengadaan Badan Usaha Pelaksana. Pengadaan Badan Usaha Pelaksana dilakukan melalui Pelelangan atau Penunjukan Langsung, yang dilakukan melalui prakualifikasi.

Pengadaan Badan Usaha Pelaksana melalui Penunjukan Langsung dapat dilakukan apabila:

- a. merupakan KPDBU kondisi tertentu; atau
- b. prakualifikasi Badan Usaha Pelaksana hanya menghasilkan satu peserta.

Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud yaitu:

- a. Pengembangan atas Infrastruktur yang telah dibangun dan/atau dioperasikan sebelumnya oleh Badan Usaha Pelaksana yang sama;
- b. Pekerjaan yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi baru dan penyedia jasa yang mampu mengaplikasikannya hanya satu-satunya; atau
- c. Badan Usaha Pelaksana telah menguasai sebagian besar atau seluruh lahan yang diperlukan untuk melaksanakan KPDBU.

KPDBU adalah skema pembiayaan di mana pemerintah dan swasta bekerja sama untuk menyediakan dan membiayai infrastruktur atau layanan public dengan pola kerja Pemda menyediakan lahan, izin, dan regulasi sementara pihak swasta memberikan pembiayaan, teknologi, dan keahlian untuk membangun dan

mengoperasikan proyek kemudian Pemda dan swasta menyepakati pembagian risiko dan manfaat, seperti retribusi, subsidi, atau jaminan pemerintah.

Kerjasama ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan, terutama dalam hal infrastruktur, mengoptimalkan penggunaan anggaran pemerintah dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan KPDBU maka pihak swasta dapat memperoleh keuntungan dari investasi dan pengelolaan proyek, sementara Pemda dapat memperluas layanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa beban anggaran yang besar dan masyarakat dapat menikmati fasilitas dan layanan publik yang lebih berkualitas.

KPDBU/PPP dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan anggaran pemerintah dan meningkatkan pembangunan. Sinergi ini juga dapat mendorong partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan serta dapat menciptakan lapangan kerja dan merangsang kegiatan ekonomi.

Untuk itu maka pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator, regulator, dan coordinator, Pemda juga harus menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memberikan jaminan kepada investor dan memastikan bahwa proyek KPDBU/PPP dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Sementara pihak swasta berperan sebagai investor dan pengelola proyek. Untuk itu maka swasta harus memiliki kemampuan finansial dan teknis untuk melaksanakan proyek dengan baik dengan tetap memperhatikan aspek sosial dan lingkungan dalam pengelolaan proyek.

2. Sinergi Pendanaan

Konsep sinergi pendanaan antara pemerintah daerah (Pemda) dengan pihak swasta adalah kolaborasi strategis untuk membiayai proyek-proyek pembangunan, terutama infrastruktur dan layanan publik, di mana Pemda dan swasta saling berbagi risiko dan manfaat. Keberadaan kawasan industri di Kabupaten Halmahera Selatan dapat mendorong kerjasama sinergi pendanaan antara Pemerintah Daerah dan pihak swasta. Sinergi pendanaan adalah konsep pembiayaan pembangunan oleh pihak swasta dengan daftar program dan kegiatan dari pihak pemerintah daerah. Sinergi pendanaan didanai dan dilaksanakan secara langsung oleh pihak swasta yang anggarannya tidak dikelola oleh APBD dan berfungsi untuk menutupi defisit kebutuhan belanja pemerintah daerah pada APBD, sehingga pembangunan yang

dilaksanakan oleh pihak swasta berdasarkan list kegiatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah disesuaikan dengan kebutuhan belanja daerah yang tidak dapat di biayai oleh APBD karena tidak tercapainya pendapatan.

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka capaian keberhasilan pembangunan dan mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2025–2029, memuat program prioritas perangkat daerah disusun secara sistematis dan terarah dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, potensi sumber daya alam dan buatan, serta efektivitas tata kelola pemerintahan. Program-program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel, responsif, dan berorientasi hasil (result-oriented). Perumusan program prioritas didasarkan pada kriteria yang menekankan pada dampak signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah, berbasis pada perencanaan yang terukur dengan indikator kinerja yang jelas, serta menjamin manfaat nyata yang dapat dirasakan masyarakat. Selain itu, program juga memprioritaskan penyelesaian isu- isu strategis dan permasalahan mendasar yang dihadapi daerah, dengan memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara realistis dalam periode lima tahun sesuai siklus pembangunan jangka menengah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun penyusunan program perangkat daerah dalam bab ini merujuk pada:

- Muatan program sesuai janji politik Bupati dan Wakil Bupati;
- Nomenklatur program yang mengacu kepada Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan beserta target dan pagu indikatifnya untuk tahun perencanaan 2026 – 2030 selengkapnya dapat dilihat dibawah ini.

TABEL 4.1
PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					486.529.758.000		511.103.458.000		535.366.141.000		566.356.141.000		616.646.141.000	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					242.621.585.000		242.621.585.000		242.631.585.000		254.364.589.000		252.610.815.000	
Meningkatnya kualitas Pelayanan urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketepatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran (%)	100	100	100	242.621.585.000	100	242.621.585.000	100	242.631.585.000	100	254.364.589.000	100	252.610.815.000	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan		
	Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan		
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					243.108.173.000		267.681.873.000		291.934.556.000		311.191.552.000		363.235.326.000	
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	Iklim Inklusivitas SD (Nilai)	58,9	61,4	63,9	243.108.173.000	66,4	267.681.873.000	68,9	291.934.556.000	71,4	311.191.552.000	73,9	363.235.326.000	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
	Iklim Inklusivitas SMP (Nilai)	57,26	59,66	62,06		64,46		66,86		69,26		71,66		1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
	Iklim Keamanan SD (Nilai)	61,21	72,49	73,14		73,81		74,47		75,13		75,79		1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
	Iklim Keamanan SMP (Nilai)	61,21	72,49	73,14		73,81		74,47		75,13		75,79		1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
	Iklim Kebinekaan SD (Nilai)	71,55	72,55	73,55		74,55		75,55		76,55		77,55		1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
	Iklim Kebinekaan SMP (Nilai)	70,31	71,31	72,31		73,31		74,31		75,31		76,31		1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan (APS) (%)	74,15	77,3	80		82,69		85,29		87,75		89,83		1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) (Persentase)	98,23	98,53	98,8		99,03		99,22		99,37		99,37		1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) (Persentase)	24,82	25,53	29,59		33,5		37,23		40,79		43,97		1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B (%)	62,71	62,97	63,38		65,65		73		81,81		90,63		1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan

	Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) (Persentase)	74,64	75,22	75,85		76,47		77,08		77,7		78,32		1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
	Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS) (Persentase)	58,06	59,92	63,06		68,65		70,01		71,2		72,4		1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV (%)	61,21	72,49	73,14		73,81		74,47		75,13		75,79		1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
	Rata - Rata Kemampuan Literasi SD Berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	60,05	62,55	65,05		67,55		70,05		72,55		75,05		1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai)	53,38	56,28	59,18		62,08		64,98		67,88		70,88		1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	68,93	70,03	71,13		72,23		73,33		74,43		75,53		1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	64,78	64,78	70		72,23		73,33		74,43		75,53		1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					280.000.000		280.000.000		280.000.000		280.000.000		280.000.000	
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	76	76	79	280.000.000	81	280.000.000	89	280.000.000	95	280.000.000	100	280.000.000	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					280.000.000		280.000.000		280.000.000		280.000.000		280.000.000	
Meningkatnya Mutu dan Distribusi Pendidik dan Distribusi Institusi Pendidikan	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	15,79	0	16,79	280.000.000	20,8	280.000.000	30,79	280.000.000	35,79	280.000.000	50,79	280.000.000	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					140.000.000		140.000.000		140.000.000		140.000.000		140.000.000	
Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (Persentase)	70	70	73	140.000.000	75	140.000.000	80	140.000.000	90	140.000.000	95	140.000.000	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Terlestarikannya Bahasa dan Sastra Daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (Persentase)	100	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					404.267.160.683		407.034.419.163		413.089.000.000		418.747.540.244		424.612.057.119	

1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					197.215.000.000		200.352.000.000		204.779.000.000		207.200.000.000		209.114.000.000	
Meningkatnya kualitas Pelayanan urusan Kesehatan	Persentase Ketepatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran (%)	70	72,3	75	124.050.000.000	80	124.657.000.000	85	125.039.000.000	90	125.418.000.000	95	125.834.000.000	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	88	90	91		92		93		94		95		1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Ketepatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran (%)	67	70	75		80		85		90		95		1.02.0.00.0.00.03.0000 - Rumah Sakit Umum Labuha
	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah (%)	65	70	75		80		85		90		95		1.02.0.00.0.00.03.0000 - Rumah Sakit Umum Labuha
	Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	72	75	78		82		85		88		90		1.02.0.00.0.00.03.0000 - Rumah Sakit Umum Labuha
Meningkatnya kualitas Pelayanan urusan Kesehatan-Rumah Sakit	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Bulan)	12	12	12	73.165.000.000	12	75.695.000.000	12	79.740.000.000	12	81.782.000.000	12	83.280.000.000	1.02.0.00.0.00.03.0000 - Rumah Sakit Umum Labuha
	Persentase Ketepatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran (%)	70	72	75		80		85		90		95		1.02.0.00.0.00.03.0000 - Rumah Sakit Umum Labuha
	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah (Persentase)	65	65	75		80		85		90		95		1.02.0.00.0.00.03.0000 - Rumah Sakit Umum Labuha
	Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	72	75	78		82		85		88		90		1.02.0.00.0.00.03.0000 - Rumah Sakit Umum Labuha
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					162.000.000.000		161.082.419.163		162.500.000.000		162.210.337.500		163.350.854.375	
Meningkatnya Masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	0	1,4	1,4	120.700.000.000	1,4	116.256.557.618	1,4	116.700.000.000	1,4	117.210.337.500	1,4	118.150.854.375	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	11,6	11,4	11,2		10,97		10,46		9,96		9,5		1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan

	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	22	30	40		50		60		70		80		1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Angka Kejadian Malaria per 1000 orang (Angka)	0,57	0	0		0		0		0		0		1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup. (Orang)	8,3	8,2	8,1		8		7,6		7,2		7		1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Jumlah infeksi baru HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksi. (Orang)	0,7	0,6	0,6		0,5		0,5		0,4		0,4		1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Penemuan Kasus TBC (%)	84	90	90		90		90		90		90		1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	83	85	87		88		90		92		95		1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (Persentase)	62	75	80		82		85		87		90		1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (Persentase)	6,2	6,2	6,2		6,2		30		40		50		1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase lanjut usia yang mandiri (%)	0	50	55		60		65		70		75		1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%)	7,5	7,4	7,3		7,2		7,1		7		6,9		1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	19,3	19,1	18,9		18,7		18,5		18,3		18,1		1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe. (Persentase)	8,5	8	7,5		7		6,5		5		4,5		1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	75	76,6	78		80		82		85		88		1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik. adil. dan terjangkau	Kematian akibat penyakit kardiovaskuler. kanker. diabetes atau penyakit pernapasan kronis (Persentase)	29	27	26	41.300.000.000	25	44.825.861.545	23	45.800.000.000	21	45.000.000.000	20	45.200.000.000	1.02.0.00.0.00.03.0000 - Rumah Sakit Umum Labuha
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	55	60	75		80		90		100		100		1.02.0.00.0.00.03.0000 - Rumah Sakit Umum Labuha
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (Persentase)	68	70	75		80		85		87		90		1.02.0.00.0.00.03.0000 - Rumah Sakit Umum Labuha

	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (Persentase)	85	87	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.03.0000 - Rumah Sakit Umum Labuha
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	42	45	55		65		75		85		90		1.02.0.00.0.00.03.0000 - Rumah Sakit Umum Labuha
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					44.352.160.683		44.800.000.000		44.950.000.000		48.457.202.744		51.147.202.744	
Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM kesehatan	Persentase Puskesmas dengan SDM Kesehatan Sesuai Standar (Persentase)	28	35	40	19.300.000.000	50	20.300.000.000	60	21.300.000.000	70	22.300.000.000	80	23.800.000.000	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (Persentase)	33	50	60		65		75		80		85		1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Rasio tenaga Kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (Persentase)	0,4	0,5	0,6		0,65		0,7		0,75		0,8		1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	45	50	60		70		80		85		90		1.02.0.00.0.00.03.0000 - Rumah Sakit Umum Labuha
Meningkatnya kuantitas kualitas dan pemerataan SDM Rumah Sakit	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	50	55	60	25.052.160.683	70	24.500.000.000	80	23.650.000.000	85	26.157.202.744	90	27.347.202.744	1.02.0.00.0.00.03.0000 - Rumah Sakit Umum Labuha
	Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (Persentase)	70	72	75		80		85		90		95		1.02.0.00.0.00.03.0000 - Rumah Sakit Umum Labuha
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					350.000.000		400.000.000		430.000.000		440.000.000		500.000.000	
Meningkatnya efektivitas program sediaan farmasi dan pangan olahan di Pemerintah Daerah	Penertiban Dan Pemenuhan Komitmen SPPIRT Sesuai Standar (Persentase)	60	65	70	350.000.000	75	400.000.000	80	430.000.000	85	440.000.000	90	500.000.000	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Apotek Dan Toko Obat Yang Mampu Memelihara Persyaratan Perizinan (Persentase)	50	55	65		75		85		90		95		1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Pangan Industri Rumah Tangga Aman Dan Bermutu (Persentase)	15	30	45		55		65		75		85		1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Dan Lintas Sektor Yang Ditindaklanjuti Oleh Pemerintah Daerah (Persentase)	50	55	65		75		86		90		95		1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Sarana IRTIP Yang Memenuhi Ketentuan (Persentase)	29	40	50		60		70		80		90		1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
														1.02.0.00.0.00.03.0000 - Rumah Sakit Umum Labuha

1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					350.000.000		400.000.000		430.000.000		440.000.000		500.000.000	
Meningkatnya Kemandirian Masyarakat dalam Berperilaku Hidup Sehat	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (Persentase)	15	20	25	350.000.000	75	400.000.000	35	430.000.000	40	440.000.000	50	500.000.000	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Penduduk Menerapkan Perilaku Hidup Sehat (Persentase)	35	40	45		50		55		60		65		1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase UKBM Aktif (Persentase)	70	75	80		85		90		95		100		1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					403.675.000.000		409.876.000.000		417.665.000.000		427.101.000.000		435.734.000.000	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.000.000.000		9.000.000.000		9.000.000.000		9.000.000.000		9.000.000.000	

Meningkatnya kualitas Pelayanan urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketepatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran (%)	100	100	100	9.000.000.000	100	9.000.000.000	100	9.000.000.000	100	9.000.000.000	100	9.000.000.000	1.03.0.00.0.00.04.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.03.0.00.0.00.04.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.03.0.00.0.00.04.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					15.500.000.000		15.500.000.000		15.500.000.000		15.500.000.000		15.500.000.000	
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Kapasitas Air Baku ((%))	0,57	0,57	0,6	15.500.000.000	0,62	15.500.000.000	0,63	15.500.000.000	0,64	15.500.000.000	0,65	15.500.000.000	1.03.0.00.0.00.04.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (Persentase)	27	31,82	36,64		46,3		55,96		65,62		72,28		1.03.0.00.0.00.04.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob (Persentase)	19,09	19,71	20,34		21,59		22,84		24,09		25,34		1.03.0.00.0.00.04.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (Persentase)	13,99	14,8	15,61		17,23		18,83		20,45		22,06		1.03.0.00.0.00.04.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					2.700.000.000		3.200.000.000		2.700.000.000		4.200.000.000		4.200.000.000	

Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap System Penyediaan Air Minum	Rumah tangga dengan akses air minum aman (%) (%)	44,01	44,53	45,06	2.700.000.000	45,58	3.200.000.000	46,1	2.700.000.000	46,63	4.200.000.000	47,15	4.200.000.000	1.04.1.03.2.10.05.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					6.300.000.000		6.300.000.000		6.300.000.000		6.300.000.000		6.300.000.000	
Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (Persentase)	56,54	56,76	56,98	6.300.000.000	57,2	6.300.000.000	57,42	6.300.000.000	57,63	6.300.000.000	57,85	6.300.000.000	1.04.1.03.2.10.05.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					12.000.000.000		12.000.000.000		13.000.000.000		13.000.000.000		13.000.000.000	
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	51,45	52,02	52,59	10.000.000.000	53,73	10.000.000.000	54,88	10.000.000.000	56,03	10.000.000.000	57,17	10.000.000.000	1.03.0.00.0.00.04.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	31,53	32,06	32,51	2.000.000.000	33,58	2.000.000.000	34,1	3.000.000.000	34,63	3.000.000.000	35,15	3.000.000.000	1.04.1.03.2.10.05.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					8.000.000.000		6.000.000.000		6.000.000.000		6.000.000.000		6.000.000.000	
Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	66,67	66,9	67,67	8.000.000.000	68,33	6.000.000.000	69,45	6.000.000.000	69,57	6.000.000.000	70,19	6.000.000.000	1.04.1.03.2.10.05.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					4.000.000.000		4.000.000.000		4.000.000.000		4.000.000.000		4.000.000.000	
Meningkatnya Bangunan dan Lingkungan yang Tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase)	20,12	21,95	22,5	4.000.000.000	23,46	4.000.000.000	23,87	4.000.000.000	24,23	4.000.000.000	35,11	4.000.000.000	1.04.1.03.2.10.05.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					344.975.000.000		352.676.000.000		359.965.000.000		367.901.000.000		376.534.000.000	
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Jumlah Jembatan Yang Di Bangun (Jembatan)	60	60	64	344.975.000.000	68	352.676.000.000	72	359.965.000.000	76	367.901.000.000	80	376.534.000.000	1.03.0.00.0.00.04.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Jumlah Jembatan Yang Di pelihara (Jembatan)	0	1	3		3		3		3		3		1.03.0.00.0.00.04.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Panjang Jalan yang Dibangun (Km)	13,07	28,74	46,92		70,21		100,03		134,07		164,25		1.03.0.00.0.00.04.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Panjang Jalan yang Direkonstruksi atau di Rehabilitasi (Km)	47,28	0	5,456		6,956		8,456		9,956		11,456		1.03.0.00.0.00.04.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Panjang Jalan yang Ditingkatkan (Struktur dan fungsi) (Km)	28,66	30,66	31,66		33,66		36,66		39,66		42,66		1.03.0.00.0.00.04.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000	

Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (Persentase)	0	0	50	400.000.000	60	400.000.000	70	400.000.000	80	400.000.000	90	400.000.000	1.03.0.00.0.00.04.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ruang	Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) (Dokumen)	1	1	1	800.000.000	1	800.000.000	1	800.000.000	1	800.000.000	1	800.000.000	1.03.0.00.0.00.04.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang (Kasus)	2	0	2		2		2		2		2		1.03.0.00.0.00.04.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					48.384.793.600		51.958.494.400		54.589.835.600		57.521.176.800		57.721.176.800	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.384.793.600		6.958.494.400		6.589.835.600		6.221.176.800		7.221.176.800	
Meningkatnya kualitas Pelayanan urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketepatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran (%)	100	100	100	6.384.793.600	100	6.958.494.400	100	6.589.835.600	100	6.221.176.800	100	7.221.176.800	1.04.1.03.2.10.05.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.04.1.03.2.10.05.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.04.1.03.2.10.05.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					3.800.000.000		4.300.000.000		3.800.000.000		3.300.000.000		3.300.000.000	
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota (%)	13,15	13,77	100	3.800.000.000	100	4.300.000.000	100	3.800.000.000	100	3.300.000.000	100	3.300.000.000	1.04.1.03.2.10.05.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota (%)	45	45,44	100		100		100		100		100		1.04.1.03.2.10.05.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000	
Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni) (%)	23,07	22,98	22,89	2.000.000.000	22,81	2.000.000.000	22,72	2.000.000.000	22,63	2.000.000.000	22,54	2.000.000.000	1.04.1.03.2.10.05.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					4.000.000.000		4.000.000.000		4.000.000.000		4.000.000.000		4.000.000.000	

Men ingatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	0,05	0,07	0,47	4.000.000.000	1,38	4.000.000.000	2,19	4.000.000.000	3,33	4.000.000.000	4,21	4.000.000.000	1.04.1.03.2.10.05.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					32.200.000.000		34.700.000.000		38.200.000.000		42.000.000.000		41.200.000.000	
Meningkatnya Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)	44,67	44,88	45,01	32.200.000.000	46,24	34.700.000.000	47,33	38.200.000.000	48,45	42.000.000.000	49,59	41.200.000.000	1.04.1.03.2.10.05.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	Konsumsi Listrik per Kapita (Kwh/Kapita)	1.218,1	1.218,1	1.220,6		1.320,5		1.380,7		1.440,8		1.520,8		1.04.1.03.2.10.05.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	Persentase Desa Yang Teraliri Listrik (%)	55,42	56,15	66,15		66,87		67,15		67,15		67,59		1.04.1.03.2.10.05.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	Presentase permukiman yang sudah dilengkapi yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan utilitas umum) (%)	31,56	32,65	33,32		43,44		44,77		45,68		46,89		1.04.1.03.2.10.05.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1.04.06 - PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN														
Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perencanaan dan perancangan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan menengah	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU (Persentase)	50	50	60		70		80		90		100		1.04.1.03.2.10.05.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					37.578.055.075		42.068.836.799		47.813.649.197		51.009.349.197		53.859.349.197	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					21.277.865.075		22.525.266.799		24.287.949.197		25.187.949.197		26.087.949.197	
Meningkatnya kualitas Pelayanan urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketepatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran (%)	100	0	100	21.277.865.075	100	22.525.266.799	100	24.287.949.197	100	25.187.949.197	100	26.087.949.197	1.05.0.00.0.00.06.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah (%)	100	0	100		100		100		100		100		1.05.0.00.0.00.06.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah

	Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	50	55	65		75		85		95		100		1.05.0.00.0.00.06.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Persentase Ketepatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.05.0.00.0.00.07.0000 - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.05.0.00.0.00.07.0000 - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.05.0.00.0.00.07.0000 - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Persentase Ketepatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran (%)	95	95	95		95		100		100		100		1.05.0.00.0.00.08.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja
	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.05.0.00.0.00.08.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja
	Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	60	60	70		75		80		85		90		1.05.0.00.0.00.08.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					5.600.000.000		7.600.000.000		9.600.000.000		11.200.000.000		12.800.000.000	
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap PERDA dan PERKADA	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	30	40	50	1.500.000.000	60	2.000.000.000	70	2.500.000.000	80	2.900.000.000	90	3.000.000.000	1.05.0.00.0.00.08.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja
Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase)	70	80	85	2.600.000.000	85	3.100.000.000	90	3.600.000.000	95	4.000.000.000	95	4.900.000.000	1.05.0.00.0.00.08.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja
Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	0	30	35	1.000.000.000	40	1.500.000.000	50	2.000.000.000	60	2.400.000.000	70	2.900.000.000	1.05.0.00.0.00.08.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja
Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	4	5	6	500.000.000	6	1.000.000.000	7	1.500.000.000	8	1.900.000.000	10	2.000.000.000	1.05.0.00.0.00.08.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					6.400.000.000		7.050.000.000		7.100.000.000		7.100.000.000		7.150.000.000	
Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	10	15	20	3.600.000.000	40	3.600.000.000	60	3.600.000.000	80	3.600.000.000	100	3.600.000.000	1.05.0.00.0.00.06.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Presentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana (%)	100	100	100	1.500.000.000	100	2.150.000.000	100	2.150.000.000	100	2.150.000.000	100	2.150.000.000	1.05.0.00.0.00.06.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	100	100	100	1.300.000.000	100	1.300.000.000	100	1.350.000.000	100	1.350.000.000	100	1.400.000.000	1.05.0.00.0.00.06.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					4.300.190.000		4.893.570.000		6.825.700.000		7.521.400.000		7.821.400.000	
Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)	80	80	85	4.300.190.000	90	4.893.570.000	95	6.825.700.000	95	7.521.400.000	100	7.821.400.000	1.05.0.00.0.00.07.0000 - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)	80	80	85		90		95		95		100		1.05.0.00.0.00.07.0000 - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					13.614.920.764		16.188.621.626		18.819.962.825		20.819.962.825		22.819.962.825	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.623.000.000		6.650.000.000		7.281.000.000		7.531.000.000		7.831.000.000	
Meningkatnya kualitas Pelayanan urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketepatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran (%)	50	50	60	5.623.000.000	70	6.650.000.000	80	7.281.000.000	90	7.531.000.000	100	7.831.000.000	1.06.0.00.0.00.09.0000 - Dinas Sosial
	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.09.0000 - Dinas Sosial
	Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	70	75	80		85		90		95		100		1.06.0.00.0.00.09.0000 - Dinas Sosial
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					1.662.000.000		2.150.000.000		2.650.000.000		3.000.000.000		3.348.962.825	
Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase SDM kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial (%)	58	60	60	1.662.000.000	65	2.150.000.000	70	2.650.000.000	75	3.000.000.000	80	3.348.962.825	1.06.0.00.0.00.09.0000 - Dinas Sosial
	Persentase lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang meningkatkan kualitasnya dalam pelayanan sosial (%)	45	50	50		55		60		65		70		1.06.0.00.0.00.09.0000 - Dinas Sosial
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					2.451.000.000		2.800.000.000		3.300.000.000		3.800.000.000		4.300.000.000	
Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhannya (%)	0	23,5	23,5	2.451.000.000	24,55	2.800.000.000	25,6	3.300.000.000	26,65	3.800.000.000	27,7	4.300.000.000	1.06.0.00.0.00.09.0000 - Dinas Sosial
	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi (%)	45	46	46		47		48		49		50		1.06.0.00.0.00.09.0000 - Dinas Sosial

1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					2.578.920.764		2.938.621.626		3.438.962.825		3.938.962.825		4.390.000.000	
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Daerah Yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin (%)	40	45	45	2.578.920.764	50	2.938.621.626	55	3.438.962.825	60	3.938.962.825	65	4.390.000.000	1.06.0.00.0.00.09.0000 - Dinas Sosial
	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi (Persentase)	0	50	50		55		60		65		70		1.06.0.00.0.00.09.0000 - Dinas Sosial
	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	48	49	49		50		51		52		53		1.06.0.00.0.00.09.0000 - Dinas Sosial
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					1.300.000.000		1.650.000.000		2.150.000.000		2.550.000.000		2.950.000.000	
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	30	30	35	1.300.000.000	40	1.650.000.000	50	2.150.000.000	60	2.550.000.000	70	2.950.000.000	1.06.0.00.0.00.09.0000 - Dinas Sosial
	presentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial (%)	40	40	40		50		60		70		80		1.06.0.00.0.00.09.0000 - Dinas Sosial
	Persentase Masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya (%)	0	21	21		22		23		24		25		1.06.0.00.0.00.09.0000 - Dinas Sosial
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					12.809.141.360		15.278.271.542		22.800.000.000		26.800.000.000		28.019.225.482	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.904.570.680		10.478.271.542		15.000.000.000		17.000.000.000		18.109.612.741	
Meningkatnya kualitas pelayanan urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketepatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran (%)	85	85	100	8.904.570.680	100	10.478.271.542	100	15.000.000.000	100	17.000.000.000	100	18.109.612.741	3.32.2.07.0.00.23.0000 - Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		3.32.2.07.0.00.23.0000 - Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		3.32.2.07.0.00.23.0000 - Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					280.000.000		100.000.000		300.000.000		300.000.000		409.612.741	
Terkelolanya informasi Tenaga Kerja	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Renstra dan Renja SKPD mengacu pada dokumen RTKD (%)	2	2	2	280.000.000	2	100.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2	409.612.741	3.32.2.07.0.00.23.0000 - Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					1.500.000.000		2.000.000.000		3.000.000.000		4.000.000.000		4.000.000.000	
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal ((%))	17	17	18	1.500.000.000	18	2.000.000.000	19	3.000.000.000	20	4.000.000.000	21	4.000.000.000	3.32.2.07.0.00.23.0000 - Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (%)	20	20	25		30		50		100		100		3.32.2.07.0.00.23.0000 - Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					1.124.570.680		1.200.000.000		3.000.000.000		4.000.000.000		4.000.000.000	
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri (Orang)	150	150	200	1.124.570.680	200	1.200.000.000	200	3.000.000.000	200	4.000.000.000	200	4.000.000.000	3.32.2.07.0.00.23.0000 - Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					1.000.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000	
Meningkatnya Pekerja Yang Terlindungi	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	23	23	20	1.000.000.000	25	1.500.000.000	30	1.500.000.000	30	1.500.000.000	30	1.500.000.000	3.32.2.07.0.00.23.0000 - Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	60,12	68,96	68,96		74,61		89,53		100		100		3.32.2.07.0.00.23.0000 - Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					8.995.080.838		11.068.781.700		12.500.122.899		13.700.122.899		14.541.122.899	
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.845.080.838		7.953.781.700		9.656.872.899		10.530.210.399		11.040.964.775	
Meningkatnya kualitas Pelayanan urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketepatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran (%)	100	100	100	6.845.080.838	100	7.953.781.700	100	9.656.872.899	100	10.530.210.399	100	11.040.964.775	2.08.2.14.0.00.10.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.08.2.14.0.00.10.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
	Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.08.2.14.0.00.10.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					600.000.000		1.300.000.000		910.000.000		1.015.000.000		1.120.000.000	

Meningkatnya Kualitas dan Efektifitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Nilai Penghargaan Parahita Ekapraya Daerah (Nilai)	0	0-0	400-500	600.000.000	501-550	1.300.000.000	551-600	910.000.000	601-650	1.015.000.000	651-799	1.120.000.000	2.08.2.14.0.00.10.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	5,45	0	3,7		4		5		6		6		2.08.2.14.0.00.10.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	47,72	47,72	47,9		48		48,5		49,1		49,1		2.08.2.14.0.00.10.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					250.000.000		300.000.000		350.000.000		400.000.000		450.000.000	
Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	100	250.000.000	100	300.000.000	100	350.000.000	100	400.000.000	100	450.000.000	2.08.2.14.0.00.10.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					100.000.000		100.000.000		100.000.000		150.000.000		200.000.000	
MENINGKATNYA KUALITAS KELUARGA DALAM MENDUKUNG KESETARAAN GENDER, PEMENUHAN HAK, SERTA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	-	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000	2.08.2.14.0.00.10.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					50.000.000		50.000.000		50.000.000		100.000.000		150.000.000	
Meningkatnya Pemanfaatan Data Gender dan Anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	6	6	11	50.000.000	13	50.000.000	15	50.000.000	17	100.000.000	18	150.000.000	2.08.2.14.0.00.10.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					500.000.000		577.500.000		606.375.000		636.693.750		668.528.437	
Terjaminnya Pemenuhan Hak Semua Anak Secara Komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	-	-	6,97	500.000.000	7	577.500.000	7	606.375.000	7	636.693.750	7	668.528.437	2.08.2.14.0.00.10.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
	Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) (Nilai)	430	370	500		600		650		700		800		2.08.2.14.0.00.10.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					650.000.000		787.500.000		826.875.000		868.218.750		911.629.687	

Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Pelantaran, Perkawinan dan Perlakuan Salah Lainnya Terhadap Anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	-	65	66,34	650.000.000	68	787.500.000	70	826.875.000	72	868.218.750	73	911.629.687	2.08.2.14.0.00.10.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		2.08.2.14.0.00.10.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					8.934.020.000		8.860.000.000		9.324.000.000		9.434.500.000		9.505.000.000	
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					3.531.630.000		3.545.000.000		3.964.000.000		3.994.500.000		4.020.000.000	
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan) (%)	100	100	100	3.531.630.000	100	3.545.000.000	100	3.964.000.000	100	3.994.500.000	100	4.020.000.000	2.09.3.27.0.00.11.0000 - Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					4.702.390.000		4.615.000.000		4.660.000.000		4.740.000.000		4.785.000.000	
Meningkatnya diverifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	57,17	57,17	57,17	4.702.390.000	59	4.615.000.000	60	4.660.000.000	62	4.740.000.000	63	4.785.000.000	2.09.3.27.0.00.11.0000 - Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					275.000.000		275.000.000		275.000.000		275.000.000		275.000.000	
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	1,3	1,3	1,2	275.000.000	1	275.000.000	1	275.000.000	0	275.000.000	0	275.000.000	2.09.3.27.0.00.11.0000 - Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					425.000.000		425.000.000		425.000.000		425.000.000		425.000.000	
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)	55	55	60	425.000.000	75	425.000.000	85	425.000.000	95	425.000.000	100	425.000.000	2.09.3.27.0.00.11.0000 - Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					2.000.000.000		2.500.000.000		3.000.000.000		3.500.000.000		4.000.000.000	
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					2.000.000.000		2.500.000.000		3.000.000.000		3.500.000.000		4.000.000.000	

Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Tanah Objek Reforma Agraria	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal Kelebihan dari Tanah Maksimum dan Tanah Absentee (%)	0	0	5	2.000.000.000	6	2.500.000.000	7	3.000.000.000	8	3.500.000.000	9	4.000.000.000	1.04.1.03.2.10.05.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
--	--	---	---	---	---------------	---	---------------	---	---------------	---	---------------	---	---------------	---

2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					35.360.000.000		36.590.000.000		37.415.000.000		38.255.000.000		38.270.000.000	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.790.000.000		8.360.000.000		8.975.000.000		9.535.000.000		10.040.000.000	
Meningkatnya kualitas Pelayanan urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketepatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran (%)	100	100	82	7.790.000.000	85	8.360.000.000	90	8.975.000.000	95	9.535.000.000	100	10.040.000.000	2.11.3.28.0.00.12.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah (%)	100	100	82		85		90		95		100		2.11.3.28.0.00.12.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
	Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	82		85		90		95		100		2.11.3.28.0.00.12.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					500.000.000		550.000.000		550.000.000		1.600.000.000		1.000.000.000	
Meningkatnya Efektivitas Kajian Lingkungan Untuk Memitigasi Dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	50	50	60	500.000.000	70	550.000.000	80	550.000.000	90	1.600.000.000	100	1.000.000.000	2.11.3.28.0.00.12.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					3.300.000.000		3.300.000.000		3.400.000.000		3.450.000.000		3.550.000.000	
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase penurunan sampah terbuang ke laut (%)	50	50	60	3.300.000.000	65	3.300.000.000	70	3.400.000.000	75	3.450.000.000	80	3.550.000.000	2.11.3.28.0.00.12.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					900.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		900.000.000	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase RTH (Persentase)	25	25	35	900.000.000	40	500.000.000	45	500.000.000	50	500.000.000	55	900.000.000	2.11.3.28.0.00.12.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					1.250.000.000		1.250.000.000		1.250.000.000		1.250.000.000		1.250.000.000	
Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	18	18	25	1.250.000.000	35	1.250.000.000	45	1.250.000.000	55	1.250.000.000	65	1.250.000.000	2.11.3.28.0.00.12.0000 - Dinas Lingkungan Hidup

2.11.06 – PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					1.350.000.000		1.050.000.000		1.050.000.000		1.050.000.000		1.050.000.000	
Meningkatnya Kepatuhan Usaha Dan/Atau Kegiatan Terhadap Persetujuan Lingkungan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	78,95	78,95	85	1.350.000.000	87,5	1.050.000.000	90	1.050.000.000	95	1.050.000.000	100	1.050.000.000	2.11.3.28.0.00.12.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Meningkatnya kapasitas mha dan kearifan lokal. Pengetahuan tradisional dan hak mha yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	0	0	10	100.000.000	15	100.000.000	20	100.000.000	25	100.000.000	30	100.000.000	2.11.3.28.0.00.12.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					900.000.000		900.000.000		900.000.000		900.000.000		900.000.000	
Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	0	0	10	900.000.000	15	900.000.000	20	900.000.000	25	900.000.000	30	900.000.000	2.11.3.28.0.00.12.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Meningkatnya Kinerja Pemangku Kepentingan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	0	0	10	50.000.000	15	50.000.000	20	50.000.000	25	50.000.000	30	50.000.000	2.11.3.28.0.00.12.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	
Meningkatnya Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	22	22	30	500.000.000	30	500.000.000	30	500.000.000	30	500.000.000	30	500.000.000	2.11.3.28.0.00.12.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11 – PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					18.720.000.000		20.030.000.000		20.140.000.000		19.320.000.000		18.930.000.000	

Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	7,575	7,727	7,879	18.720.000.000	8,031	20.030.000.000	8,183	20.140.000.000	8,335	19.320.000.000	8,487	18.930.000.000	2.11.3.28.0.00.12.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					14.180.596.265		16.754.297.127		19.385.638.326		21.385.638.326		23.385.638.326	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.450.000.000		9.950.000.000		10.260.000.000		11.360.000.000		12.260.000.000	
Meningkatnya kualitas Pelayanan urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketepatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran (%)	90	90	90	9.450.000.000	90	9.950.000.000	92	10.260.000.000	92	11.360.000.000	94	12.260.000.000	2.12.0.00.0.00.13.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.13.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	90	90	90		90		90		90		90		2.12.0.00.0.00.13.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					1.850.000.000		2.424.000.000		3.124.000.000		3.374.000.000		3.674.000.000	
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan E-KTP (%)	99,4	95	95	1.850.000.000	95	2.424.000.000	96	3.124.000.000	96	3.374.000.000	97	3.674.000.000	2.12.0.00.0.00.13.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Kepemilikan Identitas kependudukan digital (%)	28,5	30	30		35		40		45		50		2.12.0.00.0.00.13.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas anak (%)	34,07	40	60		62		64		66		68		2.12.0.00.0.00.13.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					1.630.596.265		2.130.297.127		2.830.638.326		3.080.638.326		3.380.638.326	
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase akta Perceraian yang diterbitkan (%)	100	100	100	1.630.596.265	100	2.130.297.127	100	2.830.638.326	100	3.080.638.326	100	3.380.638.326	2.12.0.00.0.00.13.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran bagi anak usia 0-17 Tahun (%)	98	93	98		98		98		98		98		2.12.0.00.0.00.13.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Kepemilikan Akta Nikah (%)	60	90	90		90		95		95		100		2.12.0.00.0.00.13.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Pencatatan Akta Kematian (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.13.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					750.000.000		1.250.000.000		1.950.000.000		2.200.000.000		2.450.000.000	
Meningkatnya Pemanfaatan informasi Kependudukan	Persentasi Capaian Perjanjian Kerja sama (PKS) (OPD)	75	80	67	750.000.000	75	1.250.000.000	83	1.950.000.000	92	2.200.000.000	100	2.450.000.000	2.12.0.00.0.00.13.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					500.000.000		1.000.000.000		1.221.000.000		1.371.000.000		1.621.000.000	

Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan	cakupan pengelolaan profil kependudukan (%)	100	100	100	500.000.000	100	1.000.000.000	100	1.221.000.000	100	1.371.000.000	100	1.621.000.000	2.12.0.00.0.00.13.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					11.291.241.000		13.864.942.000		17.496.283.000		17.813.283.000		21.496.283.000	
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.053.241.000		8.175.792.000		10.580.283.000		11.981.283.000		13.586.283.000	
Meningkatnya kualitas Pelayanan urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketepatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran (%)	100	100	100	6.053.241.000	100	8.175.792.000	100	10.580.283.000	100	11.981.283.000	100	13.586.283.000	2.13.0.00.0.00.14.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.13.0.00.0.00.14.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.13.0.00.0.00.14.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					900.000.000		900.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	
Presentase Fasilitasi Penataan Desa (Persentase)		100	100	100	900.000.000	100	900.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	2.13.0.00.0.00.14.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					500.000.000		500.000.000		750.000.000		850.000.000		850.000.000	
Meningkatnya efektifitas kerja sama Desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (Persentase)	100	100	100	500.000.000	100	500.000.000	100	750.000.000	100	850.000.000	100	850.000.000	2.13.0.00.0.00.14.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					1.198.000.000		1.333.150.000		1.643.000.000		187.000.000		2.160.000.000	
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintah Desa	Jumlah Desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa berbasis digital (Desa)	50	50	50	1.198.000.000	100	1.333.150.000	150	1.643.000.000	200	187.000.000	249	2.160.000.000	2.13.0.00.0.00.14.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Jumlah Desa yang menerapkan sistem informasi desa berbasis Prodeskel/Epdeskel dalam perencanaan dan Pelaporan (Desa)	10	10	10		25		45		75		100		2.13.0.00.0.00.14.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Jumlah Desa yang tertib dalam pengelolaan Aset Desa pada Aplikasi Sipades (Desa)	15	15	15		30		45		70		100		2.13.0.00.0.00.14.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	249	249	249		249		249		249		249		2.13.0.00.0.00.14.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Persentase BUM Desa Maju (Persentase)	5	5	5		10		15		15		25		2.13.0.00.0.00.14.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					2.640.000.000		2.956.000.000		3.523.000.000		3.795.000.000		3.900.000.000	
Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan	Jumlah fasilitasi lembaga posyandu dalam pelaksanaan 6 bidang SPM (Lembaga)	249	249	249	2.640.000.000	249	2.956.000.000	249	3.523.000.000	249	3.795.000.000	249	3.900.000.000	2.13.0.00.0.00.14.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Penilaian Teknologi Tepat Guna (Kelompok)	3	3	3		5		9		13		15		2.13.0.00.0.00.14.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase)	249	249	249		249		249		249		249		2.13.0.00.0.00.14.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	249	249	249		249		249		249		249		2.13.0.00.0.00.14.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					7.800.000.000		8.300.000.000		9.500.000.000		9.422.000.000		10.459.000.000	
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	
Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun) (Angka)	25	47,5	45,34	1.000.000.000	43	1.000.000.000	41	1.000.000.000	39	1.000.000.000	38	1.000.000.000	2.08.2.14.0.00.10.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun (Rata-rata Anak per Wanita)	2,62	2,62	2,62		3		3		3		3		2.08.2.14.0.00.10.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					4.800.000.000		5.000.000.000		5.800.000.000		5.622.000.000		6.500.000.000	
Meningkatkan Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri (Persentase)	4	5,9	7,45	4.800.000.000	9	5.000.000.000	12	5.800.000.000	15	5.622.000.000	18	6.500.000.000	2.08.2.14.0.00.10.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) (Persentase)	9,8	5,89	4,62		4		4		4		4		2.08.2.14.0.00.10.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (%)	54,8	65	70		75		78		80		85		2.08.2.14.0.00.10.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB

2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					2.000.000.000		2.300.000.000		2.700.000.000		2.800.000.000		2.959.000.000	
Meningkatkan Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Lansia Berdaya (Indeks)	63,59	64,64	65,7	2.000.000.000	67	2.300.000.000	68	2.700.000.000	69	2.800.000.000	70	2.959.000.000	2.08.2.14.0.00.10.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja (Indeks)	80,26	81,19	82,12		83		84		85		86		2.08.2.14.0.00.10.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					68.972.994.706		43.191.731.817		66.053.165.477		55.759.417.374		58.094.576.524	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					20.219.340.116		11.112.037.817		12.906.821.077		14.197.488.534		15.756.163.500	
Meningkatnya kualitas Pelayanan urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketepatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran (%)	100	100	100	20.219.340.116	100	11.112.037.817	100	12.906.821.077	100	14.197.488.534	100	15.756.163.500	2.15.0.00.0.00.15.0000 - Dinas Perhubungan
	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.15.0.00.0.00.15.0000 - Dinas Perhubungan
	Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.15.0.00.0.00.15.0000 - Dinas Perhubungan
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					9.283.654.590		7.079.994.000		24.626.674.400		8.948.291.840		9.724.776.024	
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas Darat (Persentase)	50	50	78	9.283.654.590	80	7.079.994.000	83	24.626.674.400	86	8.948.291.840	90	9.724.776.024	2.15.0.00.0.00.15.0000 - Dinas Perhubungan
	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	24,3	24,3	30,37		39,64		48,91		57,23		70,75		2.15.0.00.0.00.15.0000 - Dinas Perhubungan
	Persentase Tingkat Kecelakaan Transportasi Jalan (%)	65	70	0,5		0,45		0,4		0,35		0,3		2.15.0.00.0.00.15.0000 - Dinas Perhubungan
	Tersedianya Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) dengan Akreditasi Minimal B (Unit)	50	50	50		75		85		88		95		2.15.0.00.0.00.15.0000 - Dinas Perhubungan
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					39.470.000.000		24.999.700.000		28.519.670.000		32.613.637.000		32.613.637.000	
Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Jumlah Pelabuhan Laut yang terbangun/direhabilitasi (Pelabuhan)	8	6	6	39.470.000.000	6	24.999.700.000	6	28.519.670.000	6	32.613.637.000	6	32.613.637.000	2.15.0.00.0.00.15.0000 - Dinas Perhubungan
	Jumlah pelabuhan Penyebrangan (Pelabuhan)	5	5	6		6		6		6		6		2.15.0.00.0.00.15.0000 - Dinas Perhubungan

	Konektivitas Laut (Unit)	50	55	75		78		82		86		90		2.15.0.00.0.00.15.0000 - Dinas Perhubungan
	Persentase Tingkat Kecelakaan Transportasi Laut (%)	64	65	5		4		3		2		1		2.15.0.00.0.00.15.0000 - Dinas Perhubungan
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					19.638.554.183		21.038.534.183		22.138.534.183		23.238.534.183		24.428.554.183	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10.000.000.000		11.000.000.000		12.000.000.000		13.000.000.000		14.000.000.000	
Meningkatnya kualitas Pelayanan urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketepatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran (%)	100	100	100	10.000.000.000	100	11.000.000.000	100	12.000.000.000	100	13.000.000.000	100	14.000.000.000	2.16.2.20.2.21.16.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.16.2.20.2.21.16.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.16.2.20.2.21.16.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					2.523.366.400		2.623.346.400		2.623.346.400		2.623.346.400		2.713.366.400	
Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Persentase Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap akses kualitas informasi publik pemeritnah daerah (Survei) (%)	70	70	78	2.523.366.400	81	2.623.346.400	84	2.623.346.400	87	2.623.346.400	90	2.713.366.400	2.16.2.20.2.21.16.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					7.115.187.783		7.415.187.783		7.515.187.783		7.615.187.783		7.715.187.783	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks SPBE (%)	2,5	2,6	2,8	7.115.187.783	3	7.415.187.783	3,2	7.515.187.783	3,4	7.615.187.783	3,6	7.715.187.783	2.16.2.20.2.21.16.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					16.119.660.389		17.500.000.000		18.909.702.450		19.959.702.450		20.259.702.450	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.469.660.389		9.500.000.000		9.600.000.000		9.659.702.450		9.459.702.450	
Meningkatnya kualitas Pelayanan urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketepatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran (%)	100	100	100	9.469.660.389	100	9.500.000.000	100	9.600.000.000	100	9.659.702.450	100	9.459.702.450	2.17.3.31.3.30.17.0000 - Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.17.3.31.3.30.17.0000 - Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

	Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.17.3.31.3.30.17.0000 - Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					350.000.000		350.000.000		400.000.000		450.000.000		450.000.000	
Meningkatnya Kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Pertumbuhan volume usaha koperasi (%)	2,5	2,5	2,5	350.000.000	2,5	350.000.000	2,5	400.000.000	2,5	450.000.000	2,5	450.000.000	2.17.3.31.3.30.17.0000 - Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					500.000.000		550.000.000		650.000.000		750.000.000		550.000.000	
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	Presentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (%)	25	25	25	500.000.000	75	550.000.000	77,15	650.000.000	79	750.000.000	82,12	550.000.000	2.17.3.31.3.30.17.0000 - Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					350.000.000		500.000.000		650.000.000		400.000.000		400.000.000	
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif (%)	0	0	0	350.000.000	0	500.000.000	0	650.000.000	0	400.000.000	0	400.000.000	2.17.3.31.3.30.17.0000 - Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					500.000.000		500.000.000		600.000.000		550.000.000		550.000.000	
Meningkatnya Kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan (%)	25	25	25	500.000.000	18	500.000.000	20	600.000.000	22	550.000.000	23	550.000.000	2.17.3.31.3.30.17.0000 - Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					350.000.000		500.000.000		600.000.000		650.000.000		550.000.000	
Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	0	0	0	350.000.000	100	500.000.000	100	600.000.000	100	650.000.000	100	550.000.000	2.17.3.31.3.30.17.0000 - Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					3.000.000.000		3.100.000.000		3.600.000.000		4.500.000.000		5.000.000.000	
Meningkatnya Kapasitas UMKM yang tangguh dan Mandiri	Presentase UMKM yang mendapatkan pemberdayaan (%)	45	45	45,5	3.000.000.000	47	3.100.000.000	50	3.600.000.000	55	4.500.000.000	55	5.000.000.000	2.17.3.31.3.30.17.0000 - Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					1.600.000.000		2.500.000.000		2.809.702.450		3.000.000.000		3.300.000.000	
Meningkatnya daya saing UMKM	Presentase UMKM yang mendapatkan pemberdayaan (%)	0	0	50	1.600.000.000	100	2.500.000.000	150	2.809.702.450	200	3.000.000.000	250	3.300.000.000	2.17.3.31.3.30.17.0000 - Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					16.399.239.337		18.972.940.199		22.604.281.398		24.604.281.398		26.603.355.325	

2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.000.000.000		9.450.940.199		10.318.625.000		10.835.331.398		10.939.574.398	
Meningkatnya kualitas Pelayanan urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketepatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran (%)	100	0	100	9.000.000.000	100	9.450.940.199	100	10.318.625.000	100	10.835.331.398	100	10.939.574.398	2.18.0.00.0.00.18.0000 - Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah (%)	100	0	100		100		100		100		100		2.18.0.00.0.00.18.0000 - Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	0	100		100		100		100		100		2.18.0.00.0.00.18.0000 - Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					2.000.000.000		2.550.000.000		2.677.500.000		3.181.000.000		3.540.050.000	
Meningkatnya Kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	0	0	0	2.000.000.000	0	2.550.000.000	0	2.677.500.000	0	3.181.000.000	0	3.540.050.000	2.18.0.00.0.00.18.0000 - Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					2.300.000.000		3.100.000.000		3.592.402.489		3.972.000.000		4.777.000.927	
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	100	100	100	2.300.000.000	100	3.100.000.000	100	3.592.402.489	100	3.972.000.000	100	4.777.000.927	2.18.0.00.0.00.18.0000 - Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					1.350.000.000		2.000.000.000		2.552.000.000		2.779.600.000		3.118.580.000	
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	100	0	100	1.350.000.000	100	2.000.000.000	100	2.552.000.000	100	2.779.600.000	100	3.118.580.000	2.18.0.00.0.00.18.0000 - Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					1.000.000.000		1.050.000.000		2.247.000.000		2.559.350.000		2.687.300.000	
Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Kerja Sama Penanaman Modal yang Ditindaklanjuti (Persentase)	100	100	100	1.000.000.000	100	1.050.000.000	100	2.247.000.000	100	2.559.350.000	100	2.687.300.000	2.18.0.00.0.00.18.0000 - Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					749.239.337		822.000.000		1.216.753.909		1.277.000.000		1.540.850.000	
Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	presentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal (Persentase)	100	100	100	749.239.337	100	822.000.000	100	1.216.753.909	100	1.277.000.000	100	1.540.850.000	2.18.0.00.0.00.18.0000 - Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					17.331.055.333		19.904.756.195		23.536.097.394		25.536.097.394		27.536.097.394	
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.420.000.000		6.741.000.000		7.078.050.000		7.431.952.500		7.803.550.125	

Meningkatnya kualitas Pelayanan urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketepatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran (%)	99,23	0	100	6.420.000.000	100	6.741.000.000	100	7.078.050.000	100	7.431.952.500	100	7.803.550.125	2.19.0.00.0.00.19.0000 - Dinas Pemuda dan Olahraga
	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah (%)	100	0	100		100		100		100		100		2.19.0.00.0.00.19.0000 - Dinas Pemuda dan Olahraga
	Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	92,64	0	100		100		100		100		100		2.19.0.00.0.00.19.0000 - Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					1.500.000.000		2.000.000.000		3.000.000.000		4.000.000.000		4.500.000.000	
Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	Jumlah Sarana Prasarana Olahraga Yang Terbangun (Unit)	3	2	4	1.500.000.000	6	2.000.000.000	8	3.000.000.000	10	4.000.000.000	12	4.500.000.000	2.19.0.00.0.00.19.0000 - Dinas Pemuda dan Olahraga
	Prestasi pada Event Olahraga Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional (Orang)	70	75	80		85		90		95		100		2.19.0.00.0.00.19.0000 - Dinas Pemuda dan Olahraga
	Rasio Wirausaha Muda (Rasio)	99	20	25		30		35		40		45		2.19.0.00.0.00.19.0000 - Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					8.411.055.333		10.163.756.195		12.458.047.394		13.104.144.894		14.232.547.269	
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (Persentase)	-	-	0	8.411.055.333	0	10.163.756.195	0	12.458.047.394	0	13.104.144.894	0	14.232.547.269	2.19.0.00.0.00.19.0000 - Dinas Pemuda dan Olahraga
	Persentase keterlibatan masyarakat dalam olahraga (%)	40	35	40		45		50		60		70		2.19.0.00.0.00.19.0000 - Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	
Meningkatnya Kualitas Kepramukaan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kepramukaan (%)	20	25	30	1.000.000.000	35	1.000.000.000	40	1.000.000.000	45	1.000.000.000	50	1.000.000.000	2.19.0.00.0.00.19.0000 - Dinas Pemuda dan Olahraga
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					754.433.000		754.433.000		754.433.000		754.433.000		754.433.000	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					754.433.000		754.433.000		754.433.000		754.433.000		754.433.000	
Tercapainya kolaborasi integrasi dan starisasi dalam penyelenggaraan sistem statistik nasional	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2,91	2,93	2,94	754.433.000	2,95	754.433.000	2,96	754.433.000	2,97	754.433.000	2,98	754.433.000	2.16.2.20.2.21.16.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	Persentase Publikasi Data Statistik Sektorial Daerah (DSSD) dalam Modul E-Walidata SIPD (Persentase)	75	80	85		90		95		100		100		2.16.2.20.2.21.16.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					768.791.000		768.791.000		768.791.000		768.791.000		768.791.000	

2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					768.791.000		768.791.000		768.791.000		768.791.000		768.791.000	
Meningkatnya kecamatan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)	1,5	2	2,5	768.791.000	3	768.791.000	3,5	768.791.000	4	768.791.000	4,5	768.791.000	2.16.2.20.2.21.16.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					3.200.000.000		4.159.543.943		4.567.521.140		4.895.897.196		5.571.874.010	
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					1.700.000.000		2.384.543.943		2.603.771.140		2.833.959.696		3.191.248.658	
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	50	50	55	1.700.000.000	60	2.384.543.943	65	2.603.771.140	70	2.833.959.696	75	3.191.248.658	3.26.2.22.0.00.22.0000 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					500.000.000		725.000.000		861.250.000		904.312.500		1.165.119.102	
Meningkatnya Kesenian Tradisional yang dikembangkan dan dimanfaatkan	Persentase Kesenian Tradisional yang Dikembangkan dan dimanfaatkan (%)	50	50	55	500.000.000	60	725.000.000	65	861.250.000	70	904.312.500	75	1.165.119.102	3.26.2.22.0.00.22.0000 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					1.000.000.000		1.050.000.000		1.102.500.000		1.157.625.000		1.215.506.250	
Meningkatnya Warisan Budaya yang Dilestarikan dan Dikelola	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Persentase)	11	11	13	1.000.000.000	15	1.050.000.000	18	1.102.500.000	21	1.157.625.000	24	1.215.506.250	3.26.2.22.0.00.22.0000 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					8.043.966.000		9.117.667.000		10.699.008.000		11.799.008.000		12.899.008.000	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.243.966.000		6.617.667.000		7.199.008.000		7.699.008.000		8.199.008.000	
Meningkatnya kualitas Pelayanan urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketepatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran (%)	70	73	75	6.243.966.000	77	6.617.667.000	80	7.199.008.000	83	7.699.008.000	85	8.199.008.000	2.23.2.24.0.00.20.0000 - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah (%)	70	73	75		77		80		83		85		2.23.2.24.0.00.20.0000 - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.23.2.24.0.00.20.0000 - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					1.500.000.000		2.000.000.000		2.350.000.000		2.650.000.000		2.950.000.000	
Meningkatnya Layananan Perpustakaan Sesuai standar nasional perpustakaan	Nilai tingkat kegembiraan membaca masyarakat (%)	62,1	62,1	63,2	1.500.000.000	65,1	2.000.000.000	67,05	2.350.000.000	68,25	2.650.000.000	70,05	2.950.000.000	2.23.2.24.0.00.20.0000 - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					300.000.000		500.000.000		1.150.000.000		1.450.000.000		1.750.000.000	
Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	0	0	2	300.000.000	5	500.000.000	8	1.150.000.000	10	1.450.000.000	12	1.750.000.000	2.23.2.24.0.00.20.0000 - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					1.500.000.000		3.000.000.000		4.050.000.000		4.950.000.000		5.850.000.000	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					700.000.000		1.200.000.000		1.550.000.000		1.850.000.000		2.150.000.000	
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)	45,5	45,5	50	700.000.000	55	1.200.000.000	60	1.550.000.000	65	1.850.000.000	70	2.150.000.000	2.23.2.24.0.00.20.0000 - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					500.000.000		1.000.000.000		1.350.000.000		1.650.000.000		1.950.000.000	
Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)	60	60	65	500.000.000	70	1.000.000.000	75	1.350.000.000	80	1.650.000.000	85	1.950.000.000	2.23.2.24.0.00.20.0000 - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP					300.000.000		800.000.000		1.150.000.000		1.450.000.000		1.750.000.000	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (Persentase)	100	100	100	300.000.000	100	800.000.000	100	1.150.000.000	100	1.450.000.000	100	1.750.000.000	2.23.2.24.0.00.20.0000 - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					25.959.692.600		30.533.393.462		34.164.734.661		36.164.734.661		41.164.734.661	
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.109.692.600		5.633.393.462		6.214.734.661		6.314.734.661		7.014.734.661	
Meningkatnya kualitas Pelayanan urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketepatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran (%)	100	100	100	7.109.692.600	100	5.633.393.462	100	6.214.734.661	100	6.314.734.661	100	7.014.734.661	3.25.0.00.0.00.21.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan
	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		3.25.0.00.0.00.21.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan
	Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		3.25.0.00.0.00.21.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					15.000.000.000		20.200.000.000		22.500.000.000		23.600.000.000		26.200.000.000	
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	45.044,49	45.945,38	46.864,29	15.000.000.000	47.801,57	20.200.000.000	48.757,61	22.500.000.000	49.732,76	23.600.000.000	5.070,791	26.200.000.000	3.25.0.00.0.00.21.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					2.400.000.000		3.000.000.000		3.500.000.000		3.750.000.000		5.500.000.000	

Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	1.351,4	1.364,91	1.378,56	2.400.000.000	1.329,35	3.000.000.000	1.406,27	3.500.000.000	1.420,33	3.750.000.000	1.434,39	5.500.000.000	3.25.0.00.0.00.21.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Pengolahan dan Pembudidayaan Terhadap Aturan Pengelolaan Sumber daya Perikanan					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	3.25.0.00.0.00.21.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					1.350.000.000		1.600.000.000		1.850.000.000		2.400.000.000		2.350.000.000	
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	63	65	67	1.350.000.000	68	1.600.000.000	69	1.850.000.000	70	2.400.000.000	71	2.350.000.000	3.25.0.00.0.00.21.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					13.783.138.384		16.672.295.304		19.084.409.305		20.854.220.749		22.496.931.787	
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.087.497.611		6.591.872.492		6.921.466.116		7.267.539.422		7.830.916.394	
Meningkatnya kualitas Pelayanan urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketepatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran (%)	100	0	100	6.087.497.611	100	6.591.872.492	100	6.921.466.116	100	7.267.539.422	100	7.830.916.394	3.26.2.22.0.00.22.0000 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah (%)	100	0	100		100		100		100		100		3.26.2.22.0.00.22.0000 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	0	100		100		100		100		100		3.26.2.22.0.00.22.0000 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					3.995.640.773		5.195.422.812		5.455.193.952		5.803.544.629		6.093.721.860	
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	7,2	7,2	9	3.995.640.773	10	5.195.422.812	11,2	5.455.193.952	12,5	5.803.544.629	13	6.093.721.860	3.26.2.22.0.00.22.0000 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					2.500.000.000		3.625.000.000		4.806.250.000		5.246.562.500		5.508.890.625	
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	20	20	25	2.500.000.000	30	3.625.000.000	35	4.806.250.000	40	5.246.562.500	45	5.508.890.625	3.26.2.22.0.00.22.0000 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					700.000.000		735.000.000		871.750.000		955.337.500		1.103.104.375	
Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	0	0	3,5	700.000.000	6,8	735.000.000	9,5	871.750.000	11	955.337.500	12,7	1.103.104.375	3.26.2.22.0.00.22.0000 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					500.000.000		525.000.000		1.029.749.237		1.581.236.698		1.960.298.533	
Meningkatnya kapasitas SDM dan Ekonomi Kreatif	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif (Rp)	20	20	25	500.000.000	30	525.000.000	35	1.029.749.237	40	1.581.236.698	45	1.960.298.533	3.26.2.22.0.00.22.0000 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					67.149.680.481		70.797.401.343		73.964.742.542		75.854.242.542		80.783.742.542	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					15.095.680.481		15.188.401.343		15.510.742.542		15.550.242.542		16.074.742.542	
Meningkatnya kualitas Pelayanan urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketepatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran (%)	100	100	100	15.095.680.481	100	15.188.401.343	100	15.510.742.542	100	15.550.242.542	100	16.074.742.542	2.09.3.27.0.00.11.0000 - Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.09.3.27.0.00.11.0000 - Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan

	Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.09.3.27.0.00.11.0000 - Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					18.150.000.000		19.250.000.000		21.710.000.000		21.960.000.000		23.950.000.000	
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Jumlah Produksi Daging (sapi, kerbau, domba, kambing, ayam, itik, babi) (Ton)	110	110	113,9	18.150.000.000	127	19.250.000.000	139	21.710.000.000	152	21.960.000.000	165	23.950.000.000	2.09.3.27.0.00.11.0000 - Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	Jumlah Produksi Jagung (Ton)	340	340	361		469		610		793		1.031		2.09.3.27.0.00.11.0000 - Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	Jumlah Produksi Padi (Ton)	600	600	650		845		1.098		1.427		1.855		2.09.3.27.0.00.11.0000 - Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	Jumlah Produksi Pangan Lokal Non Beras (Ubi Kayu dan Ubi Jalar) (Ton)	250	250	300		375		450		500		550		2.09.3.27.0.00.11.0000 - Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura jenis bawang merah (Ton)	350	350	371		419		472		532		598		2.09.3.27.0.00.11.0000 - Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Jenis Cabai (Ton)	600	600	651		721		799		886		981		2.09.3.27.0.00.11.0000 - Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Cengkeh (Ton)	769	769	839		915		991		1.067		1.143		2.09.3.27.0.00.11.0000 - Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kakao (Ton)	2.195	2.195	2.417		2.636		2.855		3.074		3.293		2.09.3.27.0.00.11.0000 - Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kelapa (Ton)	23.252	23.252	25.577		27.902		30.227		32.552		34.877		2.09.3.27.0.00.11.0000 - Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan

	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kopi (Ton)	0	50	100		150		200		250		300		2.09.3.27.0.00.11.0000 - Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Pala (Ton)	601	601	650		743		787		831		975		2.09.3.27.0.00.11.0000 - Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	Jumlah Produksi Telur (Ton)	35,5	35,5	40,884		42,519		44,22		45,989		47,828		2.09.3.27.0.00.11.0000 - Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					19.350.000.000		22.585.000.000		21.405.000.000		23.105.000.000		24.815.000.000	
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	21.202,12	21.202,12	21.423,36	19.350.000.000	22.971	22.585.000.000	24.520	21.405.000.000	26.068	23.105.000.000	27.616	24.815.000.000	2.09.3.27.0.00.11.0000 - Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					789.000.000		909.000.000		924.000.000		924.000.000		829.000.000	
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)	20	20	25	789.000.000	100	909.000.000	100	924.000.000	100	924.000.000	100	829.000.000	2.09.3.27.0.00.11.0000 - Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)	100	100	100		100		100		100		100		2.09.3.27.0.00.11.0000 - Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					5.265.000.000		4.365.000.000		5.415.000.000		5.315.000.000		5.615.000.000	
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	100	100	100	5.265.000.000	100	4.365.000.000	100	5.415.000.000	100	5.315.000.000	100	5.615.000.000	2.09.3.27.0.00.11.0000 - Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		2.09.3.27.0.00.11.0000 - Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000	
Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (Persentase)	100	100	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	2.09.3.27.0.00.11.0000 - Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					7.000.000.000		7.000.000.000		7.500.000.000		7.500.000.000		8.000.000.000	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	80	80	85,71	7.000.000.000	100	7.000.000.000	100	7.500.000.000	100	7.500.000.000	100	8.000.000.000	2.09.3.27.0.00.11.0000 - Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN														

3.28.04 - PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA													
Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Poin)	0	0	20	40	60	80	100					2.11.3.28.0.00.12.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					2.985.000.000	4.078.361.251	4.750.000.000	6.250.000.000	7.100.000.000				
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					250.000.000	350.000.000	400.000.000	350.000.000	400.000.000				
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	100	0	100	250.000.000	350.000.000	400.000.000	350.000.000	400.000.000				2.17.3.31.3.30.17.0000 - Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					1.000.000.000	1.178.361.251	1.500.000.000	3.000.000.000	3.500.000.000				
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi Larangan efisien	Persentase Pasar Rakyat/Tradisional yang beroperasi secara normal (%)	6	6	7	1.000.000.000	1.178.361.251	1.500.000.000	3.000.000.000	3.500.000.000				2.17.3.31.3.30.17.0000 - Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					1.185.000.000	1.650.000.000	1.800.000.000	2.000.000.000	2.200.000.000				
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang entin	Persentase jumlah jenis barang beredar yang sudah diawasi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan (%)	6	6	6	1.185.000.000	1.650.000.000	1.800.000.000	2.000.000.000	2.200.000.000				2.17.3.31.3.30.17.0000 - Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					150.000.000	300.000.000	400.000.000	250.000.000	300.000.000				
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai ekspor barang (%)	100	100	100	150.000.000	300.000.000	400.000.000	250.000.000	300.000.000				2.17.3.31.3.30.17.0000 - Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					400.000.000	450.000.000	500.000.000	450.000.000	500.000.000				
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	presentase promosi produk lokal yang difasilitasi/dilaksanakan (%)	100	100	100	400.000.000	450.000.000	500.000.000	450.000.000	500.000.000				2.17.3.31.3.30.17.0000 - Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					0	150.000.000	150.000.000	200.000.000	200.000.000				
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	presentase promosi produk lokal yang difasilitasi/dilaksanakan (%)	0	0	0	0	150.000.000	150.000.000	200.000.000	200.000.000				2.17.3.31.3.30.17.0000 - Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					2.250.000.000	2.300.000.000	2.700.000.000	2.500.000.000	3.400.000.000				

3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					1.500.000.000		1.500.000.000		1.700.000.000		1.500.000.000		2.000.000.000	
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Presentase Pertumbuhan jumlah industri kecil (%)	100	100	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	100	1.700.000.000	100	1.500.000.000	100	2.000.000.000	2.17.3.31.3.30.17.0000 - Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					400.000.000		400.000.000		500.000.000		500.000.000		700.000.000	
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin usaha industri yang diterbitkan (Persentase)	100	100	100	400.000.000	100	400.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	700.000.000	2.17.3.31.3.30.17.0000 - Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					350.000.000		400.000.000		500.000.000		500.000.000		700.000.000	
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini (Persentase)	100	100	100	350.000.000	100	400.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	700.000.000	2.17.3.31.3.30.17.0000 - Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					4.000.000.000		5.000.000.000		4.109.612.741		4.109.612.741		5.000.000.000	
3.32.02 - PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI					1.000.000.000		2.000.000.000		1.109.612.741		1.109.612.741		2.000.000.000	
Meningkatnya Pelaksanaan Transmigrasi	Persentase program transmigrasi yang dilaksanakan (%)	100	100	100	1.000.000.000	100	2.000.000.000	100	1.109.612.741	100	1.109.612.741	100	2.000.000.000	3.32.2.07.0.00.23.0000 - Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000	
Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase luas kawasan transmigrasi yang berkembang (%)	0	0	7,4	2.000.000.000	7,4	2.000.000.000	7,4	2.000.000.000	7,4	2.000.000.000	7,4	2.000.000.000	3.32.2.07.0.00.23.0000 - Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI					1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	
Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigrasi dalam pengembangan kawasan transmigrasi	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan (Persentase)	6	6	6	1.000.000.000	6	1.000.000.000	6	1.000.000.000	6	1.000.000.000	6	1.000.000.000	3.32.2.07.0.00.23.0000 - Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					77.385.465.097		79.959.165.959		82.590.507.158		84.590.507.158		86.590.507.158	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					55.243.554.247		56.463.455.109		57.776.205.308		58.512.383.308		59.379.204.308	
Meningkatnya kualitas Pelayanan urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketepatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran (%)	100	100	100	55.243.554.247	100	56.463.455.109	100	57.776.205.308	100	58.512.383.308	100	59.379.204.308	4.01.0.00.0.00.24.0000 - Sekretariat Daerah
	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.24.0000 - Sekretariat Daerah

	Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.24.0000 - Sekretariat Daerah
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					19.712.408.400		20.845.408.400		21.980.408.400		23.133.008.400		24.098.008.400	
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	80	80	80	19.712.408.400	85	20.845.408.400	90	21.980.408.400	95	23.133.008.400	100	24.098.008.400	4.01.0.00.0.00.24.0000 - Sekretariat Daerah
	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.24.0000 - Sekretariat Daerah
	Pembinaan Masyarakat Berbasis NilaiA (PMBN) (%)	70	70	80		80		80		80		80		4.01.0.00.0.00.24.0000 - Sekretariat Daerah
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					2.429.502.450		2.650.302.450		2.833.893.450		2.945.115.450		3.113.294.450	
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)	60	60	70	2.429.502.450	80	2.650.302.450	90	2.833.893.450	95	2.945.115.450	100	3.113.294.450	4.01.0.00.0.00.24.0000 - Sekretariat Daerah
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					72.949.723.758		75.523.424.620		78.154.765.819		80.154.765.819		82.154.765.819	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					38.949.723.758		39.823.424.620		40.754.765.819		41.454.765.819		42.154.765.819	
Meningkatnya kualitas Pelayanan urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketepatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran (%)	97	97	93	38.949.723.758	95	39.823.424.620	95	40.754.765.819	97	41.454.765.819	98	42.154.765.819	4.02.0.00.0.00.25.0000 - Sekretariat DPRD
	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah (%)	97	98	93		94		95		0		95		4.02.0.00.0.00.25.0000 - Sekretariat DPRD
	Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	95	94	94		95		95		0		95		4.02.0.00.0.00.25.0000 - Sekretariat DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					34.000.000.000		35.700.000.000		37.400.000.000		38.700.000.000		40.000.000.000	
Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	100	100	100	13.000.000.000	100	13.850.000.000	100	14.700.000.000	100	15.350.000.000	100	24.000.000.000	4.02.0.00.0.00.25.0000 - Sekretariat DPRD
	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)	95	96	90		92		92		93		95		4.02.0.00.0.00.25.0000 - Sekretariat DPRD
Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	95	96	98	21.000.000.000	0	21.850.000.000	11	22.700.000.000	93	23.350.000.000	95	16.000.000.000	4.02.0.00.0.00.25.0000 - Sekretariat DPRD
5.01 - PERENCANAAN					22.186.405.528		24.360.106.390		26.691.447.589		29.691.447.589		32.991.447.589	

5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10.432.802.878		10.806.503.740		11.256.503.740		11.856.503.740		12.516.503.740	
Meningkatnya kualitas Pelayanan urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketepatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran (%)	100	82	82	10.432.802.878	85	10.806.503.740	90	11.256.503.740	95	11.856.503.740	100	12.516.503.740	5.01.5.05.1.03.26.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah (%)	100	82	82		85		90		95		100		5.01.5.05.1.03.26.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
	Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	82	82		85		90		95		100		5.01.5.05.1.03.26.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					4.853.602.650		5.303.602.650		5.834.943.849		6.434.943.849		7.094.943.849	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	90	90	90	4.853.602.650	91	5.303.602.650	92	5.834.943.849	93	6.434.943.849	94	7.094.943.849	5.01.5.05.1.03.26.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					6.900.000.000		8.250.000.000		9.600.000.000		11.400.000.000		13.380.000.000	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	80	80	80	2.500.000.000	82	2.950.000.000	84	3.400.000.000	86	4.000.000.000	90	4.660.000.000	5.01.5.05.1.03.26.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	80	80	80	2.200.000.000	82	2.650.000.000	84	3.100.000.000	86	3.700.000.000	90	4.360.000.000	5.01.5.05.1.03.26.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	80	80	80	2.200.000.000	82	2.650.000.000	84	3.100.000.000	86	3.700.000.000	90	4.360.000.000	5.01.5.05.1.03.26.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
5.02 - KEUANGAN					490.779.440.464		493.353.141.326		495.984.482.525		497.934.482.525		499.934.482.525	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					96.475.000.000		96.500.000.000		96.500.000.000		96.500.000.000		96.500.000.000	
Meningkatnya kualitas Pelayanan urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketepatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran (%)	100	100	100	96.475.000.000	100	96.500.000.000	100	96.500.000.000	100	96.500.000.000	100	96.500.000.000	5.02.2.10.0.00.27.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat	100	100	100		100		100		100		100		5.02.2.10.0.00.27.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

	Daerah (%)																	
	Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	85	85	90		90		95		100		100	5.02.2.10.0.00.27.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah					
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					379.829.440.464		382.203.141.326		384.684.482.525		386.584.482.525		388.434.482.525					
Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	40	40	40	4.400.000.000	40	4.450.000.000	40	4.500.000.000	40	4.550.000.000	40	4.600.000.000	5.02.2.10.0.00.27.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				
	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	27	27	27				27				27			29		29	5.02.2.10.0.00.27.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	90	95	95	372.631.788.464	95	374.899.536.326	95	377.273.805.425	95	379.065.591.925	95	380.806.214.125	5.02.2.10.0.00.27.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				
Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	100	100	100	2.797.652.000	100	2.853.605.000	100	2.910.677.100	100	2.968.890.600	100	3.028.268.400	5.02.2.10.0.00.27.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					8.125.000.000		8.250.000.000		8.350.000.000		8.350.000.000		8.450.000.000					
Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	-	22	25	8.125.000.000	28	8.250.000.000	33	8.350.000.000	38	8.350.000.000	45	8.450.000.000	5.02.2.10.0.00.27.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					6.350.000.000		6.400.000.000		6.450.000.000		6.500.000.000		6.550.000.000					
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase)	55,56	55,56	55,56	6.350.000.000	62,96	6.400.000.000	66,67	6.450.000.000	70,37	6.500.000.000	74,07	6.550.000.000	5.02.2.10.0.00.27.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				
	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	11,15	11,15	13,68				16,78				20,59			25,26		30	5.02.2.10.0.00.27.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.03 - KEPEGAWAIAN					13.408.918.056		15.230.761.299		17.612.102.498		18.538.918.056		19.999.777.498					
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.058.918.056		8.350.761.299		8.753.918.056		8.888.918.056		9.159.777.498					
Meningkatnya kualitas Pelayanan urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketepatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran (%)	64,5	64,6	65	8.058.918.056	68	8.350.761.299	72	8.753.918.056	75	8.888.918.056	80	9.159.777.498	5.03.5.04.0.00.28.0000 - Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah				
	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah (%)	85	85	85				90				98			98		98	5.03.5.04.0.00.28.0000 - Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
	Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi	76	79	81				83				89			93		96	

	Perkantoran (%)													Pelatihan Daerah
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					5.350.000.000		6.880.000.000		8.858.184.442		9.650.000.000		10.840.000.000	
Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	73,45	79,45	82	1.580.000.000	84	1.830.000.000	86	2.030.000.000	88	2.510.000.000	92	2.510.000.000	5.03.5.04.0.00.28.0000 - Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	1,02	1,02	1	2.170.000.000	2	3.300.000.000	3	4.193.184.442	3	4.100.000.000	3	4.850.000.000	5.03.5.04.0.00.28.0000 - Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase)	56,47	58,72	73	390.000.000	82	460.000.000	86	520.000.000	89	520.000.000	95	740.000.000	5.03.5.04.0.00.28.0000 - Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Meningkatnya Kualitas Penilaian Kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	54,64	65,32	72	1.210.000.000	78	1.290.000.000	80	2.115.000.000	87	2.520.000.000	94	2.740.000.000	5.03.5.04.0.00.28.0000 - Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					2.000.817.381		3.752.675.000		4.002.675.000		5.075.859.442		5.615.000.000	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					2.000.817.381		3.752.675.000		4.002.675.000		5.075.859.442		5.615.000.000	
Meningkatkannya layanan pengembangan komptensi dasar, kader, manajerial dan fungsional (Orientasi, Prajabatan, PKP, PKA, PKN, Diklat Fungsional)	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan Fungsional (%)	45	46	46	1.400.817.381	48	2.360.000.000	50	2.560.000.000	53	3.560.000.000	57	3.960.000.000	5.03.5.04.0.00.28.0000 - Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Meningkatnya layanan penjaminan mutu pengelolaan tugas belajar serta sertifikasi kompetensi	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi (Persentase)	8	8,7	9	600.000.000	9	1.392.675.000	16	1.442.675.000	25	1.515.859.442	32	1.655.000.000	5.03.5.04.0.00.28.0000 - Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					4.150.000.000		4.550.000.000		4.850.000.000		3.850.000.000		2.550.000.000	
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					2.150.000.000		2.050.000.000		2.450.000.000		1.950.000.000		1.050.000.000	
Meningkatnya Kajian yang Termanfaatkan Sebagai Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Pengembangan Potensi Unggulan	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	100	100	100	2.150.000.000	100	2.050.000.000	100	2.450.000.000	100	1.950.000.000	100	1.050.000.000	5.01.5.05.1.03.26.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					2.000.000.000		2.500.000.000		2.400.000.000		1.900.000.000		1.500.000.000	
Meningkatnya Pemanfaatan Inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	22	22	22	2.000.000.000	34	2.500.000.000	50	2.400.000.000	66	1.900.000.000	80	1.500.000.000	5.01.5.05.1.03.26.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
6.01 – INSPEKTORAT DAERAH					27.971.613.310		30.545.314.172		33.176.655.371		35.176.655.371		37.176.655.371	

6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					14.589.413.310		12.925.374.172		13.556.715.371		13.456.715.371		13.956.715.371	
Meningkatnya kualitas Pelayanan urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketepatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran (%)	100	100	100	14.589.413.310	100	12.925.374.172	100	13.556.715.371	100	13.456.715.371	100	13.956.715.371	6.01.0.00.0.00.29.0000 - Inspektorat
	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		6.01.0.00.0.00.29.0000 - Inspektorat
	Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		6.01.0.00.0.00.29.0000 - Inspektorat
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					9.471.200.000		12.271.200.000		13.971.200.000		14.871.200.000		15.571.200.000	
menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik dan bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	68,3	70	73	9.471.200.000	75	12.271.200.000	80	13.971.200.000	90	14.871.200.000	100	15.571.200.000	6.01.0.00.0.00.29.0000 - Inspektorat
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					3.911.000.000		5.348.740.000		5.648.740.000		6.848.740.000		7.648.740.000	
Peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP)	Level Kapabilitas APIP (Level)	3	3	4	3.911.000.000	4	5.348.740.000	4	5.648.740.000	4	6.848.740.000	4	7.648.740.000	6.01.0.00.0.00.29.0000 - Inspektorat
7.01 - KECAMATAN					45.200.000.000		45.200.000.000		45.200.000.000		45.200.000.000		45.200.000.000	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					22.600.000.000		22.600.000.000		22.600.000.000		22.600.000.000		22.600.000.000	
Meningkatnya kualitas Pelayanan urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran (Persentase)	50	0	55	22.600.000.000	60	22.600.000.000	65	22.600.000.000	70	22.600.000.000	75	22.600.000.000	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Bacan
	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah (Persentase)	70	0	75		80		85		90		95		7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Bacan
	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran (Persentase)	50	0	55		60		65		70		75		7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Bacan
	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran (Persentase)	50	0	55		60		65		70		75		7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Bacan Barat
	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah (Persentase)	70	0	75		80		85		90		95		7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Bacan Barat

	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran (Persentase)	50	0	55		60		65		70		75		7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Bacan Barat
	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran (Persentase)	50	0	55		60		65		70		75		7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Bacan Timur
	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah (Persentase)	70	0	75		80		85		90		95		7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Bacan Timur
	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran (Persentase)	50	0	55		60		65		70		75		7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Bacan Timur
	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran (Persentase)	50	0	55		60		65		70		75		7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Bacan Selatan
	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah (Persentase)	70	0	75		80		85		90		95		7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Bacan Selatan
	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran (Persentase)	50	0	55		60		65		70		75		7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Bacan Selatan
	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran (Persentase)	50	0	55		60		65		70		75		7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Bacan Barat Utara
	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah (Persentase)	70	0	75		80		85		90		95		7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Bacan Barat Utara
	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran (Persentase)	50	0	55		60		65		70		75		7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Bacan Barat Utara
	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran (Persentase)	50	0	55		60		65		70		75		7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Bacan Timur Tengah
	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah (Persentase)	70	0	75		80		85		90		95		7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Bacan Timur Tengah
	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran (Persentase)	50	0	55		60		65		70		75		7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Bacan Timur Tengah
	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran (Persentase)	50	0	55		60		65		70		75		7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Bacan Timur Selatan

	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah (Persentase)	70	0	75		80		85		90		95		7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Bacan Timur Selatan
	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran (Persentase)	50	0	55		60		65		70		75		7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Bacan Timur Selatan
	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran (Persentase)	50	0	55		60		65		70		75		7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Kasiruta Barat
	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah (Persentase)	70	0	75		80		85		90		95		7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Kasiruta Barat
	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran (Persentase)	50	0	55		60		65		70		75		7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Kasiruta Barat
	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran (Persentase)	50	0	55		60		65		70		75		7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Kasiruta Timur
	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah (Persentase)	70	0	75		80		85		90		95		7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Kasiruta Timur
	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran (Persentase)	50	0	55		60		65		70		75		7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Kasiruta Timur
	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran (Persentase)	50	0	55		60		65		70		75		7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Kepulauan Batang Lomang
	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah (Persentase)	70	0	75		80		85		90		95		7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Kepulauan Batang Lomang
	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran (Persentase)	50	0	55		60		65		70		75		7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Kepulauan Batang Lomang
	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran (Persentase)	50	0	55		60		65		70		75		7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Mandioli Utara
	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah (Persentase)	70	0	75		80		85		90		95		7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Mandioli Utara
	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah (Persentase)	70	0	75		80		85		90		95		7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Mandioli Utara

	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran (Persentase)	50	0	55		60		65		70		75		7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Mandioli Utara
	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran (Persentase)	50	0	55		60		65		70		75		7.01.0.00.0.00.12.0000 - Kecamatan Mandioli Selatan
	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah (Persentase)	70	0	75		80		85		90		95		7.01.0.00.0.00.12.0000 - Kecamatan Mandioli Selatan
	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran (Persentase)	50	0	55		60		65		70		75		7.01.0.00.0.00.12.0000 - Kecamatan Mandioli Selatan
	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran (Persentase)	50	0	55		60		65		70		75		7.01.0.00.0.00.13.0000 - Kecamatan Obi
	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah (Persentase)	70	0	75		80		85		90		95		7.01.0.00.0.00.13.0000 - Kecamatan Obi
	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran (Persentase)	50	0	55		60		65		70		75		7.01.0.00.0.00.13.0000 - Kecamatan Obi
	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran (Persentase)	50	0	55		60		65		70		75		7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kecamatan Obi Barat
	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah (Persentase)	70	0	75		80		85		90		95		7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kecamatan Obi Barat
	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran (Persentase)	50	0	55		60		65		70		75		7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kecamatan Obi Barat
	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran (Persentase)	50	0	55		60		65		70		75		7.01.0.00.0.00.15.0000 - Kecamatan Obi Utara
	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah (Persentase)	70	0	75		80		85		90		95		7.01.0.00.0.00.15.0000 - Kecamatan Obi Utara
	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran (Persentase)	50	0	55		60		65		70		75		7.01.0.00.0.00.15.0000 - Kecamatan Obi Utara
	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran (Persentase)	80	80	84		88		90		95		100		7.01.0.00.0.00.16.0000 - Kecamatan Obi Selatan

	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah (Persentase)	80	80	84		88		90		95		100		7.01.0.00.0.00.16.0000 - Kecamatan Obi Selatan
	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran (Persentase)	80	80	84		88		90		95		100		7.01.0.00.0.00.16.0000 - Kecamatan Obi Selatan
	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran (Persentase)	50	0	55		60		65		70		75		7.01.0.00.0.00.17.0000 - Kecamatan Obi Timur
	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah (Persentase)	70	0	75		80		85		90		95		7.01.0.00.0.00.17.0000 - Kecamatan Obi Timur
	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran (Persentase)	50	0	55		60		65		70		75		7.01.0.00.0.00.17.0000 - Kecamatan Obi Timur
	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran (Persentase)	50	0	55		60		65		70		75		7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Gane Barat
	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah (Persentase)	70	0	75		80		85		90		95		7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Gane Barat
	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran (Persentase)	50	0	55		60		65		70		75		7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Gane Barat
	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran (Persentase)	50	0	55		60		65		70		75		7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Gane Barat Utara
	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah (Persentase)	70	0	75		80		85		90		95		7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Gane Barat Utara
	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran (Persentase)	50	0	55		60		65		70		75		7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Gane Barat Utara
	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran (Persentase)	50	0	55		60		65		70		75		7.01.0.00.0.00.20.0000 - Kecamatan Gane Barat Selatan
	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah (Persentase)	70	0	75		80		85		90		95		7.01.0.00.0.00.20.0000 - Kecamatan Gane Barat Selatan

	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran (Persentase)	50	0	55		60		65		70		75		7.01.0.00.0.00.20.0000 - Kecamatan Gane Barat Selatan
	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran (Persentase)	100	80	80		85		90		95		100		7.01.0.00.0.00.21.0000 - Kecamatan Gane Timur
	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah (Persentase)	100	80	80		85		90		95		100		7.01.0.00.0.00.21.0000 - Kecamatan Gane Timur
	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran (Persentase)	100	80	80		85		90		95		100		7.01.0.00.0.00.21.0000 - Kecamatan Gane Timur
	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran (Persentase)	50	0	55		60		65		70		75		7.01.0.00.0.00.22.0000 - Kecamatan Gane Timur Tengah
	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah (Persentase)	70	0	75		80		85		90		95		7.01.0.00.0.00.22.0000 - Kecamatan Gane Timur Tengah
	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran (Persentase)	50	0	55		60		65		70		75		7.01.0.00.0.00.22.0000 - Kecamatan Gane Timur Tengah
	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran (Persentase)	50	0	55		60		65		70		75		7.01.0.00.0.00.23.0000 - Kecamatan Gane Timur Selatan
	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah (Persentase)	70	0	75		80		85		90		95		7.01.0.00.0.00.23.0000 - Kecamatan Gane Timur Selatan
	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran (Persentase)	50	0	55		60		65		70		75		7.01.0.00.0.00.23.0000 - Kecamatan Gane Timur Selatan
	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran (Persentase)	50	0	55		60		65		70		75		7.01.0.00.0.00.24.0000 - Kecamatan Kepulauan Joronga
	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah (Persentase)	70	0	75		80		85		90		95		7.01.0.00.0.00.24.0000 - Kecamatan Kepulauan Joronga
	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran (Persentase)	50	0	55		60		65		70		75		7.01.0.00.0.00.24.0000 - Kecamatan Kepulauan Joronga

	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran (Persentase)	50	0	55		60		65		70		75		7.01.0.00.0.00.25.0000 - Kecamatan Pulau Makian
	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah (Persentase)	70	0	75		80		85		90		95		7.01.0.00.0.00.25.0000 - Kecamatan Pulau Makian
	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran (Persentase)	50	0	55		60		65		70		75		7.01.0.00.0.00.25.0000 - Kecamatan Pulau Makian
	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran (Persentase)	50	0	55		60		65		70		75		7.01.0.00.0.00.26.0000 - Kecamatan Makian Barat
	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah (Persentase)	70	0	75		80		85		90		95		7.01.0.00.0.00.26.0000 - Kecamatan Makian Barat
	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran (Persentase)	50	0	55		60		65		70		75		7.01.0.00.0.00.26.0000 - Kecamatan Makian Barat
	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran (Persentase)	50	0	55		60		65		70		75		7.01.0.00.0.00.27.0000 - Kecamatan Kayoa
	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah (Persentase)	70	0	75		80		85		90		95		7.01.0.00.0.00.27.0000 - Kecamatan Kayoa
	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran (Persentase)	50	0	55		60		65		70		75		7.01.0.00.0.00.27.0000 - Kecamatan Kayoa
	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran (Persentase)	50	0	55		60		65		70		75		7.01.0.00.0.00.28.0000 - Kecamatan Kayoa Barat
	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah (Persentase)	70	0	75		80		85		90		95		7.01.0.00.0.00.28.0000 - Kecamatan Kayoa Barat
	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran (Persentase)	50	0	55		60		65		70		75		7.01.0.00.0.00.28.0000 - Kecamatan Kayoa Barat
	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran (Persentase)	50	0	55		60		65		70		75		7.01.0.00.0.00.29.0000 - Kecamatan Kayoa Utara
	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah (Persentase)	70	0	75		80		85		90		95		7.01.0.00.0.00.29.0000 - Kecamatan Kayoa Utara

	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran (Persentase)	50	0	55		60		65		70		75		7.01.0.00.0.00.29.0000 - Kecamatan Kayoa Utara
	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran (Persentase)	100	80	80		85		90		95		100		7.01.0.00.0.00.30.0000 - Kecamatan Kayoa Selatan
	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah (Persentase)	100	80	80		85		90		95		100		7.01.0.00.0.00.30.0000 - Kecamatan Kayoa Selatan
	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran (Persentase)	100	80	80		85		90		95		100		7.01.0.00.0.00.30.0000 - Kecamatan Kayoa Selatan
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					4.068.000.000		4.068.000.000		4.068.000.000		4.068.000.000		4.068.000.000	
Meningkatnya administrasi terpadu Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan pelayanan umum (%)	50	0	60	4.068.000.000	65	4.068.000.000	70	4.068.000.000	75	4.068.000.000	80	4.068.000.000	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Bacan
	Presentase Penyelenggaraan pelayanan umum (%)	50	0	60		65		70		75		80		7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Bacan Barat
	Presentase Penyelenggaraan pelayanan umum (%)	50	0	60		65		70		75		80		7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Bacan Timur
	Presentase Penyelenggaraan pelayanan umum (%)	50	0	60		65		70		75		80		7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Bacan Selatan
	Presentase Penyelenggaraan pelayanan umum (%)	50	0	60		65		70		75		80		7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Bacan Barat Utara
	Presentase Penyelenggaraan pelayanan umum (%)	50	0	60		65		70		75		80		7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Bacan Timur Tengah
	Presentase Penyelenggaraan pelayanan umum (%)	50	0	60		65		70		75		80		7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Bacan Timur Selatan
	Presentase Penyelenggaraan pelayanan umum (%)	50	0	60		65		70		75		80		7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Kasiruta Barat
	Presentase Penyelenggaraan pelayanan umum (%)	50	0	60		65		70		75		80		7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Kasiruta Timur
	Presentase Penyelenggaraan pelayanan umum (%)	50	0	60		65		70		75		80		7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Kepulauan Batang Lomang
	Presentase Penyelenggaraan pelayanan umum (%)	50	0	60		65		70		75		80		7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Mandioli Utara
	Presentase Penyelenggaraan pelayanan umum (%)	50	0	60		65		70		75		80		7.01.0.00.0.00.12.0000 - Kecamatan Mandioli Selatan
	Presentase Penyelenggaraan pelayanan umum (%)	50	0	60		65		70		75		80		7.01.0.00.0.00.13.0000 - Kecamatan Obi
	Presentase Penyelenggaraan pelayanan umum (%)	50	0	60		65		70		75		80		7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kecamatan Obi Barat

	Presentase Penyelenggaraan pelayanan umum (%)	50	0	60		65		70		75		80		7.01.0.00.0.00.15.0000 - Kecamatan Obi Utara
	Presentase Penyelenggaraan pelayanan umum (%)	50	0	60		65		70		75		80		7.01.0.00.0.00.16.0000 - Kecamatan Obi Selatan
	Presentase Penyelenggaraan pelayanan umum (%)	50	0	60		65		70		75		80		7.01.0.00.0.00.17.0000 - Kecamatan Obi Timur
	Presentase Penyelenggaraan pelayanan umum (%)	50	0	60		65		70		75		80		7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Gane Barat
	Presentase Penyelenggaraan pelayanan umum (%)	50	0	60		65		70		75		80		7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Gane Barat Utara
	Presentase Penyelenggaraan pelayanan umum (%)	50	0	60		65		70		75		80		7.01.0.00.0.00.20.0000 - Kecamatan Gane Barat Selatan
	Presentase Penyelenggaraan pelayanan umum (%)	50	0	60		65		70		75		80		7.01.0.00.0.00.21.0000 - Kecamatan Gane Timur
	Presentase Penyelenggaraan pelayanan umum (%)	50	0	60		67		70		75		80		7.01.0.00.0.00.22.0000 - Kecamatan Gane Timur Tengah
	Presentase Penyelenggaraan pelayanan umum (%)	50	0	60		65		70		75		80		7.01.0.00.0.00.23.0000 - Kecamatan Gane Timur Selatan
	Presentase Penyelenggaraan pelayanan umum (%)	50	0	60		65		70		75		80		7.01.0.00.0.00.24.0000 - Kecamatan Kepulauan Joronga
	Presentase Penyelenggaraan pelayanan umum (%)	50	0	60		65		70		75		80		7.01.0.00.0.00.25.0000 - Kecamatan Pulau Makian
	Presentase Penyelenggaraan pelayanan umum (%)	50	0	60		65		70		75		80		7.01.0.00.0.00.26.0000 - Kecamatan Makian Barat
	Presentase Penyelenggaraan pelayanan umum (%)	50	0	60		65		70		75		80		7.01.0.00.0.00.27.0000 - Kecamatan Kayoa
	Presentase Penyelenggaraan pelayanan umum (%)	50	0	60		65		70		75		80		7.01.0.00.0.00.28.0000 - Kecamatan Kayoa Barat
	Presentase Penyelenggaraan pelayanan umum (%)	50	0	60		65		70		75		80		7.01.0.00.0.00.29.0000 - Kecamatan Kayoa Utara
	Presentase Penyelenggaraan pelayanan umum (%)	80	80	80		85		90		95		100		7.01.0.00.0.00.30.0000 - Kecamatan Kayoa Selatan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					5.424.000.000		5.424.000.000		5.424.000.000		5.424.000.000		5.424.000.000	
Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa	Presentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa (Persentase)	40	0	50	5.424.000.000	60	5.424.000.000	70	5.424.000.000	80	5.424.000.000	90	5.424.000.000	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Bacan
	Presentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa (Persentase)	40	0	50		60		70		80		90		7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Bacan Barat
	Presentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa (Persentase)	40	0	50		60		70		80		90		7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Bacan Timur
	Presentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa (Persentase)	40	0	50		60		70		80		90		7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Bacan Selatan

	Presentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa (Persentase)	40	0	50		60		70		80		90		7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Bacan Barat Utara
	Presentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa (Persentase)	40	0	50		60		70		80		90		7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Bacan Timur Tengah
	Presentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa (Persentase)	40	0	50		60		70		80		90		7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Bacan Timur Selatan
	Presentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa (Persentase)	40	0	50		60		70		80		90		7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Kasiruta Barat
	Presentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa (Persentase)	40	0	50		60		70		80		90		7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Kasiruta Timur
	Presentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa (Persentase)	40	0	50		60		70		80		90		7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Kepulauan Batang Lomang
	Presentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa (Persentase)	40	0	50		60		70		80		90		7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Mandioli Utara
	Presentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa (Persentase)	40	0	50		60		70		80		90		7.01.0.00.0.00.12.0000 - Kecamatan Mandioli Selatan
	Presentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa (Persentase)	40	0	50		60		70		80		90		7.01.0.00.0.00.13.0000 - Kecamatan Obi
	Presentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa (Persentase)	40	0	50		60		70		80		90		7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kecamatan Obi Barat
	Presentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa (Persentase)	40	0	50		60		70		80		90		7.01.0.00.0.00.15.0000 - Kecamatan Obi Utara
	Presentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa (Persentase)	40	0	50		60		70		80		90		7.01.0.00.0.00.16.0000 - Kecamatan Obi Selatan
	Presentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa (Persentase)	40	0	50		60		70		80		90		7.01.0.00.0.00.17.0000 - Kecamatan Obi Timur
	Presentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa (Persentase)	40	0	50		60		70		80		90		7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Gane Barat
	Presentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa (Persentase)	40	0	50		60		70		80		90		7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Gane Barat Utara
	Presentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa (Persentase)	40	0	50		60		70		80		90		7.01.0.00.0.00.20.0000 - Kecamatan Gane Barat Selatan
	Presentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa (Persentase)	40	0	50		60		70		80		90		7.01.0.00.0.00.21.0000 - Kecamatan Gane Timur

	Presentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa (Persentase)	40	0	50		60		70		80		90		7.01.0.00.0.00.22.0000 - Kecamatan Gane Timur Tengah
	Presentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa (Persentase)	40	0	50		60		70		80		90		7.01.0.00.0.00.23.0000 - Kecamatan Gane Timur Selatan
	Presentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa (Persentase)	40	0	50		60		70		80		90		7.01.0.00.0.00.24.0000 - Kecamatan Kepulauan Joronga
	Presentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa (Persentase)	40	0	50		60		70		80		90		7.01.0.00.0.00.25.0000 - Kecamatan Pulau Makian
	Presentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa (Persentase)	40	0	50		60		70		80		90		7.01.0.00.0.00.26.0000 - Kecamatan Makian Barat
	Presentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa (Persentase)	40	0	50		60		70		80		90		7.01.0.00.0.00.27.0000 - Kecamatan Kayoa
	Presentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa (Persentase)	40	0	50		60		70		80		90		7.01.0.00.0.00.28.0000 - Kecamatan Kayoa Barat
	Presentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa (Persentase)	40	0	50		60		70		80		90		7.01.0.00.0.00.29.0000 - Kecamatan Kayoa Utara
	Presentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa (Persentase)	80	80	80		85		90		95		100		7.01.0.00.0.00.30.0000 - Kecamatan Kayoa Selatan
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					5.198.000.000		5.198.000.000		5.198.000.000		5.198.000.000		5.198.000.000	
meningkatnya efektivitas koordinasi antar lembaga keamanan dan ketertiban.	Presentase Pelaksanaan ketertiban dan ketertiban umum (Persentase)	100	0	100	5.198.000.000	100	5.198.000.000	100	5.198.000.000	100	5.198.000.000	100	5.198.000.000	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Bacan
	Presentase Pelaksanaan ketertiban dan ketertiban umum (Persentase)	100	0	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Bacan Barat
	Presentase Pelaksanaan ketertiban dan ketertiban umum (Persentase)	100	0	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Bacan Timur
	Presentase Pelaksanaan ketertiban dan ketertiban umum (Persentase)	100	0	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Bacan Selatan
	Presentase Pelaksanaan ketertiban dan ketertiban umum (Persentase)	100	0	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Bacan Barat Utara
	Presentase Pelaksanaan ketertiban dan ketertiban umum (Persentase)	100	0	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Bacan Timur Tengah
	Presentase Pelaksanaan ketertiban dan ketertiban umum (Persentase)	100	0	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Bacan Timur Selatan

	Presentase Pelaksanaan ketertiban dan ketertiban umum (Persentase)	100	0	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Kasiruta Barat
	Presentase Pelaksanaan ketertiban dan ketertiban umum (Persentase)	100	0	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Kasiruta Timur
	Presentase Pelaksanaan ketertiban dan ketertiban umum (Persentase)	100	0	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Kepulauan Batang Lomang
	Presentase Pelaksanaan ketertiban dan ketertiban umum (Persentase)	100	0	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Mandioli Utara
	Presentase Pelaksanaan ketertiban dan ketertiban umum (Persentase)	100	0	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.12.0000 - Kecamatan Mandioli Selatan
	Presentase Pelaksanaan ketertiban dan ketertiban umum (Persentase)	100	0	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.13.0000 - Kecamatan Obi
	Presentase Pelaksanaan ketertiban dan ketertiban umum (Persentase)	100	0	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kecamatan Obi Barat
	Presentase Pelaksanaan ketertiban dan ketertiban umum (Persentase)	100	0	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.15.0000 - Kecamatan Obi Utara
	Presentase Pelaksanaan ketertiban dan ketertiban umum (Persentase)	100	0	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.16.0000 - Kecamatan Obi Selatan
	Presentase Pelaksanaan ketertiban dan ketertiban umum (Persentase)	100	0	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.17.0000 - Kecamatan Obi Timur
	Presentase Pelaksanaan ketertiban dan ketertiban umum (Persentase)	100	0	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Gane Barat
	Presentase Pelaksanaan ketertiban dan ketertiban umum (Persentase)	100	0	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Gane Barat Utara
	Presentase Pelaksanaan ketertiban dan ketertiban umum (Persentase)	100	0	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.20.0000 - Kecamatan Gane Barat Selatan
	Presentase Pelaksanaan ketertiban dan ketertiban umum (Persentase)	100	0	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.21.0000 - Kecamatan Gane Timur
	Presentase Pelaksanaan ketertiban dan ketertiban umum (Persentase)	100	0	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.22.0000 - Kecamatan Gane Timur Tengah
	Presentase Pelaksanaan ketertiban dan ketertiban umum (Persentase)	100	0	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.23.0000 - Kecamatan Gane Timur Selatan
	Presentase Pelaksanaan ketertiban dan ketertiban umum (Persentase)	100	0	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.24.0000 - Kecamatan Kepulauan Joronga

	Presentase Pelaksanaan ketertiban dan ketertiban umum (Persentase)	100	0	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.25.0000 - Kecamatan Pulau Makian
	Presentase Pelaksanaan ketertiban dan ketertiban umum (Persentase)	100	0	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.26.0000 - Kecamatan Makian Barat
	Presentase Pelaksanaan ketertiban dan ketertiban umum (Persentase)	100	0	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.27.0000 - Kecamatan Kayoa
	Presentase Pelaksanaan ketertiban dan ketertiban umum (Persentase)	100	0	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.28.0000 - Kecamatan Kayoa Barat
	Presentase Pelaksanaan ketertiban dan ketertiban umum (Persentase)	100	0	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.29.0000 - Kecamatan Kayoa Utara
	Presentase Pelaksanaan ketertiban dan ketertiban umum (Persentase)	100	0	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.30.0000 - Kecamatan Kayoa Selatan
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					3.164.000.000		3.164.000.000		3.164.000.000		3.164.000.000		3.164.000.000	
Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Aturan	Presentase Pelayanan penyelenggaraan pelimpahan kewenangan Kecamatan (Persentase)	60	0	70	3.164.000.000	75	3.164.000.000	80	3.164.000.000	90	3.164.000.000	100	3.164.000.000	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Bacan
	Presentase Pelayanan penyelenggaraan pelimpahan kewenangan Kecamatan (Persentase)	60	0	70		75		80		90		100		7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Bacan Barat
	Presentase Pelayanan penyelenggaraan pelimpahan kewenangan Kecamatan (Persentase)	60	0	70		75		80		90		100		7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Bacan Timur
	Presentase Pelayanan penyelenggaraan pelimpahan kewenangan Kecamatan (Persentase)	60	0	70		75		80		90		100		7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Bacan Selatan
	Presentase Pelayanan penyelenggaraan pelimpahan kewenangan Kecamatan (Persentase)	60	0	70		75		80		90		100		7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Bacan Barat Utara
	Presentase Pelayanan penyelenggaraan pelimpahan kewenangan Kecamatan (Persentase)	60	0	70		75		80		90		100		7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Bacan Timur Tengah
	Presentase Pelayanan penyelenggaraan pelimpahan kewenangan Kecamatan (Persentase)	60	0	70		75		80		90		100		7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Bacan Timur Selatan
	Presentase Pelayanan penyelenggaraan pelimpahan kewenangan Kecamatan (Persentase)	60	0	70		75		80		90		100		7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Kasiruta Barat

	Presentase Pelayanan penyelenggaraan pelimpahan kewenangan Kecamatan (Persentase)	60	0	70		75		80		90		100		7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Kasiruta Timur
	Presentase Pelayanan penyelenggaraan pelimpahan kewenangan Kecamatan (Persentase)	60	0	70		75		80		90		100		7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Kepulauan Batang Lomang
	Presentase Pelayanan penyelenggaraan pelimpahan kewenangan Kecamatan (Persentase)	60	0	70		75		80		90		100		7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Mandioli Utara
	Presentase Pelayanan penyelenggaraan pelimpahan kewenangan Kecamatan (Persentase)	60	0	70		75		80		90		100		7.01.0.00.0.00.12.0000 - Kecamatan Mandioli Selatan

	Presentase Pelayanan penyelenggaraan pelimpahan kewenangan Kecamatan (Persentase)	60	0	70		75		80		90		10		7.01.0.00.0.00.13.0000 - Kecamatan Obi
	Presentase Pelayanan penyelenggaraan pelimpahan kewenangan Kecamatan (Persentase)	60	0	70		75		80		90		100		7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kecamatan Obi Barat
	Presentase Pelayanan penyelenggaraan pelimpahan kewenangan Kecamatan (Persentase)	60	0	70		75		80		90		100		7.01.0.00.0.00.15.0000 - Kecamatan Obi Utara
	Presentase Pelayanan penyelenggaraan pelimpahan kewenangan Kecamatan (Persentase)	60	0	70		75		80		90		100		7.01.0.00.0.00.16.0000 - Kecamatan Obi Selatan
	Presentase Pelayanan penyelenggaraan pelimpahan kewenangan Kecamatan (Persentase)	60	0	70		75		80		90		100		7.01.0.00.0.00.17.0000 - Kecamatan Obi Timur
	Presentase Pelayanan penyelenggaraan pelimpahan kewenangan Kecamatan (Persentase)	60	0	70		75		80		90		100		7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Gane Barat
	Presentase Pelayanan penyelenggaraan pelimpahan kewenangan Kecamatan (Persentase)	60	0	70		75		80		90		100		7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Gane Barat Utara
	Presentase Pelayanan penyelenggaraan pelimpahan kewenangan Kecamatan (Persentase)	60	0	70		75		80		90		100		7.01.0.00.0.00.20.0000 - Kecamatan Gane Barat Selatan
	Presentase Pelayanan penyelenggaraan pelimpahan kewenangan Kecamatan (Persentase)	60	0	70		75		80		90		100		7.01.0.00.0.00.21.0000 - Kecamatan Gane Timur
	Presentase Pelayanan penyelenggaraan pelimpahan kewenangan Kecamatan (Persentase)	60	0	70		75		80		90		100		7.01.0.00.0.00.22.0000 - Kecamatan Gane Timur Tengah

	Presentase Pelayanan penyelenggaraan pelimpahan kewenangan Kecamatan (Persentase)	60	0	70		75		80		90		100		7.01.0.00.0.00.23.0000 - Kecamatan Gane Timur Selatan
	Presentase Pelayanan penyelenggaraan pelimpahan kewenangan Kecamatan (Persentase)	60	0	70		75		80		90		100		7.01.0.00.0.00.24.0000 - Kecamatan Kepulauan Joronga
	Presentase Pelayanan penyelenggaraan pelimpahan kewenangan Kecamatan (Persentase)	60	0	70		75		80		90		100		7.01.0.00.0.00.25.0000 - Kecamatan Pulau Makian
	Presentase Pelayanan penyelenggaraan pelimpahan kewenangan Kecamatan (Persentase)	60	0	70		75		80		90		100		7.01.0.00.0.00.26.0000 - Kecamatan Makian Barat
	Presentase Pelayanan penyelenggaraan pelimpahan kewenangan Kecamatan (Persentase)	60	0	70		75		80		90		100		7.01.0.00.0.00.27.0000 - Kecamatan Kayoa
	Presentase Pelayanan penyelenggaraan pelimpahan kewenangan Kecamatan (Persentase)	60	0	70		75		80		90		100		7.01.0.00.0.00.28.0000 - Kecamatan Kayoa Barat
	Presentase Pelayanan penyelenggaraan pelimpahan kewenangan Kecamatan (Persentase)	60	0	70		75		80		90		100		7.01.0.00.0.00.29.0000 - Kecamatan Kayoa Utara
	Presentase Pelayanan penyelenggaraan pelimpahan kewenangan Kecamatan (Persentase)	60	0	70		75		80		90		100		7.01.0.00.0.00.30.0000 - Kecamatan Kayoa Selatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					4.746.000.000		4.746.000.000		4.746.000.000		4.746.000.000		4.746.000.000	
meningkatkan kinerja aparaturnya dan kepatuhan pemerintah desa terhadap regulasi dan pelaporan	Presentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa (Persentase)	50	0	60	4.746.000.000	70	4.746.000.000	80	4.746.000.000	90	4.746.000.000	100	4.746.000.000	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Bacan
	Presentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa (Persentase)	50	0	60		70		80		90		100		7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Bacan Barat
	Presentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa (Persentase)	50	0	60		70		80		90		100		7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Bacan Timur
	Presentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa (Persentase)	50	0	60		70		80		90		100		7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Bacan Selatan
	Presentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa (Persentase)	50	0	60		70		80		90		100		7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Bacan Barat Utara
	Presentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa (Persentase)	50	0	60		70		80		90		100		7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Bacan Timur Tengah

	Presentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa (Persentase)	50	0	60		70		80		90		100		7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Bacan Timur Selatan
	Presentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa (Persentase)	50	0	60		70		80		90		100		7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Kasiruta Barat
	Presentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa (Persentase)	50	0	60		70		80		90		100		7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Kasiruta Timur
	Presentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa (Persentase)	50	0	60		70		80		90		100		7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Kepulauan Batang Lomang
	Presentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa (Persentase)	50	0	60		70		80		90		100		7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Mandioli Utara
	Presentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa (Persentase)	50	0	60		70		80		90		100		7.01.0.00.0.00.12.0000 - Kecamatan Mandioli Selatan
	Presentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa (Persentase)	50	0	60		70		80		90		100		7.01.0.00.0.00.13.0000 - Kecamatan Obi
	Presentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa (Persentase)	50	0	60		70		80		90		100		7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kecamatan Obi Barat
	Presentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa (Persentase)	50	0	60		70		80		90		100		7.01.0.00.0.00.15.0000 - Kecamatan Obi Utara
	Presentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa (Persentase)	50	0	60		70		80		90		100		7.01.0.00.0.00.16.0000 - Kecamatan Obi Selatan
	Presentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa (Persentase)	50	0	60		70		80		90		100		7.01.0.00.0.00.17.0000 - Kecamatan Obi Timur
	Presentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa (Persentase)	50	0	60		70		80		90		100		7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Gane Barat
	Presentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa (Persentase)	50	0	60		70		80		90		100		7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Gane Barat Utara
	Presentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa (Persentase)	50	0	60		70		80		90		100		7.01.0.00.0.00.20.0000 - Kecamatan Gane Barat Selatan
	Presentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa (Persentase)	50	0	60		70		80		90		100		7.01.0.00.0.00.21.0000 - Kecamatan Gane Timur
	Presentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa (Persentase)	50	0	60		70		80		90		100		7.01.0.00.0.00.22.0000 - Kecamatan Gane Timur Tengah
	Presentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa (Persentase)	50	0	60		70		80		90		100		7.01.0.00.0.00.23.0000 - Kecamatan Gane Timur Selatan

	Presentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa (Persentase)	50	0	60		70		80		90		100		7.01.0.00.0.00.24.0000 - Kecamatan Kepulauan Joronga
	Presentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa (Persentase)	50	0	60		70		80		90		100		7.01.0.00.0.00.25.0000 - Kecamatan Pulau Makian
	Presentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa (Persentase)	50	0	60		70		80		90		100		7.01.0.00.0.00.26.0000 - Kecamatan Makian Barat
	Presentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa (Persentase)	50	0	60		70		80		90		100		7.01.0.00.0.00.27.0000 - Kecamatan Kayoa
	Presentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa (Persentase)	50	0	60		70		80		90		100		7.01.0.00.0.00.28.0000 - Kecamatan Kayoa Barat
	Presentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa (Persentase)	50	0	60		70		80		90		100		7.01.0.00.0.00.29.0000 - Kecamatan Kayoa Utara
	Presentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa (Persentase)	50	0	60		70		80		90		100		7.01.0.00.0.00.30.0000 - Kecamatan Kayoa Selatan
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					18.128.683.253		20.702.384.115		23.333.725.314		25.333.725.314		27.233.825.314	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.128.683.253		6.702.384.115		6.833.725.314		7.733.725.314		7.733.825.314	
Meningkatnya kualitas Pelayanan urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketepatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran (%)	50	50	60	5.128.683.253	100	6.702.384.115	100	6.833.725.314	100	7.733.725.314	100	7.733.825.314	8.01.0.00.0.00.30.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		8.01.0.00.0.00.30.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	60	60	70		100		100		100		100		8.01.0.00.0.00.30.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					5.000.000.000		6.000.000.000		6.500.000.000		6.800.000.000		7.000.000.000	
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan pembinaan wawasan kebangsaan dan edilogi negara terhadap aparaturn dan masyarakat per 1.000 penduduk (%)	99,99	99,99	99,99	5.000.000.000	99,99	6.000.000.000	99,99	6.500.000.000	100	6.800.000.000	100	7.000.000.000	8.01.0.00.0.00.30.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI					3.000.000.000		3.500.000.000		5.000.000.000		5.300.000.000		6.000.000.000	

PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK														
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	65	65	75	3.000.000.000	78	3.500.000.000	81	5.000.000.000	83	5.300.000.000	85	6.000.000.000	8.01.0.00.0.00.30.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					1.000.000.000		750.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.500.000.000	
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	presentase organisasi kemasyarakatan yang aktif (%)	67	68	69	1.000.000.000	70	750.000.000	71	1.000.000.000	72	1.000.000.000	73	1.500.000.000	8.01.0.00.0.00.30.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					1.000.000.000		750.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.500.000.000	
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Presentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan (%)	56	56	58	1.000.000.000	60	750.000.000	65	1.000.000.000	70	1.000.000.000	75	1.500.000.000	8.01.0.00.0.00.30.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000	
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Presentase penyelesaian konflik di masyarakat (%)	85	85	86	3.000.000.000	87	3.000.000.000	85	3.000.000.000	87	3.500.000.000	88	3.500.000.000	8.01.0.00.0.00.30.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TOTAL KESELURUHAN					2538437039845.00		2612412943935.00		2743216027412.00		2825411048253.00		2943227218798.00	

Dalam RPJMN 2025-2029 juga memperkenalkan sesuatu yang disebut kegiatan Prioritas Utama. KPU ini dipilih dari seluruh Kegiatan Prioritas pada struktur Prioritas Nasional, sesuai dengan SPP. RPJMN 2025-2029 mendeskripsikan KPU sebagai “kebijakan terintegrasi yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional”.

Dalam penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2025-2029, tagging KPU dalam RPJMD adalah keharusan serta upaya memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah sudah sejalan dengan agenda pembangunan nasional, memastikan alokasi anggaran dan program strategis daerah mendukung arah pembangunan nasional, program daerah bisa diukur kontribusinya terhadap agenda nasional, memudahkan monitoring dan evaluasi, memudahkan integrasi anggaran, pelaporan pembangunan lintas pusat daerah sinkron dengan prioritas nasional. Adapun Program RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2025-2029 yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) antara lain sebagai berikut :

Tabel
Dukungan Program dalam RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2025-2029
Terhadap Kegiatan Prioritas Utama (KPU)

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM DALAM RPJMD TAHUN 2025-2029
(1)	(2)	(3)	(4)
	Prioritas Nasional 1	Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
	Prioritas Nasional 2	Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/ lumbung pangan lainnya	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
			Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
			Program Penyuluhan Pertanian
		Pembangunan pangan akuatik (blue food)	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
		Pembangunan pangan hewani	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM DALAM RPJMD TAHUN 2025-2029
(1)	(2)	(3)	(4)
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
		Pembangunan pangan lokal dan nabati	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
			Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
			Program Penyuluhan Pertanian
		Fortifikasi dan biofortifikasi pangan	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
		Konservasi Sumber Daya Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air
		Pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		Penyediaan dan pengawasan sanitasi aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim berbasis CWIS	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
		Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan
		Peningkatan Pengumpulan dan Pengelolaan Sampah serta Pemrosesan residu di TPA/LUR	Program Pengelolaan Persampahan
	Prioritas Nasional 3	Pengembangan dan peningkatan ekosistem digital	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
		Pengembangan koperasi sektor produksi	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM DALAM RPJMD TAHUN 2025-2029
(1)	(2)	(3)	(4)
	Prioritas Nasional 4	Perluasan layanan pendidikan anak usia dini	Program Pengelolaan Pendidikan
			Program Pembinaan Perpustakaan
		Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah madrasah yang berkualitas	Program Pengelolaan Pendidikan
		Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
			Program Pengelolaan Pendidikan
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
			Program Rehabilitasi Sosial
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
			Program Perlindungan Khusus Anak
			Program Pendaftaran Penduduk
			Program Pencatatan Sipil
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
			Program Pelatihan Dan Produktivitas Tenaga Kerja
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul	Program Pengelolaan Pendidikan

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM DALAM RPJMD TAHUN 2025-2029
(1)	(2)	(3)	(4)
		Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g. pelatihan, in-service training), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
		Peningkatan Fungsi Intermediasi dan layanan pemanfaatan IPTEK dan Inovasi	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
			Program Riset Dan Inovasi Daerah
		Penurunan Kematian Ibu dan Anak	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Pencegahan dan penurunan stunting	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
			Program Pengelolaan Pendidikan
			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
			Program Pengendalian Penduduk
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)
			Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM DALAM RPJMD TAHUN 2025-2029
(1)	(2)	(3)	(4)
			Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
			Program Pengelolaan Persampahan
			Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
		Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Penuntasan TBC	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Pemberian makan bergizi untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
			Program Pengelolaan Pendidikan
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi	Program Administrasi Pemerintahan Desa
			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
			Program Pengawasan Keamanan Pangan
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
			Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
			Program Penyuluhan Pertanian
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM DALAM RPJMD TAHUN 2025-2029
(1)	(2)	(3)	(4)
		Eliminasi penyakit kusta dan Schistosomiasis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Investasi Pelayanan Kesehatan Primer	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Produksi dan pendayagunaan SDM Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
		Pengembangan Manajemen Talenta Seni Budaya	Program Pengembangan Kesenian Tradisional
			Program Kepegawaian Daerah
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) riset dan inovasi	Program Kepegawaian Daerah
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
	Prioritas Nasional 5	Pengembangan Hilirisasi Nikel	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
		Pengembangan hilirisasi Kelapa Sawit	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM DALAM RPJMD TAHUN 2025-2029
(1)	(2)	(3)	(4)
			Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
			Program Perizinan Usaha Pertanian
			Program Penyuluhan Pertanian
		Pengembangan hilirisasi Kelapa	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
			Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
			Program Perizinan Usaha Pertanian
			Program Penyuluhan Pertanian
	Prioritas Nasional 6	Penyaluran Bantuan Sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran melalui kartu kesejahteraan	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
			Program Program Pemberdayaan Sosial
		Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)
		Pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur desa	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
			Program Administrasi Pemerintahan Desa
			Program Penataan Desa
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)
			Program Pengelolaan Pelayaran
	Prioritas Nasional 7	Pencegahan Tindak Pidanan Korupsi	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
			Program Penyelenggaraan Pengawasan
		Peningkatan kesejahteraan ASN melalui penerapan konsep total reward berbasis kinerja ASN	Program Kepegawaian Daerah
		Transformasi digital layanan publik prioritas	Program Pelayanan Penanaman Modal

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM DALAM RPJMD TAHUN 2025-2029
(1)	(2)	(3)	(4)
			Program Kepegawaian Daerah
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
		Ekstensifikasi dan Intensifikasi Penerimaan Perpajakan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
	Prioritas Nasional 8	Penguatan karakter dan jati diri bangsa	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
			Program Pengelolaan Arsip
		Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno
			Program Pengembangan Kebudayaan
		Peningkatan Ketahanan Iklim Pesisir dan Laut	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
			Program Penanggulangan Bencana

Selain itu dukungan program dalam RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2025-2029 terhadap Asta Cita adalah upaya untuk mensinergikan program-program daerah dengan prioritas nasional, sehingga pembangunan di pusat dan daerah selaras, terpadu, dan saling mendukung.

Program Asta Cita adalah susunan 8 cita-cita pembangunan strategis yang dicanangkan oleh pemerintahan nasional dan menjadi acuan penting bagi dokumen pembangunan daerah seperti RPJMD. Asta Cita dipakai sebagai kerangka orientasi kebijakan pembangunan nasional maupun daerah (kabupaten/kota/provinsi) agar program pembangunan daerah bisa selaras dengan arah pusat. Dokumen perencanaan daerah (RPJMD) diwajibkan memperhatikan Asta Cita agar kegiatan-kegiatan prioritas daerah tak berjalan sendiri dan searah dengan kebijakan nasional. Adapun Program Prioritas Daerah Kabupaten Halmahera Selatan yang mendukung Asta Cita sebagai berikut:

Tabel
Dukungan Program Prioritas Dalam Asta Cita

No	Asta Cita	Bidang Urusan	Program
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Program Pengelolaan Pendidikan
2	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
3	Melanjutkan Hilirisasi Dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah Di Dalam Negeri.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
4	Membangun Dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi Dan Pemberantasan Kemiskinan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)
5	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, Dan Hak Asasi Manusia (HAM)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Program Penanggulangan Bencana
	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan Yang Harmonis Dengan Lingkungan, Alam, Dan Budaya Serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil Dan Makmur		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
6	Membangun Dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi Dan Pemberantasan Kemiskinan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Program Pemberdayaan Sosial
	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas.		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
7	Membangun Dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi Dan Pemberantasan Kemiskinan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

No	Asta Cita	Bidang Urusan	Program
(1)	(2)	(3)	(4)
	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas.		Program Hubungan Industrial
8	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
			Program Perlindungan Khusus Anak
9	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
			Program Penanganan Kerawanan Pangan
10	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee
11	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan Yang Harmonis Dengan Lingkungan, Alam, Dan Budaya Serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil Dan Makmur.		Program Pengelolaan Persampahan
12	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Program Pencatatan Sipil
13	Membangun Dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi Dan Pemberantasan Kemiskinan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Program Penataan Desa
	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan Yang Harmonis Dengan Lingkungan, Alam, Dan Budaya Serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil Dan Makmur		Program Administrasi Pemerintahan Desa
14	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)
15	Melanjutkan Hilirisasi Dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah Di Dalam Negeri.		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)
	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)
			Program Pengelolaan Pelayaran
16	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, Dan Hak Asasi Manusia (HAM).	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik

No (1)	Asta Cita (2)	Bidang Urusan (3)	Program (4)
	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, Dan Penyelundupan		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
17	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Ukm)
18	Melanjutkan Hilirisasi Dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah Di Dalam Negeri.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
19	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
20	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, Dan Penyelundupan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
21	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, (9) Ekonomi Kreatif, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru Memperkuat Reformasi Politik, Hukum Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, 2.21.02.2.01.0008 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Dan Persandian Pemerintah Daerah Dan Penyelundupan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
22	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Koperasi. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan Yang Harmonis Dengan Lingkungan, Alam, Dan Budaya Serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil Dan Makmur.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Program Pengembangan Kebudayaan Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
23	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan Yang Harmonis Dengan Lingkungan, Alam, Dan Budaya Serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil Dan Makmur.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Program Pembinaan Perpustakaan Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno
24	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan Yang Harmonis Dengan Lingkungan, Alam, Dan Budaya Serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil Dan Makmur.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Program Pengelolaan Arsip

No	Asta Cita	Bidang Urusan	Program
(1)	(2)	(3)	(4)
25	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
26	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
27	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
28	Melanjutkan Hilirisasi Dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah Di Dalam Negeri.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
			Program Pengembangan Ekspor
29	Melanjutkan Hilirisasi Dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah Di Dalam Negeri.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Program Pengendalian Izin Usaha Industri
30	Membangun Dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi Dan Pemberantasan Kemiskinan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
			Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
31	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, Dan Hak Asasi Manusia (HAM).	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan Yang Harmonis Dengan Lingkungan, Alam, Dan Budaya Serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil Dan Makmur.		
	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan Yang Harmonis Dengan Lingkungan, Alam, Dan Budaya Serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil Dan Makmur		
	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, Dan Penyelundupan		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Pada bagian ini akan disampaikan penjabaran mengenai tolak ukur kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) serta Indikator Kinerja Kunci (IKK). Daftar indikator yang termuat bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai keberhasilan pembangunan yang ditunjukkan dari akumulasi hasil pembangunan setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Suatu indikator kinerja dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator yang saling berkaitan (kausalitas indikator) dengan tetap mempertimbangkan program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas yang telah ditetapkan pada RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.

4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja strategis yang relevan dan selaras dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD 2025-2029 kemudian ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU adalah ukuran keberhasilan pencapaian RPJMD serta Visi dan Misi Kepala Daerah. Target yang tercantum berlaku dari tahun 2025-2030; dengan tahun 2030 sebagai tahun transisi yang menjadi tanggung jawab Kepala Daerah pada periode selanjutnya. IKU dievaluasi setiap tahun untuk menjadi dasar penetapan perjanjian kinerja organisasi. Lebih lanjut penetapan IKU Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dapat dilihat pada Tabel 4.2. dibawah ini

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama

INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	Indeks	66,66	67,96	68,46	68,46	68,86	69,19	
Tingkat Kemiskinan ((%))	%	5,63	5,63	4,43	4,03	3,63	3,26	
Rasio Gini (Indeks)	Indeks	0,237	235	0,233	0,23	0,228	226	
Indeks Pendidikan (Indeks)	Indeks	68,43	69,31	70,19	71,95	72,83	73,71	
Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))	Tahun	66,98	67,25	67,52	67,79	68,06	68,33	
Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga* ((%))	%	65,64	66,35	67,07	67,78	68,49	68,49	
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	%	1,9	1,9	1,8	1,7	1,6	1,5	
persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani (%)	%	67	71	74	78	82	86	
Indeks Daya Saing Daerah (Angka)	Angka	2,6	2,7	2,8	2,9	3	3,1	
Indeks Ketimpangan Wilayah (Angka)	Angka	160	154	147	141	134	134	
Persentase Penurunan Emisi GRK (Persentase)	%	80,36	80,37	80,39	80,7	80,8	81,03	
Rasio Konektivitas Wilayah (%)	%	63	65	67	73	75	81	
Indeks Infrastruktur (Angka)	Angka	40	45	50	55	60	65	
Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang (Persentase)	%	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	
Persentase Desa Mandiri (%)	%	5,62	5,62	5,62	5,62	5,62	5,62	
Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	%	77,02	77,11	77,19	77,28	77,37	77,46	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Indeks)	Indeks	83,55	83,72	83,89	84,06	84,23	84,23	
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	%	21,34	22,04	22,64	23,14	23,54	24	
PDRB per Kapita (Rp)	Rp	74,24	74,24	77,54	81,11	84,31	142,95	
Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	%	12,4	12,4	13,9	15,4	16,9	18,4	

INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)	Indeks	53,76	54,36	54,96	55,56	56,16	56,76	
Kontribusi PDRB Kabupaten Halmahera Selatan (%)	%	22,47	22,47	22,51	22,55	22,62	35	
Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	%	5,2	6,5	7,7	8,9	9,5	10	
Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota (%)	%	27,35	28,4	29,1	30	31	31,9	
Indeks Zakat Nasional (IZN) (Poin)	Poin	0,2	0,23	0,26	0,29	0,3	0,32	
Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	Indeks	65	69	74	78	85	90	
Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	Indeks	3,1	3,6	3,9	4,1	4,4	4,6	
Indeks Integritas Nasional (Persentase)	%	73,7	74,5	75,4	76,6	77,5	77,6	
Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	Indeks	25,42	27,13	29,87	30,58	31,76	32,54	
Rasio Kemandirian Fiskal (Nilai)	Nilai	11,5	14	17	21	25	30	
Return on Asset (ROA) BUMD (%)	%	1	1	1	1	1	1	
Indeks Pembangunan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Angka)	Angka	5	5,2	5,4	5,6	5,8	6,2	
Indeks Inovasi Daerah (Angka)	Angka	55,24	60,24	61,24	62,24	63,24	64,24	
Indeks Ketahanan Daerah (Angka)	Angka	0,4	0,5	0,6	0,75	0,8	0,85	
Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) ((%))	%	65	68	70	75	78	80	
Indeks Ketenteraman dan Ketertiban (Angka)	Angka	50	65	70	80	85	100	
Indeks Risiko Bencana (Indeks)	Indeks	193,6	191,6	190,1	188,6	187,1	186,6	

4.2.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator Kinerja Daerah sebagai instrumen yang berfungsi penting untuk mengukur pencapaian tujuan pembangunan daerah jangka menengah, dan menggambarkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan alat evaluasi dan perbaikan serta mengedepankan azaz

transparansi dan akuntabilitas. Selengkapnya indikator kinerja daerah pada Tabel 4.3. adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Utama Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
1	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	%	1,07	1,07	5	7	9	10	11	
2	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	44,01	44,53	45,06	45,58	46,10	46,63	47,15	
3	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	56,54	56,76	59,98	57,20	57,42	57,63	57,85	
4	Persentase pemenuhan capaian kebutuhan dasar SPM sub urusan bencana	Daerah	25	25	30	35	40	45	50	
5	Terpenuhinya Kebutuhan SPM sub urusan Kebakaran yang sesuai standar*	Daerah	10	10	12	15	17	20	25	
6	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	15	15	15	15	15	15	15	
7	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	%	27,04	27,04	25,28	23,53	21,77	20,01	18,25	
8	Proporsi areal pertanian produktif dan berkelanjutan	%	9,11	9,11	9,20	9,30	9,39	9,49	9,58	
9	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	%	60	60	70	80	90	100	100	
10	Indeks Kualitas Udara	Indeks		85,42	85,62	85,82	86,02	86,22	86,22	
11	Indeks Kualitas Air	Indeks		78,28	78,48	78,62	78,88	79,08	79,08	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
12	Indeks Kualitas Lahan	Indeks		89,12	89,19	89,26	89,33	89,40	89,40	
II ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT										
1	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat	%	86	87,3	87,95	88,6	89,25	89,9	90,55	
2	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat	%	96,73	96,87	97,01	97,15	97,29	97,43	97,57	
3	Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/ sederajat, dan SMP/ sederajat	%	86	73,38	83,38	93,38	100	100	100	
4	Indeks Pencapaian SPM Pendidikan	Indeks	46,97 (Belum Tuntas)	47,97 (Belum Tuntas)	50 (Tuntas)	50,10 (Tuntas)	55,40 (Tuntas)	60 (Tuntas)	65 (Tuntas)	
5	Rata Rata Lama Sekolah	Tahun	8,5	8,5	9,7	10,40	10,75	11,10	11,45	
6	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,5	13,5	13,40	13,56	13,82	14	14	
7	Jumlah Kematian Ibu (AKI)	(per 100.000 kelahiran hidup)	281	122	109	97	86	77	75	
8	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	%	84	98	98	98	98	98	98	
9	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	32,2	28,8	27,5	26	25	24	23	
10	Jumlah Kematian Balita	Per 100.000 Kelahiran Hidup	16	15	13,8	13,1	12,5	11,9	11	
11	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	%	81	90	90	90	90	90	90	
12	Penemuan Kasus TBC	%	90	90	90	90	90	90	90	
13	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	%	38	40	42	45	50	55	60	
14	Cakupan imunisasi bayi lengkap	%	90	93	95	97	98	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
15	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	28	35	37	40	43	50	55	
16	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	%	45	50	55	60	65	70	70	
17	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	%	0,060	0,063	0,065	0,068	0,070	0,073	0,075	
18	Persentase PMKS / PPKS yang mendapatkan Bantuan	%	62	62	67	72	77	82	87	
19	Persentase PSKS yang diberdayakan	%	55	55	60	65	70	75	80	
20	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	64,93	65,91	66,91	67,93	68,96	70	70,20	
21	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	85,01	85,01	87,91	87,99	88,12	88,23	88,31	
22	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	27,86	30,86	33,86	37,86	41,86	46,86	50,86	
23	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	58,93	60,46	61,79	63,15	64,51	65,98	66,97	
24	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	59,63	60,12	62	63,15	64,51	65,98	66,97	
25	Pendapatan Per Kapita di Wilayah Transmigrasi	Angka	50	50	50	50	50	50	50	
III ASPEK DAYA SAING DAERAH										
1	Rasio kemantapan jalan	%	27,34	28,66	30,16	31,16	33,16	34,66	35,16	
2	Tingkat Kemantapan Jalan	%	27,34	28,66	30,16	31,66	33,16	34,66	35,16	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
3	Indeks Desa	Indeks	5,62	5,62	5,62	5,62	5,62	5,62	5,62	
4	Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Kabupaten/Kota	%	60,33	63,24	66,40	69,72	73,21	76,87	80,71	
5	Indeks Perkembangan Harga	%	3,20	3,20	4,50	5,50	6,50	7,50	7,55	
6	Rasio Kewirausahaan	%	3	3,21	3,47	3,67	3,82	4,01	4,25	
7	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Non Pertanian	%	50	50	55	60	65	70	70	
8	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	20,5	20,5	25,5	30	35,5	40	45	
9	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	
10	Nilai Realisasi Penanaman Modal	Triliun rupiah	221.543.610.361.007	232.620.790.879.057	250.000.000.000.000	255.000.000.000.000	260.000.000.000.000	265.000.000.000.000	270.000.000.000.000	
11	Persentase Kapasitas daya saing keolahragaan	%	50	60	65	70	75	80	85	
12	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	% Nilai	20	20	25	30	35	40	45	
13	Tingkat pemuda partisipasi dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	25	25	30	35	40	45	50	
14	Peningkatan Prestasi Olahraga	%	75	75	80	85	90	100	100	
15	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Ton	42.208,69	44.313,13	45.731,19	47.561,18	49.463,63	51.442,18	53.449,87	
16	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	%	60	65	70	75	80	85	85	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
17	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	0	2,98	2,43	2,49	2,55	2,61	2,64	
18	Jumlah Produk Inovasi Daerah	Inovasi	11	11	11	17	25	33	50	
19	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,68	0,76	0,85	0,95	1,06	1,18	1,32	
IV ASPEK PELAYANAN UMUM										
1	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Nilai	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	
3	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Pelaporan Pengelolaan Keuangan dan BMD	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya ((%))	%	40	40	40	50	60	70	75	
6	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum	Nilai	60	65	75	85	90	95	100	
7	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Nilai	60	65,23	68,49	71,92	75,51	79,29	83,25	
8	Persentase Transformasi Layanan Informasi Publik Secara Digital	%	62	62	65,5	69	72,5	76	79,5	
9	Persentase Pembangunan Statistik	%	58,6	58,6	58,8	59	59,2	59,4	59,4	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
10	Persentase Keamanan Layanan Informasi Publik	%								
11	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	70,6	70,10	70,15	70,20	70,25	70,30	70,35	
12	Indeks Tata Kelola Pengadaan	%	4,19	4,19	3,97	3,75	3,31	3,09	3,09	
13	Presentase Produk Hukum yang dihasilkan	%	46	50	65	70	75	80	85	
14	Presentase Capaian Aksi HAM	%	57,87	57,87	62,12	66,36	70,64	74,89	79,15	
15	Nilai LPPD	Nilai	2,980	2,990	2,990	2,990	2,991	3,00	3,00	
16	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	80	80	80	85	85	87	95	
17	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPd	%	90	90	90	91	92	93	94	
18	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Angka		60	65	70	75	80	85	
19	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	%	12	29	30	32	34	36	38	
20	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3	3	3	4	4	4	4	
21	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan	%	50	55	65	70	75	80	85	
22	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	Angka	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	

4.2.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci merupakan indikator kerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Selatan. IKK ini berfungsi sebagai alat untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Berikut Indikator Kunci Kinerja dalam perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.4 dibawah ini.

Tabel 4. 4
Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.	Iklim Keamanan SMP	positif	Nilai	61,21	72,49	73,14	73,81	74,47	75,13	75,79	
2.	Iklim Kebinekaan SD	positif	Nilai	71,55	72,55	73,55	74,55	75,55	76,55	77,55	
3.	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	positif	Nilai	64,78	64,78	70	72,23	73,33	74,43	75,53	
4.	Iklim Keamanan SD	positif	Nilai	61,21	72,49	73,14	73,81	74,47	75,13	75,79	
5.	Iklim Inklusivitas SD	positif	Nilai	58,9	61,4	63,9	66,4	68,9	71,4	73,9	
6.	Iklim Kebinekaan SMP	positif	Nilai	70,31	71,31	72,31	73,31	74,31	75,31	76,31	
7.	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan (APS)	positif	%	74,15	77,3	80	82,69	85,29	87,75	89,83	
8.	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	positif	Persentase	98,23	98,53	98,8	99,03	99,22	99,37	99,37	
9.	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	positif	Persentase	24,82	25,53	29,59	33,5	37,23	40,79	43,97	
10.	Iklim Inklusivitas SMP	positif	Nilai	57,26	59,66	62,06	64,46	66,86	69,26	71,66	
11.	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	positif	%	62,71	62,97	63,38	65,65	73	81,81	90,63	

11.	Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS)	positif	Persentase	74,64	75,22	75,85	76,47	77,08	77,7	78,32	
12.	Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	positif	Persentase	58,06	59,92	63,06	68,65	70,01	71,2	72,4	
13.	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
14.	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	positif	Persentase	76	76	79	81	89	95	100	
15.	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui	positif	Persentase	70	70	73	75	80	90	95	
16.	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	positif	%	61,21	72,49	73,14	73,81	74,47	75,13	75,79	
17.	Rata - Rata Kemampuan Literasi SD Berdasarkan Asesmen Nasional	positif	Nilai	60,05	62,55	65,05	67,55	70,05	72,55	75,05	
18.	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	positif	Nilai	53,38	56,28	59,18	62,08	64,98	67,88	70,88	
19.	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	positif	Nilai	68,93	70,03	71,13	72,23	73,33	74,43	75,53	
32.	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
33.	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	positif	%	0	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	
34.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	positif	Orang	11,6	11,4	11,2	10,97	10,46	9,96	9,5	

35.	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	positif	%	22	30	40	50	60	70	80	
36.	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	positif	Persentase	8,5	8	7,5	7	6,5	5	4,5	
37.	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup.	positif	Orang	8,3	8,2	8,1	8	7,6	7,2	7	
38.	Jumlah infeksi baru HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksi.	positif	Orang	0,7	0,6	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	
39.	Penemuan Kasus TBC	positif	%	84	90	90	90	90	90	90	
40.	Penertiban Dan Pemenuhan Komitmen SPPIRT Sesuai Standar	positif	Persentase	60	65	70	75	80	85	90	
41.	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	komulatif	Persentase	15	20	25	75	35	40	50	
42.	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
43.	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	positif	%	83	85	87	88	90	92	95	
44.	Persentase Ketepatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	positif	%	70	72	75	80	85	90	95	
45.	Persentase Ketepatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	positif	%	70	72,3	75	80	85	90	95	
46.	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	positif	Persentase	65	65	75	80	85	90	95	

47.	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
48.	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	positif	%	65	70	75	80	85	90	95	
49.	Persentase lanjut usia yang mandiri	positif	%	0	50	55	60	65	70	75	
50.	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	positif	%	7,5	7,4	7,3	7,2	7,1	7	6,9	
51.	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	positif	Persentase	50	55	60	70	80	85	90	
52.	Presentase Apotek Dan Toko Obat Yang Mampu Memelihara Persyaratan Perizinan	positif	Persentase	50	55	65	75	85	90	95	

53.	Presentase Pangan Industri Rumah Tangga Aman Dan Bermutu	positif	Persentase	15	30	45	55	65	75	85	
54.	Presentase Penduduk Menerapkan Perilaku Hidup Sehat	positif	Persentase	35	40	45	50	55	60	65	
55.	Presentase Puskesmas dengan SDMK Sesuai Standar	positif	Persentase	28	35	40	50	60	70	80	
56.	Presentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Dan Lintas Sektor Yang Ditindaklanjuti Oleh Pemerintah Daerah	positif	Persentase	50	55	65	75	86	90	95	
57.	Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	positif	Persentase	33	50	60	65	75	80	85	
58.	Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	positif	Persentase	70	72	75	80	85	90	95	

59.	Presentase Sarana IRTP Yang Memenuhi Ketentuan	positif	Persentase	29	40	50	60	70	80	90	
60.	Presentase UKBM Aktif	positif	Persentase	70	75	80	85	90	95	100	
61.	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	negatif	%	19,3	19,1	18,9	18,7	18,5	18,3	18,1	
62.	Rasio tenaga Kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	positif	Persentase	0,4	0,5	0,6	0,65	0,7	0,75	0,8	
63.	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	positif	%	75	76,6	78	80	82	85	88	
64.	Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan	positif	%	72	75	78	82	85	88	90	

65.	Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	positif	%	88	90	91	92	93	94	95	
66.	Kematian akibat penyakit kardiovaskuler, kanker, diabetes atau penyakit pernapasan kronis.	negatif	Kasus	29	27	26	25	23	21	20	
67.	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna		Persentase	85	87	100	100	100	100	100	
68.	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	positif	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	
69.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	positif	%	42	45	55	65	75	85	90	
70.	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	positif	%	68	70	75	80	85	87	90	
71.	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	positif	%	55	60	75	80	90	100	100	

72.	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
73.	Jumlah Jembatan Yang Di Bangun	positif	Jembatan	60	60	64	68	72	76	80	
74.	Kapasitas Air Baku	positif	(%)	0,57	0,57	0,6	0,62	0,63	0,64	0,65	
75.	Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob	positif	Persentase	19,09	19,71	20,34	21,59	22,84	24,09	25,34	
76.	Panjang Jalan yang Dibangun	positif	Km	13,07	15,67	18,18	23,29	29,82	34,04	30,25	

77.	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	positif	Persentase	13,99	14,8	15,61	17,23	18,83	20,45	22,06	
78.	Panjang Jalan yang Direkonstruksi atau di Rehabilitasi	komulatif	Km	47,28	0	5,456	6,956	8,456	9,956	11,456	
79.	Panjang Jalan yang Ditingkatkan (Struktur dan fungsi)	positif	Km	28,66	30,66	31,66	33,66	36,66	39,66	42,66	
80.	Penetapan Rencana Rinci Tata RuangÂ (RRTR)	positif	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	
81.	Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	positif	Kasus	2	0	2	2	2	2	2	
82.	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	positif	Persentase	51,45	52,02	52,59	53,73	54,88	56,03	57,17	
83.	Persentase Ketepatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
84.	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
85.	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	positif	Persentase	0	0	50	60	70	80	90	

86.	Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
87.	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	positif	Persentase	27	31,82	36,64	46,3	55,96	65,62	72,28	
88.	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										

89.	Rumah tangga dengan akses air minum aman (%)	positif	%	44,01	44,53	45,06	45,58	46,1	46,63	47,15	
90.	Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni)	positif	%	23,07	22,98	22,89	22,81	22,72	22,63	22,54	
91.	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	positif	%	13,15	13,77	100	100	100	100	100	
92.	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	positif	%	44,67	44,88	45,01	46,24	47,33	48,45	49,59	
93.	Konsumsi Listrik per Kapita	positif	Kwh/Kapita	1.218,1	1.218,1	1.220,6	1.320,5	1.380,7	1.440,8	1.520,8	
94.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	positif	%	45	45,44	100	100	100	100	100	
95.	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	positif	Persentase	66,67	66,9	67,67	68,33	69,45	69,57	70,19	
96.	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	positif	Persentase	31,53	32,06	32,51	33,58	34,1	34,63	35,15	
97.	Persentase Desa Yang Teraliri Listrik	positif	%	55,42	56,15	66,15	66,87	67,15	67,15	67,59	
98.	Persentase Ketepatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	

99.	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
100.	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	positif	Persentase	20,12	21,95	22,5	23,46	23,87	24,23	35,11	
101.	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	positif	Persentase	56,54	56,76	56,98	57,2	57,42	57,63	57,85	
102.	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU	positif	Persentase	50	50	60	70	80	90	100	
103.	Presentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan utilitas umum)	positif	%	31,56	32,65	33,32	43,44	44,77	45,68	46,89	
104.	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal Kelebihan dari Tanah Maksimum dan Tanah Absentee	positif	%	0	0	5	6	7	8	9	
105.	Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	

106.	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
107.	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	positif	Persentase	0	30	35	40	50	60	70	
108.	Persentase Ketepatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	positif	%	100	0	100	100	100	100	100	
109.	Persentase Ketepatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
110.	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	positif	%	100	0	100	100	100	100	100	
111.	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
112.	Persentase Penanganan Pasca Bencana	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
113.	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	positif	Persentase	70	80	85	85	90	95	95	
114.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	positif	%	30	40	50	60	70	80	90	
115.	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	positif	Persentase	4	5	6	6	7	8	10	
116.	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	positif	Persentase	80	80	85	90	95	95	100	

117.	Presentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
118.	Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
119.	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	positif	Persentase	10	15	20	40	60	80	100	
120.	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	positif	Persentase	80	80	85	90	95	95	100	
121.	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
122.	Persentase Ketepatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	positif	%	50	50	60	70	80	90	100	
123.	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
124.	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	positif	Persentase	30	30	35	40	50	60	70	
125.	persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	positif	%	0	23,5	23,5	24,55	25,6	26,65	27,7	
126.	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	positif	Persentase	0	50	50	55	60	65	70	
127.	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	positif	Persentase	48	49	49	50	51	52	53	

128.	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi	positif	%	45	46	46	47	48	49	50	
129.	Persentase SDM kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	positif	%	58	60	60	65	70	75	80	
130.	presentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial	positif	%	40	40	40	50	60	70	80	
131.	Presentase lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial	positif	%	45	50	50	55	60	65	70	
132.	Presentase Masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya	positif	%	0	21	21	22	23	24	25	
133.	Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	positif	%	70	75	80	85	90	95	100	
134.	Persentase Daerah Yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	positif	%	40	45	45	50	55	60	65	
135.	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA										
	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	Positif	Persen	60,12	6012	68,96	74,61	89,53	100	100	

136.	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	positif	Orang	23	23	20	25	30	30	30	
137.	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Renstra dan Renja SKPD mengacu pada dokumen RTKD	komulatif	%	2	2	2	2	2	2	2	

138.	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	komulatif	Orang	150	150	200	200	200	200	200	
139.	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	positif	(%)	17	17	18	18	19	20	21	
140.	Persentase Ketepatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	positif	%	85	85	100	100	100	100	100	
141.	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
142.	Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
143.	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
144.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	positif	%	47,72	47,72	47,9	48	48,5	49,1	49,1	
145.	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	positif	Indeks	-	-	6,97	7	7	7	7	
146.	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	positif	Indeks	-	65	66,34	68	70	72	73	

147.	Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	positif	Nilai	430	370	500	600	650	700	800	
148.	Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah	positif	Nilai	0	0-0	400-500	501-550	551-600	601-650	651-799	

149.	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai	positif	Indeks	-	-	1	1	1	1	1	
150.	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
151.	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	komulatif	Persentase	5,45	0	3,7	4	5	6	6	
152.	Persentase Ketepatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
153.	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
154.	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
155.	Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
156.	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan	positif	Persentase	6	6	11	13	15	17	18	
157.	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN										
158.	Skor Pola Pangan Harapan	positif	Nilai	57,17	57,17	57,17	59	60	62	63	

159.	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan		%	55	55	60	75	85	95	100	
160.	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	negatif	%	1,3	1,3	1,2	1	1	0	0	
161.	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
162.	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
163.	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	positif	%	100	100	82	85	90	95	100	
164.	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	positif	Persentase	18	18	25	35	45	55	65	
165.	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya	positif	Persentase	0	0	10	15	20	25	30	
166.	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	positif	Persentase	0	0	10	15	20	25	30	
167.	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota	positif	%	78,95	78,95	85	87,5	90	95	100	
168.	Persentase Ketepatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	positif	%	100	100	82	85	90	95	100	

169.	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	positif	Persentase	22	22	30	30	30	30	30	
170.	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	positif	Persentase	0	0	10	15	20	25	30	
171.	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	positif	Persentase	50	50	60	70	80	90	100	
172.	Persentase RTH	positif	Persentase	25	25	35	40	45	50	55	
174.	Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	positif	%	100	100	82	85	90	95	100	
175.	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	positif	poin	7,575	7,727	7,879	8,031	8,183	8,335	8,487	
	Timbulan Sampah Terolah di fasilitas Pengolahan Sampah	Positif	%		30	35	40	45	50	50	
	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Positif	%	40	45	50	55	60	80	80	
176.	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
177.	Presentase Kepemilikan Identitas kependudukan digital	Positif	%	28,5	30	30	35	40	45	50	
178.	cakupan pengelolaan profil kependudukan	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
179.	Persentase akta Perceraian yang diterbitkan	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	

180.	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran bagi anak usia 0-17 Tahun	positif	%	98	93	98	98	98	98	98	
181.	Persentase Kepemilikan Akta Nikah	positif	%	60	90	90	90	95	95	100	
182.	Persentase Kepemilikan E-KTP	positif	%	99,4	95	95	95	96	96	97	
183.	Persentase Ketepatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	positif	%	90	90	90	90	92	92	94	

184.	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
185.	Persentase Pencatatan Akta Kematian	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
186.	Persentasi Capaian Perjanjian Kerja sama (PKS)	positif	OPD	75	80	67	75	83	92	100	
187.	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas anak	positif	%	34,07	40	60	62	64	66	68	
188.	Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	positif	%	90	90	90	90	90	90	90	
189.	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										
190.	Jumlah Desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa berbasis digital	positif	Desa	50	50	50	100	150	200	249	
191.	Jumlah Desa yang menerapkan sistem informasi desa berbasis Prodeskel/Epdeskel dalam perencanaan dan Pelaporan	positif	Desa	10	10	10	25	45	75	100	

192.	Jumlah Desa yang tertib dalam pengelolaan Aset Desa pada Aplikasi Sipades	positif	Desa	15	15	15	30	45	70	100	
193.	Jumlah fasilitasi lembaga posyandu dalam pelaksanaan 6 bidang SPM	positif	Lembaga	249	249	249	249	249	249	249	
194.	Penilaian Teknologi Tepat Guna	positif	Kelompok	3	3	3	5	9	13	15	
195.	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	positif	Persentase	249	249	249	249	249	249	249	
196.	Persentase BUM Desa Maju	positif	Persentase	5	5	5	10	15	15	25	
197.	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
198.	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	positif	Persentase	249	249	249	249	249	249	249	
199.	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	positif	Persentase	249	249	249	249	249	249	249	
200.	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
201.	Jumlah desa maju dan mandiri (Desa)		Desa	Desa	Desa	Desa	Desa	Desa	Desa	Desa	
202.	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										
203.	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri	positif	Persentase	4	5,9	7,45	9	12	15	18	

204.	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	negatif	Angka	25	47,5	45,34	43	41	39	38	
205.	Indeks Lansia Berdaya	positif	Indeks	63,59	64,64	65,7	67	68	69	70	
206.	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	positif	Indeks	80,26	81,19	82,12	83	84	85	86	

207.	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	positif	Persentase	9,8	5,89	4,62	4	4	4	4	
208.	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	positif	%	54,8	65	70	75	78	80	85	
209.	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN										
210.	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
211.	Persentase Tingkat Kecelakaan Transportasi Jalan	negatif	%	65	70	0,5	0,45	0,4	0,35	0,3	
212.	Konektivitas Darat	positif	Persentase	50	50	78	80	83	86	90	
213.	Persentase Tingkat Kecelakaan Transportasi Laut	negatif	%	64	65	5	4	3	2	1	
214.	Tersedianya Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) dengan Akreditasi Minimal B	positif	Unit	50	50	50	75	85	88	95	
215.	Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	

216.	Persentase Ketepatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
217.	Jumlah Pelabuhan Laut yang terbangun/direhabilitasi	negatif	Pelabuhan	8	6	6	6	6	6	6	

218.	Jumlah pelabuhan penyebrangan	positif	Pelabuhan	5	5	6	6	6	6	6	
219.	Konektivitas Laut	positif	Unit	50	55	75	78	82	86	90	
220.	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
221.	Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
222.	Persentase Tingkat kepuasan Masyarakat terhdapa akses kualitas informasi publik pemeritnah daerah (Survei)	positif	%	70	70	78	81	84	87	90	
223.	Persentase Ketepatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
224.	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
225.	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH										
226.	Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	positif	%	25	25	25	18	20	22	23	
227.	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	positif	Persentase	0	0	0	100	100	100	100	
228.	Pertumbuhan volume usaha koperasi	komulatif	%	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	

229.	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan dan Pelaporan Dokumen	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
------	---	---------	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

	Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah										
230.	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	positif	%	25	25	25	75	77,15	79	82,12	
231.	Persentase UMKM yang mendapatkan pemberdayaan	positif	%	0	0	50	100	150	200	250	
232.	Persentase UMKM yang mendapatkan pemberdayaan	positif	%	45	45	45,5	47	50	55	55	
233.	Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
234.	Persentase Ketepatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
235.	Persentase Koperasi Aktif	positif	%	0	0	0	0	0	0	0	
236.	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL										
237.	Persentase Ketepatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	positif	%	100	0	100	100	100	100	100	
238.	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	positif	%	100	0	100	100	100	100	100	
239.	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	positif	Persentase	100	0	100	100	100	100	100	
240.	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
241.	presentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
242.	Realisasi Total terhadap	positif	Persentase	0	0	0	0	0	0	0	

	Target Investasi										
243.	Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	positif	%	100	0	100	100	100	100	100	
244.	Persentase Kerja Sama Penanaman Modal yang Ditindaklanjuti	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
245.	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA										
246.	Persentase keterlibatan masyarakat dalam olahraga	positif	%	40	35	40	45	50	60	70	
247.	Jumlah Sarana Prasarana Olahraga Yang Terbangun	positif	Unit	3	2	4	6	8	10	12	
248.	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	positif	Persentase	-	-	0	0	0	0	0	
249.	Persentase Ketepatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	positif	%	99,23	0	100	100	100	100	100	
250.	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	positif	%	100	0	100	100	100	100	100	
251.	Prestasi pada Event Olahraga Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional	positif	Orang	70	75	80	85	90	95	100	
252.	Rasio Wirausaha Muda	positif	Rasio	99	20	25	30	35	40	45	
253.	Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	positif	%	92,64	0	100	100	100	100	100	
254.	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kepramukaan	positif	%	20	25	30	35	40	45	50	
255.	2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK										

256.	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	positif	Poin	2,91	2,93	2,94	2,95	2,96	2,97	2,98	
257.	Persentase Publikasi Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) dalam Modul E-Walidata SIPD	positif	Persentase	75	80	85	90	95	100	100	
258.	2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN										
259.	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	positif	Angka	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	
260.	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										
261.	Persentase Kesenian Tradisional yang Dikembangkan dan dimanfaatkan	positif	%	50	50	55	60	65	70	75	
262.	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	positif	Persentase	11	11	13	15	18	21	24	
263.	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN										
264.	Persentase Ketepatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	positif	%	70	73	75	77	80	83	85	
265.	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	positif	%	70	73	75	77	80	83	85	
266.	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	positif	Persentase	0	0	2	5	8	10	12	
267.	Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	

268.	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	positif	%	62,1	62,1	63,2	65,1	67,05	68,25	70,05	
269.	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN										
270.	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	positif	Persentase	60	60	65	70	75	80	85	
271.	Tingkat Ketersediaan Arsip	positif	Persentase	45,5	45,5	50	55	60	65	70	
272.	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
273.	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN										
274.	Persentase Ketepatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
275.	Produksi Perikanan Budidaya	positif	Ton	1.351,4	1.364,91	1.378,56	1.329,35	1.406,27	1.420,33	1.434,39	
276.	Produksi Perikanan Tangkap	positif	Ton	45.044,49	45.945,38	46.864,29	47.801,57	48.757,61	49.732,76	5.070,791	
277.	Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
278.	Angka Konsumsi Ikan	positif	Kg/KAP/TH	63	65	67	68	69	70	71	
279.	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
280.	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA										
281.	Persentase Ketepatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	positif	%	100	0	100	100	100	100	100	

282.	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif		Rp	20	20	25	30	35	40	45	
283.	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	positif	%	100	0	100	100	100	100	100	
284.	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	positif	Persentase	0	0	3,5	6,8	9,5	11	12,7	
285.	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	positif	Persentase	20	20	25	30	35	40	45	
286.	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	positif	Persentase	7,2	7,2	9	10	11,2	12,5	13	
287.	Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	positif	%	100	0	100	100	100	100	100	
288.	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN										
289.	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	positif	Dokumen	100	100	100	100	100	100	100	
290.	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	positif	Ha	21.202,12	21.202,12	21.423,36	22.971	24.520	26.068	27.616	
291.	Jumlah Produksi Daging (sapi, kerbau, domba, kambing, ayam, itik, babi)	positif	Ton	110	110	113,9	127	139	152	165	
292.	Jumlah Produksi Jagung	positif	Ton	340	340	361	469	610	793	1.031	
293.	Jumlah Produksi Padi	positif	Ton	600	600	650	845	1.098	1.427	1.855	
294.	Jumlah Produksi Pangan Lokal Non Beras (Ubi Kayu dan Ubi Jalar)	positif	Ton	250	250	300	375	450	500	550	
295.	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura jenis bawang merah	positif	Ton	350	350	371	419	472	532	598	
296.	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Jenis Cabai	positif	Ton	600	600	651	721	799	886	981	

297.	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Cengkeh	positif	Ton	769	769	839	915	991	1.067	1.143	
298.	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kakao	positif	Ton	2.195	2.195	2.417	2.636	2.855	3.074	3.293	
299.	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kelapa	positif	Ton	23.252	23.252	25.577	27.902	30.227	32.552	34.877	
300.	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kopi	positif	Ton	0	50	100	150	200	250	300	
301.	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Pala	positif	Ton	601	601	650	743	787	831	975	
302.	Jumlah Produksi Telur	positif	Ton	35,5	35,5	40,884	42,519	44,22	45,989	47,828	
303.	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
304.	Persentase Ketepatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
305.	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
306.	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
307.	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
308.	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	positif	Persentase	80	80	85,71	100	100	100	100	
309.	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	positif	Persentase	20	20	25	100	100	100	100	
310.	Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
311.	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN										

312.	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	positif	Persentase	100	0	100	100	100	100	100	
313.	presentase promosi produk lokal yang difasilitasi/dilaksanakan	positif	%	0	0	0	50	50	55	55	
314.	presentase promosi produk lokal yang difasilitasi/dilaksanakan	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
315.	Nilai ekspor barang	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
316.	Persentase Pasar Rakyat/Tradisional yang beroperasi secara normal	positif	%	6	6	7	8	10	11	12	
317.	Persentase jumlah jenis barang beredar yang sudah diawasi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan	positif	%	6	6	6	7	5	5	5	
318.	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN										
319.	tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
320.	Presentase Pertumbuhan jumlah industri kecil	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
321.	Persentase Izin usaha industri yang diterbitkan	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
322.	3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI										
323.	Presentase luas kawasan transmigrasi yang berkembang	positif	%	0	0	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	
324.	Presentase program transmigrasi yang dilaksanakan	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	

325.	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	positif	Persentase	6	6	6	6	6	6	6	
326.	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH										
327.	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	positif	Persentase	80	80	80	85	90	95	100	
328.	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	positif	Persentase	60	60	70	80	90	95	100	
329.	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
330.	Pembinaan Masyarakat Berbasis NilaiÂ (PMBN)	positif	%	70	70	80	80	80	80	80	
331.	Persentase Ketepatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
332.	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
333.	Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
334.	4.02 - SEKRETARIAT DPRD										
335.	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	positif	%	97	98	93	94	95	0	95	
336.	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
337.	Persentase Ketepatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	positif	%	97	97	93	95	95	97	98	
338.	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	positif	Persentase	95	96	90	92	92	93	95	

339.	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	positif	Persentase	95	96	98	0	11	93	95	
340.	Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	positif	%	95	94	94	95	95	0	95	
341.	5.01 - PERENCANAAN										
342.	Persentase Ketepatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	positif	%	100	82	82	85	90	95	100	
343.	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	positif	%	100	82	82	85	90	95	100	
344.	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	positif	Persentase	80	80	80	82	84	86	90	
345.	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	positif	Persentase	80	80	80	82	84	86	90	
346.	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	positif	Persentase	80	80	80	82	84	86	90	
347.	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	positif	Persentase	90	90	90	91	92	93	94	
348.	Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	positif	%	100	82	82	85	90	95	100	
349.	5.02 - KEUANGAN										
350.	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	positif	Persentase	55,56	55,56	55,56	62,96	66,67	70,37	74,07	
351.	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	komulatif	Persentase	11,15	11,15	13,68	16,78	20,59	25,26	30	

352.	Persentase Ketepatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
353.	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	positif	Persentase	40	40	40	40	40	40	40	
354.	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	positif	Persentase	27	27	27	27	27	29	29	
355.	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
356.	Persentase laporan keuangan tepat waktu	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
357.	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	positif	Persentase	-	22	25	28	33	38	45	
358.	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	positif	Persentase	90	95	95	95	95	95	95	

359.	Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	positif	%	85	85	90	90	95	100	100	
360.	5.03 - KEPEGAWAIAN										
361.	Persentase Ketepatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	positif	%	64,5	64,6	65	68	72	75	80	
362.	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	positif	%	85	85	85	90	98	98	98	
363.	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	positif	Persentase	54,64	65,32	72	78	80	87	94	
364.	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	positif	Persentase	56,47	58,72	73	82	86	89	95	
365.	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	positif	Persentase	73,45	79,45	82	84	86	88	92	

366.	Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	positif	%	76	79	81	83	89	93	96	
367.	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN										
368.	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan Fungsional	positif	%	45	46	46	48	50	53	57	
369.	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	positif	Persentase	8	8,7	9	9	16	25	32	
370.	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										
371.	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
372.	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	positif	Persentase	22	22	22	34	50	66	80	
373.	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH										
374.	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	positif	Persentase	68,3	70	73	75	80	90	100	
375.	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
376.	Persentase Ketepatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
377.	Level Kapabilitas APIP	positif	Level	3	3	4	4	4	4	4	
378.	Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
379.	7.01 - KECAMATAN										

380.	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	komulatif	Angka	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	
381.	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	positif	Persentase	100	80	80	85	90	95	100	
382.	Presentase Penyelenggaraan pelayanan umum	positif	%	80	80	80	85	90	95	100	
383.	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	positif	Persentase	80	80	84	88	90	95	100	
384.	Penyelenggaraan pelayanan umum	positif	%	50	0	60	65	70	75	80	

385.	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	komulatif	Persentase	80	80	84	88	90	95	100	
386.	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	positif	Persentase	50	0	55	60	65	70	75	
387.	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	komulatif	Persentase	80	80	84	88	90	95	100	
388.	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	positif	Persentase	100	80	80	85	90	95	100	
389.	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	positif	Persentase	70	0	75	80	85	90	95	
390.	Presentase Pelaksanaan ketertiban dan ketertiban umum	positif	Persentase	100	0	100	100	100	100	100	
391.	Presentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa		Persentase	40	0	50	60	70	80	90	

392.	Presentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa	positif	Persentase	40	0	50	60	70	80	90	
393.	Presentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa	positif	Persentase	80	80	80	85	90	95	100	
394.	Presentase Pelayanan penyelenggaraan pelimpahan kewenangan Kecamatan	positif	Persentase	60	0	70	75	80	90	10	

395.	Presentase Pelayanan penyelenggaraan pelimpahan kewenangan Kecamatan	positif	Persentase	60	0	70	75	80	90	100	
396.	Presentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	positif	Persentase	50	0	60	70	80	90	100	
397.	Presentase Penyelenggaraan pelayanan umum	positif	%	50	0	60	67	70	75	80	
398.	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	positif	Persentase	100	80	80	85	90	95	100	
399.	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	positif	Persentase	50	0	55	60	65	70	75	
400.	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										
401.	Persentase Ketepatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	positif	%	50	50	60	100	100	100	100	
402.	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
403.	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	positif	Persentase	65	65	75	78	81	83	85	

404.	Cakupan pembinaan wawasan kebangsaan dan edilogi negara terhadap aparaturnya dan masyarakat per 1.000 penduduk	positif	%	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	100	100	
405.	presentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	positif	%	67	68	69	70	71	72	73	
406.	Presentase penyelesaian konflik di masyarakat	komulatif	%	85	85	86	87	85	87	88	
407.	Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	positif	%	60	60	70	100	100	100	100	
408.	Presentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan	komulatif	%	56	56	58	60	65	70	75	

BAB V

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki peran strategis dalam pembangunan sebuah daerah. RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Dokumen RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan lainnya dan dilaksanakan secara konsisten.

5.1 KAIDAH PELAKSANAAN

Dokumen RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2025-2029 merupakan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu, konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi, serta rasa tanggung jawab tinggi diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2025-2029 dengan berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta masyarakat termasuk dunia usaha.
2. Bupati dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2025-2029 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah.

3. Dalam rangka menjamin tercapainya target indikator kinerja daerah dalam RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2025- 2029 diperlukan langkah-langkah optimalisasi pelaksanaan Kebijakan pembangunan daerah setiap tahunnya. Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan berkewajiban mensosialisasikan Peraturan Daerah Tentang RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2025-2029 kepada masyarakat.
4. Kepala perangkat daerah Kabupaten Halmahera Selatan berkewajiban menyempurnakan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

5.2 PEDOMAN TRANSISI

Pada saat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2025-2029 belum tersusun dan untuk menjaga kesinambungann pembangunan serta mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir, maka RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama dibawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil pemilihan umum Kepala Daerah (Pemilukada) periode berikutnya.

BUPATI HALMAHERA SELATAN



HASAN ALI BASSAM KASUBA

PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2025

Tentang

**RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH**

**KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
TAHUN 2025-2029**

